



2022

LAPORAN KINERJA
BPHN



BPHN HEBAT

Harmoni - Efektif & Efisien - Berprestasi - Akuntabel - Terpercaya



KATA PENGANTAR

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, keberadaan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Output kinerja BPHN terkait erat dengan beberapa isu strategis di bidang penataan regulasi serta pelayanan dan penegakkan hukum. Oleh karena itu pada tataran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, BPHN harus memberi kontribusi pada pencapaian visi “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan melaksanakan misi Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional dan Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja BPHN adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara khusus laporan kinerja tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM selaku pemberi mandat dalam perjanjian kinerja mengenai hasil kinerja yang telah dicapai BPHN tahun 2022. Berdasarkan perjanjian kinerja antara Menteri dengan Kepala BPHN tersebut, laporan kinerja menjabarkan 2 (dua) sasaran strategis yang menjadi target kinerja BPHN, yaitu “(1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat deks kepuasan layanan bantuan hukum. Selain sasaran strategis BPHN juga mengampu 2 Sasaran Program yaitu (1) Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan

evaluasi peraturan perundang-undangan dan (2) Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum.

Kami berharap laporan ini menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolok ukur peningkatan kinerja seluruh jajaran BPHN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kritikan dan masukan yang bersifat membangun masih kami perlukan untuk pelaksanaan kinerja BPHN tahun berikutnya.



Jakarta 28 Februari 2023
Kepala BPHN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
1. Profil Organisasi	4
2. Sumber Daya Manusia	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional	11
2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	11
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	12
4. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	12
5. Sekretariat Badan	13
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Aspek Strategis	14
1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	14
2. melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	15
3. Pembina Jabatan Fungsional Terbuka	16
E. Isu Strategis	17
F. Sistematika Pelaporan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis	21
1. Visi	21

2.	Misi.....	21
3.	Sasaran Strategis	23
4.	Kebijakan/Strategi Pencapaian Kinerja.....	24
B.	Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2021	28
1.	Sasaran Strategis	28
2.	Sasaran Program	29
3.	Sasaran Kegiatan	30
C.	RENCANA KERJA ANGGARAN BPHN TAHUN 2022.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		38
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2022	38
1.	Pengukuran Kinerja	38
2.	Capaian Kinerja	38
3.	Sasaran Program	51
4.	Sasaran Kegiatan	66
B.	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	93
C.	Capaian Kinerja Anggaran	98
D.	Capaian Kinerja Lainnya	99
1.	Capaian Target Kinerja	99
2.	Capaian Kinerja Prioritas Nasional RKP	101
BAB IV PENUTUP.....		108
A.	Simpulan.....	108
B.	Saran	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ikhtisar Capaian Kinerja	2
Tabel 2 Sasaran Strategis BPHN	23
Tabel 3 Kebijakan Lintas Bidang	25
Tabel 4 Kebijakan dan Strategi.....	26
Tabel 5 Sasaran Strategis BPHN	28
Tabel 6 Sasaran Program.....	29
Tabel 7 Sasaran Kegiatan	30
Tabel 8 RKA BPHN dan Kantor Wilayah	32
Tabel 9 RKA BPHN Revisi Akhir.....	33
Tabel 10 Rencana Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022	34
Tabel 11 Rincian Presentase Anggaran BPHN	35
Tabel 12 Perbandingan PAGU TA 2021 dan TA 2022	36
Tabel 13 Rincian Peningkatan Anggaran BPHN Tahun 2023	36
Tabel 14 Total anggaran BPHN tahun 2022.....	37
Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	39
Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022.....	40
Tabel 17 perbandingan capaian kinerja 2021-2022.....	42
Tabel 18 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2022	44
Tabel 19 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2022	47
Tabel 20 Realisasi Target Kinerja Indikator kepuasan layanan bantuan hukum	49
Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2022	50
Tabel 22 Capaian Kinerja Sasaran Program	51
Tabel 23 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2021 dan 2022	53
Tabel 24 perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2018-2022.....	54

Tabel 25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021 dan 2022	56
Tabel 26 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022	56
Tabel 27 Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2021-2022.....	58
Tabel 28 Perbandingan hasil capaian kinerja indikator 2 Tahun 2021-2022	59
Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022	60
Tabel 30 perbandingan capaian kinerja indikator 3 Tahun 2021-2022.....	61
Tabel 31 perbandingan capaian kinerja indikator 3 Tahun 2018 s/d 2022	62
Tabel 32 Realisasi Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	64
Tabel 33 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 4 Tahun 2021-2022.....	65
Tabel 34 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	66
Tabel 35	68
Tabel 36 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2018 s/d 2022	69
Tabel 37 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022	70
Tabel 38 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2018 s/d 2022	72
Tabel 39 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2021 - 2022	74
Tabel 40 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2018 s/d 2022	75
Tabel 41 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022	76
Tabel 42 Naskah Akademik RUU yang domohonkan penyelarasan	77
Tabel 43 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2021 dan 2022	78
Tabel 44 Perbandingan Capaian Indikator 2018-2022	78
Tabel 45 perbandingan capaian kinerja indikator 1 Tahun 2021 dan 2022	81
Tabel 46 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2022.....	82
Tabel 47 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2021-2022.....	83
Tabel 48 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2021 dan 2022	87
Tabel 50 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2018 s/d 2022	87
Tabel 51 Kegiatan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh Hukum	89
Tabel 52 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2022.....	90
Tabel 53 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2021 dan 2022	92
Tabel 54 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Program	95
Tabel 55 Realisasi Anggaran pada Tingkat Sasaran Kegiatan	96
Tabel 56 HASIL VERIFIKASI TARGET KINERJA BPHN TAHUN 2022.....	100

Tabel 57 HASIL VERIFIKASI TARGET KINERJA WILAYAH TAHUN 2022	101
Tabel 58 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	102
Tabel 59 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi.....	102
Tabel 60 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	105
Tabel 61 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Dukungan SDM BPHN.....	7
Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 3 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan.....	8
Gambar 4 Susunan organisasi BPHN	10
Gambar 5 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022	94
Gambar 6 Nilai SMART BPHN (UNIT)	98
Gambar 7 Nilai SMART BPHN (SATKER)	99
Gambar 8 Nilai IKPA BPHN Tahun 2022	99

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020-2024, yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024. Adapun capaiannya dapat diukur melalui indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis dimaksud.

Berdasarkan data Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Aplikasi OM-SPAN) realisasi anggaran belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 87.651.588.906,- (97,86%) dari total pagu anggaran Rp89.011.069.000,- termasuk anggaran Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum dan Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum Di Wilayah. Anggaran tersebut dikelola untuk pencapaian kinerja output dan outcome Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang akan dicapai, yakni Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai pada tahun 2022 yakni, (1) terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan (2) terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum.

Untuk mengukur sasaran strategis dan sasaran program dimaksud, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1 Ikhtisar Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi bersama Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Sesuai dengan Tusi BPHN)	3,1	3,43	108,88%
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,55	120,81%
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0	91,06%	130,09%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81,0	84,91%	104,83%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0	82,18%	102,74%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	10	50%
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20	29,55	147,75%
2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,55	120,81%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81,0	84,91%	104,83%

Dalam mencapai realisasi Target kinerja dan anggaran yang berkualitas Badan Pembinaan Hukum Nasional memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat unit Eselon I adalah 96,97 dan selaku satuan kerja (SATKER) adalah 96,69. Penyerapan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional yang optimal digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan hukum dalam rangka pencapaian target kinerja berdasarkan IKU.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. *Profil Organisasi*

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10 Cililitan Jakarta Timur. Pertama kali didirikan tanggal 30 Maret 1958 BPHN sebelumnya bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 107 tahun 1958 dan ditempatkan langsung dibawah Perdana Menteri. sebagai badan khusus untuk melakukan pekerjaan pembinaan hukum nasional, peninjauan kembali perundang-undangan masa penjajahan secara sistematis yang dilandasi oleh cita-cita untuk mewujudkan Sistem Hukum Nasional.

Tugas LPHN pada waktu itu adalah membantu Pemerintah untuk mencapai suatu tata hukum nasional dengan melakukan berbagai upaya yang antara lain meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan keadaan dan kepentingan negara dan rakyat berdasarkan UUD 1945, pengusulan peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda yang harus diubah atau dicabut, penterjemahan dan pembakuan peristilahan hukum.

Susunan LPHN terdiri dari Ketua Umum, Pimpinan harian, sekretariat serta penasihat yang terdiri dari Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Sedangkan Anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil dari kalangan teoritis, polisi dan praktisi hukum.

Dalam periode 1958-1961 Lembaga Pembinaan Hukum Nasional belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dikarenakan situasi politik dan sosial pada waktu itu yang tidak memungkinkan institusi tersebut bekerja dengan baik. Oleh karenanya pada tanggal 6 Mei 1961 Lembaga ini dibentuk kembali dengan Keputusan Presiden RI No. 194 tahun 1961 dan tidak lagi berada dibawah Perdana Menteri melainkan berada dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman.

Sedangkan tugasnya tetap melaksanakan pembinaan hukum nasional sebagaimana dikehendaki oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara No. II/MPRS/1960 yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang asas-asas serta landasan Pembinaan Hukum Nasional.

Berbeda dengan LPHN 1958 maka LPHN 1961 yang diketuai oleh Drs. Soesanto Tirtoprodjo, SH dengan Sekretaris M Rasad St. Sulaeman memiliki suatu Badan Perencana yang menetapkan garis-garis dan dasar-dasar serta tata kerja pelaksanaan tugas lembaga. Badan perencana tersebut berjumlah 14 orang terdiri dari 7 orang Guru Besar dari berbagai Fakultas Hukum Negeri dan 7 anggota lainnya dari beberapa pejabat departemen, anggota ABRI dan kalangan praktisi hukum (hakim dan pengacara). Sedangkan penasehat lembaga adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, ketua Mahkamah Agung, Menteri/Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua-ketua Fakultas Hukum Negeri.

Pada tahun 1964 LPHN yang dibentuk tahun 1961 diakhiri masa tugasnya dengan pertimbangan jangka waktu pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara kepada LPHN dalam Ketetapan No. II/MPRS/1960 telah lampau. Namun pembinaan hukum nasional perlu dilanjutkan dan lebih digiatkan kembali dan digaya barukan mengenai tugas, susunan dan tata kerjanya. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 282 tahun 1964 tentang Menggaya Barukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Pembaharuan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dengan bentuk Menggaya Barukan ini dengan cara mengubah persyaratan anggotanya : Berporoskan Nasakom serta dengan menyederhanakan keanggotaan penasehat Lembaga menjadi seorang yaitu Ketua Mahkamah Agung saja. LPHN ini dikepalai oleh : JCT Simorangkir SH dengan Sekretaris Ibnu Susanto, SH dengan Badan Perencana dan Panitia-panitia Kerja.

Pada tahun 1965 terjadi tragedi Nasional peristiwa G 30 S/ PKI . Setelah peristiwa 1965 itu LPHN tetap terus berjalan dengan mendasarkan pada Keputusan Presiden RI No. 282 tahun 1964 dengan meniadakan unsur komunis dalam keanggotaannya. Lembaga ini terus bekerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/ KEP /11/1966 tanggal 3 Nopember 1966 Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi : “Badan yang berdiri sendiri dalam lingkungan Departemen yang menurut undang-undang yang masih berlaku tetap berjalan sampai ada ketentuan lain”

Sebagai catatan, bahwa pada tahun 1967 Pimpinan MPRS telah menyampaikan surat kepada Ketua Presidium Kabinet dan Ketua DPR-GR antara lain mengenai kedudukan lembaga ini agar ditempatkan dibawah Presiden yang dalam penyelenggaraan sehari-hari dilaksanakan oleh Presidium Kabinet atau alat kelengkapan yang sederajat dengan itu dengan pemberian hak otonomi seluas-luasnya kepada Kepalaanya untuk memungkinkan bekerja sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.

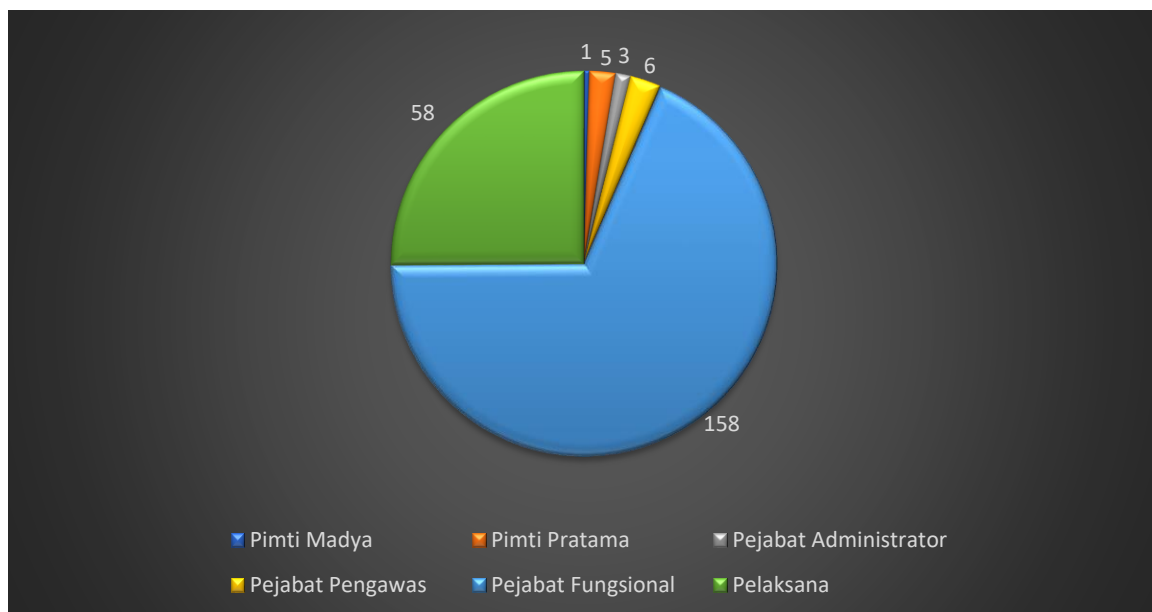
Kemudian LPHN Gaya Baru diubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadi Unit Eselon I dibawah Kementerian Kehakiman melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1974. Dalam perjalanannya BPHN sudah banyak mengalami perubahan struktur dan tata kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021, BPHN merupakan Unit Eselon I yang memiliki tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan 4 Kepala Pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Kepala Badan	:	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Sekretaris Badan	:	Audy Murfy MZ, S.,H., M.H.
Kepala Perencanaan Hukum Nasional	:	Constantinus Kristomo, S.S., M.H
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	:	Yunan Hilmy, S.H., M.H
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	:	Nofli, Bc.I.P., S.Sos., S.H., M.Si
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	:	Kartiko Nurintias, S.H., M.H.

Terkait regulasi, BPHN melaksanakan kewenangan Menteri sebagai Koordinator Prolegnas dan Penyelarasan Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah dengan stake holder Kementerian/LPNK, selain melaksanakan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang serta Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka penataan regulasi. Berkenaan dengan program bantuan hukum, BPHN adalah Penyelenggara termasuk pelaksana verifikasi dan akreditasi pemberi bantuan hukum, selain sebagai Pusat JDIHN dengan 1212 anggota JDIHN dari Kementerian/LPNK, Sekretariat DPR/DPRD, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

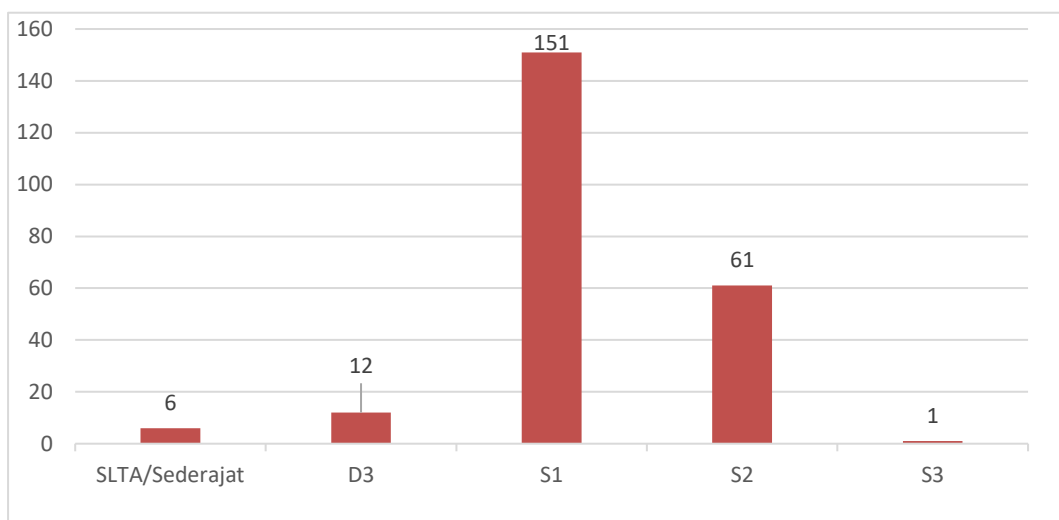
2. Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional didukung oleh sumber daya manusia (SDM) dari multidisiplin keilmuan dan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SMA, S1, S2, dan S3 yang berjumlah 231 orang (data per desember 2022) dengan komposisi 110 pegawai laki-laki dan 121 pegawai perempuan. Pegawai yang pensiun pada tahun 2022 berjumlah 5 orang, mutasi karena pindah tugas/dipromosi (JFU/Administrator/JFT) 1 orang. SDM tersebut meliputi Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum dengan formasi sebagai berikut:



Gambar 1 Diagram Dukungan SDM BPHN

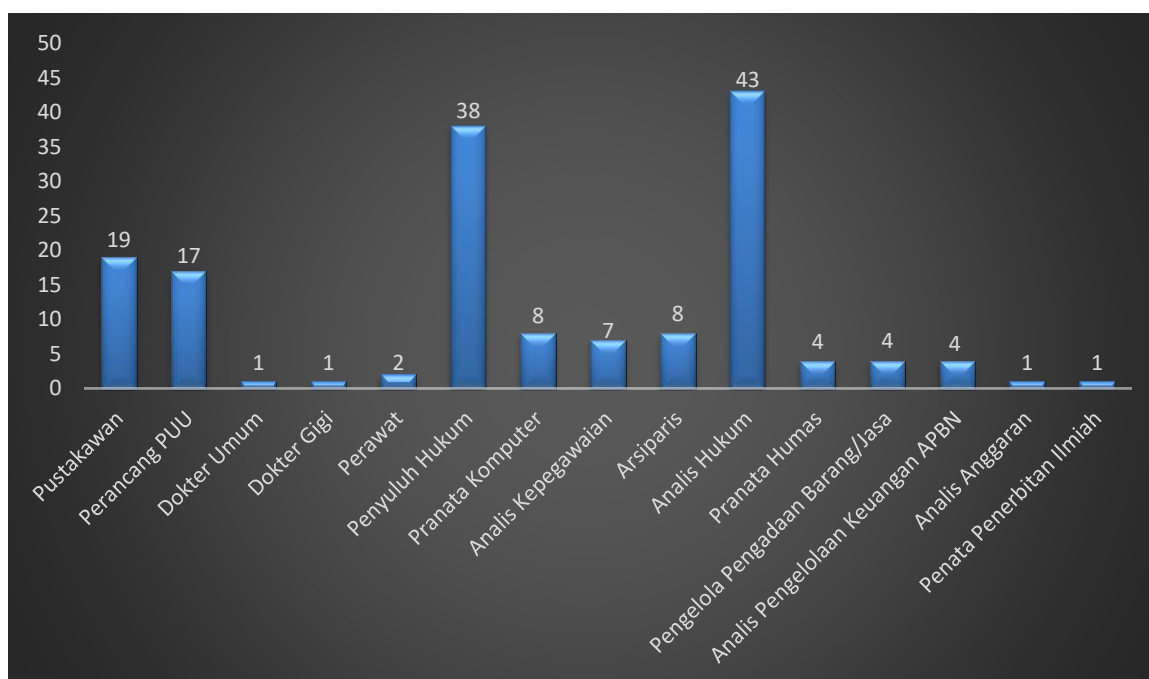
Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia di Badan Pembinaan Hukum Nasional sangatlah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan strata satu (S1) berjumlah 151 orang atau sebesar 65,36% artinya lebih dari 50% pegawai BPHN ada pada tingkat pendidikan S1. Kemudian pada posisi kedua ada 61 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata dua (S2) atau sebesar 26,40% dari total pegawai.

Potensi sumber daya manusia berdasarkan jabatan yang diampu dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 3 Diagram SDM berdasarkan klasifikasi Jabatan

Berdasarkan data yang disajikan di atas, jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional meningkat sebagai akibat kebijakan penyetaraan (deselonisasi struktural) sehingga hampir seluruh pejabat Administrator dan Pengawas dialihkan menjadi Pejabat Fungsional. Selain itu pelaksanaan inpassing dari jabatan struktural ke jabatan fungsional serta uji kompetensi terutama untuk jabatan fungsional analis hukum, mempengaruhi bertambahnya jumlah pejabat fungsional. Jumlah JFT di BPHN saat ini adalah 158 orang atau 68,39%. Artinya lebih dari 50% Pegawai di BPHN adalah Pejabat Fungsional. Sedangkan pegawai dalam jabatan Pelaksana berjumlah 73 orang atau 31,60%. Jabatan fungsional di BPHN bervariasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPHN. JF penyuluh hukum misalnya sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat. JF perancang peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan hukum, mulai dari penyusunan naskah akademik, penyelarasan naskah akademik dan perencanaan legislasi dan juga dilibatkan dalam proses perancangan rancangan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHN. BPHN selain sebagai pembina juga sebagai pengguna JF analis hukum yang melaksanakan fungsi penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung program deregulasi maupun reregulasi guna meningkatkan indeks reformasi hukum kedepan. Selain itu ada juga JF Pustakawan yang mendukung pelayanan informasi hukum baik online maupun offline. Sedangkan JFT Pranta Komputer mendukung terlaksananya inovasi menuju era pelayanan digital. Kegiatan yang dilaksanakan di BPHN dilakukan secara kolaboratif baik antar unit eselon II di lingkungan BPHN maupun antara BPHN dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, saat ini kelembagaan Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (unit) teknis yang kedepannya kerangka kelembagaannya harus dapat memperkuat dan mendukung peningkatan kualitas organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM. Adapun susunan organisasi BPHN seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 4 Susunan organisasi BPHN

1. Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Memiliki tugas melaksanakan perencanaan hukum nasional dan menyelenggarakan fungsi :

penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang perencanaan hukum nasional;

pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah, serta program penyusunan peraturan presiden;

pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan program legislasi nasional dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program legislasi nasional di lingkungan pemerintah, program penyusunan peraturan pemerintah, serta program penyusunan peraturan presiden;

pelaksanaan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi penyusunan naskah akademik;

pelaksanaan penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang;

pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan peraturan daerah;

pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Perencanaan Hukum Nasional; dan

pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Perencanaan Hukum Nasional.

2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengembangan, monitoring, pengelolaan sistem dan basis data jaringan dokumentasi informasi hukum nasional, serta pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi hukum dan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional

b. penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan monitoring jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- d. pelaksanaan pengelolaan sistem dan basis data jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- e. pelaksanaan pengelolaan layanan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyuluhan dan bantuan hukum, dan pembinaan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
- pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
- penyusunan dokumen pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, pembudayaan hukum, dan bantuan hukum; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

4. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Dalam melaksanakan tugas analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran analisis dan evaluasi hukum, dan pembinaan jabatan fungsional Analis Hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum;

- c. pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan audit hukum terhadap tingkat kepatuhan dan penerapan hukum serta unsur pendukungnya;
- e. pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum;
- f. penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pendampingan analisis dan evaluasi hukum dengan instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- h. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan hukum dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan;
- i. pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi jabatan fungsional Analis Hukum; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.

5. Sekretariat Badan

Dalam melaksanakan tugas memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembentukan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- d. pembinaan dan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan barang milik negara;
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, kerja sama, dan keprotokolan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan teknologi informasi.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM yang diemban oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sedangkan tujuan penyusunannya adalah untuk menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pembinaan Hukum kedepannya lebih dari kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

D. Aspek Strategis

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal amanat konstitusi (hukum tertinggi) ini memberikan penegasan kepada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta seluruh rakyat Indonesia bahwa seluruh keputusan dan tindakan yang dilakukan wajib berdasarkan atau diatur oleh hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, tentu memerlukan organ yang secara tugas dan fungsi semakin nyata menguatkan dan memantapkan dengan berbagai program dan kegiatan di bidang hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan" maka dalam konteks organ ini tentu urusan pemerintahan di bidang hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan berbagai unit kerjanya, salah satu unit kerja utamanya adalah BPHN.

Selain itu, mempertimbangkan untuk penguatan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hukum tentu juga wajib menaati UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Salah satu tugas negara yang harus diwujudkan pelaksanaannya adalah "mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum" maka "Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai unit teknis eselon I mengemban 2 (dua) dari 7 misi Kementerian Hukum dan HAM untuk mendukung visi presiden yakni:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas tentu harus dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional. Dalam prosesnya pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya direncanakan melainkan juga harus dievaluasi atau ditinjau kembali setelah diberlakukan, untuk mengukur efektivitas dan kemanfaatannya bagi masyarakat. BPHN yang mengemban fungsi perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki fungsi strategis untuk mendukung Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan misi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Terkait dengan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang secara teknis BPHN adalah Pelaksana Koordinator Prolegnas dan Penyelarasan Naskah Akademik dilingkungan Pemerintah dengan stake holder Kementerian/LPNK, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang BPHN juga sebagai pelaksana Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dan analisis dan evaluasi hukum dengan stake holder seluruh Kementerian/LPNK.

2. *Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat*

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (beleid regel), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum

melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Dalam pelaksanaan kesadaran hukum masyarakat tersebut, sesungguhnya BPHN juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi sifat pelayanannya nonprofit. karena pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan BPHN lebih mengarah pada layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat dan akses terhadap informasi hukum.

Untuk itu BPHN terus berupaya menjaga kualitas layanannya dalam rangka memberi kontribusi positif, secara berkelanjutan sehingga negara dapat hadir ditengah masyarakat salah satunya melalui program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Selain itu BPHN juga melaksanakan layanan terhadap akses informasi hukum melalui Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan penyediaan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi maupun layanan perpustakaan hukum. Apabila dicermati secara mendalam, kedua program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHN utamanya akan bermuara pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

3. *Pembina Jabatan Fungsional Terbuka*

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menghendaki terwujudnya gagasan penyederhanaan birokrasi sekaligus peningkatan profesionalisme aparatur dengan memperkuat fungsionalitas dan kapasitas yang mampu mendorong kinerja Pemerintahan. Keinginan Presiden ini tentu direspon positif oleh berbagai Kementerian/Lembaga dengan melakukan berbagai langkah kebijakan di bidang SDM Aparatur yang salah satunya dilakukan dengan

membentuk berbagai jabatan fungsional yang mampu menopang kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi institusi Pemerintahan.

Menghadapi perkembangan tersebut, BPHN kemudian membentuk Jabatan Fungsional Analis Hukum yang merupakan jabatan fungsional terbuka (tidak terbatas pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM) yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum. Jabatan fungsional ini kemudian menambah daftar jabatan fungsional terbuka lainnya yang sudah terlebih dahulu dibentuk oleh BPHN yakni Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Dengan demikian BPHN merupakan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan fungsi strategis sebagai pembina 2 (dua) jabatan fungsional terbuka.

E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan belum optimal dimanfaatkan oleh K/L sebagai bahan penyusunan perencanaan hukum;
2. Dokumen Pembangunan Hukum Nasional yang dihasilkan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh BAPPENAS sebagai bahan penyusunan RPJMN bidang hukum;
3. Pengelolaan dokumen dan informasi hukum belum 100% tertata dengan baik;
4. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum belum dapat dilaksanakan secara optimal terutama dalam masa pandemi covid-19;
5. Pelaksanaan integrasi aplikasi indeks kinerja OBH survei untuk mengukur indeks kepuasan layanan bantuan hukum dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM belum selesai dilaksanakan sehingga masih ada dualisme penggunaan instrumen survey di wilayah oleh Panitia Pengawas Daerah;
6. Metode penetapan target bantuan hukum belum menemukan rumusan yang efektif sehingga terjadi gap yang sangat besar antara jumlah target

- dan realisasi kinerja;
7. Akses dokumen dan informasi hukum melalui jdihn.go.id masih dinilai belum ramah pengguna sehingga kecenderungan pengguna internet yang mencari dokumen hukum cenderung menggunakan mesin pencari seperti google;
 8. Desa/Kelurahan sebagai subjek utama dalam Program pembentukan desa/ sadar hukum, juga menjadi subjek kegiatan/program dari beberapa kementerian/lembaga lain. Misalnya program “Desa BERSINAR” yang merupakan program dari Badan Narkotika Nasional atau Desa Konstitusi sebagai program dari Mahkamah Konstitusi yang jika dikaji lebih jauh, seharusnya dapat diintegrasikan sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, namun saat ini masih dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi tersebut;
 9. BPHN saat ini menjadi instansi Pembina Teknis terhadap 2 (dua) jabatan fungsional yang bersifat terbuka, tentu hal ini tidaklah mudah di dalam pengelolaan, fasilitasi dan pembinaannya, sehingga memang diperlukan adanya penguatan organisasi yang mampu menopang pelaksanaan tugas tersebut, dan hal ini relevan dengan kebutuhan yang dihadapi;
 10. Pada perencanaan regulasi, permasalahan yang sering muncul di antaranya seringkali munculnya usulan regulasi yang tidak didukung dengan hasil kajian terlebih dahulu, sehingga daftar program perencanaan masih terselip usulan yang bukan didasarkan kebutuhan yang sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang (hanya berupa wish list). Akibatnya, penyelesaian regulasi yang direncanakan tertunda dan berlarut-larut, tidak selesai hingga tenggat waktu yang telah digariskan. Problem ini mengakibatkan performa kinerja perencanaan menjadi rendah karena beberapa target perencanaan rentan tidak tercapai.

F. Sistematika Pelaporan

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi.

Ikhtisar Eksekutif

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Pendahuluan

berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika.

Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.

Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

a. Capaian Kinerja Organisasi BPHN

Subbab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi

b. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

c. Capaian Kinerja Anggaran

Subbab ini menjelaskan Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan oleh Organisasi

d. Capaian Kinerja Lainnya

Penutup

Pada BAB ini disampaikan simpulan atas pencapaian kinerja BPHN pada tahun 2022 dan rekomendasi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur, sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman akan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, maka penjabaran visi, misi, dan tujuan, serta sasaran strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut:

1. *Visi*

Sesuai Visi Kementerian Hukum dan HAM, BPHN sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, juga melaksanakan Visi yang sama untuk mendukung tugas Kementerian Hukum dan HAM yang ditujukan untuk menunjang Visi Presiden dan Wakil Presiden, yakni **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

2. *Misi*

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM mengemban 2 (dua) dari 7 (tujuh) misi yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni :

Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam misi ini, BPHN juga akan melaksanakan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga peraturan perundang-undangan yang telah terbentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama.
2. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
3. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
4. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi.
5. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek

yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan BPHN diarahkan untuk:

1. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (collective undertakings).
2. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (self expression).
3. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (mutual obligation) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

3. Sasaran Strategis

Penentuan sasaran strategis BPHN berpedoman pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM disesuaikan dengan tugas dan fungsi utama BPHN, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Strategis BPHN

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Perspektif Pemangku Kepentingan Eksternal	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan (Sasaran Strategis 1)	Indeks kualitas perundang-undangan
Perspektif Bisnis Proses Internal	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sasaran Strategis 6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai

LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
		<p>dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</p>

Sumber: Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024

4. Kebijakan/Strategi Pencapaian Kinerja

Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional jangka menengah, yaitu:

- 1) Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - a) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - b) Melakukan penyusunan dan penyelerasan naskah akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
 - c) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - d) Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- 2) Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:

- a) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
- b) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
- c) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
- d) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
- e) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
- f) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum;
- g) Mempermudah pemberian akses informasi dokumen hukum kepada masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, BPHN terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum BPHN bersama-sama dengan beberapa unit eselon I lainnya di Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional I, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3 Kebijakan Lintas Bidang

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Regulasi Sektor UMKMd dan Cipta Lapangan Kerja - Pemetaan Regulasi Dalam 	Ditjen PP dan BPHN

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		Penyusunan Omnibuslaw	

Sumber : Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2022

Kebijakan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimasa Pandemi COVID-19

Secara teknis terdapat beberapa kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan tugas selama pandemic Covid-19 antara lain:

Tabel 4 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan	Strategi
Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan partisipasi aktif Anggota JDIHN 2. Percepatan integrasi sistem dan basis data Anggota JDIHN dengan Portal JDIHN 3. Pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIHN 4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem otomasi JDIHN (aplikasi integrasi, aplikasi standar, e-reporting, dan APK) 5. Peningkatan kapasitas operator JDIH pada Anggota JDIHN terkait pemanfaatan sistem dan aplikasi-aplikasi JDIHN 6. Peningkatan Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPHN 7. Promosi Kemanfaatan JDIHN di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi hukum 2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference

Kebijakan	Strategi
	3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference
Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi analisis dan evaluasi hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan Forum Tanggapan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap berbagai rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah disampaikan sebelumnya. 2. Melakukan kegiatan Forum Pemantauan dengan mengundang Kementerian/Lembaga melalui video conference terhadap tindak lanjut dari Forum Tanggapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Efisiensi kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan fungsi Aplikasi E-Vadata sebagai sarana teknologi di dalam melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah 2. Mengoptimalkan rapat Pokja dan Narasumber melalui Video Conference 3. Melakukan FGD dengan stakeholder terkait melalui video conference
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Optimalisasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah melalui sarana teleconference atau video conference dengan Kantor Wilayah/Lembaga Pemasyarakatan/Rutan/Organisasi Bantuan Hukum/Penerima Bantuan Hukum
Kegiatan Konsultasi Hukum dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran COVID 19	Menekankan pada layanan konsultasi hukum tidak langsung (online) melalui aplikasi lcs.bphn.go.id. Apabila terpaksa, maka dapat dilakukan secara langsung dengan mengedepankan protokol kesehatan yang tersedia di law center BPHN
Tata Kelola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Menyiapkan penggunaan aplikasi yang secara khusus dimanfaatkan untuk penilaian angka kredit
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum	1. Penguatan kapasitas JF Penyuluh Hukum agar kompetitif dan professional

Kebijakan	Strategi
	2. Penyediaan instrumen pengembangan kompetensi sesuai dengan perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi 3. Penguatan kemampuan mengolah data dan publikasi kegiatan penyuluhan hukum
Perencanaan Legislasi	Memanfaatkan aplikasi/teknologi informasi dalam proses perencanaan dan monev perencanaan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden serta proses penyelarasan

Sumber : Rencana Strategis BPHN

B. Perjanjian Kinerja BPHN Tahun 2021

Berdasarkan perjanjian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

sasaran strategis yakni, (1) Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan (2) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 5 Sasaran Strategis BPHN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81,0
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

2. Sasaran Program

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengampu 2 program yakni (1) Program pembentukan regulasi dan (2) program penegakan dan pelayanan hukum yang terdiri dari 2 sasaran program dengan 6 indikator sasaran, yakni :

Tabel 6 Sasaran Program

No	Program	Indikator Sasaran	Target
1	Program Pembentukan Regulasi	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang	20
2	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis melalui program yang telah ditetapkan, BPHN menetapkan 7 Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7 Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20
		2. Dokumen pembangunan hukum nasional	1
		3. Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7
3	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66
4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61
		3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20
5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah	70
		2. Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
6	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	80
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah	70
		5. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1
		2. Jumlah Layanan Internal	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1

C. RENCANA KERJA ANGGARAN BPHN TAHUN 2022

Penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dilakukan untuk mencapai efisiensi anggaran bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan. Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA merupakan bagian dari penyusunan APBN. Secara garis besar, proses pentahapan penyusunan anggaran terbagi atas Pagu Kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-013.10.1.409288/2022 Jumlah PAGU BPHN Tahun 2022 sebesar Rp49.711.976.000 dan Kantor Wilayah sebesar Rp72.094.195.000 dengan RKA sebagai berikut:

Tabel 8 RKA BPHN dan Kantor Wilayah

Program	Kegiatan	Anggaran
BPHN		
Program Pembentukan Regulasi	1. Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp2.918.390.000
	2. Perencanaan Hukum Nasional	Rp1.627.799.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3. Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp1.752.291.000
	4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp2.820.352.000
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp40.593.144.000
Jumlah Anggaran Satker BPHN		Rp49.711.976.000
Kantor Wilayah		

Program	Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp4.739.108.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat	Rp67.355.087.000
Jumlah Anggaran Kantor Wilayah		Rp 76.666.838.000
Jumlah Anggaran BPHN (Unit Eselon I)		Rp121.806.171.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PAGU Anggaran BPHN untuk Tahun 2022 sebesar Rp49.711.976.000. Namun rencana kerja anggaran tersebut mengalami perubahan dengan adanya kebijakan Automatic Adjustement anggaran dari Kementerian Keuangan sebanyak 2 (dua) kali dengan total Rp10.515.805.000 atau sebesar 21,15% sehingga nilai PAGU anggaran BPHN per Desember 2022 menjadi Rp39.196.171.000. Angka ini masih dikurangi lagi dengan pengalihan anggaran ke Sekretariat Jenderal dari anggaran Belanja pegawai sebesar Rp250.000.000 sehingga jumlah PAGU BPHN menjadi Rp38.946.171.000. Sementara untuk rencana kerja anggaran Kantor Wilayah mengalami sekali kebijakan Automatic Adjustement sebesar Rp 22.029.297.000 sehingga jumlah PAGU Kantor Wilayah menjadi Rp50.064.898.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 RKA BPHN Revisi Akhir

Program	Kegiatan	Anggaran
BPHN Satker		
Program Pembentukan Regulasi	1. Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp2.100.408.000
	2. Perencanaan Hukum Nasional	Rp959.243.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3. Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp1.291.271.000
	4. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp1.941.370.000
Program Dukungan Manajemen	5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp32.653.879.000
Jumlah		Rp38.946.171.000
Wilayah		
Program Pembentukan Regulasi	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp4.102.260.000

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp45.962.638.000
Jumlah		Rp50.064.898.000

DIPA ini kemudian diturunkan ke level eselon II yang terdiri atas 4 unit teknis (pusat) dan 1 sekretariat serta 33 Kantor Wilayah. Untuk BPHN sendiri sebagai satuan kerja DIPA tersebut kemudian diturunkan menjadi rencana kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Rencana Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022

Kegiatan	RO	Target	Unit Penanggung Jawab
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	Sekretariat
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	
	Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	
	Layanan SDM	239 Orang	
	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
	Layanan BMN	1 Layanan	
	Layanan Umum	1 Layanan	
	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	
	Layanan Perkantoran		
	Layanan Sarana Internal	116 Unit	
Layanan Prasarana Internal	1 Unit		
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	200 Rekomendasi Kebijakan	Pusat Analisis dan Evaluasi

Kegiatan	RO	Target	Unit Penanggung Jawab
	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	1 Rekomendasi Kebijakan	Hukum Nasional
	NSPK Analisis dan Evaluasi Hukum	1 NSPK	
	NSPK Jabatan Fungsional Analisis Hukum	1 NSPK	
Perencanaan Hukum Nasional	Rekomendasi Program Legislasi Nasional	3 Dokumen	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	3 Dokumen	
	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	7 Dokumen	
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan	Layanan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	432 Orang	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	315 Kelompok Masyarakat	
	Layanan Penyuluhan Hukum	80 Kelompok Masyarakat	
	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	557 Lembaga	
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Fasilitasi Integrasi JDIHN	163 Lembaga	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
	Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum		

Dengan demikian dapat digambarkan alokasi anggaran per unit kerja Eselon II adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian Presentase Anggaran BPHN

No	Unit Kerja Eselon II	Anggaran (RP)	%
1	Pusat Perencanaan Hukum Nasional	Rp 959.243.000	2,46
2	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	Rp 1.941.370.000	4,98

3	Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp 1.291.271.000	3,32
4	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp 2.100.408.000	5,39
5	Sekretariat Badan	Rp 32.653.879.000	83,84
	Jumlah	Rp 38.946.171.000	100

Alokasi terbesar adalah untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretariat BPHN yaitu sebesar Rp 32.653.879.000 atau 83,84% dari total anggaran, dengan alokasi anggaran terbesar adalah belanja pegawai. Dibandingkan tahun 2021 anggaran BPHN pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp394.579.000. Perbandingan anggaran Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12 Perbandingan PAGU TA 2021 dan TA 2022

PROGRAM	ANGGARAN (2021)	ANGGARAN (2022)	NAIK/TURUN
Pembentukan Regulasi	Rp3.313.569.000	Rp 3.059.651.000	↓ Rp253.918.000
Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.953.220.000	Rp3.232.641.000	↓ Rp720.579.000
Dukungan Manajemen	Rp32.073.961.000	Rp32.653.879.000	↑ Rp579.918.000

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa untuk tahun anggaran 2022 BPHN mengampu 3 (tiga) Program dengan total Anggaran Rp38.946.171.000. Anggaran ini mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Untuk tahun 2023, BPHN juga mengampu 3 (tiga) program dengan total anggaran Rp 47.741.425.000 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp8.795.254.000 dengan rincian :

Tabel 13 Rincian Peningkatan Anggaran BPHN Tahun 2023

PROGRAM	ANGGARAN 2022	PENAMBAHAN ANGGARAN DARI TAHUN 2022
Program Pembentukan Regulasi	Rp3.971.189.000.-	
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp4.472.543.000.-	↑Rp8.795.254.000

Program Dukungan Manajemen	Rp38.933.593.000.-	
----------------------------	--------------------	--

Untuk tahun 2023 Anggaran BPHN sebagai satuan kerja adalah Rp47.741.425.000 dan anggaran Program Pembentukan Regulasi dan Program Pelayanan dan Penegakan Hukum di wilayah adalah Rp72.700.195.000, sehingga total anggaran Unit BPHN tahun 2022 adalah Rp120.441.620.000 dengan rincian:

Tabel 14 Total anggaran BPHN tahun 2022

BPHN	Rp47.741.425.000
33 Kantor Wilayah	Rp72.700.195.000
TOTAL	Rp120.441.620.000

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 2022

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai rencana kerja tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya berdasarkan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dalam mencapai 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja, 2 sasaran program dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, mengawali langkah dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik (*program follow result*), *performance-based budgeting* atau anggaran berbasis kinerja.

2. Capaian Kinerja

Berikut hasil capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020-2024:

Sasaran Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa BPHN mengampu 2 (dua) Sasaran Strategis yakni Sasaran Strategis pertama Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan Sasaran Strategis kedua Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Terhadap target kinerja pada kedua sasaran strategis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA	PERSENTASE
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Sasaran Strategis 1)	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15	3,43	109%
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sasaran strategis 6)	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	92,55	120,81%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	91,06%	130,09%
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	84,91%	104,83%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI KINERJA	PERSENTASE
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	82,18%	102,74%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,67	100,08%
Capaian Rata-rata				111%

Analisis Terhadap Capaian Kinerja sasaran Strategis 1

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,15 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,43 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 109%.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target indeks 3,1 Kualitas Peraturan Perundang-undangan realisasinya adalah 3,38 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 109%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,1	3,38	109%
2022	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan	3,15	3,43	108,88%

Pada Tahun 2021 target Indeks Perundang-undangan adalah 3,1 Indeks, dengan realisasi sebesar 3,38 indeks setelah dilakukan pengukuran Tahun 2021 yang berarti target tercapai sebesar 109,03%. Selanjutnya pada Tahun 2022

dilakukan Pengukuran indeks dengan target 3,15 dan diperoleh nilai Indeks Perundang-undangan sebesar 3,43 indeks dengan capaian kinerja 108,88%.

Jika dilihat sebatas capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2022 seperti mengalami penurunan. Namun jika dianalisis dari sisi realisasi target tidak terdapat penurunan atau kenaikan, melainkan berada pada nilai realisasi yang sama yakni 0,28. Persentase capaian kinerja terlihat menurun disebabkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 adalah 3,2 indeks sedangkan target 2024 adalah 3,25 indeks sementara capaian tahun 2021 sebesar 3,38 indeks dan capaian tahun 2022 sebesar 3,43 indeks.

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian terhadap target tersebut didukung oleh beberapa hal yakni :

1. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan pada setiap tahapan dengan memperhatikan kualitas dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. pada tahapan perencanaan kualitas penyaringan terhadap setiap usulan pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui mekanisme seleksi sejak penyusunan program legislasi jangka menengah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perencanaan legislasi dengan berbasis Teknologi Informasi sehingga dapat secara real time pada masa periode pelaporan dapat mengetahui perkembangan pembentukan PUU yang diusulkan oleh K/L
3. dalam proses pengusulan RUU ke Prioritas Tahunan usulan Pemerintah, telah dilakukan proses peyelarasan Naskah Akademik sebelum dilakukan proses harmonisasi dan pembulatan konsepsi RUU yang bertujuan untuk menjaga kualitas PUU yang diusulkan oleh Pemerintah

Analisis Terhadap Capaian Kinerja sasaran Strategis 2

Pencapaian target Sasaran 2 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Sasaran strategis 6) adalah 107,11%, dari 4 (empat) indikator capaiannya melebihi target yang ditetapkan. Berikut hasil analisis pada 4 (empat) indikator tersebut.

4. Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.

Target	Capaian	%Capaian
76,61 indeks	92,55 indeks	120,81%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum yang ditetapkan sebesar 76,61 indeks, realisasinya adalah 92,55 indeks dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 120,81%. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna layanan yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum yang ditetapkan sebesar 76,61 indeks, realisasinya adalah 92,55 indeks dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 120,81%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 92,85 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17 perbandingan capaian kinerja 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,85	120,81%
2022	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,55	121,20%

Meskipun capaian kinerja terhadap target indikator yang dihasilkan lebih dari 100% namun jika dilihat dengan seksama, capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,3%. hal ini disebabkan jumlah partisipan sebagai responden lebih sedikit jumlahnya dibandingkan responden yang berpartisipasi

dalam survei tahun 2021. selain itu banyaknya jenis survei yang harus diisi oleh responden sehingga tingkat partisipasi menjadi menurun.

Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan sebagai target kinerja karena Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan indikator dan target yang sama.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara capaian tahun 2021 sebesar 92,85 indeks dan capaian tahun 2022 sebesar 92,55 indeks. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada rencana strategis maka target indikator ini dinaikan menjadi 77 indeks.

keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena pada Tahun 2022 Indikator ini dijadikan sebagai salah satu target Kementerian Hukum dan HAM dengan strategi mendorong anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) untuk melakukan penataan database dokumen hukum pada website jdihn.go.id sehingga dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat pada lama jdihn.go.id menjadi lebih lengkap, akurat, dan tertata yang pada akhirnya akan membuka akses yang semakin luas bagi masyarakat. kemudahan dan keluasaan akses ini yang kemudian menjadikan Indeks Kepuasan masyarakat dengan target 76,61 dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Percepatan pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id merupakan salah satu langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM yang dikemas sebagai salah satu target kinerja Tahun 2022 melalui kegiatan Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional dari seluruh (1.175) anggota JDIHN pada Portal jdihn.go.id.

5. Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Bantuan Hukum adalah salah satu kegiatan yang hampir setiap tahun anggaran masuk ke dalam program prioritas nasional utama kementerian

hukum dan HAM sehingga selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada Tahun 2022 kegiatan bantuan hukum juga masuk menjadi program prioritas nasional yang pengawasannya dilakukan secara langsung oleh BAPPENAS dan Kantor Staf Presiden.

Capaian terhadap target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 81% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum litigas}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 11.057 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 9.389 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 84,91% dengan capaian kinerja 104,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
81%	84,91%	104,83%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 77% permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 81,28% dengan capaian kinerja 106% maka pada tahun 2022 dengan target yang dinaikan menjadi 81% realisasinya adalah 84,91% dengan capaian kinerja sebesar 104,83%.

Perbandingan hasil capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai	77	81,28	106%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	dengan peraturan perundang- undangan			
2022	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	81	84,91	104,83%

Jika dilihat sepiintas capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2022 seperti mengalami penurunan. Namun jika dianalisis dari sisi realisasi target, maka dapat disimpulkan bahwa target sudah terlampaui. Persentase capaian kinerja terlihat menurun disebabkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2021.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target untuk tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 adalah 81% begitu juga dengan 2024 targetnya adalah 81%, sementara capaian tahun 2021 sebesar 81,28% dan capaian tahun 2022 sebesar 84,91%.

Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan targetnya kinerja karena Rencana Strategisnya baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Berdasarkan capaian tahun 2022 dari target 81% dengan realisasi sebesar 84,91% menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum. selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2021 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
 - b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.
 - c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).
6. *Indikator Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Kegiatan Bantuan Hukum adalah salah satu kegiatan yang hampir setiap tahun anggaran masuk ke dalam program prioritas nasional utama kementerian hukum dan HAM sehingga selalu menjadi sorotan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya. Pada Tahun 2022 kegiatan bantuan hukum juga masuk menjadi program prioritas nasional yang pengawasannya dilakukan secara langsung oleh BAPPENAS dan Kantor Staf Presiden.

Target persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 80% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 4.287 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 3.523

Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 82,18% dengan capaian kinerja 102,73%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
80%	82,18%	102,73%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,58% dengan capaian kinerja 105% maka pada tahun 2022 dengan target yang dinaikan menjadi 80% realisasinya adalah 82,18% dengan capaian kinerja sebesar 102,73%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19 Perbandingan IKK Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79	82,58	105%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80	82,18	102,73%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan. Meskipun nilai penurunan capaian kinerjanya sangat kecil namun hal ini akan menjadi perhatian mengingat indikator ini merupakan salah satu prioritas nasional utama kementerian hukum dan HAM.

penyebab menurunnya capaian kinerja Indikator ini adalah, Pemberi Bantuan Hukum belum seluruhnya aktif melaksanakan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan bantuan hukum litigasi. kedepannya, agar kinerja terhadap indikator ini dapat meningkat, panitia pengawas pusat dan pengawas daerah harus melakukan upaya pembinaan secara intens dan berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang juga memiliki peranan penting dalam mencegah (upaya preventif) terjadinya pelanggaran hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Indikator Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan indikator baru pada sasaran strategis sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 80% sementara capaian tahun 2021 sebesar 82,58% dan capaian tahun 2022 sebesar 82,18%.

Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan targetnya kinerja karena Rencana Strategisnya baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

Capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum. selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2021 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.
- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

7. *Indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.*

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum.

Realisasi indeks layanan bantuan hukum adalah 76,67 indeks dengan capaian kinerja 100,08%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 20 Realisasi Target Kinerja Indikator kepuasan layanan bantuan hukum

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
---------------	----------------	-----------------

76,61 Indeks	76,67 Indeks	100.08%
--------------	--------------	---------

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 92,91 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,28%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 21,2%. Hal ini disebabkan adanya peralihan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan survei. Proses peralihan ini sudah pasti akan berpengaruh pada proses penerapan surveinya oleh panitia pengawas daerah yang memerlukan waktu untuk penyesuaian dan penguasaan pertanyaan atau materi survei, sehingga turut berpengaruh pada pencapaian target. Namun demikian capaian kinerja terhadap target sudah tercapai lebih dari 100%.

Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun targetnya belum ditetapkan pada tahun 2020 dikarenakan Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target terhadap indikator kerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembanding capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan indikator dan target yang sama.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara capaian tahun 2021 sebesar 92,91 indeks dan capaian tahun 2022 sebesar 76,67 indeks. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada rencana strategis maka target indikator ini dinaikan menjadi 76,75 indeks.

Meski demikian target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai tentu saja keberhasilan pencapaian terhadap indikator ini tidak lepas dari upaya perbaikan standar layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan hukum. dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Sasaran Program

Terhadap 2 (dua) sasaran program dengan 6 (enam) indikator kinerja yang diampu BPHN capaian kinerjanya adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 22 Capaian Kinerja Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI KINERJA	Capaian
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	9,80%	49,02%
	Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%	29,55%	147,75%
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61 Indeks	92,55	120,81%
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	84,91%	104,83%

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI KINERJA	Capaian
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	82,18%	102,73%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,67%	100,08%
Rata-Rata Capaian				104,20%

6. Analisis terhadap Capaian Kinerja Sasaran Program

a. Sasaran Program 1

Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yakni:

Indikator 1 :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dengan target 20%

Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 yang disampaikan ke 23 K/L adalah 102 rekomendasi. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 10 rekomendasi Peraturan Perundang-undangan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil AE tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pembuat kebijakan}}{\text{rekomendasi hasil AE PUU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus formulasi hitung di atas, maka realisasi target dari indikator ini adalah 9,80% dengan capaian kinerja sebesar 49,02%. Dari analisis data tersebut diketahui bahwa target indikator Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan tidak tercapai sebagaimana diharapkan.

Target	Capaian	%Capaian
20%	9,80%	49,02%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama, realisasinya adalah 20% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan lebih dari 50%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23 perbandingan capaian kinerja indikator 1 tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%
2022	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	9,80	49,02%

Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan yakni :

- hasil analisis dan evaluasi hanya berupa rekomendasi yang belum memiliki kekuatan mengikat karena hanya diatur dengan SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPHN;
- adanya resistensi terhadap rekomendasi Analisis dan Evaluasi yang tidak menguntungkan bagi K/L;
- masih terdapat ego sektoral di dalam memahami rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum;
- belum tersosialisasikannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh kepada K/L;
- kebijakan dari K/L masing-masing dan juga belum terintegrasinya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum ke dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 belum tercapai. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 20% sementara capaian tahun 2021 sebesar 20% dan capaian tahun 2022 sebesar 9,80%. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada

pada rencana strategis maka terhadap target indikator ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja baik untuk tahun anggaran 2023 maupun tahun 2024 dengan rekomendasi capaian pada tahun 2023 harus dapat mencapai 30% atau lebih tinggi 10% dari target untuk menutupi kegagalan pencapaian target pada tahun 2022. Namun demikian dengan melihat tren capaian terhadap target maka target tahun 2023 tidak dapat ditambah.

Untuk mendukung peningkatan capaian kinerja pada tahun 2023, perlu dibuat mekanisme atau peraturan yang memiliki daya paksa bagi stakeholder (K/L) untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan kebijakan atau regulasi di lingkup instansi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Apabila dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tahun 2018 sampai dengan 2020, maka indikator dan targetnya berbeda dengan kegiatan analisis dan evaluasi hukum pada tahun 2021 dan 2022. Adapun perbandingan capaian kinerja selama 5 tahun berdasarkan Indikator kinerja dan target Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 24 perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2018-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	12 Rekomendasi	12	100%
2019			12	100%
2020			12	100%
2021	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	20%	100%
2022	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	10%	50%

Berdasarkan tabel di atas, jika dianalisis maka target dengan indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum yang Dimanfaatkan Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional dengan target 12 Rekomendasi selalu tercapai 100%. Hal ini disebabkan indikator tersebut termasuk

dalam kategori yang bisa dikendalikan mengingat untuk penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sehingga dalam pelaksanaannya pasti memanfaatkan seluruh hasil rekomendasi analisis dan evaluasi hukum yang dihasilkan oleh BPHN. Hal ini berbeda dengan indikator persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Faktor eksternal sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target kinerja. Ini juga yang menyebabkan capaian terhadap target perjanjian kinerja tidak pernah melebihi 100% bahkan pada tahun 2022 capaian kinerja tercapai tercapai 100%.

Indikator 2 :

Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dengan target 20%

Rancangan Undang-Undang Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 adalah 44 Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang usulan Pemerintah yang masuk ke dalam daftar RUU Prioritas Tahun 2023 berdasarkan SK DPR No 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas RUU Prioritas 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 adalah sebanyak 13 RUU. Berdasarkan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah RUU usulan pemerintah dalam Prolegnas Prioritas Tahunan}}{\text{jumlah RUU di lingkungan Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020 – 2022}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi hitung di atas, realisasi target untuk indikator ini adalah sebesar adalah 29,55% dengan capaian kinerja sebesar 147%.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
20%	29,55%	147%

Pada tahun 2021 indikator Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan dengan target 25% realisasinya adalah 27,27% dengan capaian

kinerja sebesar 109% sedangkan target tahun 2022 adalah 20% realisasinya sebesar 29,55% dengan capaian kinerja sebesar 147%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 25 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25%	27,27	109%
2022		20%	29,55	147%

Penetapan target yang lebih rendah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan karena RUU Prakarsa Pemerintah dalam daftar usulan Prolegnas jangka menengah Tahun 2020-2024 akan berkurang setiap tahunnya, sehingga jumlah target kinerja yang harus dicapai juga akan berkurang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, Indikator yang digunakan berbeda dengan Indikator yang digunakan pada Tahun 2021 dan 2022 yakni Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dengan target 20 RUU.

Adapun hasil perbandingan capaian kinerja selama 5 tahun berdasarkan Indikator kinerja dan target Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 26 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	20 RUU	16 RUU	80%
2019			16 RUU	80%
2020			14 RUU	70%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25%	27,27	109%
2022		20%	29,55	147%

Berdasarkan tabel di atas, jika dianalisis maka target dengan indikator Jumlah RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional belum pernah tercapai 100%. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal karena penetapan Prolegnas bergantung pada hasil penetapan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna sehingga pada rencana strategis BPHN tahun 2020-2024 indikator tersebut kemudian diubah menjadi Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang Masuk ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan yang memungkinkan peluang untuk pencapaian target kinerja. Hal ini terlihat dari capaian dalam kurun waktu 2021-2022 yang targetnya tercapai bahkan lebih dari 100%.

b. Sasaran Program 2

Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Indikator 1 :

Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum dengan target 76,61

Target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2022 adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum. Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id. Survei dilakukan melalui aplikasi survei 3AS Balitabang Hukum dan HAM dengan Hasil 92,55 indeks sehingga nilai capaiannya adalah 120,81%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
76,61 indeks	92,55 indeks	120,81%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 92,85 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,20%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 27 Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,85	121,20%
2022	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61	92,55	120,81 %

Meskipun capaian kinerja terhadap target indikator yang dihasilkan lebih dari 100% namun jika dilihat dengan seksama, capaian kinerja pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,3%. hal ini disebabkan jumlah partisipan sebagai responden lebih sedikit jumlahnya dibandingkan responden yang berpartisipasi dalam survei tahun 2021. selain itu banyaknya jenis survei yang harus diisi oleh responden sehingga tingkat partisipasi menjadi menurun.

Sasaran program ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja tahun 2020 karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan sasaran strategis maupun indikator yang sama.

Indikator 2 :

Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target 81%

Target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 81% dengan formulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum litigas}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 11.057 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 9.389 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 84,91% dengan capaian kinerja 104,83%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
81%	84,91%	104,83%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 77% permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 81,28% dengan capaian kinerja 106% maka pada tahun 2022 dengan target yang dinaikan menjadi 81% realisasinya adalah 84,91% dengan capaian kinerja sebesar 104,83%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 28 Perbandingan hasil capaian kinerja indikator 2 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77	81,28	106%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81	84,91	104,83%

Jika dilihat sekilas capaian kinerja yang diperoleh Tahun 2022 seperti mengalami penurunan. Namun jika dianalisis dari sisi realisasi target, maka dapat disimpulkan bahwa target sudah terlampaui. Persentase capaian kinerja terlihat

menurun disebabkan target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan target tahun 2021.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, indikator dan target yang digunakan pada tahun 2018 – 2020 berbeda dengan indikator dan target yang digunakan pada periode 2021 dan 2022. Jika membandingkan capaian kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan dengan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum litigasi	5.238	18.733	357,63%
2019		5.425	11.473	211,48%
2020		5.699	12.698	222,8%
2021	persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81,28	106%
2022		81%	84,91	104,83%

Jika melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan selalu meningkat setiap tahunnya dan capaian terhadap target dimaksud selalu tercapai bahkan capaiannya selalu lebih dari 100%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target untuk tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 adalah 81% begitu juga dengan 2024 targetnya adalah 81%, sementara capaian tahun 2021 sebesar 81,28% dan capaian tahun 2022 sebesar 84,91%.

Indikator 3 :

Indikator Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target 80%

Target persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 80% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum nonlitigasi sesuai peraturan bantuan hukum}}{\text{seluruh permohonan bantuan hukum nonlitigasi}} \times 100\%$$

Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 4.287 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 3.523 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 82,18% dengan capaian kinerja 102,73%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
80%	82,18%	102,73%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,58% dengan capaian kinerja 105% maka pada tahun 2022 dengan target yang dinaikan menjadi 80% realisasinya adalah 82,18% dengan capaian kinerja sebesar 102,73%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30 perbandingan capaian kinerja indikator 3 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase permohonan bantuan hukum nolitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79	82,58	105%
2022	Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan	80	82,18	102,73%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	peraturan perundang-undangan			

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan. Meskipun nilai penurunan capaian kinerjanya sangat kecil namun hal ini akan menjadi perhatian mengingat indikator ini merupakan salah satu prioritas nasional utama kementerian hukum dan HAM.

penyebab menurunnya capaian kinerja Indikator ini adalah, Pemberi Bantuan Hukum belum seluruhnya aktif melaksanakan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi dan lebih fokus untuk melaksanakan kegiatan bantuan hukum litigasi. kedepannya, agar kinerja terhadap indikator ini dapat meningkat, panitia pengawas pusat dan pengawas daerah harus melakukan upaya pembinaan secara intens dan berkelanjutan kepada Pemberi Bantuan Hukum terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang juga memiliki peranan penting dalam mencegah (upaya preventif) terjadinya pelanggaran hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, indikator dan target yang digunakan pada tahun 2018 – 2020 berbeda dengan indikator dan target yang digunakan pada periode 2021 dan 2022. Jika membandingkan capaian kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan dengan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31 perbandingan capaian kinerja indikator 3 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum nonlitigasi	628	78.577	12.059%
2019		722	3.037	420,63%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2020		758	4.031	531,79%
2021	persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81,28	106%
2022		81%	104,83	129,42%

Jika melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan selalu meningkat setiap tahunnya dan capaian terhadap target dimaksud selalu tercapai bahkan capaiannya selalu lebih dari 100%.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 80% sementara capaian tahun 2021 sebesar 82,58% dan capaian tahun 2022 sebesar 82,18%.

Capaian kinerja tahun 2022 menunjukkan bahwa target indikator persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercapai bahkan melebihi target. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum. selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2021 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

Selain itu, beberapa kegiatan atau program juga dilakukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yakni melalui :

- a. kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian reward and punishment kepada pemberi bantuan hukum.
- b. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan

langkah untuk memetakan kondisi pemberi bantuan hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.

- c. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi bantuan hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

Indikator 4 :

Indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan target 76,61

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum.

Realisasi indeks layanan bantuan hukum adalah 76,67 indeks dengan capaian kinerja 100,08%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 32 Realisasi Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
76,61 Indeks	76,67 Indeks	100.08%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 92,91 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,28%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 4 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 21,2%. Hal ini disebabkan adanya peralihan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan survei. Proses peralihan ini sudah pasti akan berpengaruh pada proses penerapan surveinya oleh panitia pengawas daerah yang memerlukan waktu untuk penyesuaian dan penguasaan pertanyaan atau materi survei, sehingga turut berpengaruh pada pencapaian target. Namun demikian capaian kinerja terhadap target sudah tercapai lebih dari 100%.

Capaian kinerja Sasaran Program ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan sasaran program maupun indikator yang sama.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara capaian tahun 2021 sebesar 92,91 indeks dan capaian tahun 2022 sebesar 76,67 indeks. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada pada rencana strategis maka target indikator ini dinaikan menjadi 76,75 indeks.

Meski demikian target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai tentu saja keberhasilan pencapaian terhadap indikator ini tidak lepas dari upaya perbaikan standar layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan hukum. dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan

hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Sasaran Kegiatan

Terhadap 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang diampu BPHN capaian kinerjanya adalah seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 34 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN(%)
Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	9,80%	49%
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	87,06%	109%
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3 Naskah Akademik	2 Naskah Akademik	67%
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7	11	157%
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	36,55%	182,74%
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61 Indeks	90,44	118,05%
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	84,91%	424,53%
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing- masing wilayah	70%	91,06%	130,09%
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	316,25%	395,31%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,67%	100,08%
Capaian rata-rata Sasaran Kegiatan				151,88%

Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum

Indikator 1 :

Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan dengan target 20%

Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 yang disampaikan ke 23 K/L adalah 102 rekomendasi. Sedangkan rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh K/L adalah 10 rekomendasi Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan fomulasi hitung :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil AE tahun sebelumnya yang dimanfaatkan pembuat kebijakan}}{\text{rekomendasi hasil AE PUU tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Maka realisasi terhadap target indikator 1 adalah 9,80% rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
20%	9,80%	49,02%

Dari analisis data tersebut diketahui bahwa target indikator Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan tidak tercapai sebagaimana diharapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama, realisasinya adalah 20% sehingga capaian kinerjanya adalah 100%, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan lebih dari 50%.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 35

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	20	100%
2022	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20	9,80	49,02%

Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan yakni :

- hasil analisis dan evaluasi hanya berupa rekomendasi yang belum memiliki kekuatan mengikat karena hanya diatur dengan SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPHN;
- adanya resistensi terhadap rekomendasi Analisis dan Evaluasi yang tidak menguntungkan bagi K/L;
- masih terdapat ego sektoral di dalam memahami rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum;
- belum tersosialisasikannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh kepada K/L;
- kebijakan dari K/L masing-masing dan juga belum terintegrasinya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum ke dalam perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 belum tercapai. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 20% sementara capaian tahun 2021 sebesar 20% dan capaian tahun 2022 sebesar 9,80%. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada rencana strategis maka terhadap target indikator ini perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja baik untuk tahun anggaran 2023 maupun tahun 2024 dengan rekomendasi capaian pada tahun 2023 harus dapat mencapai 30% atau lebih tinggi 10% dari target untuk menutupi kegagalan pencapaian target pada tahun 2022. Namun demikian dengan melihat tren capaian terhadap target maka target tahun 2023 tidak dapat ditambah.

Untuk mendukung peningkatan capaian kinerja pada tahun 2023, perlu dibuat mekanisme atau peraturan yang memiliki daya paksa bagi stakeholder (K/L) untuk memanfaatkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan kebijakan atau regulasi di lingkup instansi pemerintah.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, Indikator yang digunakan berbeda dengan Indikator yang digunakan pada Tahun 2021 dan 2022 yakni Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan dengan target 12 Rekomendasi. Adapun hasil perbandingan capaian kinerja selama 5 tahun berdasarkan Indikator kinerja dan target Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 36 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan	12 Rekomendasi	12	100%
2019			12	100%
2020			12	100%
2021	persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan	20%	20%	100%
2022	perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	10%	50%

Berdasarkan tabel di atas, jika dianalisis maka target dengan indikator Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan dengan target 12 Rekomendasi selalu tercapai 100%. Hal ini berbeda dengan indikator persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan. Faktor eksternal sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya target kinerja. Ini juga yang menyebabkan capaian terhadap target perjanjian kinerja tidak pernah melebihi 100% bahkan pada tahun 2022 capaian kinerja belum tercapai 100%.

Indikator 2 :

Dokumen pembangunan hukum nasional dengan target 1 dokumen

Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN) merupakan Dokumen Pembangunan Nasional yang berasal dari kompilasi hasil kegiatan analisis dan evaluasi Hukum yang dilakukan oleh kelompok kerja analisis dan evaluasi yang berisi arah pembangunan hukum, rencana dan strategi pembangunan hukum nasional ke depan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan dalam membuat kebijakan. Terhadap target 1 dokumen pembangunan hukum nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 dengan formulasi hitung Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional telah tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama maka capaiannya juga 100%, yaitu 1 dokumen. Hasil dari DPHN akan digunakan untuk bahan masukan untuk penyusunan RPJMN, penyusunan perencanaan legislasi dan penyusunan kebijakan dibidang pembangunan hukum.

Capaian terhadap target indikator ini selalu tercapai 100%. Perbandingan data capaian kinerja terhadap target yang sama dalam kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah 100% dan tidak pernah melebihi target.

<i>Target</i>	<i>realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Adapun hasil perbandingan capaian kinerja selama 5 tahun berdasarkan Indikator kinerja dan target Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 37 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Dokumen pembangunan hukum nasional	1	1	100%
2019		1	1	100%
2020		1	1	100%
2021		1	1	100%
2022		1	1	100%

Indikator 3 :

Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi

Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum telah dilaksanakan proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pejabat fungsional analis hukum melalui sistem inpassing. Tujuannya lain: (1) terstandardisasinya kualifikasi dan kompetensi analis hukum; (2) terwujudnya integritas dan profesionalisme analis hukum berdasarkan sistem merit; (3) terwujudnya kejelasan akan tanggung jawab, hasil akhir, dan ukuran kinerja yang lebih terfokus dan terukur; serta (4) terciptanya independensi analis hukum.

Indikator ini telah ditetapkan pada rencana strategis BPHN 2020-2024 namun untuk target kinerja baru ditetapkan pada tahun 2022 namun sudah menjadi perjanjian kinerja sejak tahun 2021.

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum sendiri adalah standar kompetensi yang meliputi kemampuan Manajemen, Sosiokultural dan Teknis. Target pengembangan kompetensi pejabat fungsional analis hukum yang ditetapkan adalah 80% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum}}{\text{jumlah seluruh Analis Hukum yang terdata secara resmi}} \times 100\%$$

Jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang telah terdata secara resmi dalam data base BPHN adalah 1.198 orang. sedangkan jumlah Pejabat Fungsional Analis Hukum yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi adalah 1.043 orang. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 87,06% dengan capaian kinerja 109%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
80%	87,06%	108,83%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama, realisasinya adalah 89,19% dengan capaian kinerja 111,5% dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,5%. Hal ini disebabkan formulasi hitung dan dasar penetapan target yang berbeda. Untuk tahun 2021 yang dihitung adalah persentase angka kelulusan hasil uji kompetensi dalam masa rekrutmen pejabat analis hukum, sedangkan untuk tahun 2022 adalah pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi terhadap pejabat analis hukum yang sudah menjabat dan terdata secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN.

Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	89,19%	111,5%
2022	Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%	87,06%	109%

Indikator ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun targetnya belum ditetapkan pada tahun 2020 dikarenakan Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target terhadap indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembanding capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan indikator dan target yang sama.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah 80% sementara capaian tahun 2021 sebesar 89,19% dan capaian tahun 2022 sebesar 87,06%.

Sasaran Kegiatan 2:

Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis

Sasaran yang hendak dicapai dalam Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis adalah terwujudnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah dan meniadakan pertentangan dengan antara peraturan perundang-undangan yang ada (baik secara vertikal maupun horisontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil. Selaras dengan tujuan negara yang hendak dicapai secara bertahap, maka dalam muatan yang terkandung harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif di masyarakat.

Untuk mewujudkan kepastian hukum serta mendorong kinerja pembangunan yang lebih baik dibutuhkan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary action*) berupa revitalisasi hukum agar menjadikan hukum nasional sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan sosial dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan antara lain peningkatan peran perencanaan legislasi nasional dan peningkatan kualitas naskah akademik yang menjadi acuan penyusunan norma. Sasaran tersebut kemudian diukur melalui 3 (tiga) indikator, yakni :

Indikator 1 :

Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda dengan target 3 dokumen

Dokumen Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan Undang-Undang telah disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 16 Desember 2021, dengan demikian target telah terealisasi 1 Dokumen. Untuk dokumen Program penyusunan PP dan Perpres sebagai dokumen perencanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden juga telah Ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 dan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023. Dengan demikian target dokumen Program Penyusunan PP dan Perpres terealisasi sebanyak 1 Dokumen.

Selain telah menyelesaikan kegiatan yang menjadi target kinerja, terkait dengan Perencanaan Legislasi juga telah selesai melaksanakan 2 (dua) kegiatan lain yang merupakan bagian dari indikator kinerja terlaksananya Fasilitas Perencanaan Program Legislasi Daerah. Kedua kegiatan dimaksud adalah asistensi penyusunan Prolegda, dan Kegiatan konsultasi Propemperda oleh DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan telah menghasilkan 1 Dokumen. Sehingga dapat disimpulkan untuk Indikator “Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda dengan target 3 dokumen telah tercapai 100%.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
3 Dokumen	3 Dokumen	100%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama, realisasi targetnya adalah 3 Dokumen dengan capaian kinerja 100%. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 :

Tabel 39 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2021 - 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3	100%	100%
2022	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3	100%	100%

Jika melihat perbandingan capaian terhadap target indikator tersebut periode Tahun 2018–2022 dapat disimpulkan bahwa kegiatan dimaksud selalu tercapai 100% namun tidak pernah melebihi 100%. Berikut adalah perbandingan capaian kinerja indikator Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda selama kurun waktu 2018-2022 :

Tabel 40 Perbandingan capaian kinerja Indikator 1 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembentukan UU, PP, dan Perpres Serta Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Prolegda	3	3	100%
2019		3	3	100%
2020		3	3	100%
2021	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3	3	100%
2022		3	3	100%

Indikator 2 :

Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang dengan target 3 Naskah Akademik

Untuk Indikator Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang yang menargetkan 3 Naskah Akademik, jika dievaluasi berdasarkan formulasi hitung adalah jumlah naskah akademik yang disusun maka dari 3 Naskah akademik hanya 2 yang tercapai dan 1 Naskah akademik tidak selsai disusun. Sehingga capaian kinerja terhadap indikator ini adalah 67%. 2 (dua) Naskah Akademik RUU tersebut adalah : 1. NA RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*); 2. NA RUU tentang Grasi , Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi. Sedangkan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak selesai penyusunan pada tahun 2022 karena keterbatasan kajian pendukung substansi rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang akan dituangkan dalam naskah akademik dari unit teknis yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Namun demikian sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, telah dilakukan penyusunan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dimaksud.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
3 NA	2 NA	67%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya dengan dengan indikator kinerjanya berbeda namun berdasarkan formulasi hitung pada dasarnya penentuan capaian kinerja menjadi sama. Berdasarkan hasil evaluasi target kinerja yang telah ditetapkan selalu tercapai 100%. Berikut adalah perbandingan target dan capaian terhadap indikator Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang :

Tabel 41 Perbandingan capaian kinerja Indikator 2 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah Naskah yang disusun	5	5	100%
2019		5	5	100%
2020		2	3	150%
2021	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3	3	100%
2022		3	2	67%

Indikator 3 :

Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya dengan target 7 Naskah Akademik

Indikator ini menargetkan 7 naskah akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya pada tahun 2022. Jika capaiannya didasarkan pada formulasi hitung “Jumlah Naskah Akademik RUU yang dimohonkan Penyelarasannya” maka terhadap target 7 Naskah akademik realisasinya adalah 11 Naskah akademik yang dimohonkan penyelarasannya oleh K/L. Dengan demikian maka capain terhadap target ini adalah 157,14% sehingga dapat disimpulkan bawah target telah tercapai bahkan capaiannya lebih dari target yang telah ditetapkan.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
7 Permohonan	11 Permohonan	157,14%

Adapun daftar naskah akademik yang dimohonkan penyelesaiannya pada tahun 2022:

Tabel 42 Naskah Akademik RUU yang domohonkan penyelesaian

No.	Judul Naskah Akademik RUU	K/L yang Mengajukan Permohonan
1	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Kementerian Hukum dan HAM
2	RUU tentang Pengesahan <i>Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons</i> (TPNW)	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
3	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Kementerian Hukum dan HAM
4	RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)	Kementerian Perdagangan
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of the Republic of Korea</i>)	Kementerian Perdagangan
6	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (<i>Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives</i>)	Kementerian Hukum dan HAM
7	RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Defence Cooperation</i>)	Kementerian Pertahanan
8	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
9	RUU tentang <i>Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons Including Diplomatic Agent</i> (Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Tindak Pidana Terhadap Orang Yang Dilindungi Secara Internasional Termasuk Pejabat Diplomatik)	Kementerian Luar Negeri
10	Rancangan Undang-Undang tentang Penilai	Kementerian Keuangan
11	Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana	Kementerian Hukum dan HAM

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021, dengan target yang sama, realisasi target tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Realisasi target tahun 2021 adalah 12 Naskah Akademik, dengan nilai capaian kinerjanya adalah 171,42%. Hal ini bisa saja terjadi, mengingat pelaksanaan penyelarasan naskah akademik sangat dipengaruhi oleh permohonan dari K/L pemrakarsa. Penyelarasan baru dapat dilakukan jika ada K/L mengajukan permohonan.

Tabel 43 Perbandingan capaian kinerja Indikator 3 Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7	12	171,42%
2022	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7	11	157,14%

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018-2020, maka capaian kinerja tahun 2022 lebih baik daripada capaian kinerja tahun 2018-2020. Berikut disajikan data perbandingan capaian target penyelarasan naskah akademik dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 44 Perbandingan Capaian Indikator 3 Tahun 2018-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	Jumlah Naskah yang diselaraskan	20	5	25%
2019		20	10	50%
2020		15	9	60%
2021	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan materi muatannya	7	12	171,42%
2022		7	11	157,14%

Jika dilihat dari tabel di atas, target dalam kurun waktu tahun 2018 dan 2019 yang berjumlah 20 Naskah Akademik RUU tidak tercapai sebagaimana diharapkan. Demikian juga dengan target tahun 2020 yang berjumlah 15 Naskah Akademik RUU. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor eksternal dan internal.

Faktor internalnya adalah (1) indikator keberhasilannya diukur dari tingkat penyelesaian kegiatan penyelarasan Naskah Akademik yang ditandai dengan dikeluarkannya surat keterangan hasil penyelarasan naskah akademik oleh Kepala BPHN sehingga jika belum dikeluarkan keputusan tersebut maka belum dihitung sebagai realisasi kinerja; (2) penetapan target yang sangat tinggi tanpa memperhitungkan perubahan kondisi negara dan datangnya tahun politik. Sedangkan faktor eksternalnya adalah (1) sifat kegiatan penyelarasan naskah akademik sangat bergantung pada ada atau tidaknya permohonan yang diajukan dari Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan penyelarasan naskah akademik; (2) dalam pelaksanaan penyelarasan bisa saja terjadi perubahan arah kebijakan atau belum selesainya kesepakatan internal terkait substansi atau materi yang akan diatur sehingga proses penyelarasan harus dihentikan sampai selesai permasalahan yang muncul diinternal K/L yang mengajukan permohonan; (3) jika dilihat dari trend permohonan penyelarasan yang diusulkan oleh Pemrakarsa, Naskah Akademik RUU yang dimohonkan penyelarasannya adalah RUU yang masuk dalam Daftar Komulatif Terbuka.

Sedangkan untuk periode tahun 2021 dan 2022 dengan target 7 Naskah Akademik realisasinya jauh melebihi target sehingga capaian kerjanya selalu lebih dari 100%.

Sasaran Kegiatan 3:

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat.

Dalam rangka pemberian kontribusi yang optimal dalam pembangunan hukum nasional dan mendukung pencapaian sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu terkait masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, jumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan informasi-informasi seputar hukum melalui upaya menyediakan dokumen dan informasi hukum yang lengkap, akurat dan mutakhir serta kemudahan dalam mengakses informasi hukum. Kemudahan akses terhadap dokumentasi dan

informasi hukum tersebut dapat meningkatkan pengetahuan hukum para Aparatur Negara, Penegak Hukum, kalangan Akademisi, dan berbagai profesi hukum lainnya, serta dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2022, pencapaian terhadap sasaran kegiatan Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat adalah sebagai berikut :

Indikator 1 :

Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif dengan target 20%

Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional mempunyai tugas dalam membenahan strategi untuk dapat meningkatkan partisipasi aktif Anggota JDIHN. Yang dimaksud Anggota JDIHN aktif adalah Anggota JDIHN yang telah melakukan pengelolaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh instansinya melalui website JDIH yang akan diukur melalui keaktifan anggota dalam menyampaikan laporan e-Report. Pada tahun 2022 jumlah anggota JDIHN adalah 1.234 Anggota. Dari seluruh anggota JDIHN yang sudah menyampaikan laporan melalui e-Report adalah 451 Anggota. Bila pencapaian terhadap target dihitung berdasarkan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah anggota JDIHN aktif}}{\text{Jumlah anggota JDIHN}} \times 100\%$$

Maka capaian terhadap target Indikator Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif sudah tercapai bahkan lebih dari 100%. Dari target 20% Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif, realisasinya adalah 36,55% dengan capaian kinerja 182,74%.

<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%Capaian</i>
20%	36,55%	182,74%

Jika dibandingkan dengan realisasi target dan capaian kinerja tahun 2021 capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan. Perbandingan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 45 perbandingan capaian kinerja indikator 1 Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	28,62%	143,12%
2022	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	36,55%	182,74%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPHN terhadap indikator Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 39,62%. Melihat trend peningkatan capaian terhadap indikator ini, kedepannya direkomendasikan agar target kinerja Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif ditingkatkan menjadi 25% dan diharapkan dapat terus meningkat hingga 100% anggota JDIHN berpartisipasi aktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas akses dokumen dan informasi hukum bagi masyarakat.

Indikator 2 :

Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan dengan target 76,61 Indeks

Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan suatu perpustakaan adalah jumlah pengguna yang mengunjungi dan menggunakan layanan yang disediakan perpustakaan tersebut. Dalam indikator indeks layanan perpustakaan pada Pusat JDIHN dengan melakukan survei yang baru dilaksanakan tahun ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM.

Survey dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna. Survei diberikan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.bphn.go.id. Dengan jumlah responden yang sudah melakukan pengisian pada indeks kepuasan layanan perpustakaan, dari persentase target indikator sebesar indeks kepuasan layanan 76,61 maka pada Tahun 2022 ini dapat tercapai dengan

perolehan hasil indeks 90,44 sehingga dapat disimpulkan bahwa target tersebut telah tercapai 118,05%.

	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Indeks</i>	76,61	90,44	118,05%
		Indeks	

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dengan target yang sama, capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adapun perbandingan capaian target 2021 dan 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61	76,65	100,05%
2022	Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61	90,44	118,05%

Berdasarkan Rencana strategis dan perjanjian kinerja, indikator ini baru menjadi target pada tahun 2021 dan 2022 sehingga perbandingannya hanya terbatas pada tahun tersebut.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara capaian tahun 2021 sebesar 76,65 indeks dan capaian tahun 2022 sebesar 90,44 indeks. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada pada rencana strategis maka target indikator ini dinaikan menjadi 77 indeks.

Indikator 3 :

Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN dengan target 20%

Dalam menjalankan tugasnya, Anggota JDIHN melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh instansinya. Sementara itu, sebagai salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh Anggota JDIHN adalah membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN. Target indikator ini adalah 20%. Dalam pelaksanaan Jumlah website Anggota JDIHN yang terintegrasi pada tahun 2022 adalah 45 website, sedangkan Jumlah anggota JDIHN aktif pada tahun 2022 adalah 53. Jika Capaian terhadap target tersebut ditentukan berdasarkan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi}}{\text{jumlah anggota JDIHN aktif tahun berjalan}} \times 100\%$$

maka realisasi kinerja di Tahun 2022 pada indikator Persentase Website Anggota JDIHN Aktif yang Terintegrasi Dengan Portal/Sistem Integrasi JDIHN adalah 82% dengan capaian kinerja 411,10%.

Target	Realisasi	%Capaian
20%	82%	411,10%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 dengan target yang sama, maka Capaian kinerja Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 230,1%. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 47 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	36,25%	181%
2022	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi	20%	82%	411,10%

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
	dengan portal/sistem integrasi JDIHN			

Tingginya nilai realisasi ini disebabkan adanya Program Percepatan Integrasi yang dilakukan oleh Pusat JDIHN dengan membantu untuk membuat website JDIH kepada Anggota JDIHN dimana hosting website JDIH berada di Data Center Kementerian Hukum dan HAM. Pada pelaksanaan teknisnya, Anggota Jaringan menggunakan website JDIH dan mengelola dokumen hukum yang diterbitkan oleh institusinya. Apabila Anggota JDIHN sudah memiliki sarana prasarana sendiri, data website JDIH ini bisa dimigrasikan ke server milik Anggota JDIHN.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan beberapa tahun sebelumnya dengan indikator kinerja yang berbeda, berdasarkan hasil evaluasi target kinerja yang telah ditetapkan selalu tercapai 100% bahkan lebih. Berikut adalah perbandingan target dan capaian dalam pelaksanaan integrasi website anggota JDIHN :

Tabel 48 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2018-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	jumlah anggota jaringan hukum yang terintegrasi	25	135	540%
2019		25	341	1.364%
2020		25	255	1.020%
2021	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	36,25%	181%
2022		20%	82%	411,10%

Melihat trend capaian kinerja yang terus mengalami peningkatan setiap tahun bahkan melampaui target jangka menengah tahun 2023 dan 2024, sehingga direkomendasikan menaikkan target kinerja Tahun 2023 menjadi 25% website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN.

Sasaran Kegiatan 4:

Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari Sistem Pembangunan Nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pada akhirnya tujuan dari proses pembangunan hukum adalah meningkatnya kesadaran hukum termasuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap keadilan. Upaya mencapai sasaran tersebut dapat diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan.

Pada tahun 2022 ada 3 (tiga) indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran kegiatan sebagaimana diuraikan:

Indikator 1 :

Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah dengan target 70%

Pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01- PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sedangkan untuk teknis pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan dibentuknya kelompok kadarkum, selanjutnya dilakukan pembinaan secara berkala kemudian setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi desa/kelurahan binaan yang secara terus menerus mendapatkan pembinaan agar siap untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Pembinaan bagi kelompok kadarkum maupun desa/kelurahan sadar hukum dilakukan melalui kegiatan antara lain temu sadar hukum, simulasi, dan lomba kadarkum. Untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum, desa binaan harus melalui proses verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa binaan harus lolos dalam penilaian terhadap dimensi/aspek :

1. *Akses Informasi Hukum (20%);*
2. *Implementasi Hukum (40%);*
3. *Akses Keadilan (20%); dan*
4. *Akses Demokrasi dan Regulasi (20%).*

Dari dimensi di atas, kemudian dihasilkan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan kategori :

- a) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi;
- b) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Cukup, dan
- c) Desa/Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Kurang.

Dari tahapan proses yang telah dijelaskan di atas, hanya Desa/Kelurahan yang memiliki hasil indeks penilaian tinggi yang dianggap memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dan dapat diberikan penghargaan/gelar Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah mengajukan usulan terhadap desa/kelurahan binaan yang dinilai sesuai dengan kriteria untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pada Tahun 2022 ada 873 desa/kelurahan binaan yang diusulkan oleh kantor wilayah dan 795 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah yang ditetapkan sebesar 70%, realisasinya adalah 91,06% dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 130,09% dengan formulasi hitung:

$$\frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum}}{\text{usulan dari kantor wilayah}} \times 100\% = \text{Persentase Capaian Kinerja}$$

Target	Realisasi	%Capaian
70%	91,06%	130,09%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 79,64% dengan rata-rata capaiannya adalah 113,78%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	79,64	113,78%
2022	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	91,06	130,09 %

Jika dibandingkan dengan periode sebelum tahun 2021, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan kinerja terhadap pembentukan desa/kelurahan sadar hukum adalah jumlah desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah dengan target 175 Desa/Kelurahan. Untuk melihat dengan lebih jelas, target dan capaian kinerja selama kurun waktu 5 tahun, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 50 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 1 Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2018	jumlah desa/ kelurahan sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah	175	356 Desa	208,57%
2019		175	310 Desa	177,14%
2020		175	115 Desa	65,71%
2021	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	79,64	113,78%
2022	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	130,09	185,84%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian terhadap target pembentukan desa/kelurahan sadar hukum selalu tercapai bahkan melebihi target. Namun pada tahun 2020 target tidak tercapai 100%. Hal ini disebabkan proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum menjadi terhambat oleh faktor eksternal. Kondisi penyebaran covid-19 menyebabkan pemerintah daerah lebih fokus untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan upaya pengendalian penyebaran covid-19.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 70% sementara capaian tahun 2021 sebesar 79,64% dan capaian tahun 2022 sebesar 91,06% .

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2021, pada tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM melakukan beberapa perbaikan guna percepatan pencapaian kinerja yaitu dengan memasukkan indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah menjadi salah satu target kinerja kantor wilayah sehingga memberikan daya dorong pada kantor wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu dilakukan juga pembinaan terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing-masing kantor wilayah.

Dengan mengubah indikator kinerja dalam rencana strategis kementerian hukum dan ham ternyata membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode renstra tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada renstra 2020-2019 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum.

Indikator 2 :

Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi dengan target 80%

Berkaitan dengan peran penyuluh hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku instansi Pembina Pejabat Penyuluh Hukum di seluruh Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar. Termasuk bagaimana agar peran Penyuluh Hukum dapat dioptimalkan sehingga mampu menciptakan masyarakat cerdas serta sadar hukum. Untuk itu Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki tanggung jawab selain penyusunan kebijakan di bidang penyuluhan hukum, termasuk meningkatkan standar kompetensi yang dimiliki oleh seorang Penyuluh Hukum. Salah satunya melalui kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional penyuluh hukum. Standar kompetensi jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan ukuran kriteria kemampuan meliputi aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatan secara profesional di bidang penyuluhan hukum.

Pada Tahun 2022 total Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sebanyak 517 orang. Dari berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh BPHN selaku Pembina Jabatan total 1.635 Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Kegiatan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh Hukum

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Pembinaan JF Penyuluh Hukum terkait Peningkatan Kompetensi	350 orang
2	Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan dan Usulan JF Penyuluh Hukum	370 orang
3	Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Hukum Tahun 2022 Periode I	225 orang
4	Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Hukum Tahun 2022 Periode II	160 orang
5	Pelatihan ToT Pengajar JF Penyuluh Hukum	30 orang
6	Bimbingan Teknis Penyusunan Dupak	20 orang
7	Pendampingan Penyusunan Dupak secara Virtual	385 orang
8	Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	78 orang

Berdasarkan formulasi hitung terhadap capaian indikator kinerja Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi:

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi}}{\text{Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja}$$

Seluruh Pejabat Fungsional Penyuluhan Hukum

maka realisasinya adalah 394,93% dengan capaian kinerja sebesar 493,66%. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap target telah tercapai.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
80%	394,93%	493,66%

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 dengan target yang sama, realisasi target Pada Tahun 2021 adalah sebesar 344 Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang telah mengikuti pengembangan kompetensi dari total 423 JF Penyuluh Hukum atau sebesar 81,32% dengan capaian kinerja sebesar 101%.

Perbandingan hasil capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 2 Tahun 2021-2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	81,32	101%
2022	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80	394,93	493,66%

Peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan pada tahun 2022 ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kinerja dan metode pengembangan kompetensi melalui berbagai kegiatan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sebelumnya pada tahun 2021 kegiatan pengembangan kompetensi masih terbatas dilakukan melalui kegiatan yang sifatnya daring dengan kegiatan terbatas.

Indikator 3 :

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum dengan target 76,61 Indeks

Dalam rangka pemberian akses keadilan bagi masyarakat dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut, yang tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Fungsi Bantuan Hukum adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat khususnya Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini ditangani Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara program bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan perintah Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan tugas BPHN sebagai penyelenggara bantuan hukum, serta meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum. Langkah untuk mengetahui tingkat kualitas layanan bantuan hukum adalah dengan mengukur indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. dalam Rencana Strategis BPHN Tahun 2020-2024 indeks kepuasan layanan bantuan hukum merupakan salah satu target yang ditetapkan sebagai indikator kinerja.

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Panitia Pengawas Pusat BPHN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum melalui fitur E-monev pada aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) untuk melihat nilai kinerja Pemberi Bantuan Hukum (PBH) atas kualitas layanan pemberian bantuan hukum yang telah diberikan, dengan cara melihat hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pada kantor wilayah. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat kinerja dari Panwasda dalam

melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui wawancara kepada penerima bantuan hukum.

Dari keseluruhan jumlah 619 PBH yang terakreditasi, yang sudah dilakukan monitoring dan evaluasi melalui wawancara penerima layanan bantuan hukumnya sebanyak 440 PBH menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum 76,67% (Baik) sehingga capaian kinerjanya mencapai adalah kinerja 100,08%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

<i>Target</i>	<i>Capaian</i>	<i>%Capaian</i>
76,61 Indeks	76,67 Indeks	100.08%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 92,91 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,28%. Hasil perbandingan capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 53 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator 3 Tahun 2021 dan 2022

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
2021	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	92,91	121,28%
2022	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	76,67	100,08%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks kepuasan layanan bantuan hukum mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 21,2%. Hal ini disebabkan adanya peralihan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan survei. Proses peralihan ini sudah pasti akan berpengaruh pada proses penerapan surveinya oleh panitia pengawas daerah yang memerlukan waktu untuk penyesuaian dan penguasaan pertanyaan atau materi survei, sehingga turut

berpengaruh pada pencapaian target. Namun demikian capaian kinerja terhadap target sudah tercapai lebih dari 100%.

Capaian kinerja Sasaran kegiatan ini ditetapkan dalam rencana strategis 2020 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan sasaran strategis maupun indikator yang sama.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terlampaui. Target di tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 76,61 indeks sementara capaian tahun 2021 sebesar 92,91 indeks dan capaian tahun 2022 sebesar 76,67 indeks. melihat tren realisasi target pada tahun 2021 dan 2022 dan mengacu pada rencana strategis maka target indikator ini dinaikan menjadi 76,75 indeks.

Meski demikian target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai tentu saja keberhasilan pencapaian terhadap indikator ini tidak lepas dari upaya perbaikan standar layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan hukum. dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

3. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp49.711.976.000 (empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2022. Anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp8.988.773 dari tahun 2021 yang sebesar Rp40.756.203.000 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaan tahun anggaran muncul kebijakan automatic adjusment sebanyak 2 (dua) kali. Pada pelaksanaan Automatic Adjument I BPHN mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp10.747.544.000 dan

pada pelaksanaan Automatic Adjument II sebesar Rp637.747.000 sehingga total anggaran yang terkena kebijakan automatic adjusment adalah sebesar Rp17.385.291.000. dengan demikian sisa PAGU Anggaran BPHN Tahun 2022 sebesar Rp32.326.685.000. Kemudian pada saat kebijakan pembukaan Automatic Adjument anggaran, BPHN mengajukan pembukaan Automatic Adjument anggaran sebesar Rp833.486.000 sedangkan total anggaran yang direalokasi sebesar Rp10.497.805.000. selain itu ada juga transfer anggaran belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal sebesar Rp250.000.000, sehingga PAGU Akhir Satuan Kerja BPHN Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp38.946.171.000.

Realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp87.651.588.906 atau sebesar 98,47% dari total pagu sebesar Rp89.011.069.000. Presentasi realisasi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 97,86% dari total pagu Rp104.350.398.000. Anggaran ini sudah termasuk anggaran kegiatan Fasilitas perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah dan peningkatan kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah.

Perbandingan tingkat penyerapan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5 Realisasi Kinerja Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan grafik di atas, tingkat penyerapan anggaran pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mengalami tren yang sangat baik dengan persentase penyerapan yang selalu berada di atas 95%. Badan Pembinaan Hukum Nasional mampu melakukan penyerapan anggaran dengan realisasi sebesar Rp87.651.588.906 atau dengan persentase sebesar 98,47%. Adapun anggaran yang tersisa lebih pada hasil efisiensi penggunaan anggaran dengan mengalihkan kegiatan melalui metode daring/virtual. Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan sumber daya yang ada pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp102,121,929,238 atau sebesar 98% dari total pagu sebesar Rp104,350,398,000. Presentasi realisasi ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 97,33% dari total pagu Rp106,552,521.000. Anggaran ini sudah termasuk anggaran kegiatan pembinaan Hukum di Wilayah. Pagu BPHN selaku satuan kerja untuk pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 adalah Rp40,756,203,000 yang kemudian direvisi karena refocusing untuk penanganan covid-19 sehingga total Pagu setelah revisi adalah Rp39,340,750,000, dengan realiasasi Rp38,605,725,635 atau sebesar 98,13%.

Realisasi penyerapan terhadap pagu berdasarkan Sasaran Program pada Satuan Kerja BPHN tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54 Realisasi Anggaran Pada Sasaran Program

Sasaran Program	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi hukum	Rp3.059.651.000	Rp3.009.184.296	98,35%
Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Rp3.232.641.000	Rp3.164.476.959	97,89%
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen BPHN	Rp32.653.879.000	Rp 32.163.703.100	98,50%
Nilai rata-rata capaian			98,44%

Sedangkan capaian realisasi anggaran terhadap pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di wilayah adalah sebesar Rp49.314.224.551 dari total anggaran Rp50.064.898.000 atau sebesar 98,50%.

Selain realisasi anggaran dari sasaran program perlu disampaikan juga realisasi anggaran kinerja Tahun 2022 dari aspek sasaran kegiatan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 55 Realisasi Anggaran pada Tingkat Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	PAGU	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Rp2.100.408.000	Rp2.062.089.725	98,18%
Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Rp959.243.000	Rp947.094.571	98,73%
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Rp1.291.271.000	Rp1.275.516.852	98,78%
Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	Rp1.941.370.000	Rp1.888.960.107	97,30%
Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Rp32.653.879.000	Rp32.163.703.100	98,50%
Total Satker (BPHN)	Rp38.946.171.000	Rp38.337.364.355	98,44%
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Rp45.962.638.000	Rp45.364.464.181	98,70%
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Rp4.102.260.000	Rp3.949.760.370	96,28%
Total Kantor Wilayah	Rp50.064.898.000	Rp49.314.224.551	98,50%
Total BPHN (Unit Eselon I)	Rp89.011.069.000	Rp87.651.588.906	98,47%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Efisiensi juga tercapai karena ada perubahan metode pelaksanaan kegiatan antara lain rapat pembahasan dengan K/L, pembinaan dan kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional Analis dan Penyuluh Hukum dilakukan melalui metode daring (zoom meeting) maupun hybrid. Selain itu pembinaan terhadap anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional juga secara intens dapat dilakukan dengan metode daring sehingga. Dengan demikian meskipun PAGU Anggaran mengalami automatic adjument namun target kinerja hampir seluruhnya dapat dicapai bahkan lebih dari 100%.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2022 terjadi efisiensi penggunaan anggaran dengan adanya beberapa revisi dan realokasi anggaran sebagai langkah optimalisasi penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga alokasi anggaran tahun 2022 menjadi Rp38.946.171.000 dengan persentase serapan anggaran sebesar 98,44%.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{target biaya (PAGU)}} \right] \times 100$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp38.337.364.355 sementara target biaya untuk semua program sebesar Rp38.946.171.000. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 1,56%. Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 nilai ini mengalami penurunan. Tahun 2021 persentase efisiensi biaya adalah sebesar 1,87%.

Jika dilihat dari sisi efisiensi kinerja, dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 110,92% dan realisasi anggaran rata-rata sebesar 98% berdasarkan formulasi hitung :

$$\text{Efisiensi Kinerja} = \text{Realisasi Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

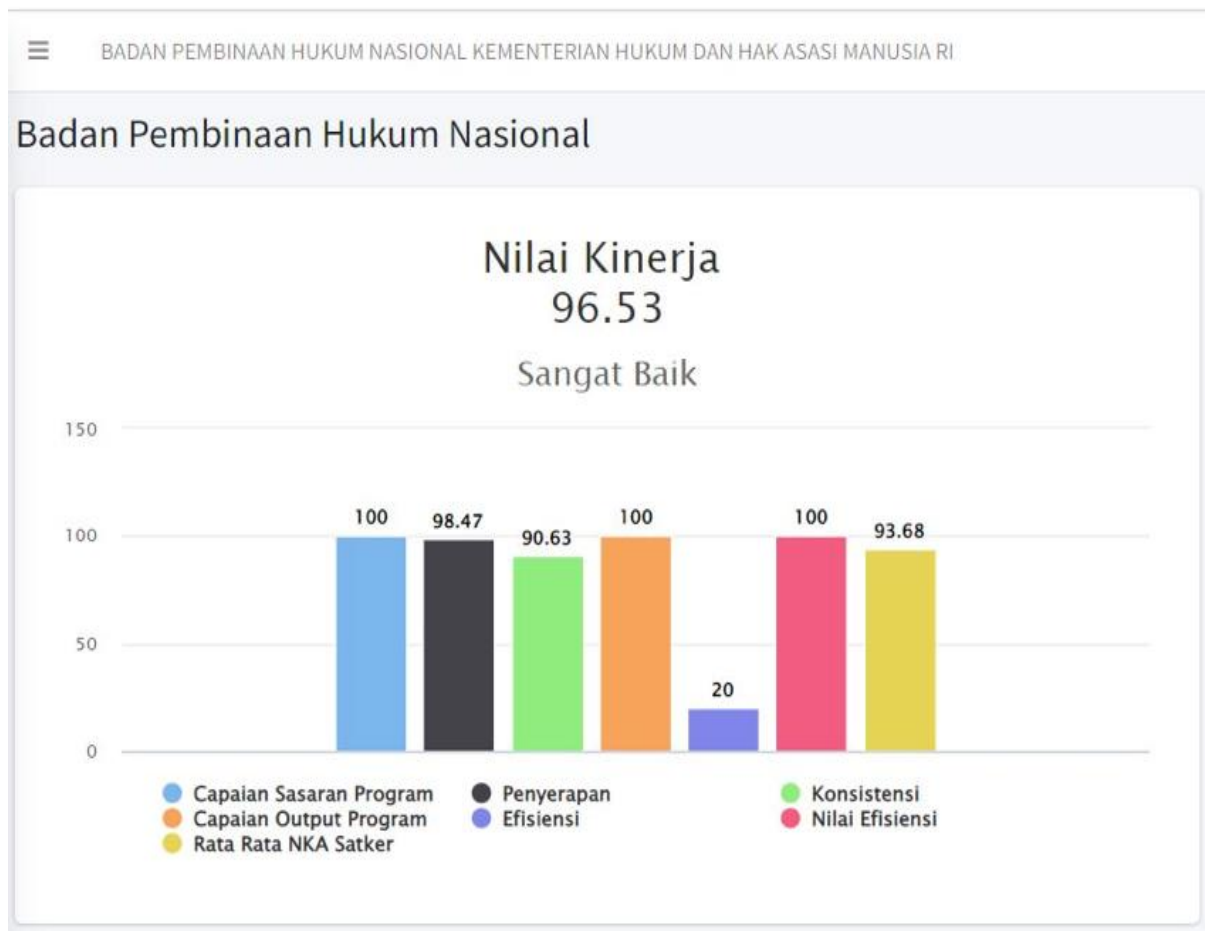
Maka nilai efisiensi kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 2022 adalah sebesar 12,67%. Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa

Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat mengefisiensikan penggunaan anggaran dan memaksimalkan pencapaian target kinerja.

4. *Capaian Kinerja Anggaran*

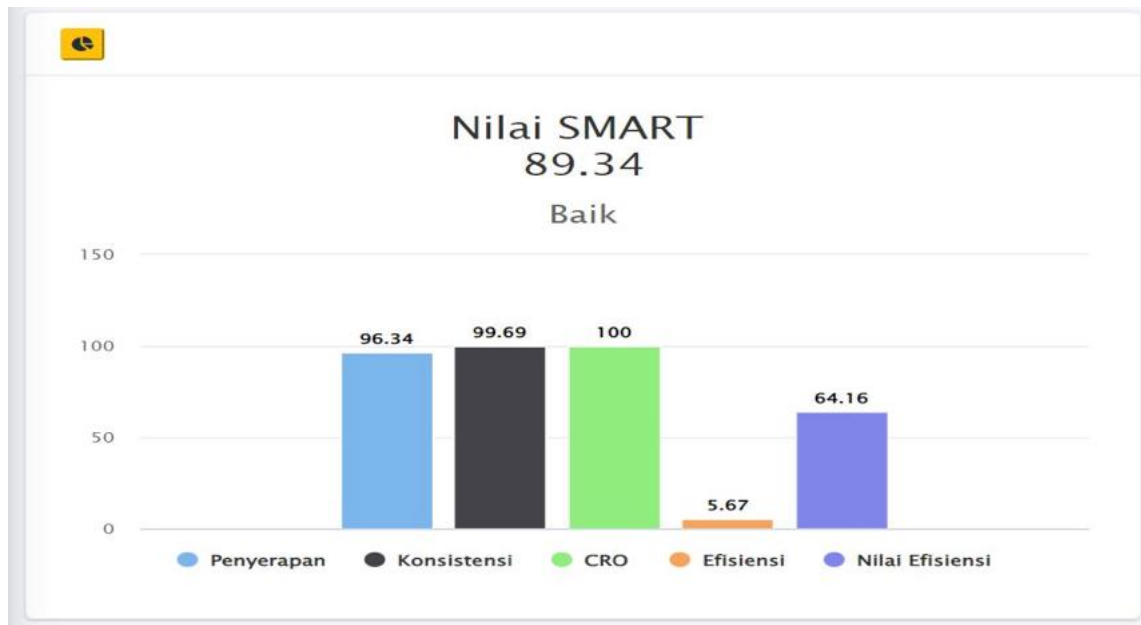
Nilai Capaian Kinerja BPHN berdasarkan Aplikasi SMART DJA adalah :

Nilai BPHN sebagai Unit Eselon I



Gambar 6 Nilai SMART BPHN (UNIT)

Nilai SMART BPHN sebagai Satuan Kerja



Gambar 7 Nilai SMART BPHN (SATKER)

NILAI IKPA BPHN TAHUN 2022

Nilai IKPA BPHN Tahun 2022 adalah 96,97 dengan detail nilai dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM				
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Nilai	100	80,53	100	95,5	100	93,65	100	100	96,97	100%	96,97
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			

Gambar 8 Nilai IKPA BPHN Tahun 2022

5. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Target Kinerja

Target Kinerja merupakan rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pada tanggal 3 Januari 2022 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Dengan diterbitkannya Kepmenkumham tersebut,

diharapkan agar tugas pokok dan fungsi yang ada di Satuan Kerja masing-masing disesuaikan dengan yang terdapat dalam Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Salah satu tujuan ditetapkannya target kinerja adalah meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum sehingga seluruh Unit kerja Eselon I maupun Kantor Wilayah wajib melaksanakan Target Kinerja tersebut. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu Unit Kerja Eselon I mengemban 5 (lima) Target Kinerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan 1 (satu) Target Kinerja diturunkan ke Kantor Wilayah pada Tahun 2022 yakni:

1. Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional 1.175 anggota JDIHN pada Portal jdih.go.id;
2. 796 Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi;
3. 5.984 Kasus/Orang Jumlah Penerima Bantuan Hukum;
4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum;
5. target waktu penyelesaian persyaratan teknis RUU (Penyusunan NA, Penyusunan draft RUU, Pembahasan PAK, Penyelerasan NA, Harmonisasi);
6. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi prolegnas dilingkungan pemerintah, yaitu pemetaan tahap penyelesaian RUU dalam daftar prolegnas Jangka Menengah Prakarsa pemerintah untuk perencanaan tahun prioritas, dan dan target waktu penyelesaian persyaratan teknis RUU (Penyusunan NA, Penyusunan draft RUU, Pembahasan PAK, Penyelerasan NA, Harmonisasi)
7. 70% Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Kantor Wilayah).

dari target kinerja yang telah ditetapkan, seluruhnya telah tercapai begitu juga dengan data dukung yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022. Untuk menggambarkan capaian target kinerja BPHN Tahun 2022 berikut disajikan dalam matriks di bawah ini:

Tabel 56 HASIL VERIFIKASI TARGET KINERJA BPHN TAHUN 2022

NO.	TARGET KINERJA	PEMENUHAN DATA DUKUNG												Ket	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional 1.175 anggota JDIHN pada Portal jdih.go.id	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	

Bantuan Hukum Litigasi pada tahun 2022 sebanyak 9.389 orang Penerima Bantuan Hukum dari target sejumlah 5.984 orang/kasus dengan capaian sebesar 156,90% (Data diambil dari Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum)).

Tabel 58 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

Target	Realisasi	Persentase Capaian
5.984 orang/kasus	9.389 orang/kasus	156,90%

Jumlah permohonan yang telah diterima atau telah proses pencairan anggaran tersebut belum menggambarkan jumlah penerima bantuan hukum, karena permohonan tersebut berdasarkan tahapan pendampingan dengan ketentuan untuk satu paket perkara/kasus Litigasi mencakup 5 (lima) tahapan (Penyidikan/Gugatan, Persidangan Tk. 1, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum yang berdasarkan permohonan Penerima Bantuan Hukum, bisa saja hanya dilaksanakan di tahapan tertentu misalnya di tahapan Penyidikan atau pada tahapan Persidangan Tk.I, sehingga anggaran untuk satu paket yang diperuntukan bagi 1 orang/kasus tersebut dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Bantuan Hukum.

Sedangkan secara realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 99.03% atau sebesar Rp29.629.850.500 dari total pagu sebesar Rp29.920.000.000.

Tabel 59 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi

PAGU	Realisasi	Persentase Realisasi
Rp29.920.000.000	Rp29.629.850.500	99.03%

(2) Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM (kebijakan *Automatic Adjustment*)

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum

(PBH), dimana saat ini di Pengadilan masih memberlakukan kebijakan untuk pelaksanaan sidang dilakukan secara online, termasuk di beberapa Rutan/ Lapas masih memberlakukan pembatasan kunjungan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya layanan yang diberikan PBH terutama terkait kualitas layanan pendampingan yang diberikan. Terkait anggaran Bantuan Hukum Litigasi tahun 2022 ini terdampak *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran) sebesar Rp17.952.000.000 dari total anggaran Bantuan Hukum Litigasi sebesar Rp. 47.872.000.000, sehingga anggaran yang bisa digunakan oleh PBH dalam memberikan layanan Bantuan Hukum hanya sebesar Rp. 29.920.000.000, yang menyebabkan capaian layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2022 hanya sebesar 9.389 Penerima Bantuan Hukum lebih rendah bila dibandingkan Tahun 2021 sebesar 11.990 Penerima Bantuan Hukum.

(3) Permasalahan dan Upaya Percepatan Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah rendahnya realisasi anggaran Bantuan Hukum di awal Tahun Anggaran yang sampai proses perceairan di Kantor Wilayah, meskipun secara jumlah permohonan dalam Sidbankum sudah banyak. Hal ini terjadi karena dari sisi PBH dalam mengajukan permohonan perceairan menunggu sampai dokumen seluruh tahapan selesai dan terkumpul, padahal proses perceairan sesuai Permenkumham Nomor 63/2016 jo. 10/2015 dapat diajukan secara bertahap. Selain itu juga postur anggaran Bantuan Hukum pada tahun sebelumnya kurang fleksibel karena sudah menyebutkan setiap tahapan Bantuan Hukum Litigasi (Penyidikan/ Gugatan, Persidangan Tk. 1, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali). Namun pelaksanaannya cenderung tidak dilaksanakan seluruhnya karena sesuai permintaan Penerima Bankum paling banyak PBH melakukan pendampingan tingkat Penyidikan/ Gugatan dan Persidangan Tk.I, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran bantuan hukum di PBH khususnya untuk tahapan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali tidak maksimal. Hal itu menyebabkan kebutuhan anggaran tahapan Penyidikan/gugatan dan Persidangan Tk. 1 cukup besar, tetapi dari sisi mekanisme keuangan untuk pembayaran tidak membolehkan

pembayaran yang melebihi tahapan sebelum dilakukan revisi. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan dan pencapaian target dan output Bantuan Hukum Litigasi sebagai berikut : 1. Mendorong percepatan pelaksanaan bantuan hukum serta realisasi anggaran Bantuan Hukum, dengan dilakukan penandatanganan kontrak bantuan hukum di Triwulan 1 (bulan Februari 2022) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan Hukum; 2. Melakukan pembinaan kepada seluruh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 dan 14 Maret 2022, guna memberikan pemahaman dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022, dengan mendorong PBH di wilayahnya masing-masing untuk mempercepat pengajuan Permohonan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Hukum dalam Aplikasi Sidbankum, serta mengarahkan Panitia Pengawas Daerah untuk mempercepat proses verifikasi dokumen PBH dan pembuatan BAST agar dapat segera dilakukan pencairan anggaran bantuan hukum;

b) Kegiatan Bantuan Hukum NonLitigasi

(1) Progres Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM yang Mendukung PN-PP-KP RKP 2022

Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi yaitu melakukan pendampingan hukum bagi orang/kelompok orang miskin yang dilakukan di luar. Adapun capaian target pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3.523 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 442,58% dari target sebesar 796 Kelompok masyarakat/Kegiatan (sumber data dari Aplikasi Sidbankum). Satu paket kegiatan Nonlitigasi terdiri 9 (sembilan) kegiatan yaitu Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Negosiasi, Penelitian Hukum, Investigasi Kasus, Pendampingan Diluar Pengadilan, dan Drafting Dokumen. Kegiatan-kegiatan Nonlitigasi tersebut berbeda baik dari jenis layanan maupun dalam mekanisme pelaksanaannya, serta jumlah penerima bantuan dalam setiap layanannya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Nonlitigasi dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum terhadap kegiatan tertentu saja sehingga

pemberian layanan dapat diberikan terhadap lebih dari satu Penerima Bantuan Hukum berdasarkan jenis kegiatan bantuan hukum nonlitigasi yang mohonkan, yang mengakibatkan realisasinya jauh lebih tinggi dibandingkan target Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Tabel 60 Capaian Target Prioritas Nasional RKP Tahun 2022

Target	Realisasi	Persentase Capaian
796 Kelompok masyarakat/Kegiatan	3.523 Kegiatan	442,58%

Sedangkan secara realisasi anggaran berdasarkan Omspan tercapai realisasi sebesar Rp6.311.759.398 (97,65%) dari total pagu sebesar Rp6.463.520.000.

Tabel 61 Realisasi Anggaran Program PN RKP Bantuan Hukum Litigasi

PAGU	Realisasi	Persentase Realisasi
Rp6.463.520.000	Rp6.311.759.398	97,65%

(2) Pengaruh Pandemi COVID-19 pada Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM (kebijakan *Automatic Adjustment*)

Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi merupakan program Bantuan Hukum yang paling banyak terkena dampak Covid-19 dikarenakan mayoritas kegiatan berkaitan dengan pengumpulan massa dan tatap muka. Pada Tahun 2022 Badan Pembinaan Hukum Nasional membuat kebijakan untuk kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan secara online. Terkait anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi tahun 2022 ini terdampak *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran) sebesar 2.029.800.000 dari total anggaran Bantuan Hukum Nonlitigasi sebesar Rp. 8.493.320.000 sehingga anggaran yang bisa digunakan oleh PBH dalam memberikan layanan Bantuan Hukum hanya sebesar Rp. 6.463.520.000, yang menyebabkan capaian layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi Tahun 2022 hanya sebanyak 3.523 kegiatan Bantuan Hukum lebih rendah bila dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 3.608 Penerima Bantuan Hukum.

(3) Permasalahan dan Upaya Percepatan Pencapaian Output Kementerian Hukum dan HAM

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah rendahnya realisasi anggaran Bantuan Hukum di awal Tahun Anggaran, selain masih adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pemberian layanan Bantuan Hukum. Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka percepatan dan pencapaian target dan output Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi untuk kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan secara online/daring.
2. Mendorong percepatan pelaksanaan bantuan hukum serta realisasi anggaran Bantuan Hukum, dengan dilakukannya penandatanganan kontrak bantuan hukum di Triwulan I (bulan Februari 2022) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan Hukum.
3. Melakukan pembinaan kepada seluruh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 dan 14 Maret 2022, guna memberikan pemahaman dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian layanan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022, dengan mendorong PBH di wilayahnya masing-masing untuk mempercepat pengajuan Permohonan Pelaksanaan Bantuan Hukum dan pengajuan Permohonan Pencairan Bantuan Hukum dalam Aplikasi Sidbankum, serta mengarahkan Panitia Pengawas Daerah untuk mempercepat proses verifikasi dokumen PBH dan pembuatan BAST agar dapat segera dilakukan pencairan anggaran bantuan hukum
4. Mengarahkan Kantor Wilayah agar seluruh PBH di wilayahnya jangan menunggu pencairan anggaran bantuan hukum sampai dokumen seluruh tahapan terkumpul, karena sesuai Permenkumham No.63/2016 jo. 10/2015 dapat diajukan secara bertahap;

5. BPHN telah melakukan Pengalihan Anggaran melalui Addendum pada Triwulan II T.A. 2022 bagi PBH yang serapan anggarannya < 50% dan akan dialihkan sisa anggarannya sebesar 70% kepada PBH yang serapannya telah mencapai >50% atau sesuai dengan perkembangan Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPHN selaku Panwaspus dan Kanwil selaku Panwasda, sebagai bentuk reward dan punishment terhadap kinerja PBH;
6. BPHN telah melakukan Pengalihan Anggaran melalui Addendum Tahap II pada Triwulan III dengan ketentuan bagi PBH yang serapan anggarannya memberikan layanan Probono sebagaimana Pasal 22 UU Advokat, serta dengan pengadilan-pengadilan setempat untuk persamaan persepsi konsep bantuan hukum dan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dari penerima layanan yang sama-sama berkategori Orang Miskin.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 berdasarkan rencana strategis dan perjanjian kinerja, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran program dan kegiatan menunjukkan capaian sesuai bahkan melebihi target yang ditetapkan meskipun tidak menonjol. Capaian kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 secara keseluruhan dinyatakan berhasil, dengan melihat capaian rata-rata indikator kinerja utama. Meski terdapat kendala dalam pencapaian target kinerja namun upaya untuk tetap menjaga kinerja terus dilakukan salah satunya melalui monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan tingkat wilayah. Selain itu kegiatan yang biasanya dilakukan melalui tatap muka diubah menjadi daring maupun hybrid. Kebijakan automatic adjustment juga belum disertai dengan penyesuaian perjanjian kinerja hingga akhir tahun anggaran sehingga menimbulkan masalah tersendiri dalam penyusunan laporan capaian kinerja yang berbasis pada perjanjian kinerja. Namun demikian, hal tersebut bisa diatasi dengan pencocokan data melalui laporan realisasi anggaran dari aplikasi OMSPAN maupun SAS DJPB. Kedepannya perencanaan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan yang mengikuti perubahan kebijakan baik kebijakan anggaran maupun program. Selain itu jika kebijakan pemblokiran anggaran masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2023, sudah pasti akan berimbas pada mekanisme kerja dan penetapan target pada indikator kinerja dalam rencana strategis BPHN. Namun demikian BPHN sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi persoalan kebijakan pemblokiran anggaran sehingga kinerja kedepannya tetap dapat berjalan optimal dan target yang ditetapkan optimis dapat tetap tercapai.

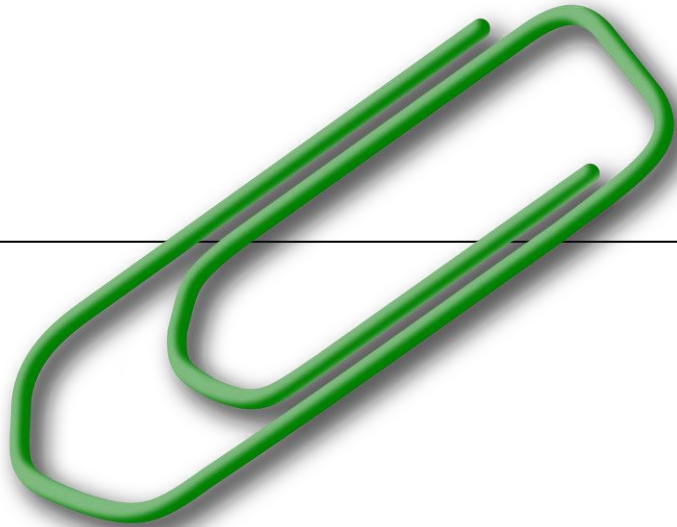
Dengan memperhatikan uraian dan data pada BAB III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan Program kerja Pembinaan Hukum dapat dinyatakan berhasil, karena capaian kinerja rata-rata terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan nilai **Capaian Kinerja Organisasi 122,24%** dengan kategori **Sangat Baik** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 111,24% (kategori sangat baik)
2. Nilai rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Program 103,59% (kategori sangat baik)
3. Nilai rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 151,88% (kategori sangat baik)

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja yang capaiannya lebih dari 100% dengan menambah besaran target kinerja;
2. Menyusun strategi dalam bentuk rencana aksi terhadap target yang tidak tercapai pada tahun 2022;
3. Melakukan penyesuaian perjanjian kinerja pada tahun anggaran yang akan datang jika terjadi perubahan kebijakan anggaran termasuk jika dilakukan refocusing atau automatic adjustment;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres capaian kinerja dan realisasi anggaran untuk mengantisipasi adanya kendala dalam upaya pencapaian tujuan;
5. Memperkuat pemahaman kepada kantor wilayah terhadap target kinerja dalam perjanjian kinerja termasuk terhadap formulasi hitung sehingga kantor wilayah dapat menyusun rencana aksi dalam upaya pencapaian target kinerja.



LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

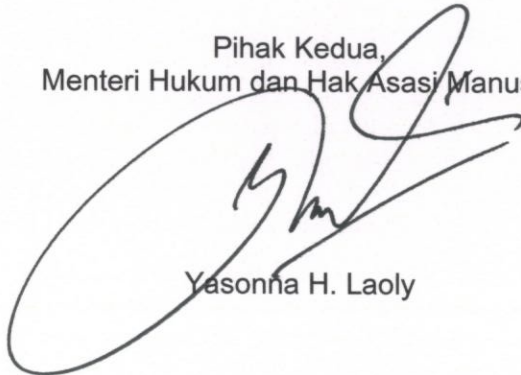
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

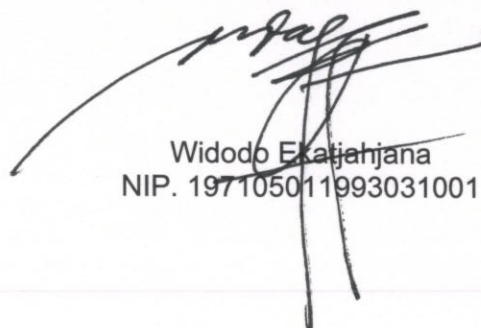
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas perundang-undangan	3,1 Indeks
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61 Indeks
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.6 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	1 dokumen
		3. Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%
2.	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3 dokumen
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3 Naskah Akademik
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7 Penyelarasan Naskah Akademik
3.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66 Kegiatan
4.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
		2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61 Indeks
		3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
5.	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		2. Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%

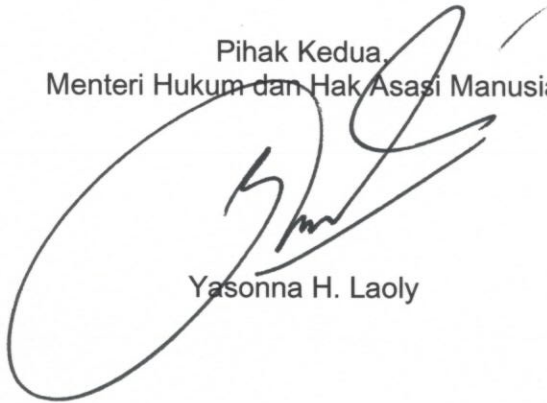
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks
6.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Internal	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi		Rp. 9.285.297.000,-
1.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.918.390.000,-
2.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.627.799.000,-
3.	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 4.739.108.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 71.927.730.000,-
1.	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.752.291.000,-
2.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.820.352.000,-
3.	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 67.355.087.000,-

	Program Dukungan Manajemen	Rp. 40.593.144.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 40.593.144.000,-

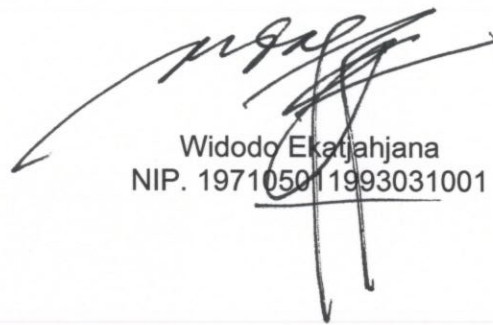
Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekajahjana
NIP. 197105011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

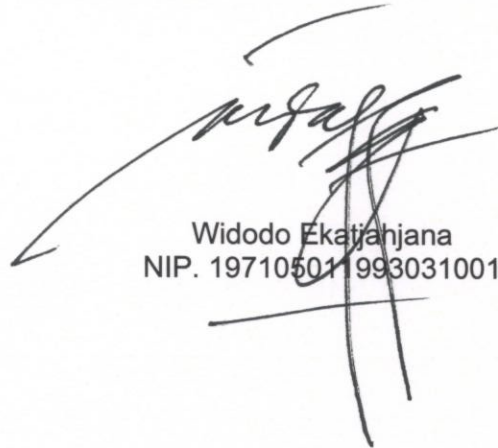
Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Audy Murfi M.Z
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

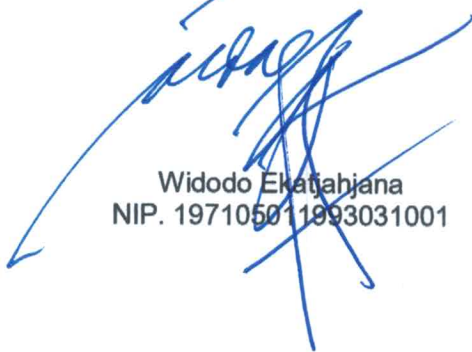
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan BPHN	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Internal	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 29.279.978.000,-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 9.225.050.000,-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 416.124.000,-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 1.671.992.000,-
JUMLAH		Rp. 40.593.144.000,-

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional



Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Audy Murfi M.Z
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2022

Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional

Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djoko Pudjiraharjo
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

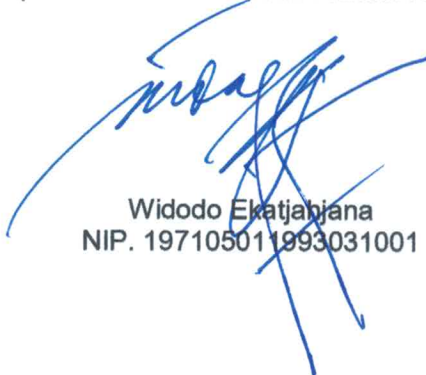
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional



Djoko Pudjiraharjo
NIP. 196209261989031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi Bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Tusi BPHN)	3,15 Indeks

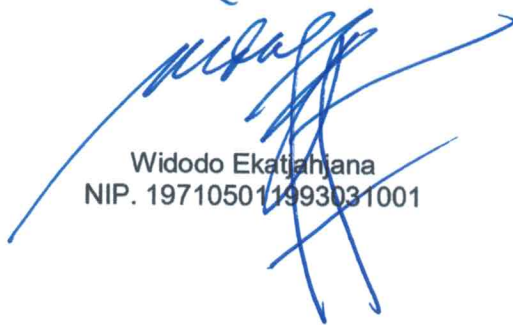
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3 Dokumen
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3 Naskah Akademik
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselarasakan sistematika dan muatannya	7 Penyelarasan Naskah Akademik

No.	Kegiatan	Anggaran
	Perencanaan Hukum Nasional	
1.	Rekomendasi Program Legislasi	Rp. 719.474.000,-
2.	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	Rp. 474.851.000,-
3.	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	Rp. 433.474.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.627.799.000,-

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatanjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional



Djoko Pudjiraharjo
NIP. 196209261989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Djoko Pudjiraharjo
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2022

Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional

Djoko Pudjiraharjo
NIP. 196209261989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunan Hilmy
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

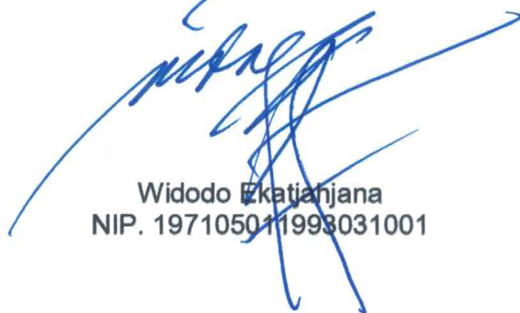
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional



Yunan Hilmy
NIP. 196312151992031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan (Kolaborasi Bersama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan Tusi BPHN)	3,15 Indeks

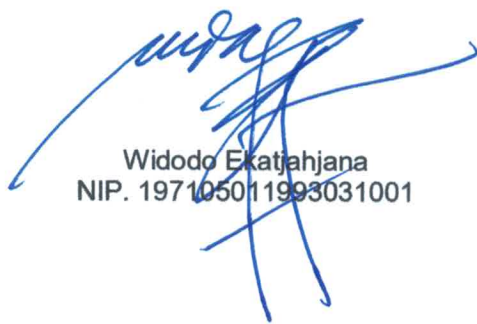
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	1 Dokumen
		3. Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rp. 2.161.085.000,-
1.	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 1.306.085.000,-
2.	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 855.000.000,-
	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Rp. 757.305.000,-
1.	NSPK Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 298.305.000,-
2.	NSPK Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Rp. 459.000.000,-
	JUMLAH	Rp. 2.918.390.000,-

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional



Yunan Hilmy
NIP. 196312151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunan Hilmy

Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2022

Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional

Yunan Hilmy
NIP. 196312151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kartiko Nurintias
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan
Hukum


Widodo Ekatjahjana
NIP. 1971050119930310013


Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		2. Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		
1.	Standarisasi Profesi dan SDM: - Layanan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	Rp. 929.500.000,-
2.	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: - Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum - Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 919.860.000,-
3.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga: - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	Rp. 970.992.000,-
JUMLAH		Rp. 2.820.352.000,-

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan
Hukum


Widodo Ekajahjana
NIP. 1971050119930310013


Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartiko Nurintias
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2022

Kepala Pusat Penyuluhan dan
Bantuan Hukum

Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasmon
Jabatan : Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Yasmon
NIP. 196805201994031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
		2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan	76,61 Indeks
		3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	
1.	Fasilitasi Integrasi JDIHN	Rp. 1.521.980.000,-
2.	Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum	Rp. 230.311.000,-
	Jumlah	Rp. 1.752.291.000,-

Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Yasmon
NIP. 196805201994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasmon

Jabatan : Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 13 Januari 2022

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional

Yasmon
NIP. 196805201994031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yasonna H. Laoly


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	1. Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase Jumlah RUU Prakarsa Pemerintah Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Yang Masuk Ke Dalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan /analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional	1 dokumen
		3. Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%
2.	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3 dokumen
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3 Naskah Akademik
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7 Penyelarasan Naskah Akademik
3.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	66 Kegiatan
4.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	25%
		2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan	77 (Indeks)
		3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	25%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		2. Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
6.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
7.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Internal	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi		Rp. 9.074.297.000,-
1.	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.737.390.000,-
2.	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 1.597.799.000,-
3.	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 4.739.108.000,-

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Rp. 72.433.730.000,-
1.	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.702.291.000,-
2.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.770.352.000,-
3.	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 67.961.087.000,-
Program Dukungan Manajemen		Rp. 38.933.593.000,-
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 38.933.593.000,-
Jumlah Total		Rp. 120.441.620.000,-

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yasonna H. Laoly

Widodo Ekadjahjana
NIP. 197105011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana ✓
NIP. 197105011993031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunan Hilmy
Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Yunan Hilmy
NIP. 196312151992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

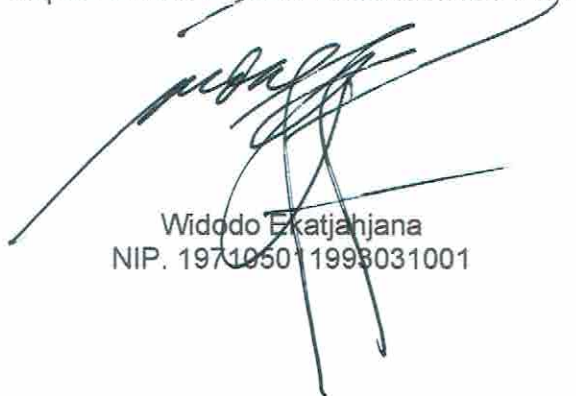
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan 2. Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional 3. Persentase JF Analis Hukum yang memenuhi standar kompetensi	21% 1 dokumen 80%

No.	Kegiatan	Anggaran
	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	Rp. 2.737.390.000,-
	Peraturan Presiden	Rp. 550.000.000,-
1.	Rancangan Peraturan Presiden Mengenai Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 550.000.000,-
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rp. 1.587.390.000,-
1.	Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Rp. 1.037.390.000,-
2.	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	Rp. 550.000.000,-
	Standarisasi Profesi dan SDM	Rp. 600.000.000,-
1.	Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Pusat dan Daerah)	Rp. 600.000.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekadjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional



Yunan Hilmy
NIP. 196312151992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunan Hilmy

Jabatan : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Pusat Analisis dan
Evaluasi Hukum Nasional

Yunan Hilmy
NIP. 196312151992031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Constantinus Kristomo
Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional


Constantinus Kristomo
NIP. 197404111999031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

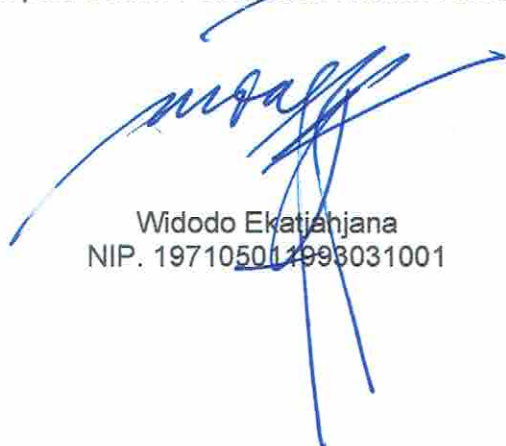
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	1. Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda	3 Dokumen
		2. Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang	3 Naskah Akademik
		3. Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya	7 Penyelarasan Naskah Akademik

No.	Kegiatan	Anggaran
	Perencanaan Hukum Nasional	Rp. 1.597.799.000,-
	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	Rp. 1.597.799.000,-
1.	Rekomendasi Program Legislasi	Rp. 689.474.000,-
2.	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	Rp. 474.851.000,-
3.	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	Rp. 433.474.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatiandjaja
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional



Constantinus Kristomo
NIP. 197404111999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Constantinus Kristomo

Jabatan : Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Pusat Perencanaan
Hukum Nasional

Constantinus Kristomo
NIP. 197404111999031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofli

Jabatan : Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana

Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197195011993031001


Nofli
NIP. 196903091992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

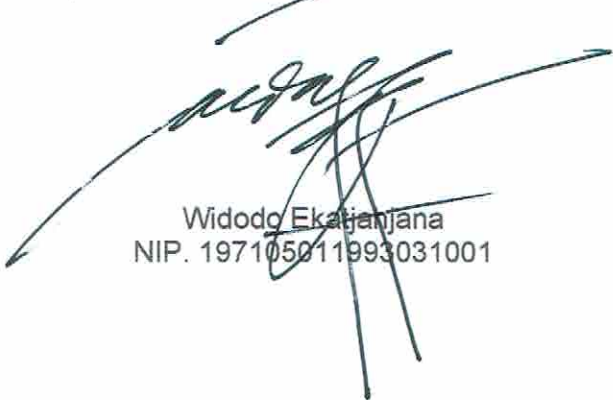
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	1. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	25%
2. Indeks kepuasan layanan perpustakaan		77 (Indeks)	
3. Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		25%	

No.	Kegiatan	Anggaran
	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	Rp. 1.702.291.000,-
	Data dan Informasi Publik	Rp. 1.702.291.000,-
1.	Fasilitasi Integrasi JDIHN	Rp. 1.429.371.000,-
2.	Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum	Rp. 272.920.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatanjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional


Nofli
NIP. 196903091992031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofli

Jabatan : Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional

Nofli
NIP. 196903091992031002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartiko Nurintias
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan
Bantuan Hukum


Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70,0%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

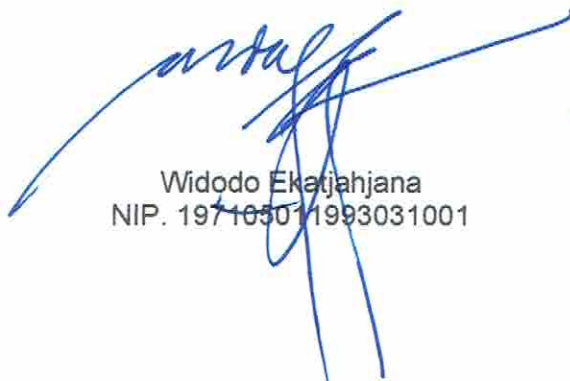
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat.	1. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		2. Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Kegiatan	Anggaran
	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 2.770.352.000,-
	Standarisasi Profesi dan SDM	Rp. 813.324.000,-
1.	Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	Rp. 813.324.000,-
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Rp. 906.860.000,-
1.	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	Rp. 598.488.000,-
2.	Layanan Penyuluhan Hukum	Rp. 308.372.000,-
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp. 1.050.168.000,-
1.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Rp. 1.050.168.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekajahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Pusat Penyuluhan dan
Bantuan Hukum



Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kartiko Nurintias

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Kepala Pusat Penyuluhan dan
Bantuan Hukum

Kartiko Nurintias
NIP. 196308161983031002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Audy Murfi M.Z
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

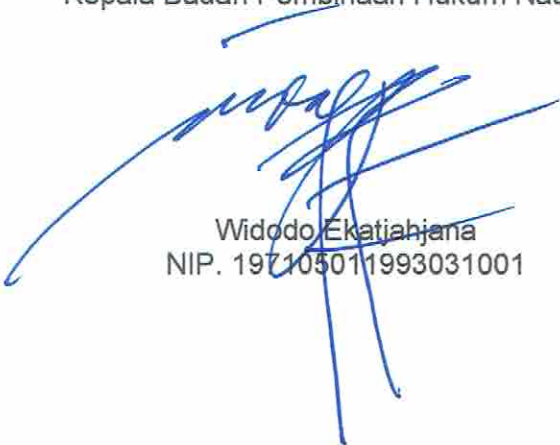
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197103011993031001


Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

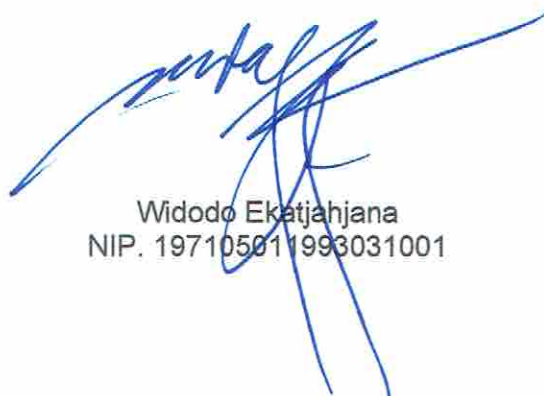
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Internal	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	Rp. 38.933.593.000,-
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 29.226.803.000,-
1.	Layanan BMN	Rp. 248.151.000,-
2.	Layanan Hubungan Masyarakat	Rp. 525.967.000,-
3.	Layanan Protokoler	Rp. 100.000.000,-
4.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp. 182.218.000,-
5.	Layanan Umum	Rp. 269.190.000,-
6.	Layanan Data dan Informasi	Rp. 146.861.000,-
7.	Layanan Perkantoran	Rp. 27.754.416.000,-
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 7.652.728.000,-
1.	Layanan Sarana Internal	Rp. 1.840.728.000,-
2.	Layanan Prasarana Internal	Rp. 5.812.000.000,-
	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 382.070.000,-
1.	Layanan Manajemen SDM	Rp. 382.070.000,-
	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 1.671.992.000,-
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 290.000.000,-
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp. 249.691.000,-
3.	Layanan Manajemen Keuangan	Rp. 357.725.000,-
4.	Layanan Reformasi Kinerja	Rp. 328.543.000,-
5.	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp. 446.033.000,-

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional



Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Audy Murfi M.Z

Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2023

Sekretaris Badan Pembinaan
Hukum Nasional

Audy Murfi M.Z
NIP. 196303271989031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			4,546,189,000	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			2,918,390,000	
1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]	201.0 Rekomendasi Kebijakan		2,161,085,000	
1611.ABD.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	200.0 Rekomendasi Kebijakan		1,306,085,000	
051	Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum			9,520,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,520,000	
521211	Belanja Bahan			5,520,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya konsumsi Snack rapat [10 org x 2 kali x 4 bid]	80.0 OK	22,000	1,760,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [10 org x 2 kali x 4 bid]	80.0 OK	47,000	3,760,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			4,000,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya transport lokal [5 org x 2 kali x 4 bid]	40.0 OK	100,000	4,000,000	
052	Analisis dan Evaluasi Hukum			1,159,665,000	U
A	Pembinaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah			89,285,000	
521211	Belanja Bahan			14,792,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan AE di Kanwil [25 org x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan AE di Kanwil [25 org x 4 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	1,726,000	3,452,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [30 org x 2 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [30 org x 2 kali]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
	- Biaya Pembuatan Sertifikat	60.0 PKT	5,000	300,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			1,345,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,345,000	1,345,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			5,148,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [13 org x 2 kali x 2 kgt]	52.0 OK	99,000	5,148,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			68,000,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Tiket PP [5 org x 2 kali]	10.0 OK	3,000,000	30,000,000	
	- Biaya uang harian [5 org x 3 hari x 2 kali]	30.0 OH	400,000	12,000,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [5 org x 2 kali x 2 kgt]	20.0 OK	250,000	5,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [5 org x 2 kali x 2 kgt]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
	- Biaya penginapan [5 org x 2 hari x 2 kali]	20.0 OH	900,000	18,000,000	
B	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum			844,680,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			77,904,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	4.0 PKT	4,301,000	17,204,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [15 org x 80 kali]	1200.0 OK	22,000	26,400,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [15 org x 40 kali]	600.0 OK	47,000	28,200,000	
	- Biaya pembuatan backdrop [1 paket x 4 kgt]	4.0 PKT	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya pembuatan spanduk [1 paket x 4 kgt]	4.0 PKT	300,000	1,200,000	
	- Biaya Pembuatan Sertifikat	180.0 PKT	5,000	900,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,080,000	RM
	- Biaya Akun E-Clis [32 paket x 11 bulan]	352.0 PKT	40,000	14,080,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			16,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK [1 pkt x 4 bid]	4.0 PKT	4,000,000	16,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			120,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal [40 org x 3 jam]	120.0 OJ	1,000,000	120,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			30,096,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [38 org x 2 kali x 4 kgt]	304.0 OK	99,000	30,096,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			326,400,000	RM
	- Tiket PP [12 org x 4 kali]	48.0 OK	3,000,000	144,000,000	
	- Biaya uang harian [12 org x 3 hari x 4 kali]	144.0 OH	400,000	57,600,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [12 org x 2 kali x 4 kgt]	96.0 OK	250,000	24,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [12 org x 2 kali x 4 kgt]	96.0 OK	150,000	14,400,000	
	- Biaya penginapan [12 org x 2 hari x 4 kali]	96.0 OH	900,000	86,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			16,000,000	RM
	- Biaya transport lokal [16 org x 10 kali]	160.0 OK	100,000	16,000,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			244,200,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING REKOMENDASI HASIL AEH :			244,200,000	
	- Uang harian paket meeting [15 org x 2 hari x 12 kgt]	360.0 OH	150,000	54,000,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon I [1 org x 12 paket]	12.0 OP	1,100,000	13,200,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon II [1 org x 12 paket]	12.0 OP	1,100,000	13,200,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon III kebawah [13 org x 12 paket]	156.0 OP	900,000	140,400,000	
	- Biaya Transport Darat [13 org x 12 kali]	156.0 OK	150,000	23,400,000	
C	<i>Fasilitas dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum</i>			225,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			36,300,000	RM
	- Biaya pembuatan spanduk [1 pkt x 5 kgt]	5.0 PKT	300,000	1,500,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Penyusunan dan Penetapan Rekomendasi hasil Inpassing [25 org x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Penyusunan dan Penetapan Rekomendasi hasil Inpassing [25 org x 4 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 pkt x 6 kgt]	6.0 PKT	1,200,000	7,200,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Koordinasi Tim [25 org x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan Koordinasi Tim [25 org x 4 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Seleksi Administrasi terkait Inpassing [25 org x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Seleksi Administrasi terkait Inpassing [25 org x 4 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Koordinasi Penyusunan Soal Uji Kompetensi [25 org x 4 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Koordinasi Penyusunan Soal Uji Kompetensi [25 org x 4 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,150,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,150,000	1,150,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,000,000	RM
	- Honor narasumber eksternal kegiatan Konsinyering [2 org x 3 jam x 2 kgt]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,400,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Luar BPHN [10 org x 3 kali]	30.0 OK	150,000	4,500,000	
	- Biaya Transport Lokal [13 org x 3 kali]	39.0 OK	100,000	3,900,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			167,850,000	RM
	> BIAJA PERJALANAN KONSINYERING :			167,850,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Esselon I dan II [3 org x 2 pkt x 3 kgt]	18.0 OP	1,100,000	19,800,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Esselon III [20 org x 2 pkt x 3 kgt]	120.0 OP	900,000	108,000,000	
	- Uang Harian paket fullboard [23 org x 3 hari x 3 kgt]	207.0 OH	150,000	31,050,000	
	- Biaya Transport [20 org x 1 kali x 3 kgt]	60.0 OK	150,000	9,000,000	
053	Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum			136,900,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			136,900,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,900,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	4.0 PKT	2,000,000	8,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [50 org x 2 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [50 org x 2 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal [2 org x 3 jam x 4 kgt]	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya transport lokal [5 org x 4 kali]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			96,000,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING PERUMUSAN REKOMENDASI AEH :			96,000,000	
	- Paket Meeting Fullboard [15 org x 4 pkt]	60.0 OP	1,000,000	60,000,000	
	- Uang Harian paket fullboard [60 org x 3 hari]	180.0 OH	150,000	27,000,000	
	- Uang Harian paket fullboard [60 org x 1 kali]	60.0 OK	150,000	9,000,000	
1611.ABD.002	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	1.0 Rekomendasi		855,000,000	
051	Persiapan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional			170,075,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			170,075,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			71,540,000	RM
	- Biaya penerbitan jurnal ilmiah [150 pkt x 3 ter]	450.0 PKT	130,000	58,500,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [16 org x 10 kali]	160.0 OK	22,000	3,520,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [16 org x 10 kali]	160.0 OK	47,000	7,520,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.139-Jakarta V)			89,100,000	RM
	- Honor mitra bestari [3 org x 3 ter]	9.0 OTER	1,500,000	13,500,000	
	- Honor Dewan Redaksi Luar BPHN [2 org x 3 ter]	6.0 OTER	1,500,000	9,000,000	
	- Honor Penulis JRV [9 org x 15 hlmn x 3 ter]	405.0 hlmn	120,000	48,600,000	
	- Honor Penulis JRV [60 org x 5 hlmn]	300.0 hlmn	60,000	18,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			5,000,000	RM
	- Biaya Pengiriman JRV	150.0 PKT	20,000	3,000,000	
	- Biaya DOI (Digital Object Identifier) melalui RJI	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			1,435,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,435,000	1,435,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [10 org x 3 kali]	30.0 org	100,000	3,000,000	
052	Pembahasan Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional			447,675,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			447,675,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			36,675,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan Rapat Koordinasi [40 org x 1 kali]	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan Rapat Koordinasi [40 org x 1 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Pokja DPHN [25 org x 6 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Pokja DPHN [25 org x 6 kali]	150.0 OK	47,000	7,050,000	
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan FGD DPHN [25 org x 3 kali]	75.0 OK	22,000	1,650,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan FGD DPHN [25 org x 3 kali]	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan Diskusi Publik di Kanwil [55 org x 2 kali]	110.0 OK	22,000	2,420,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan Diskusi Publik di Kanwil [55 org x 2 kali]	110.0 OK	47,000	5,170,000	
	- Biaya pembuatan spanduk [1 pkt x 6 kgt]	6.0 PKT	300,000	1,800,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan [1 pkt x 6 kgt]	6.0 PKT	1,500,000	9,000,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			38,500,000	RM
	- Honor Ketua Pokja [1 org x 10 bln]	10.0 OB	850,000	8,500,000	
	- Honor Anggota Pokja [4 org x 10 bln]	40.0 OB	750,000	30,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			600,000	RM
	- Biaya Pengiriman Hasil-Hasil Kegiatan DPHN	30.0 PKT	20,000	600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,284,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,284,000	1,284,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			63,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan FGD DPHN [3 org x 3 jam x 3 kgt]	27.0 OJ	1,000,000	27,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan Diskusi Publik [5 org x 3 jam x 2 kgt]	30.0 OJ	1,000,000	30,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan Peluncuran Buku DPHN [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,316,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [21 org x 2 kali x 2 kgt]	84.0 OK	99,000	8,316,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			277,800,000	RM
	> PERJADIN DISKUSI PUBLIK :			277,800,000	
	- Tiket PP [21 orang x 2 kali]	42.0 OK	3,000,000	126,000,000	
	- Biaya uang harian [20 org x 3 hari x 2 kgt]	120.0 OH	400,000	48,000,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [21 org x 2 kali x 2 kgt]	84.0 OK	250,000	21,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [21 org x 2 kali x 2 kgt]	84.0 OK	200,000	16,800,000	
	- Biaya penginapan Gol. IV [6 org x 2 hari x 2 kgt]	24.0 OH	1,000,000	24,000,000	
	- Biaya penginapan Gol. III [15 org x 2 hari x 2 kgt]	60.0 OH	700,000	42,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			21,500,000	RM
	- Biaya transport [12 org x 4 kali]	48.0 OK	100,000	4,800,000	
	- Biaya transport lokal Luar BPHN [12 org x 4 kali]	48.0 OK	150,000	7,200,000	
	- Biaya transport lokal Luar BPHN kegiatan Diskusi Publik [25 org x 2 kali]	50.0 OK	150,000	7,500,000	
	- Biaya transport lokal kegiatan Diskusi Publik [10 org x 2 kali]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
053	Penyusunan Rekomendasi Dokumen Pembangunan Hukum Nasional			237,250,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			237,250,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			23,450,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan buku DPHN	100.0 PKT	200,000	20,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Pokja DPHN [25 org x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Pokja DPHN [25 org x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan DPHN [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
	- Honor narasumber Eksternal kegiatan Konsinyering Peluncuran Buku DPHN [3 org x 3 jam x 1 kgt]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,800,000	RM
	- Biaya transport lokal [19 org x 2 kali]	38.0 OK	100,000	3,800,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			195,000,000	RM
	KONSINYERING DALAM RANGKA FINALISASI			120,600,000	
	> PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL :				
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [12 org x 2 pkt x 1 kgt]	24.0 OP	1,000,000	24,000,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah [38 org x 2 pkt x 1 kgt]	76.0 OP	900,000	68,400,000	
	- Uang Harian paket fullboard [50 org x 3 hari x 1 kgt]	150.0 OH	150,000	22,500,000	
	- Biaya Transport [38 org x 1 kali x 1 kgt]	38.0 OK	150,000	5,700,000	
	KONSINYERING DALAM RANGKA PELUNCURAN			74,400,000	
	> BUKU DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL :				
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [12 org x 2 pkt x 1 kgt]	24.0 OP	1,000,000	24,000,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah [18 org x 2 pkt x 1 kgt]	36.0 OP	900,000	32,400,000	
	- Uang Harian paket fullboard [30 org x 3 hari x 1 kgt]	90.0 OH	150,000	13,500,000	
	- Biaya Transport [30 org x 1 kali x 1 kgt]	30.0 OK	150,000	4,500,000	
1611.AFA	<u>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line]</u>	2.0 NSPK		757,305,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1611.AFA.001	NSPK Analis dan Evaluasi Hukum	1.0 NSPK		298,305,000	U
051	Pengembangan Instrumen/Metode Analis Hukum Berbasis Teknologi (EVADATA)			11,975,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			11,975,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp. 49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi Snack rapat [15 org x 5 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat [15 org x 5 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya pembuatan spanduk			7,975,000 1,650,000 3,525,000 2,500,000 300,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	75.0 OK 75.0 OK 1.0 PKT 1.0 PKT	22,000 47,000 2,500,000 300,000	1,000,000 1,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [3 org x 5 kali] - Biaya Transport Lokal Luar BPHN [2 org x 5 kali]			3,000,000 1,500,000 1,500,000	RM
052	Penyusunan Pedoman Evaluasi Hukum			203,660,000	U
A	<i>Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan</i>			<i>160,860,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi Snack rapat [24 org x 5 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat [24 org x 5 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan			11,644,000 2,640,000 5,640,000 3,364,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Ketua [1 org x 9 bln] - Honor Anggota [3 org x 9 bln]			27,900,000 7,650,000 20,250,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor narasumber Eksternal [2 org x 3 jam x 2 kgt]			12,000,000 12,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Antigen [21 org x 2 kali x 2 kgt]			8,316,000 8,316,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BIAYA PERJALANAN KONSINYERING : - Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [2 org x 2 pkt x 2 kgt] - Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah [19 org x 2 pkt x 2 kgt] - Uang Harian paket fullboard [21 org x 3 hari x 2 kgt] - Biaya Transport [19 org x 1 kali x 2 kgt]			101,000,000 8,000,000 68,400,000 18,900,000 5,700,000	RM
B	<i>Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap Produk Hukum</i>			<i>42,800,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,900,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [20 org x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [20 org x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			27,900,000	RM
	- Honor Ketua [1 org x 9 bln]	9.0 OB	850,000	7,650,000	
	- Honor Anggota [3 org x 9 bln]	27.0 OB	750,000	20,250,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
053	Sosialisasi/Diseminasi			79,540,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			79,540,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,046,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat Persiapan [27 org x 1 kali]	27.0 OK	22,000	594,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Persiapan [27 org x 1 kali]	27.0 OK	47,000	1,269,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	2,883,000	2,883,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor narasumber eksternal dari luar BPHN [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,524,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [38 org x 2 kali x 1 kgt]	76.0 OK	99,000	7,524,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,970,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING :			60,970,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [3 org x 1 pkt x 1 kgt]	3.0 OP	1,100,000	3,300,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III [35 org x 1 pkt x 1 kgt]	35.0 OP	822,000	28,770,000	
	- Uang Harian paket fullboard [38 org x 2 hari x 1 kgt]	76.0 OH	150,000	11,400,000	
	- Biaya Transport [35 org x 1 kali x 1 kgt]	35.0 OK	500,000	17,500,000	
054	Pelaporan			3,130,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,130,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,130,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan	10.0 PKT	175,000	1,750,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [20 org x 1 kali]	20.0 OK	22,000	440,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [20 org x 1 kali]	20.0 OK	47,000	940,000	
1611.AFA.002	NSPK Jabatan Fungsional Analisis Hukum	1.0 NSPK		459,000,000	
051	Penyusunan Pedoman JF Analisis Hukum			280,090,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>280,090,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			17,412,000	RM
	- Biaya pembuatan spanduk [1 pkt x 5 kgt]	5.0 PKT	300,000	1,500,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,560,000	1,560,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Koordinasi Pokja [20 org x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Koordinasi Pokja [20 org x 6 kali]	120.0 OK	47,000	5,640,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat konsultasi dengan Narasumber [22 org x 4 kali]	88.0 OK	22,000	1,936,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat konsultasi dengan Narasumber [22 org x 4 kali]	88.0 OK	47,000	4,136,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			546,000	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	546,000	546,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			48,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal [2 org x 3 jam x 4 kgt]	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	
	- Honor narasumber Eksternal kegiatan FGD [2 org x 3 jam x 4 kgt]	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,940,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [10 Orang x 3 Kgt x 2 Kali]	60.0 OK	99,000	5,940,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			208,192,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING DI JAWA BARAT :			208,192,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [3 org x 2 pkt x 4 kgt]	24.0 OP	1,100,000	26,400,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III [17 org x 2 pkt x 4 kgt]	136.0 OP	822,000	111,792,000	
	- Uang Harian paket fullboard [20 org x 3 hari x 4 kgt]	240.0 OH	150,000	36,000,000	
	- Biaya Transport [17 org x 1 kali x 4 kgt]	68.0 OK	500,000	34,000,000	
052	Sosialisas/Diseminasi			176,470,000	
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>176,470,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,982,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	2,642,000	2,642,000	
	- Biaya konsumsi Snack Diseminasi di Kanwil [35 org x 4 kali]	140.0 OK	22,000	3,080,000	
	- Biaya konsumsi Makan Diseminasi di Kanwil [35 org x 4 kali]	140.0 OK	47,000	6,580,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Persiapan [20 org x 1 kali]	20.0 OK	22,000	440,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Persiapan [20 org x 1 kali]	20.0 OK	47,000	940,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor narasumber eksternal dari luar BPHN [3 org x 2 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,870,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [6 Orang x 1 Kgt x 2 Kali]	12.0 OK	495,000	5,940,000	
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [35 org x 2 kali x 1 kgt]	70.0 OK	99,000	6,930,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			84,270,000	RM
	> JAWA TIMUR :			19,830,000	
	- Tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,500,000	7,500,000	
	- Biaya uang harian [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	190,000	1,140,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	1,000,000	6,000,000	
	> BALI :			22,020,000	
	- Tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	3,100,000	9,300,000	
	- Biaya uang harian [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	150,000	900,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	1,000,000	6,000,000	
	> KALIMANTAN BARAT :			20,760,000	
	- Tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,800,000	8,400,000	
	- Biaya uang harian [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	140,000	840,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	1,100,000	6,600,000	
	> SUMATERA BARAT :			21,660,000	
	- Tiket PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	2,800,000	8,400,000	
	- Biaya uang harian [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 org x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	190,000	1,140,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	1,200,000	7,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			59,348,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING :			59,348,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [3 org x 1 pkt x 1 kgt]	3.0 OP	1,100,000	3,300,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III [34 org x 1 pkt x 1 kgt]	34.0 OP	822,000	27,948,000	
	- Uang Harian paket fullboard [37 org x 2 hari x 1 kgt]	74.0 OH	150,000	11,100,000	
	- Biaya Transport [34 org x 1 kali x 1 kgt]	34.0 OK	500,000	17,000,000	
053	Pelaporan			2,440,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,440,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			2,440,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan	10.0 PKT	175,000	1,750,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [10 org x 1 kali]	10.0 OK	22,000	220,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [10 org x 1 kali]	10.0 OK	47,000	470,000	
1613	Perencanaan Hukum Nasional			1,627,799,000	
1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]	13.0 Rekomendasi Kebijakan		1,627,799,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1613.ABD.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT Rekomendasi Program Legislasi	3.0 Rekomendasi Kebijakan		719,474,000	
051	Penyusunan Program Legislasi Nasional			345,377,000	U
A	Pelaksana Tugas Pengarah			34,495,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			3,600,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,600,000	3,600,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			3,033,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,033,000	3,033,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			27,862,000	RM
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [17 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	34.0 OH	150,000	5,100,000	
	- Biaya Transport [17 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	17.0 OK	500,000	8,500,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Eselon II [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Eselon III ke bawah [16 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	16.0 OP	822,000	13,152,000	
B	Persiapan Penyusunan Prolegnas			160,130,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,300,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 Paket x 2 Kgt]	2.0 PKT	4,200,000	8,400,000	
	> Rapat Antar Kementerian/Lembaga			3,450,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [50 orang x 1 kgt]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [50 orang x 1 kgt]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	> Rapat Inventarisasi RUU			1,725,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 1 kali]	25.0 OK	22,000	550,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 1 kgt x 1 kali]	25.0 OK	47,000	1,175,000	
	> Rapat koordinasi dengan tenaga ahli Baleg, DPD dan K/L			1,725,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 1 kali]	25.0 OK	22,000	550,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt x 1 kali]	25.0 OK	47,000	1,175,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,744,000	RM
	- Biaya pemeriksaan RT-PCR [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	525,000	3,150,000	
	- Biaya Rapid Tes Antigen [3 ORANG x 2 KALI]	6.0 OK	99,000	594,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			65,412,000	RM
	- Biaya penggantian tiket pp [1 org x 6 kali]	6.0 OK	4,000,000	24,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan [1 ORANG x 6 KALI x 2 HARI]	12.0 OH	800,000	9,600,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 6 KALI x 3 HARI]	18.0 OH	400,000	7,200,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 6 KALI x 2 PP]	12.0 OK	256,000	3,072,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [1 ORANG x 6 KALI x 2 PP]	12.0 OK	175,000	2,100,000	
	> Jawa Barat			9,650,000	
	- BiayaTransport pp [1 org x 5 KGT x 2 Kali]	10.0 OK	250,000	2,500,000	
	- Biaya hotel/penginapan [1 ORANG x 5 KALI x 1 HARI]	5.0 OH	570,000	2,850,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 5 KALI x 2 HARI]	10.0 OH	430,000	4,300,000	
	> Banten			9,790,000	
	- Biaya Transport PP [1 org x 5 KGT x 2 Kali]	10.0 OK	250,000	2,500,000	
	- Biaya hotel/penginapan [1 ORANG x 5 KALI x 1 HARI]	5.0 OH	718,000	3,590,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 2 HARI x 5 KGT]	10.0 OH	370,000	3,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,950,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 45 KALI]	45.0 OK	100,000	4,500,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 ORANG x 45 KALI]	45.0 OK	210,000	9,450,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			55,724,000	RM
	> JAWA BARAT :			55,724,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [17 org x 2 hari x 2 kgt]	68.0 OH	150,000	10,200,000	
	- Biaya transport PP [17 org x 1 kali x 2 kgt]	34.0 OK	500,000	17,000,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon II [1 org x 1 pkt x 2 kgt]	2.0 OP	1,110,000	2,220,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon III ke bawah [16 org x 1 pkt x 2 kgt]	32.0 OP	822,000	26,304,000	
C	<u>Hearing Konsep Prolegnas</u>			127,792,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			21,834,000	RM
	> SUMATERA BARAT :			15,807,000	
	- Biaya Seminar Kit Kegiatan Hearing Pendapat [50 Pkt x 1 Kgt]	50.0 Paket	150,000	7,500,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [50 org x 1 kali]	50.0 OK	45,000	2,250,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [50 org x 1 kali]	50.0 OK	17,000	850,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	2.0 PKT	300,000	600,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	4,607,000	4,607,000	
	> JAKARTA :			6,027,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [30 org x 1 kali]	30.0 OK	47,000	1,410,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 org x 1 kali]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	2.0 PKT	300,000	600,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	3,357,000	3,357,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			22,000,000	RM
	> JAKARTA :			16,000,000	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [8 orang x 1 kgt x 2 jam]	16.0 OJ	1,000,000	16,000,000	
	> SUMATERA BARAT :			6,000,000	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [2 orang x 1 kgt x 3 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,500,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan RT-PCR [10 Orang x 2 Kali]	20.0 OK	525,000	10,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			66,458,000	RM
	> SUMATERA BARAT :			66,458,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI]	2.0 OH	1,756,000	3,512,000	
	- Biaya penggantian tiket pp [10 org x 1 kali]	10.0 OK	2,952,000	29,520,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III [1 ORANG x 2 HARI]	2.0 OH	1,353,000	2,706,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV kebawah [8 ORANG x 2 HARI]	16.0 OH	650,000	10,400,000	
	- Biaya uang harian [10 ORANG x 3 HARI]	30.0 OH	380,000	11,400,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [10 ORANG x 2 KALI]	20.0 OK	256,000	5,120,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [10 ORANG x 2 KALI]	20.0 OK	190,000	3,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Peserta [40 ORANG x 1 KALI]	40.0 OK	150,000	6,000,000	
	- Biaya transport lokal panitia daerah	10.0 OK	100,000	1,000,000	
<i>D</i>	<i>Forum Koordinasi Penyusunan Prolegnas dengan Baleg DPR</i>			22,960,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,040,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	1,520,000	3,040,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,178,000	RM
	- Biaya Rapid Antigen [11 Orang x 2 Kali]	22.0 OK	99,000	2,178,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			17,742,000	RM
	> JAKARTA :			17,742,000	
	- Biaya uang representasi Es I [1 org x 1 hari]	1.0 OH	200,000	200,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon I/setara [1 ORANG x 1 KALI x 1 HARI]	1.0 OH	4,000,000	4,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/Setara [1 ORANG x 1 KALI x 1 HARI]	1.0 OH	1,400,000	1,400,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/Setara [1 ORANG x 1 KALI x 1 HARI]	1.0 OH	992,000	992,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV ke bawah [8 ORANG x 1 KALI x 1 HARI]	8.0 OH	610,000	4,880,000	
	- Biaya penggantian taksi	11.0 OK	150,000	1,650,000	
	- Biaya uang harian (11 org x 2 hari)	22.0 OH	210,000	4,620,000	
052	Penyusunan Program Penyusunan PP dan PERPRES			233,678,000	
<i>A</i>	<i>Inventarisasi Penyusunan Program Penyusunan PP dan Perpres</i>			6,760,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,760,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 1 Kali]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 Paket x 1 Kgt]	1.0 PKT	4,100,000	4,100,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	
<i>B</i>	<i>Persiapan penyusunan PP dan Perpres dengan Stake Holder terkait</i>			86,157,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11,045,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 Pkt x 2 Kgt]	2.0 PKT	2,935,000	5,870,000	
	> Rakor antar kementerian/lembaga			3,450,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [50 orang x 1 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [50 orang x 1 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	> Rapat terbatas dengan Kementerian/Lembaga			1,725,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kali]	25.0 OK	22,000	550,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kali]	25.0 OK	47,000	1,175,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 Orang x 2 Jam x 2 Kgt]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Rapid Tes Antigen [1 ORANG x 2 KALI x 6 Kali]	12.0 OK	99,000	1,188,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 20 KALI] - Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 ORANG x 20 KALI]	20.0 OK 20.0 OK	100,000 210,000	2,000,000 4,200,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > JAWA BARAT : - Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah [16 ORANG x 1 PAKET x 2 KGT] - Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II / Setara [1 ORANG x 1 PAKET x 2 KGT] - Biaya Transport PP [17 ORANG x 1 KALI x 2 KGT] - Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [17 ORANG x 2 HARI x 2 KGT]	 32.0 OP 2.0 OP 34.0 OK 68.0 OH	 822,000 1,110,000 500,000 150,000	55,724,000 26,304,000 2,220,000 17,000,000 10,200,000	RM
C	<i>Pembahasan Tahunan Perencanaan PP dan Perpres</i>			109,430,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kgt x 1 kali] - Biaya Pembuatan Backdrop [1 Pkt x 1 Kgt] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya seminar kit [52 orang x 1 kgt] - Biaya pembuatan spanduk > RAPAT POKJA - konsumsi makan rapat [30 ORG x 3 KALI] - konsumsi snack rapat [30 ORG x 3 KALI]	20.0 OK 1.0 Pkt 1.0 PKT 52.0 PKT 4.0 PKT 90.0 OK 90.0 OK	22,000 2,000,000 4,500,000 150,000 300,000 47,000 22,000	440,000 2,000,000 4,500,000 7,800,000 1,200,000 6,210,000 4,230,000 1,980,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya jasa narasumber eksternal setara eselon 1 dari luar BPHN [3 orang x 3 jam x 1 kgt]	9.0 OJ	1,200,000	10,800,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya transport lokal dalam rangka mendukung kegiatan [28 ORG x 1 KALI]	28.0 OK	100,000	2,800,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya paket meeting fullboard eselon I dan II di Jawa Barat [35 ORG x 1 PKT] - Biaya paket meeting fullboard eselon III ke bawah di Jawa Barat [15 ORG x 1 PKT] - Biaya uang harian paket fullboard [50 org x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Transport PP [15 ORG x 1 KALI]	35.0 OP 15.0 OP 100.0 OH 15.0 OK	1,110,000 822,000 150,000 500,000	38,850,000 12,330,000 15,000,000 7,500,000	RM
D	<i>Finalisasi Penyusunan PP/Perpres di Jawa Barat</i>			31,331,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,469,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,469,000	3,469,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			27,862,000	RM
	> JAWA BARAT :			27,862,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah [16 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT]	16.0 OP	822,000	13,152,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II [1 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	
	- Biaya Transport PP [17 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	17.0 OK	500,000	8,500,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [17 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	34.0 OH	150,000	5,100,000	
053	Pemantauan Prolegnas, Progsun PP dan Perpres Tahun 2022			75,947,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			75,947,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,660,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 1 kali x 1 kgt]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	10,000,000	10,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,001,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	2,001,000	2,001,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,496,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan RT-PCR [2 Orang x 2 Kali]	4.0 OK	525,000	2,100,000	
	- Biaya Rapid Tes Antigen [2 ORANG x 2 KALI]	4.0 OK	99,000	396,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			48,390,000	RM
	> LUAR KOTA :			30,648,000	
	- Biaya penggantian tiket PP [1 org x 1 kali x 4 kgt]	4.0 OK	4,000,000	16,000,000	
	- Biaya uang harian [1 org x 3 hari x 4 kgt]	12.0 OH	400,000	4,800,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [1 org x 2 kali x 4 kgt]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [1 org x 2 kali x 4 kgt]	8.0 OK	175,000	1,400,000	
	- Biaya hotel/penginapan [1 org x 2 hari x 4 kgt]	8.0 OH	800,000	6,400,000	
	> JAKARTA :			17,742,000	
	- Biaya uang representasi Es I [1 org x 1 kali]	1.0 OK	200,000	200,000	
	- Biaya Penginapan Es I [1 org x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	4,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan Es II [1 org x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	1,400,000	1,400,000	
	- Biaya Penginapan Es III [1 org x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	992,000	992,000	
	- Biaya Penginapan Es IV / Gol III [8 org x 1 hari x 1 kgt]	8.0 OH	610,000	4,880,000	
	- Biaya uang harian [11 org x 2 hari]	22.0 OH	210,000	4,620,000	
	- Biaya penggantian taksi [11 org x 1 kali]	11.0 OK	150,000	1,650,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			12,400,000	RM
	- Biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam [1 org x 40 kali]	40.0 OK	210,000	8,400,000	
	- Biaya transport lokal [1 org x 40 kali]	40.0 OK	100,000	4,000,000	
054	Fasilitasi Perencanaan Program Legislasi Daerah			64,472,000	U
A	<i>Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Program Legislasi Daerah</i>			<i>1,884,000</i>	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			1,884,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 1 kgt x 1 kali]	10.0 OK	22,000	220,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [10 orang x 1 kgt x 1 kali]	10.0 OK	47,000	470,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,194,000	1,194,000	
B	<i>Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah</i>			<i>62,588,000</i>	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			8,186,000	RM
	- Biaya pencetakan sertifikat	2.0 PKT	250,000	500,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang]	10.0 OK	22,000	220,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	1,738,000	3,476,000	
	> SULAWESI TENGGARA :			1,950,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	45,000	1,350,000	
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	20,000	600,000	
	> BALI :			2,040,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	48,000	1,440,000	
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali]	30.0 OK	20,000	600,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 org x 2 jam x 2 kgt]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			3,744,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan RT-PCR [3 Orang x 2 Kali x 1 Kgt]	6.0 OK	525,000	3,150,000	
	- Biaya Rapid Tes Antigen [3 Org x 2 kali]	6.0 OK	99,000	594,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > SULAWESI TENGGARA :			46,658,000	RM
	- Biaya Tiket Pesawat PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	4,182,000	12,546,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/Setara [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	1,297,000	2,594,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV ke bawah [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	786,000	3,144,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [3 ORANG x 1 KALI x 2 PP]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Sulawesi Tenggara PP [3 ORANG x 1 KALI x 2 PP]	6.0 OK	171,000	1,026,000	
	> BALI :			22,392,000	
	- Biaya Tiket Pesawat PP [3 org x 1 kali]	3.0 OK	3,262,000	9,786,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/Setara [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	1,078,000	2,156,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV ke bawah [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	910,000	3,640,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [3 ORANG x 1 KALI x 2 PP]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Bali PP [3 ORANG x 1 KALI x 2 PP]	6.0 OK	159,000	954,000	
1613.ABD.002	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	3.0 Rekomendasi Kebijakan		474,851,000	
051	Persiapan Penyusunan Naskah Akademik RUU			3,265,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,265,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,265,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [2525 Lbr x 1 Pkt]	2525.0 PKT	200	505,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [40 org x 1 kali]	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [40 org x 1 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
052	Penyusunan Naskah Akademik RUU			471,586,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			471,586,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			21,743,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [23500 Lbr x 1 Paket]	23500.0 PKT	200	4,700,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [13 orang x 19 kali]	247.0 OK	22,000	5,434,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [13 orang x 19 kali]	247.0 OK	47,000	11,609,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			43,200,000	RM
	- Honor Ketua Tim [3 orang x 9 bulan]	27.0 OB	850,000	22,950,000	
	- Honor Anggota Tim dari luar BPHN [3 orang x 9 bulan]	27.0 OB	750,000	20,250,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,271,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	8,271,000	8,271,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,000,000	RM
	- Honor Narasumber luar BPHN [6 org x 3 jam]	18.0 OJ	1,000,000	18,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [12 org x 2 kali x 2 kgt]	48.0 OK	99,000	4,752,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Tiket PP Kegiatan Penyusunan NA [13 org x 2 kali x 2 kgt] - Biaya uang harian [13 org x 3 hari x 2 kgt] - Biaya penginapan [13 org x 2 hari x 2 kgt] - Biaya Taksi Jakarta PP [13 org x 2 kali x 2 kgt] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [13 org x 2 kali x 2 kgt] - Biaya Transport Jakarta Ke Kabupaten/Kota [5 org x 1 kali x 16 kgt]			113,284,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [2 orang x 20 kali] - Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam [2 orang x 20 kali]	40.0 OK 40.0 OK	100,000 210,000	4,000,000 8,400,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Paket Meeting Fullboard Penyusunan DIM NA dan Penyempurnaan NA di Jawa Barat : - Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon I dan II [2 org x 2 pkt x 6 kgt] - Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon III Kebawah [14 ORG x 2 PAKET x 6 KGT] - Biaya uang harian [16 org x 3 hari x 6 kgt] - Biaya uang transport [14 org x 1 kali x 6 kgt]			249,936,000	RM
1613.ABD.003	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	7.0	Rekomendasi Kebijakan	433,474,000	
051	Persiapan Awal Terhadap Naskah Akademik Yang Akan Diselaraskan			54,782,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			54,782,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya makan Rapat Pemeriksaan oleh Bidang Penyelarasan NA [95 org x 1 kali] - Biaya snack Rapat Pemeriksaan oleh Bidang Penyelarasan NA [95 org x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [10250 Lbr x 1 Pkt]	95.0 OK 95.0 OK 10250.0 Lbr	47,000 22,000 200	4,465,000 2,090,000 2,050,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian alat tulis kantor (ATK)	1.0 PKT	6,427,000	6,427,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [30 org x 1 kali]	30.0 OK	99,000	2,970,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar [30 org x 1 kali] - Uang Harian [30 org x 1 hari]	30.0 OK 30.0 OH	430,000 300,000	12,900,000 9,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			14,880,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [48 org x 1 kali]	48.0 OK	100,000	4,800,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [48 org x 1 kali]	48.0 OK	210,000	10,080,000	
052	Penyelarasan Terhadap Sistematika dan Materi Muatan Naskah Akademik			330,026,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			330,026,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			25,460,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Penyelarasan Terhadap Sistematika dan Materi Muatan Naskah Akademik [340 org x 1 kali]	340.0 OK	47,000	15,980,000	
	- Biaya Snack Rapat Penyelarasan Terhadap Sistematika dan Materi Muatan Naskah Akademik [340 org x 1 kali]	340.0 OK	22,000	7,480,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	10000.0 Lbr	200	2,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			15,300,000	RM
	- Honor jasa narasumber eselon I luar BPHN [2 org x 3 jam]	6.0 OJ	1,200,000	7,200,000	
	- Honor jasa narasumber eselon II/III luar BPHN [3 org x 3 jam]	9.0 OJ	900,000	8,100,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			2,970,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [30 org x 1 Kgt]	30.0 OK	99,000	2,970,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			286,296,000	RM
	- Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon I/II [2 org x 2 pkt x 6 kgt]	24.0 OP	1,100,000	26,400,000	
	- Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon III kebawah [12 org x 2 pkt x 7 kgt]	168.0 OP	822,000	138,096,000	
	- Uang Harian Paket Meeting Fullboard (Jawa Barat) [12 org x 3 hari x 7 kgt]	252.0 OH	150,000	37,800,000	
	- Biaya penggantian uang transport (Jawa Barat) [168 org x 1 kali]	168.0 OK	500,000	84,000,000	
053	Penyusunan Laporan Hasil Penyelarasan			48,666,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			48,666,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			20,210,000	RM
	- Biaya Konsumsi Rapat (makan) [45 org x 2 kali]	90.0 OK	47,000	4,230,000	
	- Biaya Konsumsi Rapat (snack) [45 org x 2 kali]	90.0 OK	22,000	1,980,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	7.0 PKT	2,000,000	14,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			2,970,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [30 org x 1 Kgt]	30.0 OK	99,000	2,970,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			25,486,000	RM
	- Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon I/II [4 org x 1 pkt]	4.0 OP	1,100,000	4,400,000	
	- Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon III dibawah [13 org x 1 pkt]	13.0 OP	822,000	10,686,000	
	- Uang Harian Paket Meeting Fullboard (Jawa Barat) [13 org x 2 hari]	26.0 OH	150,000	3,900,000	
	- Biaya penggantian uang transport (Jawa Barat) [13 org x 1 pkt]	13.0 OK	500,000	6,500,000	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4,572,643,000	
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional			1,752,291,000	
1610.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	166.0 layanan		1,752,291,000	
1610.BMA.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT Fasilitasi Integrasi JDIHN	163.0 Lembaga		1,521,980,000	
051	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Sesuai Perpres 33/2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019			770,786,000	U
A	Pembinaan dan Pengembangan JDIHN			189,570,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			10,936,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 5 kali]	125.0 OK	22,000	2,750,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt x 5 kali]	125.0 OK	47,000	5,875,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	2,311,000	2,311,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.139-Jakarta V)			47,250,000	RM
	- Honor Angggota [7 orang x 9 bulan]	63.0 OB	750,000	47,250,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			3,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,500,000	3,500,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			2,616,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan antigen di luar pulau jawa [12 ORANG x 2 KALI]	24.0 OK	109,000	2,616,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			118,368,000	RM
	> SULAWESI TENGAH			18,584,000	
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	950,000	3,800,000	
	- biaya uang harian [2 orang x 3 hari]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [2 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	4,990,000	9,980,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	165,000	660,000	
	- Biaya representasi [2 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	150,000	900,000	
	> PAPUA			16,886,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	580,000	1,740,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	10,322,000	10,322,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	431,000	862,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> PAPUA BARAT			16,585,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	10,819,000	10,819,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	182,000	364,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			9,449,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP	1.0 OK	5,081,000	5,081,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP)	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP)	2.0 OK	108,000	216,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> KALIMANTAN UTARA			8,385,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,797,000	3,797,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	218,000	436,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> KALIMANTAN TIMUR			9,485,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,797,000	3,797,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	218,000	436,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SUMATERA UTARA			8,244,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,808,000	3,808,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	232,000	464,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SUMATERA BARAT			14,668,000	
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	950,000	3,800,000	
	- biaya uang harian [2 orang x 3 hari]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [2 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	2,952,000	5,904,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	190,000	760,000	
	- Biaya representasi [2 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	150,000	900,000	
	> SULAWESI SELATAN			8,208,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,766,000	3,766,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	145,000	290,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			7,874,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	440,000	1,320,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,230,000	3,230,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	231,000	462,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,900,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [3 ORANG x 23 KALI]	69.0 OK	100,000	6,900,000	
B	<u>Teknis Pengelolaan JDIH</u>			438,596,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,850,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 6 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt x 6 kali]	150.0 OK	47,000	7,050,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Seminar Kit [30 orang x 3 kgt]	90.0 PAKET	150,000	13,500,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			101,250,000	RM
	- Honor Anggota [15 orang x 9 bulan]	135.0 OB	750,000	101,250,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,500,000	RM
	- Biaya mengikuti Seminar / Kegiatan [5 PAKET x 1 KGT]	5.0 PAKET	2,500,000	12,500,000	
	- Biaya mengikuti Sertifikasi TI	4.0 PAKET	3,000,000	12,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,746,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,746,000	2,746,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 3 kgt x 3 jam]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			31,500,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Swab PCR [30 ORANG x 1 KALI x 3 KGT]	90.0 OK	350,000	31,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			21,250,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [15 ORANG x 9 KALI x 1 KGT]	135.0 OK	150,000	20,250,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			223,500,000	RM
	> JAWA BARAT			97,320,000	
	- Paket meeting fullboard [30 ORANG x 1 PAKET x 2 KGT]	60.0 OP	822,000	49,320,000	
	- Uang Harian [30 ORANG x 2 HARI x 2 KGT]	120.0 OH	150,000	18,000,000	
	- Uang transportasi [30 ORANG x 2 KALI x 2 KGT]	120.0 OK	250,000	30,000,000	
	> JOGJAKARTA			126,180,000	
	- tiket pp [30 orang x 1 kali]	30.0 ok	2,268,000	68,040,000	
	- uang harian [30 orang x 2 hari]	60.0 oh	140,000	8,400,000	
	- paket meeting fullboard [30 orang x 1 paket x 1 kgt]	30.0 op	750,000	22,500,000	
	- taksi jakarta [30 orang x 2 kali]	60.0 ok	256,000	15,360,000	
	- taksi provinsi [30 orang x 2 kali]	60.0 ok	198,000	11,880,000	
C	<i>Pertemuan Nasional Pengelola JDIH</i>			142,620,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,400,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kgt x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 1 kgt x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Pembuatan Backdrop/Spanduk/Banner	4.0 BUAH	2,500,000	10,000,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,500,000	1,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,500,000	3,500,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,000,000	RM
	- Sewa Peralatan Pelaksanaan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH	1.0 PAKET	20,000,000	20,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			25,700,000	RM
	- Honor Narasumber Menteri	3.0 OJ	1,700,000	5,100,000	
	- Honor Narasumber Eselon I/Sederajat [2 orang x 1 kgt x 3 jam]	6.0 OJ	1,400,000	8,400,000	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 orang x 1 kgt x 3 jam]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
	- Biaya Moderator [4 orang x 1 kgt]	4.0 OK	700,000	2,800,000	
	- Honor MC/Pembawa Acara	1.0 OK	400,000	400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [6 ORANG x 5 KALI x 1 KGT]	30.0 OK	100,000	3,000,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			72,020,000	RM
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Menteri [1 ORANG x 1 PAKET]	1.0 OP	2,100,000	2,100,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I II [1 ORANG x 1 PAKET]	1.0 OP	1,216,000	1,216,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I II [2 ORANG x 2 PAKET]	4.0 OP	1,216,000	4,864,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah [24 ORANG x 2 PAKET]	48.0 OP	950,000	45,600,000	
	- Biaya Transport PP [28 ORANG x 1 KALI]	28.0 OK	150,000	4,200,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [26 ORANG x 3 HARI]	78.0 OH	180,000	14,040,000	
052	Promosi , Penerbitan dan Kerja Sama JDIH			272,230,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			272,230,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			80,630,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 1 kgt x 8 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 1 kgt x 8 kali]	120.0 OK	47,000	5,640,000	
	- Pembuatan Bahan Cetak/leaflet/ stiker/poster/umbul (pemasangan)/ spanduk/ dan lainnya untuk sosialisasiJDIH	1.0 PAKET	22,000,000	22,000,000	
	> Biaya Penerbitan/Pencetakan			50,350,000	
	- Biaya Penerbitan/pencetakan hasil-hasil kegiatan BPHN versi ebook dan cetak (5 judul) [60 EKS x 5 JUDUL]	300.0 EKS	60,500	18,150,000	
	- Biaya Penerbitan/Perencanaan Jurnal MHN (2 edisi x 100 buku) [100 eks x 2 EDISI]	200.0 BUKU	83,000	16,600,000	
	- Biaya Penerbitan/Perencanaan Jurnal ILJ (2 edisi x 100 buku)	200.0 BUKU	78,000	15,600,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			147,500,000	RM
	- Honor Editor Jurnal [7 orang x 2 Tbt]	14.0 OT	300,000	4,200,000	
	- Honor Honor Redaktur Jurnal [3 orang x 4 Tbt]	12.0 OT	400,000	4,800,000	
	- Honor Pembuat Artikel Jurnal Hukum Berbahasa Inggris [5 Orang x 2 ter x 25 Hal]	250.0 OT	200,000	50,000,000	
	- Honor Pembuat Artikel Majalah Hukum [7 orang x 2 ter x 25 Hal]	350.0 OT	150,000	52,500,000	
	- Honor Mitra Bestari Majalah Hukum Nasional	14.0 OT	1,500,000	21,000,000	
	- Honor Mitra Bestari Jurnal bahasa inggris	10.0 OT	1,500,000	15,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,900,000	RM
	- Biaya Langganan Aplikasi Grafis dan Template (1 th)	2.0 PAKET	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Langganan Fasilitas pengelolaan untuk jurnal [2 paket x 1 tahun]	2.0 PAKET	4,000,000	8,000,000	
	- Biaya Keanggotaan Penerbitan dan Jurnal (DOI)	2.0 PAKET	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Mengikuti Seminar/Kegiatan [3 ORANG x 1 KGT]	3.0 OK	300,000	900,000	
	- Biaya Pendistribusian Terbitan [20 TEMP x 4 KALI x 1 PAKET]	80.0 PAKET	25,000	2,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	4,000,000	4,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [5 orang x 2 kgt x 2 jam]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [3 ORANG x 4 KALI]	12.0 OK	100,000	1,200,000	
053	Pengintegrasian Anggota JDIHN			94,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			94,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 2 kgt x 1 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 2 kgt x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya Pembuatan Backdrop, Spanduk, Banner [1 PAKET x 2 KGT]	30.0 OK 30.0 OK 1.0 KGT 2.0 PAKET	22,000 47,000 1,000,000 300,000	3,670,000 660,000 1,410,000 1,000,000 600,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 2 kgt x 2 jam]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan swab pcr [10 ORANG x 1 KALI x 2 KGT]	20.0 OK	500,000	10,000,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > JAWA BARAT - Paket meeting fullboard [10 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT] - Uang Harian [10 ORANG x 2 HARI x 1 KGT] - Uang transportasi [10 ORANG x 2 KALI x 1 KGT] > BALI - Biaya Paket Meeting Fullboard [10 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT] - Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [10 ORANG x 2 HARI x 1 KGT] - Biaya Penggantian Tiket PP [10 ORANG x 1 KALI x 1 KGT] - Biaya Taksi Jakarta PP [10 ORANG x 1 KGT x 2 KALI] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [10 ORANG x 1 KGT x 2 KALI]	10.0 OP 20.0 OH 20.0 OK 10.0 OP 20.0 OH 10.0 OK 20.0 OK 20.0 OK	822,000 150,000 250,000 1,419,000 160,000 3,262,000 256,000 189,000	75,130,000 16,220,000 8,220,000 3,000,000 5,000,000 58,910,000 14,190,000 3,200,000 32,620,000 5,120,000 3,780,000	RM
054	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional			384,164,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>384,164,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kgt x 5 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 1 kgt x 5 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan	100.0 OK 100.0 OK 1.0 KGT	22,000 47,000 850,000	7,750,000 2,200,000 4,700,000 850,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembuatan Plakat/Piala Bagi Anggota JDIHN Terbaik [80 BUAH x 1 PAKET] > Piagam Penghargaan - Biaya pembuatan Piagam Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terbaik (Cetak Bingkai) [80 BUAH x 1 KGT] - Biaya pembuatan Piagam Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terintegrasi (Cetak Bingkai) [300 BUAH x 1 KGT]	80.0 PAKET 80.0 BUAH 300.0 BUAH	750,000 125,000 75,000	92,500,000 60,000,000 32,500,000 10,000,000 22,500,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013)
UNIT ORG (10)
UNIT KERJA (409288)
ALOKASI Rp. 49,711,976,000

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Badan Pembinaan Hukum Nasional
 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			3,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,500,000	3,500,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			17,000,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan PCR [34 ORANG x 2 KALI]	68.0 OK	250,000	17,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			256,214,000	RM
	> SULAWESI TENGAH			10,065,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	5,113,000	5,113,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	165,000	330,000	
	> BENGKULU			6,391,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,621,000	2,621,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	109,000	218,000	
	> SULAWESI TENGGARA			8,076,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,182,000	4,182,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	171,000	342,000	
	> SULAWESI UTARA			8,900,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP	1.0 OK	5,102,000	5,102,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP)	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP)	2.0 OK	138,000	276,000	
	> JAWA TIMUR			6,704,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,674,000	2,674,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	194,000	388,000	
	> SUMATERA SELATAN			6,076,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,268,000	2,268,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	128,000	256,000	
	> Bali			7,432,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,262,000	3,262,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	159,000	318,000	
	> Jambi			6,276,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,460,000	2,460,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	147,000	294,000	
	> Yogyakarta			6,210,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	420,000	1,260,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,268,000	2,268,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	135,000	270,000	
	> Aceh			8,230,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,492,000	4,492,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	123,000	246,000	
	> Lampung			5,424,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	1,538,000	1,538,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	167,000	334,000	
	> Kalimantan Selatan			7,947,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,995,000	2,995,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	150,000	300,000	
	> Papua			14,307,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	580,000	1,740,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	8,193,000	8,193,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1	2.0 OK	256,000	512,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	431,000	862,000	
	> Kep. Bangka Belitung			5,961,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,139,000	2,139,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	90,000	180,000	
	> Gorontalo			8,826,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,824,000	4,824,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	240,000	480,000	
	> Papua Barat			16,140,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	10,824,000	10,824,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	182,000	364,000	
	> Jawa Tengah			5,884,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,182,000	2,182,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	90,000	180,000	
	> Maluku Utara			10,796,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	6,664,000	6,664,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	215,000	430,000	
	> Kepulauan Riau			5,927,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,131,000	2,131,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	137,000	274,000	
	> SUMATERA UTARA			7,794,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,808,000	3,808,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	232,000	464,000	
	> Kalimantan Tengah			6,698,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,984,000	2,984,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	111,000	222,000	
	> Kalimantan Barat			6,613,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,781,000	2,781,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	140,000	280,000	
	> Riau			6,726,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,016,000	3,016,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	94,000	188,000	
	> SUMATERA BARAT			6,884,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,952,000	2,952,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	190,000	380,000	
	> SULAWESI SELATAN			7,758,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,766,000	3,766,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	145,000	290,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			8,999,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	5,081,000	5,081,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	108,000	216,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			7,178,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	440,000	1,320,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,230,000	3,230,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	108,000	216,000	
	> Kalimantan Utara			7,935,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,797,000	3,797,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	218,000	436,000	
	> Maluku			11,113,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	7,081,000	7,081,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	240,000	480,000	
	> Kalimantan Timur			9,499,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,797,000	3,797,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	450,000	900,000	
	> Sulawesi Barat			9,135,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,867,000	4,867,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	- biaya uang taksi provinsi asal (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	313,000	626,000	
	> Banten			3,690,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	950,000	1,900,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya transportasi [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> DKI JAKARTA			620,000	
	- biaya uang harian [2 orang x 1 hari]	2.0 OH	210,000	420,000	
	- biaya transportasi [2 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	100,000	200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,200,000	
	- Biaya Transport Lokal Internal [3 ORANG x 24 KALI]	72.0 OK	100,000	7,200,000	
1610.BMA.002	Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum	3.0 layanan		230,311,000	
051	Pengelolaan Perpustakaan Hukum			180,665,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			180,665,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11,505,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,500,000	1,500,000	
	> Kegiatan Tim Tajuk Subjek Lanjutan			7,245,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 1 kgt x 7 kali]	105.0 OK	22,000	2,310,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 1 kgt x 7 kali]	105.0 OK	47,000	4,935,000	
	> Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan			2,760,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 1 kgt x 2 kali]	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 1 kgt x 2 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,500,000	RM
	- Honorarium Anggota Tim dari Luar BPHN [3 orang x 6 bulan]	18.0 OB	750,000	13,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			122,000,000	RM
	- Biaya Pembelian Perlengkapan untuk Protokol Kesehatan Layanan Perpustakaan (Masker, Handgloves, handsanitizer, Disinfektan Spray,	1.0 PAKET	10,000,000	10,000,000	
	- Biaya Fumigasi Koleksi Dokumen Hukum	1.0 PAKET	20,000,000	20,000,000	
	- Langganan Media (Koran, Majalah, Jurnal Hukum, dll)	12.0 PAKET	1,000,000	12,000,000	
	- Langganan e-book gramedia	1.0 paket	55,000,000	55,000,000	
	- Biaya Pemeliharaan koleksi dokumen langka (Dry Cleaning)	1.0 PAKET	25,000,000	25,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,660,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK Pengelolaan Perpustakaan Hukum	1.0 PAKET	3,660,000	3,660,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [2 orang x 1 kgt x 3 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [2 ORANG x 20 KALI x 1 KGT]	40.0 OK	100,000	4,000,000	
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,000,000	RM
	- Biaya pembelian buku-buku hukum	1.0 Paket	20,000,000	20,000,000	
052	Peningkatan Kapasitas Pustakawan			49,646,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			49,646,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,750,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	540,000	540,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat persiapan [15 orang x 1 kgt x 2 kali]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [50 orang x 1 kgt x 1 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [50 orang x 1 kgt x 1 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	- Biaya Spanduk/Backdrop Kegiatan [2 BUAH x 1 KGT]	2.0 PAKET	300,000	600,000	
	- Biaya Pembelian Seminar Kit Kegiatan [50 PKT x 1 KGT]	50.0 PAKET	150,000	7,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Biaya Keikutsertaan Pelatihan/Diklat/Seminar/Forum/Webinar/Kegiatan lainnya diluar BPHN [1 ORANG x 1 PKT x 3 KGT]	3.0 PAKET	2,000,000	6,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 orang x 1 kgt x 3 jam]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,500,000	RM
	- Pemeriksaan Swab PCR [1 ORANG x 6 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,396,000	RM
	> Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Kanwil			18,396,000	
	>> SURABAYA		0	18,396,000	
	- Biaya Penggantian Tiket PP [1 ORANG x 3 KALI x 1 KGT]	3.0 OK	2,674,000	8,022,000	
	- Biaya Hotel/Penginapan [1 ORANG x 3 KALI x 2 HARI]	6.0 OH	664,000	3,984,000	
	- Biaya Uang Harian [1 ORANG x 3 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 3 KGT x 2 KALI]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [1 ORANG x 2 KALI x 3 KGT]	6.0 OK	194,000	1,164,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [2 ORANG x 10 KALI x 1 KGT]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
1612	<u>Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum</u>			2,820,352,000	
1612.ADG	<u>Standarisasi Profesi dan SDM[Base Line]</u>	432.0 Orang		929,500,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1612.ADG.001	<u>Layanan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional</u>	432.0 Orang		929,500,000	
051	<u>Penyiapan Regulasi dan Instrumen JF Penyuluh Hukum</u>			341,294,000	U
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			341,294,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			23,330,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 12 kali x 1 kgt]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 12 kali x 1 kgt]	300.0 OK	47,000	14,100,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	2,630,000	2,630,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			494,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	494,000	494,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			58,500,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon I/Sederajat (Eksternal) [15 orang x 1 kgt x 3 jam]	45.0 OJ	1,300,000	58,500,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,180,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [10 orang x 2 kali]	20.0 OK	109,000	2,180,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			63,490,000	RM
	> Jawa Timur			23,320,000	
	- Tiket PP [4 ORANG x 1 KALI]	4.0 OK	2,200,000	8,800,000	
	- Uang Harian [4 orang x 3 HARI x 1 KGT]	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya Penginapan [4 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	8.0 OH	800,000	6,400,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	8.0 OK	250,000	2,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
	> SULAWESI BARAT			23,190,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	4,000,000	12,000,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	> JOGJAKARTA			16,980,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	2,000,000	6,000,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	150,000	900,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,800,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [12 ORANG x 1 KALI]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			191,500,000	RM
	> Biaya Kegiatan Konsinyering Penyusunan Permenkumham			191,500,000	
	>> JAWA BARAT		0	191,500,000	
	- uang harian [70 ORANG x 3 HARI]	210.0 OH	150,000	31,500,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Es. I [2 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	4.0 OP	1,100,000	4,400,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Es. II [12 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	24.0 OP	1,000,000	24,000,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Es. III ke bawah [56 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	112.0 OP	800,000	89,600,000	
	- Biaya transportasi [70 orang x 2 kali]	140.0 OK	300,000	42,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pemetaan dan Profiling Penyuluh Hukum			96,716,000	
A	<i>Penyusunan Database Penyuluh Hukum</i>			9,965,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,870,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,970,000	1,970,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			495,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	495,000	495,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [6 ORANG x 1 KALI]	6.0 OK	100,000	600,000	
B	<i>Sosialisasi Formasi Penyuluh Hukum</i>			13,018,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,525,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 5 kali]	125.0 OK	22,000	2,750,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 5 kali]	125.0 OK	47,000	5,875,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,900,000	1,900,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	100,000	500,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [10 ORANG x 1 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
C	<i>Pengembangan dan Sosialisasi Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Aplikasi SIPAKET LUHKUM)</i>			73,733,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,800,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,900,000	1,900,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,180,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [10 orang x 2 kali]	20.0 OK	109,000	2,180,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,860,000	RM
	> JAWA TENGAH			16,770,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	2,200,000	6,600,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	90,000	540,000	
	> JAWA TIMUR			22,520,000	
	- Tiket PP [4 ORANG x 1 KALI]	4.0 OK	2,000,000	8,000,000	
	- Uang Harian [4 orang x 3 HARI x 1 KGT]	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya Penginapan [4 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	8.0 OH	800,000	6,400,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	8.0 OK	250,000	2,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
	> JAWA TIMUR			21,570,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	3,500,000	10,500,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	150,000	900,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,400,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	100,000	500,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [6 ORANG x 1 KALI]	6.0 OK	150,000	900,000	
053	Peningkatan Kapasitas JF Penyuluh Hukum			194,473,000	U
A	<i>Pembinaan Penyuluh Hukum</i>			178,773,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,460,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,900,000	1,900,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 12 kali]	240.0 OK	22,000	5,280,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang]	240.0 OK	47,000	11,280,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			22,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [11 orang x 1 kgt x 2 jam]	22.0 OJ	1,000,000	22,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,360,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	109,000	4,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			132,460,000	RM
	> KALIMANTAN TENGAH			18,240,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	2,500,000	7,500,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	360,000	3,240,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			23,970,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	4,500,000	13,500,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	750,000	4,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	100,000	600,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			20,160,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	750,000	4,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	> BALI			20,520,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	150,000	900,000	
	> MALUKU			21,420,000	
	- Tiket PP [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	3,500,000	10,500,000	
	- Uang Harian [3 orang x 3 HARI x 1 KGT]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	200,000	1,200,000	
	> Jawa Timur			28,150,000	
	- Tiket PP [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	2,000,000	10,000,000	
	- Uang Harian [5 orang x 3 HARI x 1 KGT]	15.0 OH	410,000	6,150,000	
	- Biaya Penginapan [5 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	10.0 OH	800,000	8,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [5 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	10.0 OK	250,000	2,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [5 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [10 ORANG x 1 KALI]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
B	<i>Kompetisi Metode Penyuluhan Hukum</i>			15,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,700,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,900,000	1,900,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang]	200.0 OK	47,000	9,400,000	
054	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Hukum			277,373,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			277,373,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			51,580,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 24 kali]	720.0 OK	22,000	15,840,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang]	720.0 OK	47,000	33,840,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,900,000	1,900,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [4 orang x 1 kgt x 2 jam]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			900,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [3 ORANG x 2 KALI]	6.0 OK	150,000	900,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			216,400,000	RM
	- Biaya paket meeting fullboard Eselon I [2 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	4.0 OP	1,100,000	4,400,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Eselon II [8 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	16.0 OP	1,000,000	16,000,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Eselon III ke bawah [70 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	140.0 OP	800,000	112,000,000	
	- uang harian [80 ORANG x 3 HARI]	240.0 OH	150,000	36,000,000	
	- uang transportasi [80 ORANG x 2 KALI]	160.0 OK	300,000	48,000,000	
055	Pemberian Rekomendasi dan Pelaksanaa Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang			19,644,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			19,644,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,150,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 10 kali]	250.0 OK	22,000	5,500,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 10 kali]	250.0 OK	47,000	11,750,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	900,000	900,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			494,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	494,000	494,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [10 ORANG x 1 KALI]	10.0 OK	100,000	1,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1612.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line] Lokasi : INSTANSI PUSAT	395.0 Kelompok Masyarakat		919,860,000	
1612.BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar Hukum	315.0 Kelompok Masyarakat		716,720,000	
051	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum			374,826,000	
A	Melaksanakan Temu Sadar Hukum pada Kelompok KADARKUM Tingkat Pusat			21,850,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			14,850,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 5 kgt]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 5 kgt]	150.0 OK	47,000	7,050,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [1 buah x 5 KGT]	5.0 PAKET	300,000	1,500,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			5,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 10 KALI]	50.0 OK	100,000	5,000,000	
B	Melaksanakan Lomba KADARKUM Tingkat Nasional			320,851,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			46,501,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [40 orang x 4 kali]	160.0 OK	22,000	3,520,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [40 orang x 4 kali]	160.0 OK	47,000	7,520,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 PAKET	22,711,000	22,711,000	
	- Biaya pengadaan piagam penghargaan	1.0 PAKET	7,750,000	7,750,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [5 buah x 5 PAKET x 1 KGT]	25.0 PAKET	200,000	5,000,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.139-Jakarta V)			6,750,000	RM
	- Honor anggota tim [3 orang x 3 bulan]	9.0 OB	750,000	6,750,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			2,500,000	RM
	- Biaya Perbaikan Piala Untuk Kategori Pemenang 1, 2, 3 dan Harapan Serta Piala Menteri [5 BUAH x 1 PAKET]	5.0 PAKET	500,000	2,500,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			100,000,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [100 ORANG x 2 KALI]	200.0 OK	500,000	100,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			11,800,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [10 ORANG x 10 KALI]	100.0 OK	100,000	10,000,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [6 ORANG x 2 KALI]	12.0 OK	150,000	1,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			150,300,000	RM
	- Biaya transportasi [105 orang x 2 kali x 1 kgt]	210.0 OK	150,000	31,500,000	
	- Biaya pakeet meeting fullboard Menteri/ setingkat [1 ORANG x 1 KALI x 1 PAKET]	1.0 OP	2,100,000	2,100,000	
	- Biaya pakeet meeting fullboard Es. I dan II [4 ORANG x 1 KALI x 1 PAKET]	4.0 OP	1,300,000	5,200,000	
	- Biaya pakeet meeting fullboard III kebawah [100 ORANG x 1 KALI x 1 PAKET]	100.0 OP	800,000	80,000,000	
	- Biaya uang harian [105 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	210.0 OH	150,000	31,500,000	
C	<i>Penyusunan Pedoman Instrumen Desa Sadar Hukum</i>			32,125,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,375,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 5 kgt]	125.0 OK	22,000	2,750,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 5 kgt]	125.0 OK	47,000	5,875,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 PAKET	3,750,000	3,750,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II / sederajat (Eksternal) [2 ORANG x 2 JAM x 2 KGT]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,750,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 10 KALI]	50.0 OK	100,000	5,000,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [5 ORANG x 5 KALI]	25.0 OK	150,000	3,750,000	
052	Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum			341,894,000	U
A	<i>Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum</i>			137,388,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,640,000	RM
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	4,640,000	4,640,000	
	- Biaya Pembuatan Piagam	1.0 PAKET	15,000,000	15,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,168,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Antigen [8 ORANG x 2 KALI x 2 KGT]	32.0 OK	99,000	3,168,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			111,580,000	RM
	- Biaya penggantian tiket pp [8 orang x 2 kali x 1 kgt]	16.0 OK	3,500,000	56,000,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 2 KALI x 3 HARI]	6.0 OH	150,000	900,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 2 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	2,000,000	8,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [2 ORANG x 2 KALI x 2 HARI]	8.0 OH	1,000,000	8,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [5 ORANG x 2 KALI x 2 HARI]	20.0 OH	700,000	14,000,000	
	- Biaya uang harian [8 ORANG x 2 KALI x 3 HARI]	48.0 OH	370,000	17,760,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [8 ORANG x 2 KALI x 2 KGT]	32.0 OK	175,000	5,600,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 ORANG x 2 KALI x 2 KGT]	8.0 OK	165,000	1,320,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [2 ORANG x 5 KALI]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
B	<i>Monitoring/Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum</i>			97,660,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,894,000	RM
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	3,894,000	3,894,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,970,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [5 ORANG x 2 KALI x 3 KGT]	30.0 OK	99,000	2,970,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			88,796,000	RM
	> JAWA TIMUR			36,684,000	
	- Biaya penggantian tiket pp [6 orang x 1 kali x 1 kgt]	6.0 OK	2,674,000	16,044,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	1,600,000	3,200,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [3 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	6.0 OH	650,000	3,900,000	
	- Biaya uang harian [6 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	18.0 OH	410,000	7,380,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	175,000	1,050,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	165,000	660,000	
	> LAMPUNG			21,802,000	
	- Biaya penggantian tiket pp [4 orang x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	1,583,000	6,332,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	1,000,000	4,000,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Biaya uang harian [4 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	12.0 OH	380,000	4,560,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	175,000	700,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	165,000	660,000	
	> SUMATERA UTARA			30,310,000	
	- Biaya penggantian tiket pp [4 orang x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	3,800,000	15,200,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	1,700,000	3,400,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	1,100,000	4,400,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	530,000	1,060,000	
	- Biaya uang harian [4 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	175,000	700,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	4.0 OK	165,000	660,000	
C	<i>Sosialisasi Aplikasi Informasi Masyarakat Cerdas Hukum (SIMASDASKUM) Terhadap Kantor Wilayah</i>			106,846,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11,250,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 4 kgt]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 4 kgt]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Pengandaan Penjilidan	1.0 PAKET	3,750,000	3,750,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [1 buah x 2 kgt]	2.0 PAKET	300,000	600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eselon II / sederajat (Eksternal) [2 ORANG x 2 JAM x 2 KGT]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Antigen [22 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	44.0 OK	99,000	4,356,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya transportasi [22 orang x 2 kali x 2 kgt] - Biaya pakeet meeting fullboard Es. I dan II [4 ORANG x 2 KALI x 2 PAKET] - Biaya pakeet meeting fullboard III kebawah [19 ORANG x 1 KALI x 2 PAKET] - Biaya uang harian [22 ORANG x 2 KALI x 2 HARI]	88.0 OK 16.0 OP 38.0 OP 88.0 OH	150,000 1,300,000 800,000 180,000	13,200,000 20,800,000 30,400,000 15,840,000	RM
1612.BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	80.0 Kelompok Masyarakat		203,140,000	
051	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung			123,180,000	U
A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Hukum</i>			<i>98,580,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu - Biaya konsumsi snack rapat [40 orang x 5 kgt] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [40 orang x 5 kgt] - Biaya Penggandaan Penjilidan - Biaya Pembuatan Spanduk > Penyuluhan Hukum Keliling Melalui Mobil Penyuling - Biaya konsumsi snack rapat [12 orang x 10 kgt] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [12 orang x 10 kgt] - Biaya Penggandaan Penjilidan > Pojok Penyuluhan dan Bantuan Hukum - Biaya Pembelian Goodybag dan Souvenir [500 PAKET x 1 KGT]	200.0 OK 200.0 OK 1.0 KGT 5.0 BUAH 120.0 OK 120.0 OK 1.0 KGT 500.0 PAKET	22,000 47,000 3,500,000 300,000 22,000 47,000 3,500,000 85,000	18,800,000 4,400,000 9,400,000 3,500,000 1,500,000 11,780,000 2,640,000 5,640,000 3,500,000 42,500,000 42,500,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK [1 PAKET x 2 KGT]	2.0 PAKET	2,250,000	4,500,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eksternal [1 ORANG x 2 JAM x 5 KGT]	10.0 OJ	400,000	4,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 17 KALI x 2 KGT]	170.0 OK	100,000	17,000,000	RM
B	<i>Fasilitasi Konsultasi Hukum</i>			<i>24,600,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,825,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 2 kgt]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 2 kgt]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	16,685,000	16,685,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,775,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,775,000	3,775,000	
052	Kegiatan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung			79,960,000	
A	<i>Penyebarnya Informasi Hukum</i>			79,960,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,210,000	RM
	> Radio			6,105,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 3 kgt]	45.0 OK	22,000	990,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 3 kgt]	45.0 OK	47,000	2,115,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	3,000,000	3,000,000	
	> Media Digital			6,105,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 3 kgt]	45.0 OK	22,000	990,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 3 kgt]	45.0 OK	47,000	2,115,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	3,000,000	3,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,000,000	RM
	- Biaya Pelaksanaan Kegiatan Dialog Perbincangan Penyuluhan Hukum di Radio [1 kgt x 1 PAKET]	1.0 PAKET	60,000,000	60,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,250,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	2.0 PAKET	2,125,000	4,250,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 7 KALI]	35.0 OK	100,000	3,500,000	
1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	557.0 Lembaga		970,992,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1612.BIC.001	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	557.0 Lembaga		970,992,000	
051	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Pusat			631,901,000	U
A	<i>KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TINGKAT PUSAT</i>			62,802,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			36,907,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 26 kali]	390.0 OK	22,000	8,580,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang]	390.0 OK	47,000	18,330,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	9,997,000	9,997,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,195,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	7,195,000	7,195,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,700,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [8 ORANG x 20 KALI]	160.0 OK	100,000	16,000,000	
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [3 ORANG x 6 KALI]	18.0 OK	150,000	2,700,000	
<i>B</i>	<i>Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Tahun 2022</i>			<i>370,449,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			37,250,000	RM
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	5,250,000	5,250,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PAKET	1,500,000	1,500,000	
	- Biaya pembuatan sertifikat	1.0 PAKET	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya Pembuatan Piagam termasuk figura	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya Pembuatan Plakat	1.0 PAKET	14,000,000	14,000,000	
	- Biaya pembelian seminar kit	1.0 PAKET	12,500,000	12,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			17,400,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon IISederajat (Eksternal) [2 orang x 1 kgt x 3 jam]	6.0 OJ	1,400,000	8,400,000	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 orang x 1 kgt x 3 jam]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,668,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [26 ORANG x 2 KALI]	52.0 OK	109,000	5,668,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			310,131,000	RM
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Es I dan II [8 orang x 2 paket]	16.0 OP	1,400,000	22,400,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard [59 orang x 2 paket]	118.0 OP	1,000,000	118,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Halfday [33 orang x 1 paket]	33.0 OP	350,000	11,550,000	
	- Uang Harian Fullboard [67 orang x 3 hari]	201.0 OH	140,000	28,140,000	
	- Uang Harian Fulboard panitia sebelum acara [26 orang x 1 hari]	26.0 OH	140,000	3,640,000	
	- Biaya Penginapan Es II [1 ORANG x 1 HARI]	1.0 OH	1,605,000	1,605,000	
	- Biaya Penginapan Es IV sederajat [25 ORANG x 1 HARI]	25.0 OH	664,000	16,600,000	
	>> Biaya Transportasi		0	108,196,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP	1.0 OK	5,466,000	5,466,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [25 ORANG x 1 KALI]	25.0 OK	2,674,000	66,850,000	
	- biaya uang taksi Jakarta [26 ORANG x 2 KALI]	52.0 OK	250,000	13,000,000	
	- biaya uang taksi daerah [26 ORANG x 2 KALI]	52.0 OK	190,000	9,880,000	
	- Biayaa transportasi darat [26 Orang x 2 kali]	52.0 OK	250,000	13,000,000	
<i>C</i>	<i>PENGLOLAAN APLIKASI AKSES PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM (PEMELIHARAAN APLIKASI SIDBANKUM)</i>			<i>89,260,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,760,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [8 orang x 5 kali]	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [8 orang]	40.0 OK	47,000	1,880,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			85,000,000	RM
	- Biaya pemeliharaan/perawatan aplikasi Sidbankum	1.0 PAKET	85,000,000	85,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [2 ORANG x 5 KALI]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
<i>D</i>	<i>PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN PARALEGAL</i>			<i>109,390,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			39,340,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [5 orang x 6 kali x 10 MODUL]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [5 orang x 6 KALI x 10 MODUL]	300.0 OK	47,000	14,100,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	14,500,000	14,500,000	
	> TOT Asistenstasi Penyusunan Modul Pelatihan Paralegal			4,140,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 2 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [30 orang x 2 KALI x 0 0]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			50,550,000	RM
	- Honorarium Pengarah Penyusunan Modul Pelatihan Paralegal [1 ORANG x 3 BULAN]	3.0 OB	1,000,000	3,000,000	
	- Honorarium Penanggung Jawab Penyusunan Modul Pelatihan Paralegal [1 ORANG x 3 BULAN]	3.0 OB	850,000	2,550,000	
	- Honorarium Penyusunan Modul Pelatihan Paralegal [20 ORANG x 3 BULAN]	60.0 OB	750,000	45,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [2 orang x 2 kgt x 3 jam]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [5 ORANG x 10 KALI]	50.0 OK	150,000	7,500,000	
052	Pengawasan Organisasi Bantuan Hukum			339,091,000	U
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>339,091,000</i>	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			17,178,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [3 ORANG x 2 KALI x 7 PROV]	42.0 OK	109,000	4,578,000	
	- Biaya Pemeriksaan Swab PCR [3 ORANG x 2 KALI x 4 PROV]	24.0 OK	525,000	12,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			318,613,000	RM
	> BALI			26,222,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,262,000	9,786,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,946,000	3,892,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	910,000	3,640,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Bali) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	189,000	1,134,000	SBM
	- transportasi kabupatzen/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> Kepulauan Riau			22,108,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,888,000	8,664,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,037,000	2,074,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	792,000	3,168,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kepulauan Riau) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	137,000	822,000	SBM
	- transportasi kabupatzen/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	350,000	2,100,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SUMATERA BARAT			25,482,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,952,000	8,856,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	3,083,000	6,166,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	650,000	2,600,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Barat) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	190,000	1,140,000	SBM
	- transportasi kabupatzen/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	225,000	1,350,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> YOGYAKARTA			23,992,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	2,695,000	5,390,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	845,000	3,380,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.I. Yogyakarta) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	198,000	1,188,000	SBM
	- transportasi kabupatzen/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> JAWA BARAT			15,350,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	2,755,000	5,510,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	570,000	2,280,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Transport [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	300,000	1,800,000	
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	240,000	1,440,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SULAWESI SELATAN			25,771,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,829,000	11,487,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,550,000	3,100,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	732,000	2,928,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sulawesi Selatan) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	166,000	996,000	SBM
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	240,000	1,440,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			27,282,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,230,000	9,690,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	2,648,000	5,296,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	725,000	2,900,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Nusa Tenggara Barat) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	231,000	1,386,000	SBM
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	350,000	2,100,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> KALIMANTAN BARAT			21,893,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,781,000	8,343,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,538,000	3,076,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	538,000	2,152,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Kalimantan Barat) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	142,000	852,000	SBM
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	350,000	2,100,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> JAWA TENGAH			19,226,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,182,000	6,546,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,480,000	2,960,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	600,000	2,400,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Tengah) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	90,000	540,000	
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> JAWA TIMUR			22,042,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,674,000	8,022,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,605,000	3,210,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	664,000	2,656,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Jawa Timur) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	194,000	1,164,000	
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	225,000	1,350,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SUMATERA SELATAN			24,448,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	3,083,000	6,166,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	861,000	3,444,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Selatan) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	154,000	924,000	
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	290,000	1,740,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SUMATERA UTARA			25,496,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,808,000	11,424,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,518,000	3,036,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	530,000	2,120,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB]	6.0 OK	350,000	2,100,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> MALUKU			39,301,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	7,081,000	21,243,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	3,240,000	6,480,000	
	- Biaya penginapan [2 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	4.0 OH	667,000	2,668,000	
	- Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	250,000	1,500,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Maluku) [3 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	6.0 OK	240,000	1,440,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	- transportasi kabupaten/kota [3 ORANG x 1 KALI x 2 KAB] - Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kali] <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)	6.0 OK 3.0 OH	350,000 150,000	2,100,000 450,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [3 ORANG x 11 KALI]	33.0 OK	100,000	3,300,000	
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen			40,593,144,000	U
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			40,593,144,000	
1614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	6.0 Layanan		29,279,978,000	
1614.EBA.956	Lokasi : INSTANSI PUSAT Layanan BMN	1.0 Layanan		165,721,000	U
051	Pengelolaan BMN			165,721,000	
A	Penatausahaan BMN			144,976,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,189,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,149,000	2,149,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 8 kali]	160.0 OK	22,000	3,520,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 8 kali]	160.0 OK	47,000	7,520,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,691,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	4,691,000	4,691,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,960,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [5 Org x 3 Kali]	15.0 OK	99,000	1,485,000	
	- Biaya Pemeriksaan PCR [5 Orang x 1 Kali]	5.0 OK	495,000	2,475,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			83,814,000	RM
	> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Di Jawa Barat			83,814,000	
	>> Penyusunan Laporan Tahunan BMN 2021 Tingkat Eselon I :		0	19,650,000	
	- Biaya uang harian [5 orang x 4 hari]	20.0 OH	430,000	8,600,000	
	- Biaya penginapan [5 orang x 3 hari]	15.0 OH	570,000	8,550,000	
	- Biaya Transportasi [5 Orang x 1 KGT]	5.0 OK	500,000	2,500,000	
	>> Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2022 Tingkat Eselon I :		0	19,650,000	
	- Biaya uang harian [5 orang x 4 hari]	20.0 OH	430,000	8,600,000	
	- Biaya penginapan [5 orang x 3 hari]	15.0 OH	570,000	8,550,000	
	- Biaya Transportasi [5 Orang x 1 KGT]	5.0 OK	500,000	2,500,000	
	>> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN Di Kantor Wilayah Jogjakarta :		0	27,870,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Orang x 1 Kali]	5.0 OK	2,268,000	11,340,000	
	- Biaya Uang Harian [5 Orang x 3 Hari]	15.0 OH	420,000	6,300,000	
	- Biaya Penginapan [5 Orang x 2 Hari]	10.0 OH	845,000	8,450,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [5 Orang x 1 Kali]	5.0 OK	256,000	1,280,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [5 Orang x 1 Kali]	5.0 OK	100,000	500,000	
	>> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN Di Kantor Wilayah Jawa Timur :		0	16,644,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,540,000	7,620,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	664,000	3,984,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	256,000	768,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	194,000	582,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 25 kali]	125.0 OK	100,000	12,500,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,822,000	RM
	> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Huk			8,822,000	
	- Biaya paket meeting fullboard [2 orang x 3 hari]	6.0 OP	1,197,000	7,182,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [2 orang x 4 hari]	8.0 OH	180,000	1,440,000	
	- Biaya Transport Dalam Kota [2 orang x 1 kali]	2.0 OK	100,000	200,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,000,000	RM
	> Melaksanakan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			18,000,000	
	>> Penyusunan Laporan BMN dengan Kantor Wilayah :		0	18,000,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [5 orang x 4 hari]	20.0 OH	150,000	3,000,000	
	- Biaya paket meeting fullboard [5 orang x 3 paket]	15.0 OP	800,000	12,000,000	
	- Biaya Transport Darat [5 orang x 2 kali]	10.0 OK	300,000	3,000,000	
B	<u>Penghapusan BMN</u>			20,745,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,900,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	5000.0 PKT	200	1,000,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 10 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 10 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,845,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,845,000	2,845,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 20 kali]	100.0 OK	100,000	10,000,000	
1614.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan		525,967,000	
051	Melaksanakan Kehumasan dan Penyebaran Informasi Hukum			284,142,000	U
<i>A</i>	<i>Pembinaan Koordinasi, Evaluasi dan monitoring Kehumasan BPHN</i>			<i>33,537,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,975,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 10 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 5 kali]	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	- Spanduk/Banner [1 paket x 1 kali]	1.0 paket	450,000	450,000	
	- Seminar Kit [25 paket]	25.0 paket	150,000	3,750,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	500,000	500,000	
	> Workshop Kehumasan			3,450,000	
	- Biaya konsumsi snack Pelaksanaan Workshop [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi makan Pelaksanaan Workshop [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,762,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,762,000	1,762,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			16,800,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Setara Es. I [2 orang x 6 jam]	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	
<i>B</i>	<i>Peliputan kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional</i>			<i>65,528,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			750,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	750,000	750,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi.COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,792,000	RM
	> Pulau Jawa			4,356,000	
	- Biaya Swab Antigen [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	99,000	396,000	
	- Biaya Swab PCR [4 Org x 2 Kali]	8.0 OK	495,000	3,960,000	
	> Luar Pulau Jawa			436,000	
	- Rapid Test Antigen [2 Orang x 2 Kali]	4.0 OK	109,000	436,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			55,486,000	RM
	> Aceh			15,590,000	
	- Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	4,492,000	8,984,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	6.0 OH	360,000	2,160,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	1,294,000	2,588,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	556,000	1,112,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	123,000	246,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> Jawa Tengah			10,372,000	
	- Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	2,182,000	4,364,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	954,000	1,908,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	90,000	180,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> Jawa Timur			12,176,000	
	- Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	2,674,000	5,348,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	1,076,000	2,152,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	664,000	1,328,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	194,000	388,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
	> NTT			17,348,000	
	- Tiket PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	5,113,000	10,226,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 3 Hari x 1 KGT]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	1,355,000	2,710,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	116,000	232,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [2 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	2.0 OK	250,000	500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 15 kali]	45.0 OK	100,000	4,500,000	
C	<i>Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat</i>			5,701,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,540,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 5 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 2 kali]	20.0 OK	47,000	940,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	500,000	500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			911,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	911,000	911,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,250,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 5 kali]	15.0 OK	100,000	1,500,000	
	- Biaya Transport Lokal Orang luar BPHN [1 orang x 5 kali]	5.0 OK	150,000	750,000	
<i>D</i>	<i>Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi BPHN</i>			131,481,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			43,981,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 5 kali]	75.0 OK	22,000	1,650,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 2 kali]	30.0 OK	47,000	1,410,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	921,000	921,000	
	- Biaya pencetakan leaflet BPHN [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Pencetakan Kalender Meja BPHN [0 0 x 0 0]	750.0 Eks	40,000	30,000,000	
	- Goodie Bag [0 0 x 0 0]	500.0 PKT	10,000	5,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Biaya Langganan Aplikasi Envato Elements [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKT	3,500,000	3,500,000	
	- Biaya Langganan Aplikasi Freepik [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKT	2,500,000	2,500,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			32,000,000	RM
	- Biaya sewa perlengkapan pelaksanaan [1 PKT x 4 KGT]	4.0 PKT	8,000,000	32,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			28,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Setara Es. I [10 orang x 2 jam]	20.0 OJ	1,400,000	28,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,000,000	RM
	- Biaya Publikasi Media TV [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKt	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Publikasi Media Radio [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKt	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Publikasi Media Cetak [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKt	5,000,000	5,000,000	
	- Biaya Publikasi Media Massa Online [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKt	5,000,000	5,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 5 kali]	15.0 OK	100,000	1,500,000	
<i>E</i>	<i>Pameran Kegiatan-kegiatan BPHN</i>			47,895,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,145,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 5 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 2 kali]	20.0 OK	47,000	940,000	
	- Biaya konsumsi snack Penjaga Stand [15 orang x 3 kali]	45.0 OK	22,000	990,000	
	- Biaya konsumsi makan Penjaga Stand [15 orang x 3 kali]	45.0 OK	47,000	2,115,000	
	- Biaya pembuatan booth pameran [0 0 x 0 0]	3.0 PKT	5,000,000	15,000,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,500,000	RM
	- Biaya Layout	3.0 PKT	2,500,000	7,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			750,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	750,000	750,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,000,000	RM
	- Biaya stage display pameran [1 PKT x 3 KGT]	3.0 PKT	2,500,000	7,500,000	
	- Biaya sewa perlengkapan pelaksanaan [1 PKT x 3 KGT]	3.0 PKT	2,500,000	7,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [15 orang x 3 kali]	45.0 OK	100,000	4,500,000	
052	Pelaksanaan Kerjasama Hukum			241,825,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			241,825,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,490,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 18 kali]	270.0 OK	22,000	5,940,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 10 kali]	150.0 OK	47,000	7,050,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,273,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,273,000	1,273,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,892,000	RM
	> Luar Pulau Jawa			2,536,000	
	- Biaya Swab Antigen [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	109,000	436,000	
	- Biaya Swab PCR [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	525,000	2,100,000	
	> Pulau Jawa			4,356,000	
	- Biaya Swab Antigen [2 Org x 2 Kali]	4.0 OK	99,000	396,000	
	- Biaya Swab PCR [4 Org x 2 Kali]	8.0 OK	495,000	3,960,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			37,670,000	RM
	> Sumatera Selatan			12,488,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,268,000	4,536,000	
	- Biaya Uang Harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	1,571,000	3,142,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	861,000	1,722,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	154,000	308,000	
	> Jawa Tengah			10,372,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,182,000	4,364,000	
	- Biaya Uang Harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	954,000	1,908,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	90,000	180,000	
	> Sulawesi Selatan			14,810,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,829,000	7,658,000	
	- Biaya Uang Harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	1,138,000	2,276,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 orang x 2 hari x 1 kgt]	2.0 OH	732,000	1,464,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	250,000	500,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	166,000	332,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 15 kali]	45.0 OK	100,000	4,500,000	
524211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</u> (KPPN.139-Jakarta V)			178,000,000	RM
	> Asia Tenggara			68,000,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	12,000,000	24,000,000	
	- Biaya uang harian [2 orang x 4 hari x 1 kgt]	8.0 OH	5,500,000	44,000,000	
	> Eropa			110,000,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	25,000,000	50,000,000	
	- Biaya uang harian [2 orang x 4 hari x 1 kgt]	8.0 OH	7,500,000	60,000,000	
1614.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		182,218,000	
051	Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Laksana			182,218,000	U
A	<i>Penataan Orta di lingkungan BPHN</i>			<i>169,553,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,040,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 15 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [21 orang x 8 kali]	168.0 OK	47,000	7,896,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 paket	544,000	544,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	423,000	423,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eksternal Eselon I [1 orang x 2 jam x 2 kgt] - Honor Narasumber Eksternal Eselon II [1 orang x 2 jam x 2 kgt]	4.0 OJ 4.0 OJ	1,400,000 1,000,000	5,600,000 4,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen [50 Org x 1 Kali]	50.0 OK	99,000	4,950,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [2 orang x 6 kali]	12.0 OK	100,000	1,200,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya paket meeting fullboard (Pejabat setara Es I dan II) [15 org x 2 pkt] - Biaya paket meeting fullboard (Pejabat Eselon III ke bawah) [35 org x 2 pkt] - Biaya penggantian transport jakarta-Jawa Barat pp [50 org x 1 kali] - Biaya uang harian paket fullboard [50 org x 3 hari]	30.0 OP 70.0 OP 50.0 OK 150.0 OH	1,110,000 822,000 500,000 150,000	33,300,000 57,540,000 25,000,000 22,500,000	RM
B	<i>Penataan Tata Laksana</i>			12,665,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 1 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 paket]	200.0 OK 20.0 OK 1.0 KGT	22,000 47,000 525,000	4,400,000 940,000 525,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eksternal Eselon I [1 orang x 2 jam x 1 kgt] - Honor Narasumber Eksternal Eselon II [1 orang x 2 jam x 1 kgt]	2.0 OJ 2.0 OJ	1,400,000 1,000,000	2,800,000 2,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [2 orang x 10 kali]	20.0 OK	100,000	2,000,000	RM
1614.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		162,879,000	
051	Layanan Umum			86,070,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			86,070,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [36 orang x 25 kali] - Biaya penggandaan dan penjilidan	900.0 OK 1.0 PKT	22,000 1,200,000	19,800,000 1,200,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,070,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	8,070,000	8,070,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			57,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [15 orang x 38 kali]	570.0 OK	100,000	57,000,000	
052	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			76,809,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			76,809,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11,883,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 18 kali]	270.0 OK	22,000	5,940,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [10 Org x 5 Kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	3,593,000	3,593,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			50,580,000	RM
	> Honor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa BPHN			50,580,000	
	- Honor Kepala ULP BPHN [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,000,000	12,000,000	
	- Honor Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa BPHN [2 orang x 12 bulan]	24.0 OB	400,000	9,600,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [3 orang x 12 bulan]	36.0 OB	680,000	24,480,000	
	- Honor Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa [3 orang x 2 paket]	6.0 OP	750,000	4,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,146,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,146,000	4,146,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [6 orang x 17 kali]	102.0 OK	100,000	10,200,000	
1614.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan		301,548,000	
051	Manajemen Sistem Informasi			290,745,000	U
A	PENGLOLAAN WEBSITE BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			179,171,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,834,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	47,000	9,400,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [1 paket]	1.0 PKT	1,034,000	1,034,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			89,400,000	RM
	> Tim Pengelola Website BPHN			89,400,000	
	- Penanggung Jawab [1 org x 12 bln]	12.0 OB	500,000	6,000,000	
	- Redaktur [6 org x 12 bln]	72.0 OB	450,000	32,400,000	
	- Editor [2 org x 12 bln]	24.0 OB	400,000	9,600,000	
	- Web Admin [3 org x 12 bln]	36.0 OB	350,000	12,600,000	
	- Web Developer [8 org x 12 bln]	96.0 OB	300,000	28,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Perawatan aplikasi webserver BPHN (Conten Management System) dan sub domain [1 paket]	1.0 paket	65,766,000	65,766,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,171,000	2,171,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eksternal Eselon I [1 orang x 2 jam x 1 kgt]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon II [2 orang x 2 jam x 1 kgt]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 14 kali]	14.0 OK	100,000	1,400,000	RM
B	<i>Pengelolaan Teknis Teknologi Informasi/Aplikasi Dilingkungan BPHN</i>			111,574,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	RM
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	47,000	9,400,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 PKT	997,000	997,000	
	- Biaya Spanduk [1 paket]	1.0 PKT	375,000	375,000	
	- Biaya Seminar kit [30 paket]	30.0 PKT	150,000	4,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,566,000	2,566,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eksternal Eselon I [1 orang x 2 jam x 1 kgt]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon II [2 orang x 2 jam x 1 kgt]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen pulau jawa dan bali [32 org x 2 kali x 1 Kgt]	64.0 OK	99,000	6,336,000	RM
	- Biaya Swab Antigen diluar pulau jawa [2 org x 2 kali x 1 Kgt]	4.0 OK	109,000	436,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > SUMATERA SELATAN - Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt] > JOGJAKARTA - Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt]			24,104,000	RM
		2.0 OK	2,268,000	11,876,000	
		6.0 OH	380,000	4,536,000	
		4.0 OH	861,000	2,280,000	
		4.0 OK	250,000	3,444,000	
		4.0 OK	154,000	1,000,000	
				616,000	
				12,228,000	
		2.0 OK	2,268,000	4,536,000	
		6.0 OH	420,000	2,520,000	
		4.0 OH	845,000	3,380,000	
		4.0 OK	250,000	1,000,000	
		4.0 OK	198,000	792,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 12 kali]	12.0 OK	100,000	1,200,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya paket meeting fullboard [30 org x 1 paket] - Biaya pengganti transport [30 org x 2 kali] - Biaya uang harian paket fullboard [30 org x 2 hari]			51,660,000	RM
		30.0 OP	822,000	24,660,000	
		60.0 OK	300,000	18,000,000	
		60.0 OH	150,000	9,000,000	
052	Pengelolaan Data dan Informasi			10,803,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			10,803,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 5 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 KGT]			7,518,000	RM
		100.0 OK	22,000	2,200,000	
		100.0 OK	47,000	4,700,000	
		1.0 PKT	618,000	618,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,085,000	2,085,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 12 kali]	12.0 OK	100,000	1,200,000	RM
1614.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		27,941,645,000	
001	Gaji dan Tunjangan			17,552,977,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			17,094,877,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)			11,302,322,000	RM
		1.0 THN	9,677,322,000	9,677,322,000	
		1.0 BLN	812,500,000	812,500,000	
		1.0 BLN	812,500,000	812,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			175,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	149,000	149,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	13,600	13,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	13,600	13,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			750,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS	1.0 THN	643,000,000	643,000,000	
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	53,500,000	53,500,000	
	- Belanja Tunj. Suamilstri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	53,500,000	53,500,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			198,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	170,000,000	170,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	14,000,000	14,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	14,000,000	14,000,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			934,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	800,000,000	800,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	67,000,000	67,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	67,000,000	67,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			911,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	782,760,000	782,760,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	64,120,000	64,120,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	64,120,000	64,120,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			77,900,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	37,100,000	37,100,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,400,000	20,400,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	20,400,000	20,400,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			603,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	518,400,000	518,400,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	42,300,000	42,300,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	42,300,000	42,300,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,064,480,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol II [11 orang x 20 hari x 12 bln]	2640.0 BLN	35,000	92,400,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol III [170 orang x 20 hari x 12 bln]	40800.0 BLN	37,000	1,509,600,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol IV [47 orang x 20 hari x 12 bln]	11280.0 BLN	41,000	462,480,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			254,000,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	217,800,000	217,800,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	18,100,000	18,100,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	18,100,000	18,100,000	
<i>B</i>	<u>Uang Lembur</u>			458,100,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.139-Jakarta V)			458,100,000	RM
	- Biaya uang lembur Gol II [36 orang x 12 jam]	432.0 OJ	17,000	7,344,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan II [125 org x 12 hari]	1500.0 OH	30,000	45,000,000	
	- Biaya uang lembur Gol III [366 orang x 12 jam]	4392.0 OJ	20,000	87,840,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan III [583 org x 12 hari]	6996.0 OH	32,000	223,872,000	
	- Biaya uang lembur Gol IV [73 orang x 12 jam]	876.0 OJ	25,000	21,900,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan IV [167 org x 12 hari]	2004.0 OH	36,000	72,144,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			10,388,668,000	U
<i>A</i>	<u>KESEHATAN PEGAWAI</u>			100,000,000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			100,000,000	RM
	- Biaya pembelian obat-obatan keperluan poliklinik kantor BPHN [1 kgt x 1 thn]	1.0 thn	100,000,000	100,000,000	
<i>B</i>	<u>PAKAIAN DINAS PEGAWAI</u>			271,180,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V)			271,180,000	RM
	> Pengadaan pakaian dinas resmi pegawai			271,180,000	
	- Pegawai [242 orang x 1 stel]	242.0 stel	790,000	191,180,000	
	- Atribut [242 orang x 1 paket]	242.0 paket	200,000	48,400,000	
	- Satpam [12 orang x 1 stel]	12.0 stel	1,000,000	12,000,000	
	- Dokter [2 orang x 1 stel]	2.0 stel	900,000	1,800,000	
	- Perawat [2 orang x 1 stel]	2.0 stel	700,000	1,400,000	
	- Pramubakti/Cleaning Service [35 orang x 1 stel]	35.0 stel	400,000	14,000,000	
	- Supir [6 orang x 1 stel]	6.0 stel	400,000	2,400,000	
<i>C</i>	<u>BIAYA PERAWATAN GEDUNG KANTOR</u>			1,110,069,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,078,224,000	RM
	- Pemeliharaan/peningkatan fungsi sarana lingkungan gedung kantor BPHN (jalan, taman, dll)	8733.0 M2	11,000	96,063,000	
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional	8945.0 M2	109,800	982,161,000	
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			31,845,000	RM
	- Pengadaan Lampu Bohlam/Neon [1 Paket]	1.0 Paket	31,845,000	31,845,000	
<i>D</i>	<u>PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG KANTOR</u>			567,120,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			567,120,000	RM
	- Perawatan Inventaris Kantor [242 peg x 1 tahun]	242.0 unit	80,000	19,360,000	
	- Facsimile dan Telepon (80 unit) [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	24,970,000	24,970,000	
	- Perawatan Komputer [129 unit x 1 tahun]	129.0 unit	560,000	72,240,000	
	- Perawatan Server [5 unit x 1 tahun]	5.0 unit	2,000,000	10,000,000	
	- Perawatan Printer [78 unit x 1 tahun]	78.0 unit	500,000	39,000,000	
	- Perawatan Peralatan kedokteran/poliklinik [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	15,000,000	15,000,000	
	- Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) [90 unit x 1 tahun]	90.0 unit	175,000	15,750,000	
	- Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing [106 unit x 1 tahun]	106.0 unit	500,000	53,000,000	
	- Perawatan Laptop [22 unit x 1 tahun]	22.0 unit	500,000	11,000,000	
	- Perawatan Genset 100 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
	- Perawatan Genset 125 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	10,300,000	10,300,000	
	- Perawatan Genset 300 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	20,500,000	20,500,000	
	- Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	130,000,000	130,000,000	
	- Perawatan Mesin Pompa Air [12 unit x 1 tahun]	12.0 unit	3,000,000	36,000,000	
	- Perawatan Mesin Foto Copy (8 unit) [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	20,000,000	20,000,000	
	- Perawatan Lift BPHN [2 unit x 1 tahun]	2.0 unit	30,000,000	60,000,000	
	- Pemeliharaan mesin absensi [4 unit x 1 tahun]	4.0 unit	5,000,000	20,000,000	
<i>E</i>	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR RODA 4/6			607,350,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			607,350,000	RM
	- Kendaraan Operasional [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	33,350,000	33,350,000	
	- Kendaraan Roda 6 [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	36,000,000	36,000,000	
	- Roda 4 [20 unit x 1 tahun]	20.0 unit	26,500,000	530,000,000	
	- Biaya Pembelian BBM dalam rangka Penyuluhan Hukum Keliling [1 Unit x 1 Tahun]	1.0 KGT	8,000,000	8,000,000	
<i>F</i>	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR RODA 2			20,000,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,000,000	RM
	- Roda 2 [10 unit x 1 tahun]	10.0 unit	2,000,000	20,000,000	
<i>G</i>	LANGGANAN DAYA DAN JASA			1,904,400,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,430,400,000	RM
	- Listrik Kantor BPHN [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	119,200,000	1,430,400,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.139-Jakarta V)			54,000,000	RM
	- Telepon kantor BPHN [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	4,500,000	54,000,000	
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			420,000,000	RM
	- Langganan Internet Kantor [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	35,000,000	420,000,000	
<i>H</i>	KEPERLUAN PERKANTORAN			3,234,147,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,940,808,000	RM
	- Honorarium Petugas Pengamanan non PNS [12 orang x 13 bulan]	156.0 OB	4,100,000	639,600,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS (Koordinator) [1 orang x 13 bulan]	13.0 OB	3,900,000	50,700,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS [4 orang x 13 bulan]	52.0 OB	3,700,000	192,400,000	
	- Honor Petugas Kebersihan Dalam Gedung non PNS [19 orang x 13 bulan]	247.0 OB	3,600,000	889,200,000	
	- Honorarium Pengemudi non PNS (1 orang x 13 bulan)	13.0 OB	3,300,000	42,900,000	
	- Honor Pramubakti non PNS [9 orang x 13 bulan]	117.0 OB	4,100,000	479,700,000	
	- luran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja [50 Org x 12 Bln]	600.0 OB	25,000	15,000,000	
	- Honorarium Pengemudi Kepala BPHN non PNS [1 orang x 13 bulan]	13.0 OB	4,300,000	55,900,000	
	- Honorarium Pengemudi BPHN non PNS [5 orang x 13 bulan]	65.0 OB	4,100,000	266,500,000	
	- Biaya refile tinta printer, tinta foto copy, dll [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	78,148,000	78,148,000	
	- Pengelolaan Sampah Kantor BPHN (Biaya Retribusi dan Pengangkutan) [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	1,500,000	18,000,000	
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya [242 orang x 1 tahun]	242.0 orang	780,000	188,760,000	
	- Biaya Langganan TV kabel [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	2,000,000	24,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,527,000	RM
	- Biaya pengiriman pos surat/bahan	1.0 Pkt	2,527,000	2,527,000	
	- biaya pengiriman kalender BPHN	1.0 Pkt	5,000,000	5,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			267,812,000	RM
	- Biaya pembelian/pembuatan plakat/souvenir/cinderamata [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	30,000,000	30,000,000	
	- Biaya pembelian ATK Rutin [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	133,635,000	133,635,000	
	- Biaya pengadaan alat/sarana prasarana kebersihan (tissue, sapu, semir lantai, dll) [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	104,177,000	104,177,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,000,000	RM
	- Biaya pembelian solar/BBM untuk operasional Genset dan mesin potong rumput [1 kgt x 12 bulan x 150 liter]	1800.0 liter	10,000	18,000,000	
/	COORDINASI DAN KONSULTASI INTANSI TERKAIT			627,598,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi.COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,948,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [1 Orang x 42 Kali]	42.0 OK	99,000	4,158,000	
	- Biaya Pemeriksaan PCR [1 Orang x 42 Kali]	42.0 OK	495,000	20,790,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			602,650,000	RM
	> Yogyakarta			23,288,000	
	- Biaya Tiket PP [4 Orang x 1 Kali]	4.0 OK	2,250,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 Orang x 3 Hari]	12.0 OH	420,000	5,040,000	
	- Biaya Penginapan [4 Orang x 2 Hari]	8.0 OH	800,000	6,400,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	100,000	800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	> Jawa Timur			17,994,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,540,000	7,620,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	664,000	3,984,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	194,000	1,164,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Jawa Tengah			21,800,000	
	- Biaya Tiket PP [4 Orang x 1 Kali]	4.0 OK	2,000,000	8,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 Orang x 3 Hari]	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya Penginapan [4 Orang x 2 Hari]	8.0 OH	664,000	5,312,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	190,000	1,520,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	> Lampung			13,836,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	1,500,000	4,500,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	580,000	3,480,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sumatera Utara			22,608,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,450,000	10,350,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,000,000	6,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	232,000	1,392,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Bali			26,070,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,800,000	10,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	159,000	954,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Selatan			23,376,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,500,000	10,500,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,100,000	6,600,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	145,000	870,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Riau			24,378,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,016,000	9,048,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,650,000	9,900,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	94,000	564,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kepulauan Riau			20,532,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,888,000	8,664,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,030,000	6,180,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	137,000	822,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Jambi			20,400,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,460,000	7,380,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,212,000	7,272,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	147,000	882,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sumatera Barat			23,070,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,952,000	8,856,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,353,000	8,118,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	190,000	1,140,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sumatera Selatan			21,528,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	128,000	768,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Bengkulu			22,386,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,500,000	7,500,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,546,000	9,276,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	109,000	654,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Bangka Belitung			23,508,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,000,000	6,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,957,000	11,742,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	90,000	540,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Nusa Tenggara Barat			23,682,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,300,000	7,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	231,000	1,386,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Nusa Tenggara Timur			28,254,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	5,000,000	15,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,200,000	7,200,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	108,000	648,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Aceh			26,754,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	4,492,000	13,476,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	360,000	3,240,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,294,000	7,764,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	123,000	738,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Barat			20,646,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,700,000	8,100,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,125,000	6,750,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	140,000	840,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Tengah			21,348,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,984,000	8,952,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	360,000	3,240,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,160,000	6,960,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	110,000	660,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Selatan			23,841,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,995,000	8,985,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Timur			28,539,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,797,000	11,391,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,507,000	9,042,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	450,000	2,700,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Utara			27,204,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	5,102,000	15,306,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,034,000	6,204,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	138,000	828,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Tengah			29,856,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	5,000,000	15,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	165,000	990,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Tenggara			25,476,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	4,000,000	12,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,250,000	7,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	170,000	1,020,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Papua			42,276,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	7,000,000	21,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	580,000	5,220,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	2,000,000	12,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	420,000	2,520,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
J	PENANGANAN COVID-19			444,564,000	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			111,012,000	RM
	- Biaya Sewa Licensi Aplikasi (Partisipan sampai dengan 100 Org) [7 paket x 12 bulan]	84.0 bulan	350,000	29,400,000	
	- Biaya Sewa Licensi Aplikasi (Partisipan sampai dengan 500 Org) [2 paket x 12 bulan]	24.0 bulan	1,000,000	24,000,000	
	- Biaya pembelian multivitamin covid-19	1.0 PAKET	23,972,000	23,972,000	
	- Biaya pembelian masker	116.0 box	290,000	33,640,000	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			24,750,000	RM
	- Biaya pembelian hand sanitizer	50.0 buah	471,000	23,550,000	
	- Biaya pembelian Baju / APD	4.0 buah	300,000	1,200,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			308,802,000	RM
	- Biaya penyemprotan disinfectan [8222 M2 x 12 kali]	98664.0 M2	2,000	197,328,000	
	- Biaya Swab PCR [150 Orang x 1 Kali]	150.0 OK	495,000	74,250,000	
	- Biaya Rapid Test Antibody/Swab Antigen [376 Orang x 1 Kali]	376.0 OK	99,000	37,224,000	
K	Jamuan Tamu Pimpinan			50,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V)			50,000,000	RM
L	- Jamuan tamu	1.0 Thn	50,000,000	50,000,000	
	<i>Honor Operasional Satuan Kerja</i>			200,640,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.139-Jakarta V)			200,640,000	RM
	> Tim Pengelolaan Keuangan			175,440,000	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	3,420,000	41,040,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	3,320,000	39,840,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	2,210,000	26,520,000	
	- Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,520,000	18,240,000	
	- Honor Bendaharawan Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,320,000	15,840,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	570,000	6,840,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	640,000	7,680,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	810,000	9,720,000	
	- Honor Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	810,000	9,720,000	
	> Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)			25,200,000	
	- Honor Penanggungjawab [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honor Koordinator [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	400,000	4,800,000	
	- Honor Ketua/Wakil Ketua [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	350,000	4,200,000	
	- Honor Anggota/Petugas [3 orang x 12 bulan]	36.0 OB	300,000	10,800,000	
M	<i>SEWA OPERASIONAL PERKANTORAN</i>			1,251,600,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,080,600,000	RM
	- Biaya sewa kendaraan operasional Eselon I [1 unit x 12 bulan]	12.0 Bln	17,600,000	211,200,000	
	- Biaya sewa kendaraan operasional Eselon II [5 unit x 12 bulan]	60.0 Bln	13,250,000	795,000,000	
	- Biaya sewa kendaraan operasional [1 unit x 12 bulan]	12.0 Bln	6,200,000	74,400,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			171,000,000	RM
	- Biaya Pembelian BBM Kendaraan Operasional Eselon I [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	31,000,000	31,000,000	
	- Biaya Pembelian BBM Kendaraan Operasional Eselon II [5 unit x 1 tahun]	5.0 unit	28,000,000	140,000,000	
1614.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	175.0 Unit		9,225,050,000	
1614.EBB.951	Lokasi : INSTANSI PUSAT <u>Layanan Sarana Internal</u>	174.0 Unit		3,413,050,000	
051	<u>Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</u>			2,184,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,184,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,184,800,000	RM
	- Display (Videotron LED) [1 unit]	1.0 unit	1,030,000,000	1,030,000,000	
	- Tablet PC [1 unit]	1.0 unit	30,300,000	30,300,000	
	- Pengadaan Komputer Jinjing [5 unit]	5.0 unit	37,500,000	187,500,000	
	- Pengadaan Komputer Meja [20 unit]	20.0 unit	27,000,000	540,000,000	
	- Pengadaan Printer [10 unit]	10.0 Unit	20,000,000	200,000,000	
	- Pengadaan TV [1 unit]	1.0 unit	62,000,000	62,000,000	
	- Scanner [5 unit]	5.0 unit	27,000,000	135,000,000	
052	Kendaraan Bermotor			678,050,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			678,050,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			678,050,000	RM
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 [1 unit]	1.0 unit	678,050,000	678,050,000	
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran			550,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			550,200,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			550,200,000	RM
	- Pengadaan Kursi Besi/Metal [30 unit]	30.0 unit	1,700,000	51,000,000	
	- Filling Cabinet Besi [10 unit]	10.0 unit	3,500,000	35,000,000	
	- Pengadaan AC Split [10 unit]	10.0 unit	9,800,000	98,000,000	
	- Lemari Kayu [5 unit]	5.0 unit	3,000,000	15,000,000	
	- Lemari Besi/Metal [2 unit]	2.0 unit	3,600,000	7,200,000	
	- Meja Kerja Kayu [10 unit]	10.0 unit	5,000,000	50,000,000	
	- Pompa Air [3 unit]	3.0 unit	10,000,000	30,000,000	
	- Dispenser [50 unit]	50.0 unit	3,700,000	185,000,000	
	- Lemari Es [5 unit]	5.0 unit	9,800,000	49,000,000	
	- Alat Penghancur Kertas [5 unit]	5.0 unit	6,000,000	30,000,000	
1614.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		5,812,000,000	U
051	Gedung dan Bangunan			5,812,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,812,000,000	
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,812,000,000	RM
	> Renovasi Gedung Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional			5,812,000,000	
	- Biaya Kontruksi Fisik SJDI	1800.0 m2	2,570,000	4,626,000,000	
	- Biaya Perencanaan Konstruksi	1.0 PKT	507,000,000	507,000,000	
	- Biaya Pengawasan Konstruksi	1.0 PKT	512,000,000	512,000,000	
	- Biaya Pengelolaan Kegiatan	1.0 PKT	167,000,000	167,000,000	
1614.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	239.0 Orang		416,124,000	
1614.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	239.0 Orang		416,124,000	
051	Pemutakhiran Data dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian			63,844,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			63,844,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			44,844,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	8,000,000	8,000,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 8 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	- Biaya pembuatan plakat penghargaan pegawai	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya pembuatan medali penghargaan pegawai	2.0 PKT	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya pembuatan piagam penghargaan pegawai (cetak bingkai)	2.0 PKT	500,000	1,000,000	
	> Tim Pengawas dan Pengendalian Internal BPHN			14,734,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,184,000	2,184,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 6 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [50 orang x 2 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [50 orang x 2 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	> Tim Penghargaan Pegawai BPHN			7,690,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,040,000	2,040,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 6 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	> Kegiatan Pengolahan Data Pegawai BPHN			2,670,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,020,000	1,020,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 3 kali]	75.0 OK	22,000	1,650,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	4,000,000	4,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	Honor narasumber Eksternal kegiatan Tim Pengawas dan Pengendalian Internal BPHN (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 2 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [6 orang x 15 kali]	90.0 OK	100,000	9,000,000	
052	Perencanaan Kebutuhan, Pengembangan Kompetensi serta Penilaian Kinerja Pegawai			89,630,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			89,630,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 7 kali] > Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BPHN - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 7 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 4 kali] > Sosialisasi e-LHKPN dan e-LHKASN - Biaya konsumsi makan rapat [50 orang x 1 Kali] - Biaya konsumsi snack kegiatan [50 orang x 1 Kali] - Biaya penggandaan dan penjiilidan > Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai - Biaya konsumsi makan kegiatan [50 orang x 1 Kali] - Biaya konsumsi snack kegiatan [50 orang x 1 kali] - Biaya penggandaan dan penjiilidan > Kegiatan Pelantikan Pejabat - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack kegiatan [50 orang x 7 kali] - Biaya konsumsi makan kegiatan [50 orang x 7 kali]	1.0 PKT 140.0 OK 1.0 PKT 175.0 OK 100.0 OK 50.0 OK 50.0 OK 1.0 PKT 50.0 OK 50.0 OK 1.0 PKT 1.0 PKT 350.0 OK 350.0 OK	6,000,000 22,000 1,050,000 22,000 47,000 47,000 22,000 500,000 47,000 22,000 500,000 1,050,000 22,000 47,000	51,780,000 6,000,000 3,080,000 9,600,000 1,050,000 3,850,000 4,700,000 3,950,000 2,350,000 1,100,000 500,000 3,950,000 2,350,000 1,100,000 500,000 25,200,000 1,050,000 7,700,000 16,450,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Jasa Rohaniawan [2 orang x 7 kali]	14.0 OK	400,000	5,600,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) Biaya dalam rangka mendukung pendidikan/pelatihan/pengembangan pegawai (SDM) [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	6,500,000	6,500,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,000,000	4,000,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) Honor narasumber Eksternal Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BPHN (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 2 kgt] - Honor narasumber Sosialisasi e-LHKPN dan e-LHKASN (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam] - Honor narasumber kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 1 KGT]	6.0 OJ 3.0 OJ 3.0 OJ	1,000,000 1,000,000 1,000,000	6,000,000 3,000,000 3,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [9 orang x 10 kali] - Biaya transport lokal orang luar BPHN [5 org x 1 kali]	90.0 OK 5.0 OK	100,000 150,000	9,750,000 9,000,000 750,000	RM
053	Pengelolaan Jabatan Fungsional			262,650,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			262,650,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			94,482,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	8,552,000	8,552,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 12 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 3 kali]	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	> Kegiatan FGD/Bimtek/Workshop Jabatan Fungsional			28,960,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,360,000	1,360,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [100 orang x 4 kali]	400.0 OK	22,000	8,800,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [100 orang x 4 kali]	400.0 OK	47,000	18,800,000	
	> Internalisasi Peraturan Pendukung Jabatan Fungsional			21,720,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [100 orang x 3 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [100 orang x 3 kali]	300.0 OK	47,000	14,100,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,020,000	1,020,000	
	> Kegiatan CLE			14,480,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [100 orang x 2 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [100 orang x 2 kali]	200.0 OK	47,000	9,400,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	680,000	680,000	
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			10,645,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat di daerah 20 orang x 6 kali [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat di daerah 20 orang x 6 kali	120.0 OK	47,000	5,640,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,045,000	1,045,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,000,000	4,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			49,800,000	RM
	- Honor narasumber Kegiatan FGD/Bimtek/Workshop Jabatan Fungsional (setara Eselon III) [2 orang x 3 jam x 4 KGT]	24.0 OJ	900,000	21,600,000	
	- Honor narasumber Eksternal Internalisasi Peraturan Pendukung Jabatan Fungsional (setara Eselon III) [2 orang x 3 jam x 3 KGT]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	
	- Honor narasumber Eksternal kegiatan CLE (setara Eselon II) [2 orang x 3 jam x 2 KGT]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,616,000	RM
	- Biaya Antigen [4 orang x 2 kali x 3 kgt]	24.0 OK	109,000	2,616,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			97,052,000	RM
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Jawa Barat			8,750,000	
	- Biaya uang harian [4 orang x 2 hari]	8.0 OH	430,000	3,440,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,200,000	1,200,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [3 orang x 1 hari]	3.0 OH	570,000	1,710,000	
	- Biaya penggantian transport PP Jawa Barat (4.0 orang x 1.0 kegiatan) [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	300,000	2,400,000	
	> Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Banten			8,594,000	
	- Biaya uang harian [4 orang x 2 hari]	8.0 OH	370,000	2,960,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,000,000	1,000,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [3 orang x 1 hari]	3.0 OH	718,000	2,154,000	
	- Biaya penggantian transport PP Banten (4.0 orang x 1.0 kegiatan)	8.0 OK	310,000	2,480,000	
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di NTT			32,872,000	
	- Biaya tiket pesawat PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	4,800,000	19,200,000	
	- Biaya uang harian [4 orang x 3 hari x 1 kali]	12.0 OH	430,000	5,160,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 orang x 2 hari x 1 kali]	2.0 OH	1,300,000	2,600,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [3 orang x 2 hari x 1 kali]	6.0 OH	500,000	3,000,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya taksi Provinsi Tujuan PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]	8.0 OK	108,000	864,000	
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Jawa Tengah			20,908,000	
	- Biaya tiket pesawat PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	2,150,000	8,600,000	
	- Biaya uang harian [4 orang x 3 hari x 1 kali]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 orang x 2 hari x 1 kali]	2.0 OH	900,000	1,800,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [3 orang x 2 hari x 1 kali]	6.0 OH	550,000	3,300,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya taksi Provinsi Tujuan PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]	8.0 OK	90,000	720,000	
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Sumatera Barat			25,928,000	
	- Biaya tiket pesawat PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	2,900,000	11,600,000	
	- Biaya uang harian [4 orang x 3 hari x 1 kali]	12.0 OH	380,000	4,560,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [1 orang x 2 hari x 1 kali]	2.0 OH	1,300,000	2,600,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [3 orang x 2 hari x 1 kali]	6.0 OH	600,000	3,600,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	- Biaya taksi Provinsi Tujuan PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]	8.0 OK	190,000	1,520,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,700,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [6 orang x 17 kali]	102.0 OK	100,000	10,200,000	
	- Biaya transport lokal orang luar BPHN [2 orang x 15 kali]	30.0 OK	150,000	4,500,000	
1614.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	5.0 Dokumen		1,671,992,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1614.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		290,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Penyusunan Rencana Program/Kegiatan/Anggaran			243,071,000	U
<i>A</i>	<i>Penyusunan Rencana Kerja Program</i>			<i>73,897,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,360,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	3,060,000	3,060,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 15 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,540,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,540,000	1,540,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,188,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [3 org x 2 kali x 2 kgt]	12.0 OK	99,000	1,188,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			46,809,000	RM
	> BALI			22,200,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,262,000	9,786,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	910,000	5,460,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	189,000	1,134,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			24,609,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	5,081,000	15,243,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	550,000	3,300,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	250,000	1,500,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	116,000	696,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [4 orang x 10 kali]	40.0 OK	100,000	4,000,000	
<i>B</i>	<i>Penyusunan Postur</i>			<i>19,357,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,137,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,857,000	1,857,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,220,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,220,000	1,220,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [4 orang x 10 kali]	40.0 OK	100,000	4,000,000	RM
C	<u>Penyusunan RKA-KL</u>			131,730,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 12 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 3 kali]	1.0 PKT 240.0 OK 60.0 OK	4,000,000 22,000 47,000	4,000,000 5,280,000 2,820,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,891,000	1,891,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen [4 org x 2 kali x 2 kgt]	16.0 OK	99,000	1,584,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > SUMATERA UTARA - Tiket PP [5 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [5 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [5 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [5 orang x 2 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [5 orang x 2 kali x 1 kgt] > SUMATERA SELATAN - Tiket PP [5 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [5 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [5 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [5 orang x 2 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [5 orang x 2 kali x 1 kgt] > KALIMANTAN TIMUR - Tiket PP [5 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [5 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [5 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [5 orang x 2 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [5 orang x 2 kali x 1 kgt]			103,055,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,100,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 10 kali]	50.0 OK	100,000	5,000,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [5 orang x 2 hari]	10.0 OH	210,000	2,100,000	
	<i>Evaluasi Renstra BPHN</i>			18,087,000	
D					
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,080,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	4,000,000	4,000,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,007,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,007,000	1,007,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 6 kali]	30.0 OK	100,000	3,000,000	
052	Evaluasi Program dan Anggaran			46,929,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			46,929,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,040,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,940,000	1,940,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 12 kali]	240.0 OK	22,000	5,280,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,085,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,085,000	2,085,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [3 orang x 2 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			792,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [4 org x 2 kali]	8.0 OK	99,000	792,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,412,000	RM	
	> JOGJAKARTA			12,228,000		
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,268,000	4,536,000		
	- Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	420,000	2,520,000		
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	845,000	3,380,000		
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	250,000	1,000,000		
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	198,000	792,000		
	> JAWA TIMUR			12,184,000		
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,674,000	5,348,000		
	- Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	410,000	2,460,000		
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	650,000	2,600,000		
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	250,000	1,000,000		
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	194,000	776,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,600,000		RM
	- Biaya Transport Lokal [4 orang x 9 kali]	36.0 OK	100,000	3,600,000		
1614.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		249,691,000		U
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BPHN			176,918,000		
A	<i>Pengumpulan dan Supervisi Data</i>			<i>169,898,000</i>		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,718,000	RM	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 7 kali]	175.0 OK	22,000	3,850,000		
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 7 kali]	175.0 OK	47,000	8,225,000		
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	643,000	643,000		
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			824,000	RM	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	824,000	824,000		
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,640,000	RM	
	- Biaya SWAB PCR di jawa dan bali [3 org x 2 kali x 2 kgt]	12.0 OK	495,000	5,940,000		
	- Biaya SWAB Antigen di luar pulau jawa dan bali [2 org x 2 kali x 7 kgt]	28.0 OK	525,000	14,700,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			132,716,000	RM
	> ACEH			11,900,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,000,000	6,000,000	
	- Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	360,000	2,160,000	
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	556,000	2,224,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	123,000	492,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			20,232,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	725,000	4,350,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	231,000	1,386,000	
	> BALI			21,450,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	910,000	5,460,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	189,000	1,134,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			18,714,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	659,000	3,954,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	134,000	804,000	
	> JOGJAKARTA			20,574,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	845,000	5,070,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	198,000	1,188,000	
	> RIAU			19,800,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	852,000	5,112,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	137,000	822,000	
	> SUMATERA SELATAN			20,046,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	861,000	5,166,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	RM
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	154,000	924,000	
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 6 kali]	30.0 OK	100,000	3,000,000	
<i>B</i>	<i>Verifikasi dan Validasi Target Kinerja BPHN</i>			7,020,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,520,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 5 kali]	25.0 OK	100,000	2,500,000	
052	Pengendalian Kinerja BPHN			25,104,000	U
<i>A</i>	<i>Analisa Capaian Kinerja Program</i>			6,595,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,595,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [35 orang x 1 kali]	35.0 OK	47,000	1,645,000	
	- Biaya cetak piagam penghargaan dan pemasangan bingkai	33.0 Buah	70,000	2,310,000	
<i>B</i>	<i>Rapat Koordinasi Capaian Kinerja</i>			18,509,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,030,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [35 orang x 10 kali]	350.0 OK	22,000	7,700,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [35 orang x 4 kali]	140.0 OK	47,000	6,580,000	
	- Biaya Spanduk	2.0 Buah	375,000	750,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			479,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	479,000	479,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 10 kali]	30.0 OK	100,000	3,000,000	
053	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja			47,669,000	U
<i>A</i>	<i>Penyusunan Bahan Rapat Kerja</i>			13,495,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,200,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 10 kali]	250.0 OK	22,000	5,500,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,795,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,795,000	1,795,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 5 kali]	15.0 OK	100,000	1,500,000	
B	<u>Rapat Koordinasi Capaian Kinerja</u>			13,115,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11,175,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 5 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [30 orang x 5 kali]	150.0 OK	47,000	7,050,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	825,000	825,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			440,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	440,000	440,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 5 kali]	15.0 OK	100,000	1,500,000	
C	<u>Penyusunan LKIP, Laporan SPIP dan Manajemen Risiko</u>			21,059,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			14,900,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	47,000	9,400,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,100,000	1,100,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,159,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,159,000	1,159,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [2 orang x 2 jam]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 orang x 5 kali]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
1614.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		357,725,000	
051	Pelaksanaan Anggaran			100,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,257,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjilidan	1.0 PKT	3,267,000	3,267,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,921,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,921,000	2,921,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp. 49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [2 orang x 3 jam]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi.COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen Jawa-Bali [9 orang x 2 kali] - Biaya Swab Antigen Luar Jawa-Bali [6 orang x 1 kali]	18.0 OK 6.0 OK	99,000 109,000	1,782,000 654,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Jawa Barat - Biaya transport darat [4 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [4 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [4 orang x 3 hari] > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Jawa Tengah - Biaya tiket PP [2 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Sulawesi Utara - Biaya tiket PP [2 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Kalimantan Selatan - Biaya tiket PP [2 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] > Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Sumatera Selatan - Biaya tiket PP [2 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [2 orang x 2 kali x 1 pp]			64,786,000 12,120,000 2,400,000 4,560,000 5,160,000 10,368,000 4,364,000 2,400,000 2,220,000 1,024,000 360,000 17,912,000 10,204,000 3,912,000 2,220,000 1,024,000 552,000 12,486,000 5,990,000 2,592,000 2,280,000 1,024,000 600,000 11,900,000 4,536,000 3,444,000 2,280,000 1,024,000 616,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [3 orang x 52 kali]	156.0 OK	100,000	15,600,000	RM
052	Pengelolaan Perbendaharaan			100,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 7 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 7 kali] - Biaya penggandaan dan penjiilidan > KEGIATAN WORKSHOP PEMBEKALAN ADMINISTRASI KEUANGAN TH. 2022 - Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 2 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [30 orang x 2 kali] - Biaya penggandaan dan penjiilidan	140.0 OK 140.0 OK 1.0 PKT 60.0 OK 60.0 OK 1.0 PKT	22,000 47,000 540,000 22,000 47,000 815,000	15,155,000 3,080,000 6,580,000 540,000 4,955,000 1,320,000 2,820,000 815,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	15,017,000	15,017,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [1 orang x 3 jam]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen Jawa-Bali [7 orang x 2 kali] - Biaya Swab Antigen Luar Jawa-Bali [3 orang x 2 kali]	14.0 OK 6.0 OK	99,000 109,000	2,040,000 1,386,000 654,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Monitoring Kegiatan Pembinaan Perbendaharaan di Kanwil Jawa Barat - Biaya transport darat PP [7 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [7 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [7 orang x 3 hari] > Monitoring Kegiatan Pembinaan Perbendaharaan di Kanwil Yogyakarta - Biaya tiket PP [3 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [3 orang x 2 hari] - Biaya uang harian [3 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [3 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [3 orang x 2 kali x 1 pp]	7.0 OK 14.0 OH 21.0 OH 3.0 OK 6.0 OH 9.0 OH 6.0 OK 6.0 OK	600,000 570,000 430,000 2,268,000 845,000 420,000 256,000 198,000	39,588,000 21,210,000 4,200,000 7,980,000 9,030,000 18,378,000 6,804,000 5,070,000 3,780,000 1,536,000 1,188,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [3 orang x 84 kali]	252.0 OK	100,000	25,200,000 25,200,000	RM
053 A	Penyusunan Laporan Keuangan <i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			157,725,000 157,725,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker > - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya seminar kit [4 org x 2 paket] - Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 3 kali] - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 3 kali] > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 4 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 4 kali]			20,423,000 6,021,000 1,716,000 1,200,000 2,115,000 990,000 14,402,000 10,262,000 1,320,000 2,820,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker > - Biaya pembelian ATK > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya pembelian ATK			5,556,000 2,838,000 2,838,000 2,718,000 2,718,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen [4 orang x 4 kali] - Biaya Swab PCR [4 orang x 2 kali]			5,544,000 1,584,000 3,960,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di Yogyakarta - Biaya tiket PP [4 orang x 2 kali] - Biaya uang harian [4 orang x 4 hari] - Biaya penginapan setara eselon III [2 orang x 3 hari] - Biaya penginapan golongan III [2 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [4 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [4 orang x 2 kali x 1 pp] > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di Bali - Biaya tiket PP [4 orang x 2 kali] - Biaya uang harian [4 orang x 4 hari] - Biaya penginapan setara eselon III [2 orang x 3 hari] - Biaya penginapan golongan III [2 orang x 3 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [4 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [4 orang x 2 kali x 1 pp]			86,894,000 39,726,000 16,000,000 6,720,000 8,304,000 5,070,000 2,048,000 1,584,000 47,168,000 24,000,000 7,680,000 6,468,000 5,460,000 2,048,000 1,512,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker - Biaya Transport Lokal [3 orang x 12 kali]	36.0 OK	100,000	3,600,000	RM
				7,200,000	
				3,600,000	
				3,600,000	
				3,600,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker di Provinsi DKI Jaka - Biaya Transport Darat PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	150,000	600,000	RM
				17,844,000	
				17,844,000	
				14,364,000	
				2,880,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker di Provinsi Jawa Bar - Biaya Transport Darat PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	500,000	2,000,000	RM
				14,264,000	
				14,264,000	
				9,864,000	
				2,400,000	
1614.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen		328,543,000	
051	Perencanaan Reformasi Birokrasi			46,063,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			46,063,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 25 kali]	625.0 OK	22,000	13,750,000	RM
				4,700,000	
				3,000,000	
				3,500,000	
				3,500,000	
				1,191,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	3,822,000	3,822,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. I [2 orang x 2 jam]	4.0 OJ	1,400,000	5,600,000	RM
				4,000,000	
				3,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [2 orang x 15 kali]	30.0 OK	100,000	3,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			236,550,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			236,550,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			41,575,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 35 kali]	875.0 OK	22,000	19,250,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 12 kali]	300.0 OK	47,000	14,100,000	
	- Biaya Spanduk	7.0 Buah	375,000	2,625,000	
	- Biaya Pembuatan Roll Banner	10.0 Buah	350,000	3,500,000	
	- Biaya Pembuatan Banner	6.0 Buah	350,000	2,100,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			36,600,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. I [5 orang x 2 jam]	10.0 OJ	1,400,000	14,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [5 orang x 2 jam]	10.0 OJ	1,000,000	10,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. III [7 orang x 2 jam]	14.0 OJ	900,000	12,600,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,445,000	RM
	- Biaya SWAB Antigen [55 org x 1 kali]	55.0 OK	99,000	5,445,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 15 kali]	45.0 OK	100,000	4,500,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			148,430,000	RM
	- Biaya paket meeting fullboard (Pejabat setara Es I dan II) [10 org x 2 paket]	20.0 OP	1,110,000	22,200,000	
	- Biaya paket meeting fullboard (Pejabat Eselon III ke bawah) [45 org x 2 paket]	90.0 OP	822,000	73,980,000	
	- Biaya penggantian transport jakarta-Jawa Barat pp [55 org x 1 kali]	55.0 OK	500,000	27,500,000	
	- Biaya uang harian paket fullboard [55 org x 3 hari]	165.0 OH	150,000	24,750,000	
053	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi			45,930,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			45,930,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			23,930,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 20 kali]	400.0 OK	22,000	8,800,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 15 kali]	300.0 OK	47,000	14,100,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,030,000	1,030,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,000,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [5 orang x 2 jam]	10.0 OJ	1,000,000	10,000,000	
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. III [5 orang x 2 jam]	10.0 OJ	900,000	9,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 10 kali]	30.0 OK	100,000	3,000,000	
1614.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen		446,033,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp.49,711,976,000

Halaman : 89

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Pelaksanaan Ketatusahaan dan Arsip			46,033,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			46,033,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,700,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 10 kali]	250.0 OK	22,000	5,500,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 10 kali]	250.0 OK	47,000	11,750,000	
	- Biaya Spanduk	1.0 Buah	450,000	450,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,033,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,033,000	2,033,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			16,800,000	RM
	- Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. I [1 orang x 12 jam]	12.0 OJ	1,400,000	16,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 15 kali]	75.0 OK	100,000	7,500,000	
052	Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis			400,000,000	U
A	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			30,250,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 20 kali]	500.0 OK	22,000	11,000,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 10 kali]	250.0 OK	47,000	11,750,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	7,500,000	7,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,342,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	5,342,000	5,342,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,308,000	RM
	- Biaya SWAB Antigen [1 org x 2 kali x 6 kgt]	12.0 OK	109,000	1,308,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,900,000	RM
	- Tiket PP [1 orang x 6 kali]	6.0 OK	5,000,000	30,000,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari x 6 kgt]	18.0 OH	400,000	7,200,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari x 6 kgt]	12.0 OH	1,500,000	18,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 orang x 2 kali x 6 kgt]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II [1 org x 3 hari x 6 kgt]	18.0 OH	150,000	2,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 orang x 11 kali x 1 Kgt]	22.0 OK	100,000	2,200,000	
B	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Perencanaan Hukum</i>			100,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,330,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 7 kali]	210.0 OK	22,000	4,620,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [30 orang x 7 kali]	210.0 OK	47,000	9,870,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	840,000	840,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,722,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	6,722,000	6,722,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,960,000	RM
	- Biaya SWAB Antigen [2 org x 20 Kgt x 0 kgt]	40.0 OK	99,000	3,960,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			69,088,000	RM
	- Tiket PP [1 orang x 7 kali]	7.0 OK	5,000,000	35,000,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari x 7 Kgt]	21.0 OH	420,000	8,820,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari x 7 Kgt]	14.0 OH	1,000,000	14,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 orang x 7 Kgt x 2 Kali]	14.0 OK	256,000	3,584,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [1 orang x 2 kali x 7 Kgt]	14.0 OK	256,000	3,584,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II [1 org x 2 hari x 2 kgt]	4.0 OH	150,000	600,000	
	- Biaya Transport Darat [1 org x 2 kali x 7 Kgt]	14.0 OK	250,000	3,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,900,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 7 kali x 7 Kgt]	49.0 OK	100,000	4,900,000	
C	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Analisis dan Evaluasi</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,668,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [14 orang x 8 kali]	112.0 OK	22,000	2,464,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [14 orang x 2 kali]	28.0 OK	47,000	1,316,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	2,888,000	2,888,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,000,000	4,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,082,000	RM
	- Biaya SWAB Antigen [13 org x 2 kali x 1 kgt]	26.0 OK	99,000	2,574,000	
	- Biaya Pemeriksaan Swab PCR [6 Orang x 1 Kgt x 2 Kali]	12.0 OK	459,000	5,508,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp.49,711,976,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			81,250,000	RM
	- Tiket PP [1 orang x 13 kali]	13.0 OK	3,500,000	45,500,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 2 hari x 13 kgt]	26.0 OH	400,000	10,400,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari x 13 kgt]	13.0 OH	1,000,000	13,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 orang x 2 kali x 13 kgt]	26.0 OK	250,000	6,500,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [1 orang x 2 kali x 13 kgt]	26.0 OK	150,000	3,900,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II [1 org x 1 hari x 13 kgt]	13.0 OH	150,000	1,950,000	
D	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			21,100,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya konsumsi snack konsultasi Anggota JDH [5 orang x 100 kali]	500.0 OK	22,000	11,000,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,500,000	4,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			68,400,000	RM
	- Tiket PP [6 orang x 1 kali]	6.0 OK	4,500,000	27,000,000	
	- Biaya uang harian [6 orang x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	550,000	9,900,000	
	- Biaya penginapan [6 orang x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	1,750,000	21,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 orang x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [6 orang x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	400,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Representatif [6 org x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	150,000	2,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 20 kali]	60.0 OK	100,000	6,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

JAKARTA, 17 November 2021
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


AUDY MURFI MZ
 NIP 196303271989031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			3,059,651,000	
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional			2,100,408,000	
1611.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]	201.0 Rekomendasi Kebijakan		1,350,772,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1611.ABD.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	200.0 Rekomendasi Kebijakan		879,959,000	
051	Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum			4,040,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,040,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			3,960,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat [15 org x 4 kali x 3 bid]	180.0 OK	22,000	3,960,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			80,000	RM
	- Biaya transport lokal [1 org x 1 kali x 1 bid]	1.0 OK	80,000	80,000	
052	Analisis dan Evaluasi Hukum			652,905,000	U
A	Pembinaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah			21,533,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			2,410,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	340,000	340,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [15 org x 2 kali]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [15 org x 2 kali]	30.0 OK	47,000	1,410,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			63,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen	1.0 OK	63,000	63,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			19,060,000	RM
	- Biaya uang taksi Jakarta PP	1.0 OK	160,000	160,000	
	- Tiket PP	3.0 OK	630,000	1,890,000	
	- Biaya uang harian	21.0 OH	430,000	9,030,000	
	- Biaya Penginapan Golongan III	14.0 OH	570,000	7,980,000	
B	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum			524,160,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			66,234,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	6.0 PKT	2,000,000	12,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan [20 org x 10 kgt x 3 bdg]	600.0 OK	22,000	13,200,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan [20 org x 10 kgt x 3 bdg]	600.0 OK	47,000	28,200,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan FGD DI DAERAH [31 org x 2 kgt x 3 bdg]	186.0 OK	22,000	4,092,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan Pokja AE [31 org x 2 kgt x 3 bdg]	186.0 ok	47,000	8,742,000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.139-Jakarta V)			36,000,000	RM
	- Honor Anggota Pokja 2 org x 6 pokja x 4 bln	48.0 OB	750,000	36,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Akun E-Clis [5 paket x 11 bulan]	55.0 PKT	40,000	2,200,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	3.0 PKT	3,540,000	10,620,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor narasumber Eksternal [8 org x 2 jam x 3 bdg]	48.0 OJ	1,000,000	48,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal BPHN kegiatan FGD DI DAERAH (4 org x 2 jam x 3 bidang)	24.0 OJ	1,000,000	24,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Antigen [1 ORG]	1.0 OK	28,000	28,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > FGD POKJA AEH DI DAERAH			311,663,000	RM
	- Tiket PP	1.0 OK	120,200,000	120,200,000	
	- Biaya uang harian	1.0 OH	76,600,000	76,600,000	
	- Biaya uang taksi Jakarta PP	1.0 OK	9,603,000	9,603,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan	40.0 OK	74,000	2,960,000	
	- Biaya penginapan	1.0 OH	102,300,000	102,300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya transport lokal [1 org x 1 kali x 1 bdg]	1.0 OK	6,620,000	6,620,000	RM
	- Biaya transport lokal Luar BPHN dalam rangka kegiatan FGD di Daerah	120.0 OK	150,000	18,000,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BIAYA PERJALANAN KONSINYERING REKOMENDASI HASIL AEH :			795,000	RM
	- Biaya paket meeting fullboard eselon I	1.0 OP	194,000	194,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon II	1.0 OP	200,000	200,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon III kebawah	1.0 OP	400,000	400,000	
	- Biaya Transport Darat	1.0 OK	1,000	1,000	
C	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum</i>			107,212,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			25,335,000	RM
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Penyusunan dan Penetapan Rekomendasi hasil Inpassing	65.0 OK	22,000	1,430,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Penyusunan dan Penetapan Rekomendasi hasil Inpassing	65.0 OK	47,000	3,055,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat koordinasi tim	75.0 PKT	22,000	1,650,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat Koordinasi Tim	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat seleksi adm terkait inpassing	90.0 OK	22,000	1,980,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat seleksi adm terkait inpassing	65.0 OK	47,000	3,055,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat koordinasi penyusunan soal uji kompetensi	82.0 OK	22,000	1,804,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat koordinasi penyusunan soal uji kompetensi	65.0 OK	47,000	3,055,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan (1 pkt x 2 kgt)	3.0 PKT	1,827,000	5,481,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,065,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,065,000	1,065,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Honor narasumber eksternal kegiatan Konsinyering [1 org x 3 jam x 1 kgt]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,688,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Luar BPHN [12 org x 5 kali]	60.0 OK	150,000	9,000,000	
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	6,688,000	6,688,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			62,124,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING :			62,124,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Esselon I dan II [1 org x 1 pkt]	1.0 OP	2,424,000	2,424,000	
	- Paket Meeting Fullboard setara Esselon III	1.0 OP	46,800,000	46,800,000	
	- Uang Harian paket fullboard	66.0 OH	150,000	9,900,000	
	- Biaya Transport [20 org x 1 kali x 1 kgt]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
053	Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum			223,014,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			223,014,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,860,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	6.0 PKT	2,200,000	13,200,000	
	> KEGIATAN PERENCANAAN PENYUSUNAN EVALUASI DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM			6,660,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	1,955,000	1,955,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat dan kegiatan (45 org x 1 kgt)	45.0 OK	22,000	990,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat dan kegiatan (45 org x 1 kgt)	45.0 OK	47,000	2,115,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan Akhir	1.0 PKT	1,600,000	1,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) Honor narasumber eksternal kegiatan perencanaan penyusunan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil AEH (2 org x 2 jam x 1 kgt	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya transport lokal [1 org x 1 kali] Biaya transport lokal luar BPHN dalam rangka kegiatan - perencanaan penyusunan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil AEH (20	1.0 OK 20.0 OK	40,000 150,000	40,000 3,000,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BIAYA PERJALANAN KONSINYERING PERUMUSAN REKOMENDASI AEH : - Paket Meeting Fullboard [1 org x 1 pkt] - Uang Harian paket fullboard [1 org x 1 hari] - Biaya Transport [1 org x 1 kali]	1.0 OP 1.0 OH 1.0 OK	14,000 68,000 20,000	14,000 68,000 20,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BIAYA PERJALANAN KONSINYERING PERUMUSAN REKOMENDASI AEH (HOTEL DI BEKASI/DEPOK/BOGOR) : - Paket Meeting Fullboard Eselon II hari ke - I (3 org x 1 pkt x 2 kgt) - Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah hari ke - I (42 org x 1 pkt x 2 kgt) - Uang Harian Paket Fullboard ke-I (45 org x 2 hari x 2 kgt) - Paket Meeting Fullboard Eselon II Hari ke-II (1 org x 1 pkt x 2 kgt) - Paket Meeting Fullboard Eselon III ke bawah Hari ke-II (31 org x 1 pkt x 2 kgt) - Uang Harian Paket Fullboard ke-II (32 org x 1 hari x 2 kgt) - Biaya penggantian Taksi PP (45 orang x 2 kali x 2 kgt)	6.0 OP 84.0 OP 180.0 OH 2.0 OP 62.0 OP 64.0 OH 180.0 OK	1,100,000 822,000 150,000 1,100,000 822,000 150,000 170,000	6,600,000 69,048,000 27,000,000 2,200,000 50,964,000 9,600,000 30,600,000	RM
1611.ABD.002	Rekomendasi Pembangunan Hukum Nasional	1.0 Rekomendasi		470,813,000	
051	Persiapan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional	Kebijakan		69,123,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			69,123,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya penerbitan jurnal ilmiah [75 pkt x 3 ter] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya konsumsi Snack rapat [26 org x 7 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat [26 org x 7 kali]	225.0 PKT 1.0 PKT 182.0 OK 182.0 OK	130,000 6,176,000 22,000 47,000	29,250,000 6,176,000 4,004,000 8,554,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor mitra bestari	1.0 OTER	14,687,000	14,687,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,800,000	RM
	- Biaya Pengiriman JRV	90.0 PKT	20,000	1,800,000	
	- Biaya DOI (Digital Object Identifier) melalui RJI	1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,442,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,442,000	1,442,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,210,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 org	1,210,000	1,210,000	
052	Pembahasan Bahan Penyusunan Dokumen Pembangunan Hukum Nasional			303,238,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			303,238,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			27,957,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat Pokja DPHN [22 org x 6 kali]	132.0 OK	22,000	2,904,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Pokja DPHN [22 org x 6 kali]	132.0 OK	47,000	6,204,000	
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan FGD DPHN [25 org x 3 kali]	75.0 OK	22,000	1,650,000	
	- Biaya konsumsi Makan kegiatan FGD DPHN [25 org x 3 kali]	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	- Biaya konsumsi Snack kegiatan rapat Narasumber 23 org x 2 kali	46.0 OK	22,000	1,012,000	
	- Biaya konsumsi MakanKegiatan rapat Narasumber 23 org x 2 kali	46.0 OK	47,000	2,162,000	
	- Biaya pembuatan spanduk [1 pkt x 7 kgt]	7.0 PKT	300,000	2,100,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan [1 pkt x 7 kgt]	7.0 PKT	1,200,000	8,400,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,195,000	RM
	- Honor Anggota Pokja	1.0 OB	15,195,000	15,195,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			400,000	RM
	- Biaya Pengiriman Hasil-Hasil Kegiatan DPHN	20.0 PKT	20,000	400,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,900,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,900,000	1,900,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			46,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan FGD DPHN [3 org x 3 jam x 3 kgt]	27.0 OJ	1,000,000	27,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan Diskusi Publik Semarang [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan Rapat Narasumber 1 org x 2 jam x2 kgt	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
	- Honor Narasumber Eksternal BPHN kegiatan Diskusi Publik Surabaya 3 org x 3 jam x 1 kgt	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			580,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen	1.0 OK	580,000	580,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > PERJADIN DISKUSI PUBLIK : - Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [1 org x 1 kali x 1 kgt] - Biaya penginapan Gol. IV [1 org x 1 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan Gol. III [1 org x 1 hari x 1 kgt] - Biaya Uang Harian			946,000 946,000 346,000 200,000 200,000 200,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya transport [1 org x 1 kali] - Biaya transport lokal Luar BPHN [1 org x 1 kali] - Biaya transport lokal Luar BPHN kegiatan Diskusi Publik [1 org x 1 kali] - Biaya transport lokal Luar BPHN kegiatan Diskusi Publik di Daerah (15 org x 2 kali)			10,055,000 2,655,000 2,800,000 100,000 4,500,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > DISKUSI PUBLIK DI JAWA TENGAH (SEMARANG) - Tiket PP - Biaya uang harian sebelum dan sesudah kegiatan - Biaya uang harian fullday (saat kegiatan) - Biaya uang taksi Jakarta PP - Biaya Uang Taksi Semarang PP - Biaya penginapan Eselon I dan II - Biaya penginapan Gol. IV - Biaya penginapan Gol. III - Paket Meeting fullday (peserta bphn peserta daerah 2 orang narsum) > DISKUSI PUBLIK DI JAWA TIMUR (SURABAYA) - Tiket PP - Biaya uang harian sebelum dan sesudah kegiatan - Biaya uang harian fullday (saat kegiatan) - Biaya uang taksi Jakarta PP - Biaya Uang Taksi Surabaya PP - Biaya penginapan Eselon I dan II - Biaya penginapan Gol. IV - Biaya penginapan Gol. III - Paket Meeting fullday (peserta bphn peserta daerah 2 orang narsum)			200,205,000 83,067,000 30,548,000 10,360,000 1,330,000 3,600,000 2,160,000 7,896,000 11,448,000 7,200,000 8,525,000 117,138,000 45,458,000 13,940,000 1,700,000 7,500,000 1,500,000 6,400,000 17,120,000 9,240,000 14,280,000	RM
053	Penyusunan Rekomendasi Dokumen Pembangunan Hukum Nasional			98,452,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			98,452,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan buku DPHN			10,000,000 10,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor narasumber Eksternal kegiatan Konsinyering Finalisasi Penyusunan DPHN [1 org x 3 jam x 1 kgt]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya transport lokal [1 org x 1 kali]	1.0 OK	66,000	66,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) KONSINYERING DALAM RANGKA FINALISASI PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL : - Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II - Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah - Uang Harian paket fullboard - Biaya Transport [16 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OP 1.0 OP 1.0 OH 16.0 OK	8,858,000 20,274,000 6,650,000 150,000	8,858,000 20,274,000 6,650,000 2,400,000	RM
	> KONSINYERING DALAM RANGKA PELUNCURAN BUKU DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL : - Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah [1 org x 1 pkt x 1 kgt] - Uang Harian paket fullboard	1.0 OP 1.0 OH	300,000 50,000	300,000 50,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan Esselon II - Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah - Uang Harian paket fullboard - Biaya Transport PP	6.0 OP 27.0 OP 66.0 OH 27.0 OK	1,110,000 822,000 150,000 300,000	6,660,000 22,194,000 9,900,000 8,100,000	RM
1611.AFA	<u>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria[Base Line]</u>	2.0 NSPK		749,636,000	
1611.AFA.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT NSPK Analis dan Evaluasi Hukum	1.0 NSPK		208,005,000	
051	Pengembangan Instrumen/Metode Analis Hukum Berbasis Teknologi (EVADATA)			9,463,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			9,463,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi Snack rapat [29 org x 5 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat [59 org] - Biaya Pengandaan dan Penjilidan	145.0 OK 59.0 OK 1.0 PKT	22,000 47,000 1,000,000	3,190,000 2,773,000 1,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	500,000	500,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal - Biaya Transport Lokal Luar BPHN [10 org]	4.0 OK 10.0 OK	88,750 164,500	355,000 1,645,000	RM
052	Penyusunan Pedoman Evaluasi Hukum			44,681,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan</i>			34,517,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,707,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat	139.0 OK	22,000	3,058,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [26 org x 5 kali]	130.0 OK	47,000	6,110,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,239,000	4,239,000	
	- Biaya Pembuatan spanduk	1.0 PAKET	300,000	300,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			403,000	RM
	- Honor Ketua [1 org x 1 bln]	1.0 OB	3,000	3,000	
	- Honor Anggota	1.0 OB	400,000	400,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal [3 org x 2 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,887,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	87,000	87,000	
	- Biaya Pemeriksaan PCR (10 org x 1 kali x 1 kgt)	10.0 OK	280,000	2,800,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			11,520,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING :			11,520,000	
	- Uang Harian paket fullboard	80.0 OH	141,875	11,350,000	
	- Biaya Transport [1 org x 1 kgt]	1.0 OK	170,000	170,000	
B	<i>Penyusunan Pedoman Evaluasi terhadap Produk Hukum</i>			10,164,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,091,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [21 org x 4 kali]	84.0 OK	22,000	1,848,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [69 org]	69.0 OK	47,000	3,243,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			203,000	RM
	- Honor Ketua [1 org x 1 bln]	1.0 OB	203,000	203,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,870,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	1,870,000	1,870,000	
053	Sosialisasi/Diseminasi			151,101,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			151,101,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,760,000	RM
	- Biaya konsumsi Snack rapat Persiapan [15 org x 2 kali]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	5,800,000	5,800,000	
	- Biaya pembuatan spanduk	1.0 PKT	300,000	300,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,000,000	RM
	- Honor narasumber eksternal dari luar BPHN [2 org x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,000,000	6,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			32,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR	1.0 OK	32,000	32,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,950,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Luar BPHN (11 org x 3 kali)	33.0 OK	150,000	4,950,000	
	- Biaya Transport Lokal (10 org x 4 kali)	40.0 OK	100,000	4,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			129,359,000	RM
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING :			1,035,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [1 org x 1 pkt x 1 kgt]	1.0 OP	783,000	783,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III [1 org x 1 pkt x 1 kgt]	1.0 OP	152,000	152,000	
	- Uang Harian paket fullboard [1 org x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	100,000	100,000	
	> BIAYA PERJALANAN KONSINYERING :			128,324,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II (3 org x 2 mlm x 2 kgt)	12.0 OP	1,100,000	13,200,000	
	- Paket Meeting fullboard setara Esselon III kebawah (23 org x 2 mlm x 2kgt)	92.0 OP	822,000	75,624,000	
	- Uang Harian paket fullboard (26 org x 3 hari x 2 kgt)	156.0 OH	150,000	23,400,000	
	- Biaya Transport 23 org x 2 kgt	46.0 OK	350,000	16,100,000	
054	Pelaporan			2,760,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,760,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,760,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.0 PKT	2,760,000	2,760,000	
1611.AFA.002	NSPK Jabatan Fungsional Analisis Hukum	1.0 NSPK		541,631,000	
051	Penyusunan Pedoman JF Analisis Hukum			104,196,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			104,196,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,924,000	RM
	- Biaya pembuatan spanduk [1 pkt x 2 kgt]	2.0 PKT	300,000	600,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	2.0 PKT	3,192,000	6,384,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat Koordinasi Pokja [20 org x 13 kali]	260.0 OK	22,000	5,720,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat Koordinasi Pokja [20 org x 13 kali]	260.0 OK	47,000	12,220,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			785,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	785,000	785,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor narasumber Eksternal [1 org x 3 jam x 1 kgt] Honor Narasumber kegiatan Sosialisasi Peraturan - Perundang-Undangan terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum 3 org x 3 jam	3.0 OJ 9.0 OJ	1,000,000 1,000,000	12,000,000 3,000,000 9,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 Orang x 1 Kgt]	1.0 OK	20,000	20,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BIAYA PERJALANAN KONSINYERING DI JAWA BARAT : - Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II - Paket Meeting fullboard setara Esselon III - Uang Harian paket fullboard - Biaya Transport	5.0 OP 48.0 OP 80.0 OH 25.0 OK	975,400 786,250 141,875 500,000	66,467,000 66,467,000 4,877,000 37,740,000 11,350,000 12,500,000	RM
052	Sosialisas/Diseminasi			245,435,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			245,435,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya Penggandaan dan Penjilidan - Biaya konsumsi Snack Diseminasi di Kanwil [50 org x 2 kali] - Biaya konsumsi Makan Diseminasi di Kanwil [50 org x 1 kali] - Biaya pembuatan spanduk - Biaya konsumsi Snack Rapat Persiapan Kanwil - Biaya konsumsi Makan Rapat Persiapan Kanwil Biaya Konsumsi Snack kegiatan Sosialisasi Peraturan - Perundang-Undangan terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Fullday) Biaya Konsumsi Makan kegiatan Sosialisasi Peraturan - Perundang-Undangan terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Hukum (Fullday) - Biaya pembelian Seminar Kit	4.0 PAKET 1.0 PKT 100.0 OK 50.0 OK 2.0 PKT 10.0 OK 10.0 OK 350.0 OK 175.0 OK 175.0 PKT	1,000,000 3,097,000 22,000 47,000 300,000 22,000 47,000 22,000 47,000 100,000	4,000,000 3,097,000 2,200,000 2,350,000 600,000 220,000 470,000 7,700,000 8,225,000 17,500,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 Orang x 1 Kgt x 1 Kali] - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR	1.0 OK 1.0 OK	220,000 87,000	307,000 220,000 87,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BALI : - Tiket PP [16 org x 1 kali] - Biaya uang harian - Biaya uang taksi Jakarta PP - Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [13 org x 2 kali x 1 kgt] - Biaya penginapan setara Ess. III - Biaya penginapan setara Ess. III			117,996,000	RM
				117,996,000	
		16.0 OK	3,206,000	51,296,000	
		48.0 OH	400,000	19,200,000	
		32.0 OK	250,000	8,000,000	
		26.0 OK	150,000	3,900,000	
		2.0 OH	1,300,000	2,600,000	
		33.0 OH	1,000,000	33,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Luar BPHN (10 org x 2 kali) - Biaya Transport Lokal (7 org x 5 kali) - Biaya Transport Lokal Luar BPHN kegiatan Diseminasi di Kanwil(20 org x 1 kali) - Biaya Transport Lokal Luar BPHN kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Huku - Biaya Transport Lokal (7 org x 1 kali)			32,400,000	RM
		20.0 OK	150,000	3,000,000	
		35.0 OK	100,000	3,500,000	
		38.0 OK	150,000	5,700,000	
		130.0 OK	150,000	19,500,000	
		7.0 OK	100,000	700,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > BIAYA PERJALANAN KONSINYERING : - Paket Meeting fullboard setara Esselon I dan II [4 org x 1 pkt x 1 kgt] - Paket Meeting fullboard setara Esselon III [50 org x 1 pkt x 1 kgt] - Uang Harian paket fullboard - Biaya Transport [15 org x 1 kali x 1 kgt]			48,370,000	RM
				48,370,000	
		4.0 OP	1,100,000	4,400,000	
		50.0 OP	756,800	37,840,000	
		1.0 OH	130,000	130,000	
		15.0 OK	400,000	6,000,000	
053	Pelaporan			192,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			192,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan Laporan - Biaya Pencetakan Buku Peraturan terkait Jabatan Fungsional Analis Hukum			192,000,000	RM
		1.0 PKT	2,000,000	2,000,000	
		1.0 PKT	190,000,000	190,000,000	
1613	Perencanaan Hukum Nasional			959,243,000	
1613.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM[Base Line]			959,243,000	
----- Lokasi : INSTANSI PUSAT					
1613.ABD.001	Rekomendasi Program Legislasi			446,212,000	U
051	Penyusunan Program Legislasi Nasional	3.0 Rekomendasi Kebijakan		298,789,000	
A	Pelaksana Tugas Pengarah			54,769,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan			3,600,000	RM
		1.0 PKT	3,600,000	3,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,033,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,033,000	3,033,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			25,570,000	RM
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [17 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	34.0 OH	180,000	6,120,000	
	- Biaya Transport [15 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	15.0 OK	150,000	2,250,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Eselon II [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	1,200,000	1,200,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon III ke bawah [16 orang x 1 paket x 1 kgt]	16.0 OP	1,000,000	16,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			22,566,000	RM
	- Biaya paket meeting Fullboard Eselon III ke bawah [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	4,000	4,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard [17 Orang x 2 Hari x 1 Kgt]	34.0 OH	150,000	5,100,000	
	- Biaya Transport [8 Orang x 1 Kali x 1 Kgt]	8.0 OK	400,000	3,200,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Eselon II [1 Orang x 1 Paket x 1 Kgt]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon III ke bawah [16 orang x 1 paket x 1 kgt]	16.0 OP	822,000	13,152,000	
B	<u>Persiapan Penyusunan Prolegnas</u>			39,103,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,512,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 Paket x 2 Kgt]	2.0 PKT	4,444,000	8,888,000	
	> Rapat Antar Kementerian/Lembaga			4,899,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [71 orang x 1 kgt]	71.0 OK	22,000	1,562,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [71 orang x 1 kgt]	71.0 OK	47,000	3,337,000	
	> Rapat Inventarisasi RUU			1,725,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 1 kali]	25.0 OK	22,000	550,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 1 kgt x 1 kali]	25.0 OK	47,000	1,175,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,200,000	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Honor narasumber eselon I/Sederajat [4 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	8.0 OJ	1,400,000	11,200,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			490,000	RM
	- Biaya pemeriksaan RT-PCR [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	490,000	490,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,901,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 33 KALI]	33.0 OK	100,000	3,300,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	6,601,000	6,601,000	
C	<u>Hearing Konsep Prolegnas</u>			191,143,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			20,622,000	RM
	> JAWA TIMUR (JEMBER) :			8,057,000	
	- Biaya Seminar Kit Kegiatan Hearing Pendapat [23 Pkt x 1 Kgt]	23.0 Paket	150,000	3,450,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	4,607,000	4,607,000	
	> JAKARTA :			5,708,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	3,358,000	3,358,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [50 org x 1 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	> SUMATERA BARAT			6,857,000	
	- Biaya Seminar Kit Kegiatan Hearing	16.0 PKT	218,750	3,500,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	3,357,000	3,357,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			44,000,000	RM
	> JAKARTA :			8,000,000	
	- Honor narasumber Eselon II/Sederajat (eksternal) [4 orang x 1 kgt x 2 jam]	8.0 OJ	1,000,000	8,000,000	
	> SUMATERA BARAT			16,000,000	
	- Honor narasumber Eselon II/Sederajat (eksternal) [8 org x 1 kgt x 2 jam]	16.0 OJ	1,000,000	16,000,000	
	> JAWA TIMUR (JEMBER) :			20,000,000	
	- Honor narasumber Eselon II/Sederajat (eksternal) [10 orang x 1 kgt x 2 jam]	20.0 OJ	1,000,000	20,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,825,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan RT-PCR [5 Orang x 1 Kali]	5.0 OK	365,000	1,825,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			124,696,000	RM	
	> JAWA TIMUR (JEMBER) :			69,924,000		
	- Biaya penggantian tiket bisnis pp	1.0 OK	5,206,000	5,206,000		
	- Biaya penggantian tiket ekonomi pp [12 org x 1 kali]	12.0 OK	2,102,883	25,234,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon I [1 org x 2 hari]	2.0 OH	450,000	900,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI]	2.0 OH	450,000	900,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III [1 ORANG x 2 HARI]	2.0 OH	350,000	700,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV kebawah [10 ORANG x 2 HARI]	20.0 OH	350,000	7,000,000		
	- Biaya paket meeting full day eselon I dan II [2 org x 1 hari]	2.0 OP	400,000	800,000		
	- Biaya paket meeting full day eselon III ke bawah [21 org x 1 hari]	21.0 OP	400,000	8,400,000		
	- Biaya uang harian [13 ORANG x 2 HARI]	26.0 OH	410,000	10,660,000		
	- Biaya uang harian fullday [13 org x 1 hari]	13.0 OH	100,000	1,300,000		
	- Biaya uang representasi Eselon I [1 org x 1 hari]	1.0 OH	200,000	200,000		
	- Biaya uang representasi Eselon II [1 org x 1 hari]	1.0 OH	150,000	150,000		
	- Biaya Taksi Jakarta PP	19.0 OK	206,000	3,914,000		
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [12 ORANG x 2 KALI]	24.0 OK	190,000	4,560,000		
	> SUMATERA BARAT			54,772,000		
	- Biaya penggantian tiket ekonomi pp [8 org x 1 kali]	8.0 OK	2,884,500	23,076,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II [1 ORANG x 2 HARI]	2.0 OH	2,550,000	5,100,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III [1 ORANG x 2 HARI]	2.0 OH	1,353,000	2,706,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV kebawah [6 ORANG x 2 HARI]	12.0 OH	650,000	7,800,000		
	- Biaya paket meeting full day eselon III ke bawah [8 org x 1 hari]	8.0 OP	460,000	3,680,000		
	- Biaya uang harian [8 ORANG x 2 HARI]	16.0 OH	380,000	6,080,000		
	- Biaya uang harian fullday [8 org x 1 hari]	8.0 OH	85,000	680,000		
	- Biaya uang representasi Eselon II [1 org x 1 hari]	1.0 OH	150,000	150,000		
	- Biaya Taksi Jakarta PP [5 ORANG x 2 KALI]	10.0 OK	246,000	2,460,000		
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [8 ORANG x 2 KALI]	16.0 OK	190,000	3,040,000		
D	<i>Forum Koordinasi Penyusunan Prolegnas dengan Baleg DPR</i>			13,774,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,734,000		RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	3,734,000	3,734,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,040,000	RM	
	> JAKARTA :			10,040,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III	8.0 OH	730,000	5,840,000		
	- Biaya uang harian [10 ORANG x 2 HARI]	20.0 OH	210,000	4,200,000		
052	Penyusunan Program Penyusunan PP dan PERPRES			70,693,000	U	
A	<i>Inventarisasi Penyusunan Program Penyusunan PP dan Perpres</i>			2,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	RM
B	<i>Persiapan penyusunan PP dan Perpres dengan Stake Holder terkait</i>			38,469,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 Pkt x 1 Kgt]	1.0 PKT	3,506,000	3,506,000	RM
	> Rakor antar kementerian/lembaga			1,173,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [17 orang x 1 kali]	17.0 OK	22,000	374,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [17 orang x 1 kali]	17.0 OK	47,000	799,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [2 Orang x 2 Jam x 1 Kgt]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 23 KALI]	23.0 OK	100,000	2,300,000	RM
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 ORANG x 22 KALI]	22.0 OK	232,000	5,104,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) > JAWA BARAT :			22,386,000	RM
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon II / Setara [1 ORANG x 1 PAKET x 1 KGT]	1.0 OP	1,110,000	1,110,000	
	- Biaya paket meeting fullboard eselon III ke bawah	20.0 OP	640,000	12,800,000	
	- Biaya Transport PP [12 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	12.0 OK	281,400	3,376,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [17 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	34.0 OH	150,000	5,100,000	
C	<i>Pembahasan Tahunan Perencanaan PP dan Perpres</i>			30,224,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [17 orang x 1 kgt x 1 kali]	17.0 OK	22,000	374,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	4,500,000	4,500,000	
	- Biaya seminar kit [52 orang x 1 kgt]	52.0 PKT	150,000	7,800,000	
	> RAPAT POKJA			10,350,000	
	- konsumsi makan rapat [30 ORG x 5 KALI]	150.0 OK	47,000	7,050,000	
	- konsumsi snack rapat [30 ORG x 5 KALI]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya jasa narasumber eksternal setara eselon 1 dari luar BPHN [2 orang x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	1,200,000	7,200,000	RM
053	Pemantauan Prolegnas, Progsun PP dan Perpres Tahun 2022			28,923,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,923,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan	15.0 OK 1.0 PKT	22,000 3,821,000	4,151,000 330,000 3,821,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	2,001,000	2,001,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan RT-PCR [1 Orang x 1 Kali]	1.0 OK	502,000	502,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > JAWA BARAT - Biaya Transport dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar - Biaya uang harian - Biaya transport darat - Biaya uang harian [3 orang x 1 kgt] - Biaya penginapan [3 orang x 1 kgt x 1 malam] > BANTEN - Biaya Transport dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota [6 orang x 1 kali] - Biaya uang harian [6 orang x 1 kali] > LUAR KOTA : - Biaya penggantian tiket PP [1 org x 1 kali x 1 kgt]			17,161,000 13,260,000 3,600,000 5,160,000 1,500,000 1,290,000 1,710,000 3,900,000 1,680,000 2,220,000 1,000 1,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam [1 org x 1 kali] - Biaya transport lokal [12 org x 0 kali]	1.0 OK 12.0 OK	3,908,000 100,000	5,108,000 3,908,000 1,200,000	RM
054	Fasilitas Perencanaan Program Legislasi Daerah			47,807,000	U
A	<i>Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Program Legislasi Daerah</i>			55,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	55,000	55,000	RM
B	<i>Asistensi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah</i>			47,752,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pencetakan sertifikat - Biaya Penggandaan dan Penjilidan > SULAWESI TENGGARA : - Biaya konsumsi Makan kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali] - Biaya konsumsi Snack kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali] > BALI : - Biaya konsumsi Makan kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali] - Biaya konsumsi Snack kegiatan asistensi perencanaan pembentukan peraturan daerah [30 org x 1 kali]	2.0 PKT 2.0 PKT 30.0 OK 30.0 OK 30.0 OK 30.0 OK	250,000 1,738,000 45,000 20,000 48,000 20,000	500,000 3,476,000 1,950,000 1,350,000 600,000 2,040,000 1,440,000 600,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > SULAWESI TENGGARA : - Biaya Tiket Pesawat PP [3 org x 1 kali] - Biaya hotel/penginapan Eselon III/Setara [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI] - Biaya hotel/penginapan Eselon IV ke bawah [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI] - Biaya uang harian [3 ORANG x 1 KALI x 3 HARI] - Biaya Taksi Jakarta PP [1 ORANG x 1 KALI x 2 PP] > BALI : - Biaya Tiket Pesawat PP [1 org x 1 kali] - Biaya hotel/penginapan Eselon III/Setara [1 ORANG x 1 KALI x 1 HARI] - Biaya hotel/penginapan Eselon IV ke bawah [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI] - Biaya uang harian - Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 1 KALI x 2 PP] - Biaya Taksi Bali PP [3 ORANG x 1 KALI x 2 PP]	3.0 OK 2.0 OH 4.0 OH 9.0 OH 2.0 OK 1.0 OK 1.0 OH 4.0 OH 8.0 OH 4.0 OK 6.0 OK	3,227,000 1,297,000 786,000 380,000 398,500 9,050,000 720,000 910,000 540,000 366,500 159,000	39,786,000 19,636,000 9,681,000 2,594,000 3,144,000 3,420,000 797,000 20,150,000 9,050,000 720,000 3,640,000 4,320,000 1,466,000 954,000	RM
1613.ABD.002	Rekomendasi Naskah Akademik RUU	3.0 Rekomendasi Kebijakan		263,015,000	
051	Persiapan Penyusunan Naskah Akademik RUU			2,056,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,056,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [150 Pkt] - Biaya konsumsi Snack rapat [14 org x 2 kali] - Biaya konsumsi Makan rapat [15 org x 2 kali]	150.0 PKT 28.0 OK 30.0 OK	200 22,000 47,000	30,000 616,000 1,410,000	RM
052	Penyusunan Naskah Akademik RUU			260,959,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			260,959,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,079,000	RM
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan [1 Paket]	1.0 PKT	2,654,000	2,654,000	
	- Biaya konsumsi Snack rapat [15 orang x 13 Kgt]	195.0 OK	22,000	4,290,000	
	- Biaya konsumsi Makan rapat [15 orang x 13 kali]	195.0 OK	47,000	9,165,000	
	- Biaya konsumsi Snack Rapat di Bandung [45 org x 1 kgt]	45.0 OK	20,000	900,000	
	- Biaya konsumsi Makan Rapat di Bandung [45 org x 1 kgt]	45.0 OK	46,000	2,070,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			23,074,000	RM
	- Honor Ketua Tim [1 orang x 1 bulan]	1.0 OB	124,000	124,000	
	- Honor Ketua Tim [3 orang x 9 bulan]	27.0 OB	850,000	22,950,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,221,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	6,221,000	6,221,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,000,000	RM
	- Honor Narasumber luar BPHN [5 org x 2 jam]	10.0 OJ	1,000,000	10,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,818,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [18 org]	18.0 OK	101,000	1,818,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			63,298,000	RM
	- Biaya uang harian [1 org x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	100,000	100,000	
	- Biaya uang harian [25 org x 3 hari x 1 kali]	75.0 OH	430,000	32,250,000	
	- Biaya penginapan [1 org x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	288,000	288,000	
	- Biaya penginapan Eselon II ke bawah [3 org x 1 hari x 1 kgt]	3.0 OH	1,200,000	3,600,000	
	- Biaya penginapan Eselon III ke bawah [19 org x 2 hari x 1 kgt]	38.0 OH	570,000	21,660,000	
	- Biaya Transport Jakarta Ke Kabupaten/Kota [2 org x 2 kali x 2 kgt]	8.0 OK	300,000	2,400,000	
	- Biaya Transport Jakarta Ke Bandung [3 org x 2 kgt x 2 kali]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			17,168,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [3 orang x 19 kgt]	57.0 OK	100,000	5,700,000	
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	128,000	128,000	
	- Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 jam [2 orang x 27 kgt x 1 kali]	54.0 OK	210,000	11,340,000	
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			85,529,000	RM
	- Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon I dan II [3 ORG x 1 PAKET x 2 KGT]	6.0 OP	1,300,000	7,800,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon III Kebawah [1 ORG x 1 PAKET x 1 KGT]	1.0 OP	59,549,000	59,549,000	
	- Biaya uang harian fullboard [27 ORG x 3 HARI x 1 KGT]	81.0 OH	180,000	14,580,000	
	- Biaya uang transport [12 ORG x 2 KALI x 0 KGT]	24.0 OK	150,000	3,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			34,772,000	RM
	> Paket Meeting Fullboard Penyusunan DIM NA dan Penyempurnaan NA di Jawa Barat :			34,772,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon I dan II [2 org x 2 pkt x 1 kgt]	4.0 OP	1,110,000	4,440,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon III Kebawah [1 ORG x 1 PAKET x 1 KGT]	1.0 OP	210,000	210,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Pejabat Eselon III Kebawah [13 ORG x 2 PAKET x 1 KGT]	26.0 OP	822,000	21,372,000	
	- Biaya uang harian [15 org x 3 hari x 1 kgt]	45.0 OH	150,000	6,750,000	
	- Biaya uang transport [4 org x 1 kali x 0 kgt]	4.0 OK	500,000	2,000,000	
1613.ABD.003	Rekomendasi Penyelarasan Naskah Akademik	7.0 Rekomendasi Kebijakan		250,016,000	
051	Persiapan Awal Terhadap Naskah Akademik Yang Akan Diselaraskan			51,333,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>51,333,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,984,000	RM
	- Biaya makan Rapat Pemeriksaan oleh Bidang Penyelarasan NA [8 org x 2 kali]	16.0 OK	47,000	752,000	
	- Biaya snack Rapat Pemeriksaan oleh Bidang Penyelarasan NA	56.0 OK	22,000	1,232,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,264,000	RM
	- Biaya pembelian alat tulis kantor (ATK)	1.0 PKT	5,264,000	5,264,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 org x 1 kali]	1.0 OK	10,000	10,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			24,083,000	RM
	- Biaya Transport dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar [7 org x 1 kali]	7.0 OK	369,000	2,583,000	
	- Uang Harian [50 org x 1 hari]	50.0 OH	430,000	21,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,992,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [35 org x 1 kali]	35.0 OK	100,000	3,500,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 org x 1 kali]	1.0 OK	16,492,000	16,492,000	
052	Penyelarasan Terhadap Sistematika dan Materi Muatan Naskah Akademik			184,056,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>184,056,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,167,000	RM
	- Biaya Makan Rapat Penyelarasan Terhadap Sistematika dan Materi Muatan Naskah Akademik [165 org x 1 kali]	165.0 OK	47,000	7,755,000	
	- Biaya Snack Rapat Penyelarasan Terhadap Sistematika dan Materi Muatan Naskah Akademik [246 org x 1 kali]	246.0 OK	22,000	5,412,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,800,000	RM
	- Honor jasa narasumber eselon II/III luar BPHN	2.0 OJ	900,000	1,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 org x 1 Kgt]	1.0 OK	10,000	10,000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon I/II - Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon III kebawah - Paket Meeting Fullboard Luar Kota Jakarta Eselon III ke bawah - Uang Harian Paket Meeting Fullboard (Jawa Barat) - Biaya penggantian uang transport Luar Kota Jakarta	6.0 OP 1.0 OP 1.0 OP 225.0 OH 19.0 OK	1,100,000 193,000 119,036,000 150,000 500,000	169,079,000 6,600,000 193,000 119,036,000 33,750,000 9,500,000	RM
053	Penyusunan Laporan Hasil Penyelarasan			14,627,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,627,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan	7.0 PKT	1,970,000	13,790,000	RM
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Test Antibody/Antigen/Swab PCR [1 org x 1 Kgt]	1.0 OK	10,000	10,000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon I/II [1 org x 1 pkt] - Paket Meeting Fullboard luar kota Jakarta Eselon III kebawah [1 org x 1 pkt]	1.0 OP 1.0 OP	141,000 686,000	827,000 141,000 686,000	RM
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			3,232,641,000	
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional			1,291,271,000	
1610.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	166.0 layanan		1,291,271,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1610.BMA.001	Fasilitasi Integrasi JDIHN	163.0 Lembaga		1,101,755,000	
051	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN) Sesuai Perpres 33/2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019			495,489,000	U
A	Pembinaan dan Pengembangan JDIHN			153,927,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [23 orang x 1 kgt x 3 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [23 orang x 1 kgt x 4 kali] - Biaya Penggandaan dan Penjilidan	69.0 OK 92.0 OK 1.0 KGT	22,000 47,000 900,000	6,742,000 1,518,000 4,324,000 900,000	RM
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Angggota [1 orang x 1 bulan]	1.0 OB	47,272,000	47,272,000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,500,000	3,500,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			92,480,000	RM
	> NUSA TENGGARA BARAT			5,540,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	580,000	1,160,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	440,000	1,320,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,610,000	2,610,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	225,000	450,000	
	> Bali			5,903,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,208,000	1,208,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	480,000	960,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,435,000	3,435,000	
	- Biaya representasi [1 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	150,000	300,000	
	> Kepulauan Riau			4,884,000	
	- Biaya Uang Harian (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OK	2,870,000	2,870,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OK	180,000	180,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Asal (Pp) (1 orang x 2 kali x 1 KGT)	2.0 OK	137,000	274,000	
	- Biaya Representasi (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	150,000	450,000	
	> Papua Barat			11,210,000	
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 hari)	2.0 OH	1,758,000	3,516,000	
	- Biaya Uang Harian (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OH	6,254,000	6,254,000	
	> Aceh			7,619,000	
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 hari)	2.0 OH	900,000	1,800,000	
	- Biaya Uang Harian (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OK	4,739,000	4,739,000	
	> Riau			4,300,000	
	- Biaya Penginapan 1 orang x 1 hari)	1.0 OH	785,000	785,000	
	- Biaya Uang Harian 1 orang x 2 hari	2.0 OH	370,000	740,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP 1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OK	2,475,000	2,475,000	
	- Biaya Representasi 1 orang x 3 hari x 1 KGT	2.0 OH	150,000	300,000	
	> Jawa Barat			4,900,000	
	- Biaya Representasi 1 orang x 3 hari x 1 KGT	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Biaya Penginapan [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	450,000	1,800,000	
	- Biaya Uang Harian [1 orang x 5 hari]	5.0 OH	430,000	2,150,000	
	- Biaya Transportasi Darat [1 orang x 1 kgt]	1.0 OK	500,000	500,000	
	> JAWA TENGAH			9,920,000	
	- Biaya Penginapan [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	975,000	3,900,000	
	- Biaya Uang Harian (2 orang x 3 hari)	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	1,900,000	3,800,000	
	> JAWA TIMUR			10,028,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	750,000	1,500,000	
	- Biaya Uang Harian (2 orang x 3 hari)	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (2 orang x 1 kali x 1 KGT)	2.0 OK	2,674,000	5,348,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	180,000	720,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			9,708,000	
	- Biaya Penginapan [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	475,000	1,900,000	
	- Biaya Uang Harian (2 orang x 3 hari)	6.0 OH	360,000	2,160,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,770,000	5,540,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	108,000	108,000	
	> SULAWESI BARAT			18,468,000	
	- Biaya Penginapan (2 orang x 2 hari)	4.0 OH	1,200,000	4,800,000	
	- Biaya Uang Harian (2 orang x 3 hari)	6.0 OH	410,000	2,460,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (2 orang x 1 kali x 1 KGT)	2.0 OK	4,867,000	9,734,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) (2 orang x 2 kali x 1 KGT)	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Representasi (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	150,000	450,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,933,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	3,933,000	3,933,000	
B	<i>Teknis Pengelolaan JDIH</i>			169,061,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,605,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [65 orang x 1 kgt]	65.0 OK	22,000	1,430,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 1 kgt]	25.0 OK	47,000	1,175,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,500,000	1,500,000	
	- Biaya Seminar Kit (30 org x 1 kgt)	30.0 PAKET	150,000	4,500,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			77,962,000	RM
	- Honor Anggota [1 orang x 1 bulan]	1.0 OB	77,962,000	77,962,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,697,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,697,000	2,697,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 1 kgt x 2 jam]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,012,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal	1.0 OK	12,000	12,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			76,785,000	RM	
	> JAWA BARAT			76,785,000		
	- Paket meeting fullboard [30 ORANG x 1 PAKET x 2 KGT]	60.0 OP	822,000	49,320,000		
	- Uang Harian	1.0 OH	18,465,000	18,465,000		
	- Uang transportasi [9 Orang x 2 hari x 2 kgt]	36.0 OK	250,000	9,000,000		
C	<u>Pertemuan Nasional Pengelola JDIIH</u>			172,501,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,950,000	RM	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 1 kgt x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000		
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 1 kgt x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000		
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	1,500,000	1,500,000		
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			25,000,000	RM	
	- Sewa Peralatan Pelaksanaan Pertemuan Nasional Pengelola JDIIH	1.0 PAKET	25,000,000	25,000,000		
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,000,000	RM	
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 orang x 1 kgt x 3 jam]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,010,000	RM	
	- Biaya Transport Lokal [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	5,710,000	5,710,000		
	- Biaya transport lokal eksternal 14 x 3 kali x 1 Kgt)	42.0 OK	150,000	6,300,000		
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			121,541,000	RM	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Menteri [1 ORANG x 1 PAKET]	1.0 OP	2,100,000	2,100,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I II [1 ORANG x 1 PAKET]	1.0 OP	1,216,000	1,216,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon I II [2 ORANG x 2 PAKET]	4.0 OP	1,216,000	4,864,000		
	- Biaya Paket Meeting Fullboard Eselon III ke Bawah	1.0 OP	62,031,000	62,031,000		
	- Biaya Transport PP [29 ORANG x 1 KALI]	29.0 OK	150,000	4,350,000		
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [35 ORANG x 3 HARI]	105.0 OH	180,000	18,900,000		
	- Biaya Paket meeting Halfday	80.0 OP	351,000	28,080,000		
052	Promosi , Penerbitan dan Kerja Sama JDIIH			316,091,000		U
A	TANPA SUB KOMPONEN			316,091,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Pembuatan Bahan Cetak/leaflet/ stiker/poster/umbul(pemasangan)/ spanduk/ dan lainnya untuk sosialisasiJDIH > Biaya Penerbitan/Pencetakan - Biaya Penerbitan/pencetakan hasil-hasil kegiatan BPHN versi ebook dan cetak (5 judul) - Biaya Penerbitan/Percepatan Jurnal MHN (2 edisi x 100 buku) [100 eks x 2 EDISI] - Biaya Penerbitan/Percepatan Jurnal ILJ (2 edisi x 100 buku)	1.0 PAKET 876.0 EKS 200.0 BUKU 200.0 BUKU	73,241,000 63,500 83,000 78,000	161,067,000 73,241,000 87,826,000 55,626,000 16,600,000 15,600,000	RM
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Editor Jurnal [5 orang x 2 Tbt] - Honor Honor Redaktur Jurnal [3 orang x 4 Tbt] - Honor Pembuat Artikel Jurnal Hukum Berbahasa Inggris [5 ORG x 2 TER x 23 HAL] - Honor Pembuat Artikel Majalah Hukum [7 orang x 2 ter x 22 Hal] - Honor Mitra Bestari Majalah Hukum Nasional - Honor Mitra Bestari Jurnal bahasa inggris	10.0 OT 12.0 OT 230.0 PAKET 308.0 OT 14.0 OT 10.0 OT	300,000 400,000 200,000 150,000 1,500,000 1,500,000	136,000,000 3,000,000 4,800,000 46,000,000 46,200,000 21,000,000 15,000,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Langganan Aplikasi Grafis dan Template (1 th) - Biaya Langganan Fasilitas pengelolaan untuk jurnal [1 paket x 1 tahun] - Biaya Keanggotaan Penerbitan dan Jurnal (DOI) - Biaya Mengikuti Seminar/Kegiatan [2 ORANG x 1 KGT] - Biaya Pendistribusian Terbitan	2.0 PAKET 1.0 PAKET 2.0 PAKET 2.0 OK 97.0 PAKET	1,925,000 2,083,000 2,000,000 41,000 25,000	12,440,000 3,850,000 2,083,000 4,000,000 82,000 2,425,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,500,000	2,500,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [2 orang x 1 kgt x 2 jam]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	84,000	84,000	RM
053	Pengintegrasian Anggota JDIHN			123,990,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			123,990,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 2 kgt x 1 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 2 kgt x 1 kali] - Biaya Pengandaan dan Penjilidan - Biaya Pembuatan Backdrop, Spanduk, Banner [1 PAKET x 2 KGT] - Biaya Seminar Kit 15 orang x 1 kgt	30.0 OK 30.0 OK 1.0 KGT 2.0 PAKET 15.0 OP	22,000 47,000 1,006,000 300,000 150,000	5,926,000 660,000 1,410,000 1,006,000 600,000 2,250,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			45,780,000	RM
	- Paket Meeting Fullboard 15 Org x 2 Paket x 1 kgt	30.0 OP	1,197,000	35,910,000	
	- Uang Harian	44.0 OH	180,000	7,920,000	
	- Uang Transportasi [13 orang x 1 kali x 1 kgt]	13.0 OK	150,000	1,950,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			69,284,000	RM
	> BALI			69,284,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullboard [10 ORANG x 2 PAKET x 1 KGT]	20.0 OP	1,419,000	28,380,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullboard [10 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	30.0 OH	160,000	4,800,000	
	- Biaya Penggantian Tiket PP [10 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	10.0 OK	3,233,400	32,334,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [10 ORANG x 1 KGT x 2 KALI]	20.0 OK	170,000	3,400,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [1 ORANG x 1 KGT x 2 KALI]	2.0 OK	185,000	370,000	
054	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional			166,185,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			166,185,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			867,000	RM
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [1 orang x 1 kgt x 0 kali]	1.0 OK	17,000	17,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	850,000	850,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			49,980,000	RM
	- Biaya pembuatan Plakat/Piala Bagi Anggota JDIHN Terbaik [60 BUAH x 1 PAKET]	60.0 PAKET	658,000	39,480,000	
	> Piagam Penghargaan			10,500,000	
	- Biaya pembuatan Piagam Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terbaik (Cetak Bingkai) [60 BUAH x 1 KGT]	60.0 BUAH	118,000	7,080,000	
	- Biaya pembuatan Piagam Penghargaan Bagi Anggota JDIH Terintegrasi (Cetak Bingkai) [60 BUAH x 1 KGT]	60.0 BUAH	57,000	3,420,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			3,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,500,000	3,500,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			1,290,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan PCR [3 ORANG x 1 KALI]	3.0 OK	430,000	1,290,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			110,544,000	RM
	> SULAWESI TENGAH			5,197,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	860,000	860,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,337,000	4,337,000	
	> SULAWESI UTARA			6,286,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,564,000	1,564,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP	1.0 OK	3,452,000	3,452,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP)	1.0 OK	160,000	160,000	
	> Jambi			4,480,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	896,000	896,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,207,000	2,207,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	267,000	267,000	
	> Yogyakarta			3,360,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	540,000	540,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	420,000	840,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	1,468,000	1,468,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> Papua			11,837,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,544,000	1,544,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,740,000	1,740,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	8,193,000	8,193,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	360,000	360,000	
	> Kep. Bangka Belitung			5,131,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	625,000	1,250,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,139,000	2,139,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> Gorontalo			7,956,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	840,000	1,680,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,654,000	4,654,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> Papua Barat			9,640,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,548,000	1,548,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	6,492,000	6,492,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	160,000	160,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Maluku Utara			7,460,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	600,000	600,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,702,000	1,702,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	4,646,000	4,646,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [2 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> Kepulauan Riau			4,998,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	735,000	1,470,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	1,976,000	1,976,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	221,000	442,000	
	> SUMATERA UTARA			4,721,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	550,000	550,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	370,000	740,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	2,708,000	2,708,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 3 KALI x 1 KGT]	3.0 OK	241,000	723,000	
	> SUMATERA BARAT			3,648,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	650,000	650,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	380,000	760,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	1,848,000	1,848,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	390,000	390,000	
	> SULAWESI SELATAN			5,386,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	600,000	600,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	430,000	860,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,766,000	3,766,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	160,000	160,000	
	> Kalimantan Timur			6,437,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	575,000	1,150,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	430,000	1,290,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,797,000	3,797,000	
	- biaya uang taksi Jakarta (PP) [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	100,000	200,000	
	> Sulawesi Barat			5,990,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,200,000	1,200,000	
	- biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- biaya pembelian tiket pesawat PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	3,560,000	3,560,000	
	> Kalimantan Barat			5,234,000	
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 hari)	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Biaya Uang Harian (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	380,000	1,140,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OK	2,794,000	2,794,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) (1 orang x 2 kali x 1 KGT)	2.0 OK	100,000	200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Riau			5,464,000	
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 hari)	2.0 OH	740,000	1,480,000	
	- Biaya Uang Harian (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OH	2,514,000	2,514,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) (1 orang x 2 kali x 1 KGT)	2.0 OK	180,000	360,000	
	> Aceh			7,319,000	
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 hari)	2.0 OH	525,000	1,050,000	
	- Biaya Uang Harian (1 orang x 3 hari)	3.0 OH	360,000	1,080,000	
	- Biaya Pembelian Tiket Pesawat PP (1 orang x 1 kali x 1 KGT)	1.0 OK	4,739,000	4,739,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta (PP) (1 orang x 2 kali x 1 KGT)	2.0 OK	225,000	450,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal	1.0 OK	4,000	4,000	
1610.BMA.002	Fasilitasi Layanan Perpustakaan Hukum	3.0 layanan		189,516,000	
051	Pengelolaan Perpustakaan Hukum			128,452,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			128,452,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,614,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,676,000	1,676,000	
	> Kegiatan Tim Tajuk Subjek Lanjutan			6,900,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	> Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan			5,038,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [22 orang x 4 kali]	88.0 OK	22,000	1,936,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [22 orang x 3 kali]	66.0 OK	47,000	3,102,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,195,000	RM
	- Honorarium Anggota Tim dari Luar BPHN [3 orang x 5 bulan]	15.0 OB	813,000	12,195,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			41,938,000	RM
	- Biaya Pembelian Perlengkapan untuk Protokol Kesehatan Layanan Perpustakaan (Masker, Handgloves, handsanitizer, Disinfektan Spray,	1.0 PAKET	13,298,000	13,298,000	
	- Biaya Fumigasi Koleksi Dokumen Hukum	1.0 PAKET	20,000,000	20,000,000	
	- Langganan Media (Koran, Majalah, Jurnal Hukum, dll)	12.0 PAKET	720,000	8,640,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,725,000	RM
	- Biaya Pembelian ATK Pengelolaan Perpustakaan Hukum	1.0 PAKET	5,725,000	5,725,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,700,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon III kebawah (Eksternal BPHN)	3.0 OJ	900,000	2,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Internal [2 ORANG x 20 KALI x 1 KGT]	40.0 OK	132,000	5,280,000	RM
536111	<u>Belanja Modal Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian buku-buku hukum	1.0 Paket	47,000,000	47,000,000	RM
052	Peningkatan Kapasitas Pustakawan			61,064,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			61,064,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pembelian Seminar Kit Kegiatan - Biaya konsumsi snack rapat persiapan [15 orang x 1 kgt x 2 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [60 orang x 1 kgt x 1 kali] - Biaya Konsumsi Makan Rapat [60 orang x 1 kgt x 1 kali] - Biaya Pembelian Seminar Kit Kegiatan [60 PKT x 1 KGT]	1.0 PAKET 30.0 OK 60.0 OK 60.0 OK 60.0 PAKET	1,500,000 22,000 22,000 47,000 150,000	1,500,000 660,000 1,320,000 2,820,000 9,000,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya keikutsertaan Pelatihan/Diklat/Seminar/Forum/Webinar/Kegiatan lainnya diluar BPHN (5 Orang x 1 Paket x 1 Kgtn)	5.0 PAKET	3,240,000	16,200,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Honor Narasumber Setara Eselon I/Setara [1 orang x 1 kgt x 3 jam] - Honor Narasumber Eselon III/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 1 kgt x 3 jam]	3.0 OJ 3.0 OJ	1,400,000 1,000,000	4,200,000 3,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) keikutsertaan > Pelatihan/Diklat/Seminar/Forumr/Kegiatan lainnya diluar BPHN >> SURABAYA - Biaya Penggantian Tiket PP [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT] - Biaya Uang Harian (2 Org x 1 Kali x 4 Hari) - Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt] keikutsertaan > Pelatihan/Diklat/Seminar/Forumr/Kegiatan lainnya diluar BPHN >> SOLO (Jawa Tengah) - Biaya tiket pp Jakarta - Solo (3 Org x 3 Kali x 2 Hari) - Biaya Hotel/Penginapan (3 Org x 1 Kali x 2 Hari) - Biaya Uang Harian (3 Orang x1 Kali x 3 Hari) - Biaya Taksi Jakarta PP (3 Orang x 1 Kgtn x 2 Kali)			19,724,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal Internal [4 ORANG x 5 KALI x 1 KGT]	20.0 OK	132,000	2,640,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum			1,941,370,000	
1612.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM[Base Line]	432.0 Orang		781,602,000	

	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1612.ADG.001	Layanan Pembinaan Penyuluh Hukum Nasional	432.0 Orang		781,602,000	
051	Penyiapan Regulasi dan Instrumen JF Penyuluh Hukum			119,233,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			119,233,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			18,885,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 10 kgt]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 4 kgt]	80.0 OK	47,000	3,760,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	10,725,000	10,725,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			646,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	646,000	646,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			12,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon I/Sederajat (Eksternal) [4 orang x 1 kgt x 3 jam]	12.0 OJ	1,000,000	12,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			371,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	371,000	371,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			276,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	276,000	276,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			87,055,000	RM
	> Biaya Kegiatan Konsinyering Penyusunan Permenkumham			87,055,000	
	>> JAWA BARAT		0	87,055,000	
	- uang harian [40 ORANG x 3 HARI]	120.0 OH	150,000	18,000,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Es. II [7 ORANG x 1 paket x 2 KGT]	14.0 OP	1,100,000	15,400,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Es. III ke bawah [5 ORANG x 1 paket x 1 KGT]	5.0 OP	171,000	855,000	
	- Biaya paket meeting Fullboard Es. III ke bawah [32 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	64.0 OP	800,000	51,200,000	
	- Biaya transportasi [4 orang x 2 kali]	8.0 OK	200,000	1,600,000	
052	Pemetaan dan Profiling Penyuluh Hukum			22,686,000	
A	Penyusunan Database Penyuluh Hukum			5,700,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			4,863,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	22,000	880,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	2,103,000	2,103,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

Halaman : 31

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			495,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	495,000	495,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			342,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [6 ORANG x 1 KALI]	6.0 OK	57,000	342,000	
B	<i>Sosialisasi Formasi Penyuluh Hukum</i>			5,881,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,698,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 PAKET	1,248,000	1,248,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			690,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	100,000	500,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [2 Orang x 1 Kali]	2.0 OK	95,000	190,000	
C	<i>Pengembangan dan Sosialisasi Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Aplikasi SIPAKET LUHKUM)</i>			11,105,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,630,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 paket	2,730,000	2,730,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			182,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Swab Antigen [1 orang x 2 kali]	2.0 OK	91,000	182,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			800,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	100,000	500,000	
	- Biaya Transport Lokal eksternal [2 ORANG x 1 KALI]	2.0 OK	150,000	300,000	
053	Peningkatan Kapasitas JF Penyuluh Hukum			225,963,000	
A	<i>Pembinaan Penyuluh Hukum</i>			222,994,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			26,230,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	9,670,000	9,670,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 12 kali]	240.0 OK	22,000	5,280,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [20 orang x 12 kali]	240.0 OK	47,000	11,280,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			313,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	313,000	313,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [3 orang x 1 kgt x 3 jam]	9.0 OJ	1,000,000	9,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			132,360,000	RM
	> LAMPUNG			14,090,000	
	- Tiket PP [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	750,000	3,750,000	
	- Uang Harian [5 orang x 3 HARI x 1 KGT]	15.0 OH	380,000	5,700,000	
	- Biaya Penginapan [4 ORANG x 2 MALAM x 1 KGT]	8.0 OK	580,000	4,640,000	
	> JAWA BARAT			15,960,000	
	- Transport Darat Jakarta-Bandung PP [1 ORANG x 1 KGT]	1.0 OK	500,000	500,000	
	- Biaya Uang Representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Uang Harian [5 orang x 3 HARI x 1 KGT]	15.0 OH	430,000	6,450,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon II / Sederajat [1 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	2,000,000	4,000,000	
	- Biaya Penginapan [4 ORANG x 2 HARI x 1 KGT]	8.0 OK	570,000	4,560,000	
	> BALI			76,720,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali]	2.0 OK	3,581,000	7,162,000	
	- Biaya Penggantian Tiket PP [9 orang x 1 kali x 1 KGT]	9.0 OK	3,142,000	28,278,000	
	- Biaya Uang Representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 HARI x 1 KGT]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon II sederajat [1 orang x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- Biaya Penginapan Pejabat Eselon IV sederajat [1 orang x 2 HARI x 1 KGT]	2.0 OH	910,000	1,820,000	
	- Biaya Penginapan [9 orang x 3 malam x 1 KGT]	27.0 OH	550,000	14,850,000	
	- Biaya Uang Harian [2 org x 3 hari]	6.0 OH	480,000	2,880,000	
	- Biaya Uang Harian [9 org x 4 hari]	36.0 OH	480,000	17,280,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 KGT]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
	> BALI			25,590,000	
	- Tiket PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	2,745,000	10,980,000	
	- Biaya Uang Harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	480,000	5,760,000	
	- Biaya Penginapan Eselon II [1 orang x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- Biaya Penginapan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OH	800,000	4,800,000	
	- Biaya Refresentatif Eselon II [1 orang x 3 hari x 1 kgt]	3.0 OK	150,000	450,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	100,000	600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			641,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	641,000	641,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			54,450,000	RM
	> Sosialisasi Mekanisme Perpindahan Jabatan JF Penyuluh Hukum			54,450,000	
	- Biaya penggantian tiket pp kelas ekonomi [12 orang x 1 kgt]	12.0 OK	1,100,000	13,200,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [2 orang x 1 kali x 3 hari]	6.0 OH	440,000	2,640,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [10 orang x 1 kali x 3 hari]	30.0 OH	370,000	11,100,000	
	- Biaya uang harian [12 orang x 1 kali x 3 hari]	36.0 OH	410,000	14,760,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday [25 orang x 1 kali x 1 paket]	25.0 OP	410,000	10,250,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullday 25 ORANG X 1 KALI X 1 HARI [25 orang x 1 kali x 1 hari]	25.0 OH	100,000	2,500,000	
B	<u>Kompetisi Metode Penyuluhan Hukum</u>			2,969,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,969,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	459,000	459,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang]	30.0 OK	47,000	1,410,000	
054	Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit JF Penyuluh Hukum			406,601,000	
A	TANPA SUB KOMPONEN			406,601,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,985,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [32 orang x 25 kali]	800.0 OK	22,000	17,600,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [35 orang x 22 kali]	770.0 OK	47,000	36,190,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	7,195,000	7,195,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			493,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	493,000	493,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			201,612,000	RM
	> JAWA TIMUR (JEMBER)			201,612,000	
	- Biaya penggantian tiket pesawat PP [8 org x 1 kgt]	8.0 OK	2,674,000	21,392,000	
	- Biaya penggantian tiket PP [40 org x 1 kgt]	40.0 OK	1,647,500	65,900,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon I, II dan III / sederajat [2 ORG x 3 MALAM x 1 KGT]	6.0 OH	970,000	5,820,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV / sederajat [42 org x 3 malam]	126.0 OH	375,000	47,250,000	
	- Biaya uang harian [45 org x 3 hari x 1 kgt]	135.0 OH	410,000	55,350,000	
	- Biaya Taksi peserta di Jakarta PP [11 org x 2 kali x 1 kgt]	22.0 OK	200,000	4,400,000	
	- Biaya Refresentatif Eselon I / sederajat [1 org x 3 hari]	3.0 OK	200,000	600,000	
	- Biaya Refresentatif Eselon II / sederajat [2 org x 3 hari]	6.0 OK	150,000	900,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,413,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [0 ORANG x 0 KALI]	1.0 OK	1,413,000	1,413,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			142,098,000	RM
	- Biaya paket meeting fullboard Eselon II [3 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	6.0 OP	1,000,000	6,000,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Eselon III kebawah [46 ORANG x 2 paket x 1 KGT]	92.0 OP	800,000	73,600,000	
	- Biaya paket meeting fullboard Eselon III ke bawah [1 ORANG x 1 paket x 1 KGT]	1.0 OP	168,000	168,000	
	- Biaya uang harian paket meeting fullboard peserta konsinyering [49 ORANG x 3 HARI x 1 KGT]	147.0 OH	150,000	22,050,000	
	- Biaya transportasi darat peserta konsinyering di Jawa Barat PP [20 ORANG x 1 KGT]	20.0 OK	500,000	10,000,000	
	> JAWA TIMUR (JEMBER)			0	
	> Sosialisasi Penilaian Angka kredit jabatan JF Penyuluh Hukum			30,280,000	
	- Biaya uang harian paket meeting Full day [58 org x 1 hari x 1 kgt]	58.0 OH	100,000	5,800,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday [60 org x 1 hari x 1 kgt]	60.0 OP	408,000	24,480,000	
055	Pemberian Rekomendasi dan Pelaksanaa Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang			7,119,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			7,119,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,125,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 4 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 4 kali]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 paket	1,985,000	1,985,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			494,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	494,000	494,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			500,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 ORANG x 1 KALI]	5.0 OK	100,000	500,000	
1612.BDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat(Base Line)	395.0 Kelompok Masyarakat		546,372,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1612.BDD.001	Fasilitas Kelompok Desa Sadar Hukum	315.0 Kelompok Masyarakat		380,839,000	
051	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum			169,067,000	
A	<i>Melaksanakan Temu Sadar Hukum pada Kelompok KADARKUM Tingkat Pusat</i>			<i>11,438,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,238,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [42 orang x 2 kgt]	84.0 OK	22,000	1,848,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [35 orang x 2 kgt]	70.0 OK	47,000	3,290,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	2,500,000	2,500,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [1 buah x 2 paket]	2.0 PAKET	300,000	600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [6 ORANG x 2 KALI]	12.0 OK	100,000	1,200,000	
C	<u>Penyusunan Pedoman Instrumen Desa Sadar Hukum</u>			157,629,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,574,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 4 kgt]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 2 kgt]	30.0 OK	47,000	1,410,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 PAKET	3,764,000	3,764,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk [2 buah x 2 kgt]	4.0 PAKET	300,000	1,200,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II / sederajat (Eksternal) [1 ORANG x 3 JAM x 1 KGT]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			115,070,000	RM
	> Inventarisasi Instrumen Desa/Kelurahan Sadar Hukum lingkup Provinsi Jawa Timur / Jember			115,070,000	
	- Biaya penggantian tiket pp kelas ekonomi [18 orang x 1 kgt]	18.0 OK	1,100,000	19,800,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/sederajat [1 orang x 1 kali x 3 hari]	3.0 OH	500,000	1,500,000	
	- Biaya penggantian tiket PP [13 org x 1 kgt]	13.0 OK	1,500,000	19,500,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/sederajat [5 orang x 1 kali x 3 hari]	15.0 OH	500,000	7,500,000	
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/sederajat [24 orang x 1 kali x 3 hari]	72.0 OH	370,000	26,640,000	
	- Biaya uang harian [31 orang x 1 kali x 3 hari]	93.0 OH	410,000	38,130,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [5 org x 2 kali x 1 kgt]	10.0 OK	200,000	2,000,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			27,985,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday [27 orang x 1 kali x 1 paket]	27.0 OH	455,000	12,285,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullday [30 orang x 1 kali x 1 hari]	30.0 OH	100,000	3,000,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday [25 org x 1 kali x 1 paket]	25.0 OP	408,000	10,200,000	
	- Biaya Uang Harian Paket Meeting Fullday [25 org x 1 kali x 1 hari]	25.0 OH	100,000	2,500,000	
052	Pembentukan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum			211,772,000	U
A	<u>Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum</u>			168,259,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			37,590,000	RM
	- Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	4,590,000	4,590,000	
	- Biaya Pembuatan Piagam	1.0 PAKET	33,000,000	33,000,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Rapid Antigen [1 ORANG x 2 KALI x 1 KGT]	2.0 OK	309,000	618,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya penggantian tiket pp [9 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI] - Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 1 HARI] - Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI] - Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [5 ORANG x 1 KALI x 2 HARI] - Biaya uang harian [9 ORANG x 1 KALI x 3 HARI] - Biaya Taksi Jakarta PP [2 ORANG x 2 KALI x 1 KGT] > JAWA BARAT - Biaya penggantian transportasi Jakarta - Bandung pp (7 org) - Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 2 kali x 5 hari] - Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 orang x 1 kali x 4 hari] - Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [6 orang x 1 kali x 1 hari] - Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [17 orang x 1 kali x 1 hari] - Biaya uang harian [31 orang x 2 hari] > BALI - Biaya penggantian tiket pp [3 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [4 orang x 1 kali x 2 hari] - Biaya uang harian [15 orang x 1 kali x 3 hari] - Biaya representatif Es II/ sederajat [2 org x 1 kali x 3 hari]	9.0 OK 2.0 OH 1.0 OH 2.0 OH 10.0 OH 27.0 OH 4.0 OK 7.0 OK 10.0 OH 4.0 OH 6.0 OH 17.0 OH 62.0 OH 3.0 OK 8.0 OH 45.0 OH 6.0 OH	1,479,000 150,000 2,000,000 1,000,000 720,000 420,000 175,000 500,000 150,000 2,100,000 325,000 570,000 430,000 3,000,000 1,000,000 480,000 150,000	128,051,000 13,311,000 300,000 2,000,000 2,000,000 7,200,000 11,340,000 700,000 51,700,000 3,500,000 1,500,000 8,400,000 1,950,000 9,690,000 26,660,000 39,500,000 9,000,000 8,000,000 21,600,000 900,000	RM
B	<u>Monitoring/Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum</u>			34,363,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan Penjilidan dan Laporan Akhir	1.0 KGT	2,556,000	2,556,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	2,000,000	2,000,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Pemeriksaan Antigen [5 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	5.0 OK	101,000	505,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			29,302,000	RM	
	> LAMPUNG			16,532,000		
	- Biaya penggantian tiket pp [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	1,751,000	3,502,000		
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	150,000	450,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	1,450,000	2,900,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	850,000	1,700,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	570,000	2,280,000		
	- Biaya uang harian [5 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	15.0 OH	380,000	5,700,000		
	> JAWA BARAT			12,770,000		
	- Biaya penggantian transportasi darat Jakarta - Bandung PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	500,000	500,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon II/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	1,200,000	2,400,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon III/ sederajat [1 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	2.0 OH	570,000	1,140,000		
	- Biaya hotel/penginapan Eselon IV/ sederajat [2 ORANG x 1 KALI x 2 HARI]	4.0 OH	570,000	2,280,000		
	- Biaya uang harian [5 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	15.0 OH	430,000	6,450,000		
C	<i>Sosialisasi Aplikasi Informasi Masyarakat Cerdas Hukum (SIMASDASKUM) Terhadap Kantor Wilayah</i>			9,150,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,851,000		RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [22 orang x 2 kgt]	44.0 OK	22,000	968,000		
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [22 orang x 2 kgt]	44.0 OK	47,000	2,068,000		
	- Biaya Penggandaan Penjilidan	1.0 PAKET	1,815,000	1,815,000		
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000		RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,000,000	3,000,000		
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			899,000	RM	
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	899,000	899,000		
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			400,000	RM	
	- Biaya pakeet meeting fullboard Es. I dan II [1 ORANG x 1 KALI x 1 PAKET]	1.0 OP	400,000	400,000		
1612.BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	80.0 Kelompok Masyarakat		165,533,000		
051	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung			103,683,000	U	
A	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Hukum</i>			93,873,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			78,573,000	RM
	> Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu			21,450,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [35 orang x 7 kgt]	245.0 OK	22,000	5,390,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [35 orang x 7 kgt]	245.0 OK	47,000	11,515,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan	1.0 KGT	2,445,000	2,445,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	7.0 BUAH	300,000	2,100,000	
	> Penyuluhan Hukum Keliling Melalui Mobil Penyuling			7,398,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [12 orang x 6 kgt]	72.0 OK	22,000	1,584,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [12 orang x 6 kgt]	72.0 OK	47,000	3,384,000	
	- Biaya Penggandaan Penjilidan	1.0 KGT	2,430,000	2,430,000	
	> Pojok Penyuluhan dan Bantuan Hukum			49,725,000	
	- Biaya Pembelian Goodybag dan Souvenir [585 PAKET x 1 KGT]	585.0 PAKET	85,000	49,725,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK [1 PAKET x 2 KGT]	2.0 PAKET	2,250,000	4,500,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			800,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal [1 ORANG x 2 JAM x 1 KGT]	2.0 OJ	400,000	800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 10 KALI x 2 KGT]	100.0 OK	100,000	10,000,000	
B	<i>Fasilitas Konsultasi Hukum</i>			9,810,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,035,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 2 kgt]	30.0 OK	22,000	660,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 2 kgt]	30.0 OK	47,000	1,410,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	3,965,000	3,965,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,775,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	3,775,000	3,775,000	
052	Kegiatan Penyuluhan Hukum Tidak Langsung			61,850,000	
A	<i>Penyebarluasan Informasi Hukum</i>			61,850,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,605,000	RM
	> Radio			5,605,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 3 kgt]	45.0 OK	22,000	990,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [15 orang x 3 kgt]	45.0 OK	47,000	2,115,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	2,500,000	2,500,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			49,995,000	RM
	- Biaya Pelaksanaan Kegiatan Dialog Perbincangan Penyuluhan Hukum di Radio [1 kgt x 1 PAKET]	1.0 PAKET	49,995,000	49,995,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			4,250,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	2.0 PAKET	2,125,000	4,250,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			2,000,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [5 ORANG x 4 KALI]	20.0 OK	100,000	2,000,000	
1612.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	557.0 Lembaga		613,396,000	
1612.BIC.001	Lokasi : INSTANSI PUSAT Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Provinsi	557.0 Lembaga		613,396,000	
051	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Pusat			286,380,000	U
A	KOORDINASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TINGKAT PUSAT			72,899,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			53,705,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 80 kali]	800.0 OK	22,000	17,600,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat	617.0 OK	47,000	28,999,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 KGT	7,106,000	7,106,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			8,235,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PAKET	8,235,000	8,235,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			10,959,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	10,959,000	10,959,000	
B	Rapat Koordinasi Bantuan Hukum Tahun 2022			94,201,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			12,050,000	RM
	> BALI			4,150,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PAKET	400,000	400,000	
	- Biaya pembelian seminar kit	1.0 PAKET	3,750,000	3,750,000	
	> BANDUNG			7,900,000	
	- Biaya Pembuatan Spanduk	1.0 PAKET	400,000	400,000	
	- Biaya pembelian seminar kit	1.0 PAKET	7,500,000	7,500,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V)			14,800,000	RM
	- Honor Narasumber Eselon II/Sederajat (Eksternal) [1 orang x 2 kgt x 2 jam]	4.0 OJ	1,000,000	4,000,000	
	- Honor tenaga ahli Pembaharuan Aplikasi Sidbankum [2 orang x 3 jam x 2 kgt]	12.0 OK	900,000	10,800,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			70,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Swab Antigen [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	70,000	70,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			67,281,000	RM
	- Biaya Penginapan Es IV sederajat [1 ORANG x 1 HARI]	1.0 OH	31,000	31,000	
	> JAWA BARAT (Bandung)			25,270,000	
	- Biaya penginapan [4 orang x 2 malam]	8.0 OH	570,000	4,560,000	
	- Uang Harian [4 orang x 2 hari]	8.0 OH	430,000	3,440,000	
	- Biaya Transport Jawa barat PP 4 Orang	4.0 OK	450,000	1,800,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday 34 orang	34.0 OP	350,000	11,900,000	
	- Uang Harian Paket Meeting Fullday [34 orang x 1 hari]	34.0 OH	105,000	3,570,000	
	> BALI			41,980,000	
	- Tiket PP [4 orang x 1 kali]	4.0 OK	2,975,000	11,900,000	
	- Biaya penginapan [4 orang x 2 malam]	8.0 OH	800,000	6,400,000	
	- Uang Harian [4 orang x 2 hari]	8.0 OH	480,000	3,840,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [4 orang x 1 kgt]	4.0 OK	500,000	2,000,000	
	- Taksi Prov Tujuan PP [4 orang x 1 kgt]	4.0 OK	225,000	900,000	
	- Biaya Paket Meeting Fullday 32 orang	32.0 OP	400,000	12,800,000	
	- Uang Harian Paket Meeting Fullday [36 orang x 1 hari]	36.0 OH	115,000	4,140,000	
C	PENGELOLAAN APLIKASI AKSES PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM (PEMELIHARAAN APLIKASI SIDBANKUM)			119,255,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,700,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	26.0 OK	22,000	572,000	
	- Biaya Konsumsi Makan Rapat [6 orang x 4 kali]	24.0 OK	47,000	1,128,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			116,700,000	RM
	- Biaya pemeliharaan/perawatan aplikasi Sidbankum	1.0 PAKET	116,700,000	116,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			855,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [3 ORANG x 5 KALI]	15.0 OK	57,000	855,000	
D	PENYUSUNAN MODUL PELATIHAN PARALEGAL			25,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			25,000	RM
	- Biaya Transport Lokal Eksternal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	25,000	25,000	
052	Pengawasan Organisasi Bantuan Hukum			327,016,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			327,016,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			481,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [1 ORANG x 2 KALI x 1 PROV]	2.0 OK	109,000	218,000	
	- Biaya Pemeriksaan Swab PCR [1 ORANG x 1 KALI x 1 PROV]	1.0 OK	263,000	263,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			326,454,000	RM
	> KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			4,054,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 Kali]	1.0 OK	1,350,000	1,350,000	
	- Biaya penginapan [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	625,000	1,250,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP 1 Orang x 3 Kali [1 ORANG x 1 KALI x 1 KGT]	1.0 OK	224,000	224,000	
	> LAMPUNG			10,960,000	
	- Tiket PP [4 orang x 1 Kali]	4.0 OK	750,000	3,000,000	
	- Biaya penginapan [4 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	8.0 OH	425,000	3,400,000	
	- Biaya uang harian [4 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	12.0 OH	380,000	4,560,000	
	> JAWA BARAT			11,480,000	
	- Biaya penginapan Golongan IV [1 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	2.0 OH	1,200,000	2,400,000	
	- Biaya penginapan [3 ORANG x 1 KALI x 2 MALAM]	6.0 OH	570,000	3,420,000	
	- Biaya uang harian [4 ORANG x 1 KALI x 3 HARI]	12.0 OH	430,000	5,160,000	
	- Biaya Transport Jawa barat [1 orang x 1 kgt]	1.0 OK	500,000	500,000	
	> SULAWESI SELATAN			3,829,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 Kali]	3.0 OK	1,261,000	3,783,000	
	- Biaya uang harian [1 ORANG x 1 KALI x 1 HARI]	1.0 OH	46,000	46,000	
	> JEMBER			78,630,000	
	- Biaya Tiket PP [19 orang x 1 kali]	19.0 OK	1,100,000	20,900,000	
	- Biaya penginapan Eselon II 1 ORANG X 3 MALAM [1 orang x 3 malam]	3.0 OH	600,000	1,800,000	
	- Biaya penginapan Gol IV [1 orang x 3 malam]	3.0 OH	500,000	1,500,000	
	- Biaya penginapan [17 orang x 3 malam]	51.0 OH	370,000	18,870,000	
	- Biaya uang harian [19 orang x 4 hari]	76.0 OH	410,000	31,160,000	
	- Transportasi kabupaten/kota PP [19 orang x 1 kali]	19.0 OK	200,000	3,800,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 4 hari]	4.0 OH	150,000	600,000	
	> GORONTALO			6,361,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	4,751,000	4,751,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	500,000	500,000	
	> SULAWESI SELATAN			13,405,000	
	- Biaya tiket eselon II [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	2,294,000	2,294,000	
	- Tiket PP Eselon IV [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	4,009,000	4,009,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 orang x 2 malam]	2.0 OH	1,250,000	2,500,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 malam]	2.0 OH	706,000	1,412,000	
	- Biaya uang harian 2 ORANG x 3 HARI [2 orang x 3 hari]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP	1.0 OK	160,000	160,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> SULAWESI BARAT			7,790,000	
	- Tiket PP	1.0 OK	5,900,000	5,900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya penginapan 1 ORANG X 2 MALAM [1 orang x 2 malam]	2.0 OH	250,000	500,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari]	3.0 OH	410,000	1,230,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP	1.0 OK	160,000	160,000	
	> JAWA BARAT (BANDUNG)			49,360,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [2 orang x 2 malam]	4.0 OH	1,750,000	7,000,000	
	- Biaya penginapan [13 orang x 2 malam]	26.0 OH	570,000	14,820,000	
	- Uang Harian [17 orang x 3 hari]	51.0 OH	430,000	21,930,000	
	- Uang Harian [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	430,000	860,000	
	- Biaya Transport Jawa barat PP [11 ORANG]	11.0 OK	350,000	3,850,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [2 orang x 3 hari]	6.0 OK	150,000	900,000	
	> BALI			61,155,000	
	- Tiket PP [9 orang x 1 kali]	9.0 OK	2,780,000	25,020,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 orang x 2 malam]	2.0 OH	1,500,000	3,000,000	
	- Biaya penginapan Eselon III [1 orang x 2 malam]	2.0 OH	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya penginapan [7 orang x 2 malam]	14.0 OH	800,000	11,200,000	
	- Uang Harian [9 orang x 3 hari]	27.0 OH	480,000	12,960,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [9 orang x 1 kgt]	9.0 OK	500,000	4,500,000	
	- Taksi Prov Tujuan PP [9 orang x 1 kgt]	9.0 OK	225,000	2,025,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 orang x 3 hari]	3.0 OK	150,000	450,000	
	> DENPASAR			63,370,000	
	- Tiket PP [10 orang x 1 kali]	10.0 OK	3,142,000	31,420,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 3 malam]	9.0 OH	550,000	4,950,000	
	- Biaya penginapan [4 orang x 2 malam]	8.0 OH	500,000	4,000,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 malam]	6.0 OH	910,000	5,460,000	
	- Uang Harian [3 orang x 4 hari]	12.0 OH	480,000	5,760,000	
	- Uang Harian [7 orang x 3 hari]	21.0 OH	480,000	10,080,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [10 orang x 1 kgt]	10.0 OK	170,000	1,700,000	
	> CIREBON			16,060,000	
	- Biaya penginapan Eselon II [1 org x 1 malam]	1.0 OH	2,755,000	2,755,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 1 malam]	4.0 OH	385,000	1,540,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 1 malam]	3.0 OH	575,000	1,725,000	
	- Uang Harian [9 org x 2 hari]	18.0 OH	430,000	7,740,000	
	- Biaya Transport Jawa barat PP 4 Orang	4.0 OK	500,000	2,000,000	
	- Biaya uang representatif Pejabat Eselon II [1 org x 2 hari]	2.0 OH	150,000	300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			81,000	
	- Biaya Transport Lokal Internal [1 ORANG x 1 KALI]	1.0 OK	81,000	81,000	
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen			32,653,879,000	
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN			32,653,879,000	
1614.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	6.0 Layanan		28,668,640,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1614.EBA.956	Layanan BMN	1.0 Layanan		73,284,000	

RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Pengelolaan BMN			73,284,000	U
A	Penatausahaan BMN			65,099,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			9,868,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,588,000	1,588,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 6 kali]	120.0 OK	47,000	5,640,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			4,691,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	4,691,000	4,691,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			4,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [1 Org x 1 Kali]	1.0 OK	4,000	4,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			44,924,000	RM
	> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Di Jawa Barat Penyusunan Laporan Tahunan BMN 2021 Tingkat Eselon I :			200,000	
	>>			0	
	- Biaya uang harian [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	20,000	20,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	80,000	80,000	
	>> Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2022 Tingkat Eselon I :			0	
	- Biaya uang harian [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	20,000	20,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	80,000	80,000	
	> Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BMN Di Kantor Wilayah			44,724,000	
	- Biaya Tiket PP [5 Org x 1 kali]	5.0 OK	2,870,000	14,350,000	
	- Biaya Uang Harian [5 Org x 3 hari x 3 kali]	45.0 OH	390,000	17,550,000	
	- Biaya Penginapan [5 Org x 2 hari x 2 kali]	20.0 OK	530,000	10,600,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan [4 org x 2 kali x 1 kgt]	8.0 Ok	150,000	1,200,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			5,525,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	65.0 OK	85,000	5,525,000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			27,000	RM
	> Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Huk			27,000	
	- Biaya paket meeting fullboard [1 orang x 1 hari]	1.0 OP	27,000	27,000	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V)			60,000	RM
	> Melaksanakan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Program Pembentukan Regulasi dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			60,000	
	>> Penyusunan Laporan BMN dengan Kantor Wilayah :			0	
	- Biaya Transport Darat [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	60,000	60,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	<i>Penghapusan BMN</i>			8,185,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,040,000	RM
	- Biaya pengadaan dan penjiilidan	5000.0 PKT	200	1,000,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 5 kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 2 kali]	20.0 OK	47,000	940,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,845,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,845,000	2,845,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,300,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 23 kali]	23.0 OK	100,000	2,300,000	
1614.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan		309,915,000	
051	Melaksanakan Kehumasan dan Penyebaran Informasi Hukum			271,788,000	U
A	<i>Pembinaan Koordinasi, Evaluasi dan monitoring Kehumasan BPHN</i>			36,502,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			26,340,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 18 kali]	270.0 OK	22,000	5,940,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 5 kali]	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	- Seminar Kit [60 paket]	60.0 paket	170,000	10,200,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	2,535,000	2,535,000	
	> Workshop Kehumasan			4,140,000	
	- Biaya konsumsi snack Pelaksanaan Workshop [60 orang x 1 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan Pelaksanaan Workshop [60 orang x 1 kali]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,762,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,762,000	1,762,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,400,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Setara Es. I (Ahli Kehumasan) [2 orang x 3 jam]	6.0 OJ	1,400,000	8,400,000	
B	<i>Peliputan kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional</i>			127,552,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			720,000	RM
	> Pulau Jawa			620,000	
	- Biaya Swab PCR [2 Org x 1 Kali]	2.0 OK	310,000	620,000	
	> Luar Pulau Jawa			100,000	
	- Rapid Test Antigen [2 Orang x 1 Kali]	2.0 OK	50,000	100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			111,767,000	RM
	> Aceh			3,350,000	
	- Tiket PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	2,373,000	2,373,000	
	- Biaya Uang Harian [4 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	4.0 OH	230,000	920,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	1.0 OH	20,000	20,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	1.0 OH	20,000	20,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	7,000	7,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	10,000	10,000	
	> Jawa Tengah			6,441,000	
	- Tiket PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	2,197,000	2,197,000	
	- Biaya Uang Harian [1 Orang x 11 Hari x 1 KGT]	11.0 OH	202,000	2,222,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [2 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	4.0 OH	391,000	1,564,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [3 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	3.0 OK	60,000	180,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	278,000	278,000	
	> Jawa Barat			17,182,000	
	- Biaya Uang Harian [6 ORG x 3 HARI x 1 KGT]	18.0 OH	430,000	7,740,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 ORG x 2 HARI]	2.0 OH	1,201,000	2,402,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [5 ORG x 2 HARI]	10.0 OH	500,000	5,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [10 org x 1 kgt]	10.0 OK	149,000	1,490,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [10 org x 1 kgt]	10.0 OK	55,000	550,000	
	> Jawa Timur			31,945,000	
	- Tiket PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	11,727,000	11,727,000	
	- Biaya Uang Harian [8 Orang x 5 Hari x 1 KGT]	40.0 OH	227,000	9,080,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	1.0 OH	1,152,000	1,152,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	1.0 OH	7,468,000	7,468,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	997,000	997,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [9 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	9.0 OK	169,000	1,521,000	
	> NTT			5,334,000	
	- Tiket PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	2,373,000	2,373,000	
	- Biaya Uang Harian [2 Orang x 2 Hari x 1 KGT]	4.0 OH	395,000	1,580,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	1.0 OH	770,000	770,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 Orang x 1 Hari x 1 KGT]	1.0 OH	600,000	600,000	
	- Biaya Uang Provinsi Taksi Tujuan [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	1,000	1,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [1 Orang x 1 Kali x 1 KGT]	1.0 OK	10,000	10,000	
	> D.I Yogyakarta			16,672,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kgt]	4.0 OK	1,300,000	5,200,000	
	- Biaya Uang Harian (4 Orang X 4 Hari X 1 Kgt)	16.0 OH	365,000	5,840,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III (1 Orang X 2 Hari X 1 Kgt)	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV (3 Orang X 2 Hari X 1 Kgt)	6.0 OH	692,000	4,152,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan (2 Orang X 2 Kali X 1	4.0 OK	20,000	80,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Kgt)	4.0 OK	20,000	80,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP (2 Orang X 2 Kali X 1 Kgt)	4.0 OK	50,000	200,000	
	> Bali			21,219,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,262,000	9,786,000	
	- Biaya Uang Harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 2 hari]	2.0 OH	1,078,000	2,156,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [2 orang x 2 hari]	4.0 OH	910,000	3,640,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	189,000	567,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	250,000	750,000	
	> Lampung			9,624,000	
	- Tiket PP	3.0 OK	1,295,000	3,885,000	
	- Biaya Uang Harian (3 ORG X 3 HARI)	9.0 OK	254,000	2,286,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV	4.0 OH	135,000	540,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III (1 ORG X 2 HARI)	2.0 OH	1,140,000	2,280,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan (3 ORG X 1 KGT)	3.0 OK	40,000	120,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP (3 ORG X 1 KGT)	3.0 OK	171,000	513,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			15,065,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [5 orang x 131 kali]	655.0 OK	23,000	15,065,000	
C	<i>Penyelesaian Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat</i>			4,798,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,355,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 12 kali]	120.0 OK	22,000	2,640,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [10 orang x 1 kali]	10.0 OK	47,000	470,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	245,000	245,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			911,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	911,000	911,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			532,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 orang x 2 kali]	4.0 OK	100,000	400,000	
	- Biaya Transport Lokal Orang luar BPHN [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	132,000	132,000	
D	<i>Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi BPHN</i>			102,121,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			64,916,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [30 orang x 19 kali]	570.0 OK	22,000	12,540,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [30 orang x 7 kali]	210.0 OK	47,000	9,870,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [0 0 x 0 0]	1.0 PKT	256,000	256,000	
	- Biaya Pencetakan Kalender Meja BPHN [0 0 x 0 0]	800.0 Eks	45,000	36,000,000	
	- Goodie Bag [0 0 x 0 0]	250.0 PKT	25,000	6,250,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,750,000	RM
	- Biaya Langganan Aplikasi Envato Elements [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKT	2,550,000	2,550,000	
	- Biaya Langganan Aplikasi Freepik [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKT	1,200,000	1,200,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,000,000	RM
	- Biaya sewa perlengkapan pelaksanaan [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKT	8,000,000	8,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Setara Es. I [1 orang x 3 jam]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,300,000	RM
	- Biaya Publikasi Media Cetak [1 PKT x 1 KGT]	1.0 PKt	19,300,000	19,300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,155,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	3,155,000	3,155,000	
E	<i>Pameran Kegiatan-kegiatan BPHN</i>			815,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			750,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	750,000	750,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			65,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	65,000	65,000	
052	Pelaksanaan Kerjasama Hukum			38,127,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			<i>38,127,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			26,865,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 28 kali]	420.0 OK	22,000	9,240,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 25 kali]	375.0 OK	47,000	17,625,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,273,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,273,000	1,273,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,000	RM
	> Luar Pulau Jawa			0	
	> Pulau Jawa			2,000	
	- Biaya Swab PCR [1 Org x 1 Kali]	1.0 OK	2,000	2,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,080,000	RM
	> Sumatera Selatan			690,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	13,000	13,000	
	- Biaya Uang Harian [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	200,000	200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon III [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	200,000	200,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	100,000	100,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	177,000	177,000	
	> Jawa Tengah			2,000	
	- Biaya Uang Harian [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	2,000	2,000	
	> Sulawesi Selatan			2,000	
	- Biaya Uang Harian [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	2,000	2,000	
	> Jawa Barat			4,386,000	
	- Biaya Uang Harian (2 Orang X 3 Hari X 1 Kgt)	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya Penginapan Eselon IV (2 Orang X 2 Hari X 1 Kgt)	4.0 OH	275,000	1,100,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan (2 Orang X 1 Kali X 1 Kgt)	2.0 OK	103,000	206,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta PP (2 Orang X 1 Kali X 1 Kgt)	2.0 OK	250,000	500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,065,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	4,065,000	4,065,000	
524211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</u> (KPPN.139-Jakarta V)			842,000	RM
	> Asia Tenggara			0	
	> Eropa			842,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	500,000	500,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 1 hari x 1 kgt]	1.0 OH	342,000	342,000	
1614.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.0 Layanan		13,497,000	
051	Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Laksana			13,497,000	U
A	<i>Penataan Orta di lingkungan BPHN</i>			<i>9,462,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			6,703,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	219.0 OK	22,000	4,818,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat	35.0 OK	47,000	1,645,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 paket	240,000	240,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			423,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	423,000	423,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			49,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [1 Org x 1 Kali]	1.0 OK	49,000	49,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,284,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	2,284,000	2,284,000	
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000	RM
	- Biaya paket meeting fullboard (Pejabat Eselon III ke bawah) [1 org x 1 pkt]	1.0 OP	2,000	2,000	
	- Biaya uang harian paket fullboard [1 org x 1 hari]	1.0 OH	1,000	1,000	
<i>B</i>	<i>Penataan Tata Laksana</i>			4,035,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,995,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	45.0 OK	22,000	990,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 1 kali]	15.0 OK	47,000	705,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 KGT	300,000	300,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,040,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	24.0 OK	85,000	2,040,000	
1614.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		159,895,000	
051	Layanan Umum			85,198,000	U
<i>A</i>	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			81,098,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			27,938,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [34 orang x 15 kali]	510.0 OK	22,000	11,220,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [125 org x 2 kali]	250.0 OK	47,000	11,750,000	
	- Biaya konsumsi snack Pelaksanaan Workshop [72 Org x 1 kgt]	72.0 OK	22,000	1,584,000	
	- Biaya konsumsi makan Pelaksanaan Workshop [72 org x 1 kgt]	72.0 OK	47,000	3,384,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,070,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	8,070,000	8,070,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,600,000	RM
	- Honor Narasumber Eksternal Eselon III [2 Org x 2 Jam x 1 Kgt]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			41,490,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 461 kali]	461.0 OK	90,000	41,490,000	
<i>B</i>	<i>Layanan Kesehatan</i>			4,100,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,100,000	RM
	- Snack (50 orang x 1 kali)	50.0 OK	22,000	1,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,000,000	
	- Honor Dokter Spesialis Penyakit Dalam (1 orang x 2 jam)	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	
	- Honor Instruktur Senam (2 orang x 1 kgt)	2.0 OK	500,000	1,000,000	
052	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			74,697,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			74,697,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			19,224,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [16 orang x 15 kali]	240.0 OK	22,000	5,280,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [16 Org x 10 Kali]	160.0 OK	47,000	7,520,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	6,424,000	6,424,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			48,213,000	
	> Honor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa BPHN			48,213,000	
	- Honor Kepala ULP BPHN [1 orang x 6 bulan]	6.0 OB	668,000	4,008,000	
	- Honor Staf Pendukung Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa BPHN [2 orang x 12 bulan]	24.0 OB	67,000	1,608,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa [1 orang x 1 bulan]	1.0 OB	8,193,000	8,193,000	
	- Honor Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa [1 orang x 1 paket]	1.0 OP	4,000	4,000	
	- Honor Kepala Sekretariat Perwakilan UKPBJ BPHN [1 Org x 10 bulan]	10.0 OB	1,000,000	10,000,000	
	- Honor Staf Pendukung Pengadaan Sekretariat Perwakilan UKPBJ BPHN [1 Org x 10 bulan]	10.0 OB	400,000	4,000,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan Sekretariat Perwakilan UKPBJ BPHN [3 org x 10 bulan]	30.0 OB	680,000	20,400,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,146,000	
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,146,000	4,146,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,114,000	
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	3,114,000	3,114,000	
1614.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.0 Layanan		87,067,000	
051	Manajemen Sistem Informasi			84,280,000	U
A	PENGELOLAAN WEBSITE BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			67,382,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			885,000	
	- Biaya Penggandaan dan Penjiilidan [1 paket]	1.0 PKT	885,000	885,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			162,000	
	> Tim Pengelola Website BPHN			162,000	
	- Redaktur [1 org x 1 bln]	1.0 OB	36,000	36,000	
	- Editor [1 org x 1 bln]	1.0 OB	72,000	72,000	
	- Web Admin [1 org x 1 bln]	1.0 OB	54,000	54,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Perawatan aplikasi webserver BPHN (Conten Management System) dan sub domain [1 paket]	1.0 paket	63,666,000	63,666,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,171,000	2,171,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	498,000	498,000	RM
B	<u>Pengelolaan Teknis Teknologi Informasi/Aplikasi Dilingkungan BPHN</u>			16,898,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 paket]	1.0 PKT	997,000	997,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,566,000	2,566,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen pulau jawa dan bali [1 org x 1 kali x 1 Kgt]	1.0 OK	27,000	27,000	RM
	- Biaya Swab Antigen diluar pulau jawa [1 org x 1 kali x 1 Kgt]	1.0 OK	1,000	1,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > SUMATERA SELATAN - Tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [1 orang x 1 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [1 orang x 1 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [1 orang x 1 kali x 1 kgt] > JOGJAKARTA - Biaya uang harian [1 orang x 1 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [1 orang x 1 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [1 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 orang x 1 kali x 1 kgt] > BATAM - Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 1 kali x 1 kgt]			13,023,000	RM
				46,000	
		1.0 OK	1,000	1,000	
		1.0 OH	4,000	4,000	
		1.0 OH	39,000	39,000	
		1.0 OK	2,000	2,000	
				447,000	
		1.0 OH	2,000	2,000	
		1.0 OH	3,000	3,000	
		1.0 OK	202,000	202,000	
		3.0 OK	80,000	240,000	
				12,530,000	
		2.0 OK	3,161,200	6,322,000	
		6.0 OH	370,000	2,220,000	
		4.0 OH	792,000	3,168,000	
		4.0 OK	155,000	620,000	
		2.0 OH	100,000	200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	284,000	284,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pengelolaan Data dan Informasi			2,787,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,787,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			618,000	RM
	- Biaya Penggandaan dan Penjilidan [1 KGT]	1.0 PKT	618,000	618,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			2,085,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,085,000	2,085,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			84,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	84,000	84,000	
1614.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		28,024,982,000	
001	Gaji dan Tunjangan			17,302,977,000	U
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			17,033,817,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.139-Jakarta V)			11,034,452,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	9,444,452,000	9,444,452,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	787,500,000	787,500,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	802,500,000	802,500,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.139-Jakarta V)			187,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	155,000	155,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	16,000	16,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	16,000	16,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.139-Jakarta V)			728,000,000	RM
	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS	1.0 THN	621,000,000	621,000,000	
	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	53,500,000	53,500,000	
	- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	53,500,000	53,500,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.139-Jakarta V)			203,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	173,000,000	173,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,000,000	15,000,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,000,000	15,000,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.139-Jakarta V)			884,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	750,000,000	750,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	67,000,000	67,000,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	67,000,000	67,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,392,202,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	1,212,962,000	1,212,962,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	94,120,000	94,120,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	85,120,000	85,120,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			90,000,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	42,000,000	42,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	22,000,000	22,000,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	26,000,000	26,000,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			583,000,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	498,400,000	498,400,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	42,300,000	42,300,000	
	- Belanja Tunj. Beras PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	42,300,000	42,300,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,884,876,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS Gol II [12 orang x 19 hari x 12 bln]	2736.0 BLN	35,000	95,760,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol III [160 orang x 19 hari x 12 bln]	36480.0 BLN	37,000	1,349,760,000	
	- Belanja Uang Makan PNS Gol IV [47 orang x 19 hari x 12 bln]	10716.0 BLN	41,000	439,356,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.139-Jakarta V)			234,100,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	197,900,000	197,900,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	18,100,000	18,100,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	18,100,000	18,100,000	
B	<u>Uang Lembur</u>			269,160,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.139-Jakarta V)			269,160,000	RM
	- Biaya uang lembur Gol II [10 orang x 13 jam x 12 hari]	1560.0 OJ	17,000	26,520,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan II [10 org x 4 jam x 12 hari]	480.0 OH	30,000	14,400,000	
	- Biaya uang lembur Gol III [27 orang x 19 jam x 12 hari]	6156.0 OJ	20,000	123,120,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan III [27 org x 5 jam x 12 hari]	1620.0 OH	32,000	51,840,000	
	- Biaya uang lembur Gol IV [10 orang x 12 jam x 12 hari]	1440.0 OJ	25,000	36,000,000	
	- Biaya uang makan lembur Golongan IV [10 org x 4 jam x 12 hari]	480.0 OH	36,000	17,280,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			10,722,005,000	U
A	KESEHATAN PEGAWAI			100,000,000	
521832	<u>Belanja Barang Persediaan Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			100,000,000	RM
	- Biaya pembelian obat-obatan keperluan poliklinik kantor BPHN [1 kgt x 1 thn]	1.0 thn	100,000,000	100,000,000	
B	PAKAIAN DINAS PEGAWAI			213,772,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V)			213,772,000	RM	
	> Pengadaan pakaian dinas resmi pegawai			213,772,000		
	- Pegawai [242 orang x 1 stel]	242.0 stel	766,000	185,372,000		
	- Satpam [12 orang x 1 stel]	12.0 stel	1,000,000	12,000,000		
	- Pramubakti/Cleaning Service [35 orang x 1 stel]	35.0 stel	400,000	14,000,000		
	- Supir [6 orang x 1 stel]	6.0 stel	400,000	2,400,000		
C	BIAYA PERAWATAN GEDUNG KANTOR			1,850,348,000		
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,813,503,000	RM	
	- Pemeliharaan/peningkatan fungsi sarana lingkungan gedung kantor BPHN (jalan, taman, dll)	8733.0 M2	11,000	96,063,000		
	- Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional	8945.0 M2	192,000	1,717,440,000		
523112	<u>Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			36,845,000	RM	
	- Pengadaan Lampu Bohlam/Neon [1 Paket]	1.0 Paket	36,845,000	36,845,000		
D	PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG KANTOR			451,071,000		
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			451,071,000	RM	
	- Perawatan Inventaris Kantor [242 peg x 1 tahun]	242.0 unit	80,000	19,360,000		
	- Perawatan Facsimile dan Telepon (80 unit) [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	661,000	661,000		
	- Perawatan Komputer [129 unit x 1 tahun]	129.0 unit	335,000	43,215,000		
	- Perawatan Printer [78 unit x 1 tahun]	78.0 unit	40,000	3,120,000		
	- Perawatan Peralatan kedokteran/poliklinik [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	15,000,000	15,000,000		
	- Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR) [90 unit x 1 tahun]	90.0 unit	212,000	19,080,000		
	- Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing [107 unit x 1 tahun]	107.0 unit	500,000	53,500,000		
	- Perawatan Laptop [22 unit x 1 tahun]	22.0 unit	75,000	1,650,000		
	- Perawatan Genset 100 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	9,300,000	9,300,000		
	- Perawatan Genset 125 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	9,500,000	9,500,000		
	- Perawatan Genset 300 KVA [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	20,500,000	20,500,000		
	- Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	130,000,000	130,000,000		
	- Perawatan Mesin Pompa Air [12 unit x 1 tahun]	12.0 unit	3,000,000	36,000,000		
	- Perawatan Mesin Foto Copy (8 unit) [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	9,685,000	9,685,000		
	- Perawatan Lift BPHN [2 unit x 1 tahun]	2.0 unit	30,250,000	60,500,000		
	- Pemeliharaan mesin absensi [4 unit x 1 tahun]	4.0 unit	5,000,000	20,000,000		
E	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR RODA 4/6			743,000,000		
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			743,000,000		RM
	- Kendaraan Operasional [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	33,350,000	33,350,000		
	- Roda 4 [21 unit x 1 tahun]	21.0 unit	33,650,000	706,650,000		
	- Biaya Pembelian BBM dalam rangka Penyuluhan Hukum Keliling [1 Unit x 1 Tahun]	1.0 KGT	3,000,000	3,000,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR RODA 2			7,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V)			7,000,000	RM
	- Roda 2 [10 unit x 1 tahun]	10.0 unit	700,000	7,000,000	
G	LANGGANAN DAYA DAN JASA			1,533,600,000	
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.139-Jakarta V)			1,116,000,000	RM
	- Listrik Kantor BPHN [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	93,000,000	1,116,000,000	
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.139-Jakarta V)			18,000,000	RM
	- Telepon kantor BPHN [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	1,500,000	18,000,000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya (KPPN.139-Jakarta V)			399,600,000	RM
	- Langganan Internet Kantor [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	33,300,000	399,600,000	
H	KEPERLUAN PERKANTORAN			3,313,890,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.139-Jakarta V)			3,025,070,000	RM
	- Honorarium Petugas Pengamanan non PNS [11 orang x 13 bulan]	143.0 OB	4,100,000	586,300,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS (Koordinator) [1 orang x 13 bulan]	13.0 OB	3,900,000	50,700,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan Taman Non PNS [4 orang x 13 bulan]	52.0 OB	3,700,000	192,400,000	
	- Honor Petugas Kebersihan Dalam Gedung non PNS [19 orang x 13 bulan]	247.0 OB	3,600,000	889,200,000	
	- Honorarium Pengemudi non PNS (1 orang x 13 bulan)	13.0 OB	3,300,000	42,900,000	
	- Honor Pramubakti non PNS [8 orang x 13 bulan]	104.0 OB	4,100,000	426,400,000	
	- Honor Pramubakti Non PNS [1 orang x 6 bulan]	6.0 OB	4,100,000	24,600,000	
	- luran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung pemberi kerja [51 Org x 12 Bln]	612.0 OB	25,000	15,300,000	
	- Honorarium Pengemudi non PNS [1 orang x 7 bulan]	7.0 OB	4,400,000	30,800,000	
	- Honorarium Pengemudi non PNS [1 orang x 6 bulan]	6.0 OB	5,000,000	30,000,000	
	- Honorarium Pengemudi BPHN non PNS [5 orang x 13 bulan]	65.0 OB	4,100,000	266,500,000	
	- Biaya refill tinta printer, tinta foto copy, dll [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	66,130,000	66,130,000	
	- Pengelolaan Sampah Kantor BPHN (Biaya Retribusi dan Pengangkutan) [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	1,500,000	18,000,000	
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya [242 orang x 1 tahun]	242.0 orang	1,520,000	367,840,000	
	- Biaya Langganan TV kabel [1 kgt x 12 bulan]	12.0 bulan	1,500,000	18,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.139-Jakarta V)			8,027,000	RM
	- Biaya pengiriman pos surat/bahan	1.0 Pkt	1,527,000	1,527,000	
	- biaya pengiriman kalender BPHN	1.0 Pkt	6,500,000	6,500,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			262,793,000	RM
	- Biaya pembelian ATK Rutin [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	133,635,000	133,635,000	
	- Biaya pengadaan alat/sarana prasarana kebersihan (tissue, sapu, semir lantai, dll) [1 paket x 1 tahun]	1.0 paket	129,158,000	129,158,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			18,000,000	RM
	- Biaya pembelian solar/BBM untuk operasional Genset dan mesin potong rumput [1 kgt x 12 bulan x 150 liter]	1800.0 liter	10,000	18,000,000	
/	<u>KOORDINASI DAN KONSULTASI INTANSI TERKAIT</u>			664,108,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,570,000	RM
	- Biaya Pemeriksaan Antigen [1 Orang x 42 Kali]	42.0 OK	35,000	1,470,000	
	- Biaya Pemeriksaan PCR [1 Orang x 42 Kali]	42.0 OK	50,000	2,100,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			660,538,000	RM
	- Biaya Tiket [8 orang x 1 kali]	8.0 OK	3,000,000	24,000,000	
	- Biaya uang harian [8 orang x 3 hari]	24.0 OH	420,000	10,080,000	
	- Biaya penginapan [8 orang x 2 hari]	16.0 OH	1,000,000	16,000,000	
	- Biaya uang taksi provinsi tujuan [8 orang x 2 kali]	16.0 OK	232,000	3,712,000	
	- Biaya uang taksi jakarta [8 orang x 2 hari]	16.0 OH	256,000	4,096,000	
	> Yogyakarta			23,288,000	
	- Biaya Tiket PP [4 Orang x 1 Kali]	4.0 OK	2,250,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 Orang x 3 Hari]	12.0 OH	420,000	5,040,000	
	- Biaya Penginapan [4 Orang x 2 Hari]	8.0 OH	800,000	6,400,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	100,000	800,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	> Jawa Timur			17,994,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,540,000	7,620,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	664,000	3,984,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	194,000	1,164,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Jawa Tengah			21,800,000	
	- Biaya Tiket PP [4 Orang x 1 Kali]	4.0 OK	2,000,000	8,000,000	
	- Biaya Uang Harian [4 Orang x 3 Hari]	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya Penginapan [4 Orang x 2 Hari]	8.0 OH	664,000	5,312,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	190,000	1,520,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [4 Orang x 2 Kali]	8.0 OK	256,000	2,048,000	
	> Lampung			13,836,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	1,500,000	4,500,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	580,000	3,480,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sumatera Utara			22,608,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,450,000	10,350,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,000,000	6,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	232,000	1,392,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Bali			26,070,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	420,000	3,780,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,800,000	10,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	159,000	954,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Sulawesi Selatan			23,376,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,500,000	10,500,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,100,000	6,600,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	145,000	870,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Riau			24,378,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,016,000	9,048,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,650,000	9,900,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	94,000	564,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kepulauan Riau			20,532,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,888,000	8,664,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,030,000	6,180,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	137,000	822,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Jambi			20,400,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,460,000	7,380,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,212,000	7,272,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	147,000	882,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sumatera Barat			23,070,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,952,000	8,856,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,353,000	8,118,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	190,000	1,140,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sumatera Selatan			21,528,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,268,000	6,804,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	128,000	768,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Bengkulu			22,386,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,500,000	7,500,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,546,000	9,276,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	109,000	654,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Bangka Belitung			23,508,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,000,000	6,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	410,000	3,690,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,957,000	11,742,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	90,000	540,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Nusa Tenggara Barat			23,682,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	440,000	3,960,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,300,000	7,800,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	231,000	1,386,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Nusa Tenggara Timur			28,254,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	5,000,000	15,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,200,000	7,200,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	108,000	648,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Aceh			26,754,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	4,492,000	13,476,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	360,000	3,240,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,294,000	7,764,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	123,000	738,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Barat			20,646,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,700,000	8,100,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,125,000	6,750,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	140,000	840,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Tengah			21,348,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,984,000	8,952,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	360,000	3,240,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,160,000	6,960,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	110,000	660,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Selatan			23,841,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	2,995,000	8,985,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	150,000	900,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Kalimantan Timur			28,539,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	3,797,000	11,391,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,507,000	9,042,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	450,000	2,700,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Utara			27,204,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	5,102,000	15,306,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,034,000	6,204,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	138,000	828,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Tengah			29,856,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	5,000,000	15,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,500,000	9,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	165,000	990,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Sulawesi Tenggara			25,476,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	4,000,000	12,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	1,250,000	7,500,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	170,000	1,020,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> Papua			42,276,000	
	- Biaya Tiket PP [3 Orang x 1 Kali]	3.0 OK	7,000,000	21,000,000	
	- Biaya Uang Harian [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	580,000	5,220,000	
	- Biaya Penginapan [3 Orang x 2 Hari]	6.0 OH	2,000,000	12,000,000	
	- Biaya Uang Taksi Provinsi Tujuan [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	420,000	2,520,000	
	- Biaya Uang Taksi Jakarta [3 Orang x 2 Kali]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
J	PENANGANAN COVID-19			388,208,000	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			132,170,000	RM
	- Biaya Sewa Licensi Aplikasi (Partisipan sampai dengan 100 Org) [7 paket x 12 bulan]	84.0 bulan	270,000	22,680,000	
	- Biaya Sewa Licensi Aplikasi (Partisipan sampai dengan 500 Org) [2 paket x 12 bulan]	24.0 bulan	550,000	13,200,000	
	- Biaya pembelian multivitamin covid-19	1.0 PAKET	62,186,000	62,186,000	
	- Biaya pembelian masker	116.0 box	294,000	34,104,000	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			24,750,000	RM
	- Biaya pembelian hand sanitizer	50.0 buah	471,000	23,550,000	
	- Biaya pembelian Baju / APD	4.0 buah	300,000	1,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			231,288,000	RM
	- Biaya penyemprotan disinfektan [8222 M2 x 12 kali]	98664.0 M2	2,000	197,328,000	
	- Biaya Swab PCR [100 Orang x 1 Kali]	100.0 OK	300,000	30,000,000	
	- Biaya Rapid Test Antibody/Swab Antigen [40 Orang x 1 Kali]	40.0 OK	99,000	3,960,000	
<i>K</i>	<i>Jamuan Tamu Pimpinan</i>			4,768,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,768,000	RM
	- Jamuan tamu	1.0 Thn	4,768,000	4,768,000	
<i>L</i>	<i>Honor Operasional Satuan Kerja</i>			200,640,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.139-Jakarta V)			200,640,000	RM
	> Tim Pengelolaan Keuangan			175,440,000	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	3,420,000	41,040,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	3,320,000	39,840,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	2,210,000	26,520,000	
	- Honor Penguji Tagihan Penandatanganan SPM [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,520,000	18,240,000	
	- Honor Bendaharawan Pengeluaran [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	1,320,000	15,840,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	570,000	6,840,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	640,000	7,680,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	810,000	9,720,000	
	- Honor Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	810,000	9,720,000	
	> Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)			25,200,000	
	- Honor Penanggungjawab [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	450,000	5,400,000	
	- Honor Koordinator [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	400,000	4,800,000	
	- Honor Ketua/Wakil Ketua [1 orang x 12 bulan]	12.0 OB	350,000	4,200,000	
	- Honor Anggota/Petugas [3 orang x 12 bulan]	36.0 OB	300,000	10,800,000	
<i>M</i>	<i>SEWA OPERASIONAL PERKANTORAN</i>			1,251,600,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,080,600,000	RM
	- Biaya sewa kendaraan operasional Eselon I [1 unit x 12 bulan]	12.0 Bln	17,600,000	211,200,000	
	- Biaya sewa kendaraan operasional Eselon II [5 unit x 12 bulan]	60.0 Bln	13,250,000	795,000,000	
	- Biaya sewa kendaraan operasional [1 unit x 12 bulan]	12.0 Bln	6,200,000	74,400,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.139-Jakarta V)			171,000,000	RM
	- Biaya Pembelian BBM Kendaraan Operasional Eselon I [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	31,000,000	31,000,000	
	- Biaya Pembelian BBM Kendaraan Operasional Eselon II [5 unit x 1 tahun]	5.0 unit	26,000,000	130,000,000	
	- Biaya Pembelian BBM Kendaraan Operasional [1 unit x 1 tahun]	1.0 unit	10,000,000	10,000,000	
1614.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	117.0 Unit		2,534,300,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				
1614.EBB.951	Layanan Sarana Internal	116.0 Unit		2,335,310,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			1,313,873,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,313,873,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V)			1,313,873,000	RM
	- Peralatan Podcast untuk 12 Kanwil [12 unit]	12.0 unit	12,667,000	152,004,000	
	- Pengadaan Komputer Jinjing untuk 18 Kanwil [18 unit]	18.0 unit	11,800,000	212,400,000	
	- Pengadaan Komputer Jinjing [16 unit]	16.0 unit	21,950,000	351,200,000	
	- Pengadaan Komputer Meja [20 unit]	20.0 unit	17,000,000	340,000,000	
	- Pengadaan Printer [10 unit]	10.0 Unit	3,200,000	32,000,000	
	- Alat Kedokteran	1.0 UNIT	8,050,000	8,050,000	
	- Citojeck	1.0 UNIT	12,200,000	12,200,000	
	- LCD Proyektor	2.0 UNIT	15,000,000	30,000,000	
	- Kamera Digital	1.0 UNIT	20,050,000	20,050,000	
	- Tripod Kamera	1.0 UNIT	3,300,000	3,300,000	
	- Lighting Kamera	3.0 UNIT	10,000,000	30,000,000	
	- Gimbal Stabilizer	1.0 UNIT	22,000,000	22,000,000	
	- Pengadaan Komputer Jinjing Macbook (2 Unit)	2.0 UNIT	25,398,000	50,796,000	
	- Pengadaan TV	2.0 unit	7,436,500	14,873,000	
	- scanner	2.0 unit	17,500,000	35,000,000	
052	Kendaraan Bermotor			856,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			856,800,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V)			856,800,000	RM
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (3 Unit)	3.0 UNIT	285,600,000	856,800,000	
053	Peralatan Fasilitas Perkantoran			164,637,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			164,637,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.139-Jakarta V)			164,637,000	RM
	- Pengadaan AC Split [10 unit]	10.0 unit	9,694,500	96,945,000	
	- Meja Kerja Kayu [2 unit]	2.0 unit	9,762,500	19,525,000	
	- Lemari Es [2 unit]	2.0 unit	7,250,000	14,500,000	
	- Pengadaan Sice (2 Unit)	2.0 UNIT	8,991,000	17,982,000	
	- Dispenser	5.0 UNIT	3,137,000	15,685,000	
1614.EBB.971	Layanan Prasarana Internal			198,990,000	
051	Gedung dan Bangunan			198,990,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			198,990,000	
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (KPPN.139-Jakarta V)			198,990,000	RM
	> Renovasi Gedung Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional			198,990,000	
	- Renovasi Ruang Lantai 2 Gedung Annex	67.0 m2	2,970,000	198,990,000	
1614.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	239.0 Orang		294,795,000	
	Lokasi : INSTANSI PUSAT				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1614.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	239.0 Orang		294,795,000	
051	Pemutakhiran Data dan Informasi, Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian			56,887,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			56,887,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			34,107,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	8,000,000	8,000,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [50 orang x 4 kali]	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya pembuatan plakat penghargaan pegawai	1.0 PKT	750,000	750,000	
	- Biaya pembuatan medali penghargaan pegawai	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Biaya pembuatan piagam penghargaan pegawai (cetak bingkai)	1.0 PKT	250,000	250,000	
	> Tim Pengawas dan Pengendalian Internal BPHN			15,917,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,977,000	2,977,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [26 org x 4 kali]	104.0 OK	22,000	2,288,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [84 ORG x 2 KALI]	168.0 OK	22,000	3,696,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [74 org x 2 kali]	148.0 OK	47,000	6,956,000	
	> Tim Penghargaan Pegawai BPHN			4,290,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,760,000	1,760,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [23 org x 5 kali]	115.0 OK	22,000	2,530,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 PKT	4,000,000	4,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,400,000	RM
	- Honor narasumber Eksternal kegiatan Tim Pengawas dan Pengendalian Internal BPHN (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 2 kgt]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			13,380,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	126.0 OK	100,000	12,600,000	
	- Biaya transport lokal orang luar BPHN 5.0 orang x 1.0 kgt	5.0 OK	150,000	750,000	
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	30,000	30,000	
052	Perencanaan Kebutuhan, Pengembangan Kompetensi serta Penilaian Kinerja Pegawai			80,859,000	U
A	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			80,859,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			42,760,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,950,000	2,950,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 4 kali]	80.0 OK	22,000	1,760,000	
	> Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BPHN			8,900,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	900,000	900,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 6 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 4 kali]	100.0 OK	47,000	4,700,000	
	> Sosialisasi e-LHKPN dan e-LHKASN			3,450,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [50 orang x 1 Kali]	50.0 OK	47,000	2,350,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [50 orang x 1 Kali]	50.0 OK	22,000	1,100,000	
	> Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai			500,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	500,000	500,000	
	> Kegiatan Pelantikan Pejabat			25,200,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,050,000	1,050,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [50 orang x 7 kali]	350.0 OK	22,000	7,700,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [50 orang x 7 kali]	350.0 OK	47,000	16,450,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,192,000	RM
	- Biaya Jasa Rohaniawan [2 orang x 4 kali]	8.0 OK	399,000	3,192,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,500,000	RM
	Biaya dalam rangka mendukung pendidikan/pelatihan/pengembangan pegawai (SDM) [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	10,500,000	10,500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,000,000	4,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			8,100,000	RM
	Honor narasumber Eksternal Tim Kerja Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja BPHN (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 2 kgt]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
	Honor narasumber kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 1 KGT]	3.0 OJ	900,000	2,700,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,307,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	108.0 OK	100,000	10,800,000	
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	7,000	7,000	
	- Biaya transport lokal orang luar BPHN [5 org x 2 kali]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
053	Pengelolaan Jabatan Fungsional			157,049,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			157,049,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,760,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	7,346,000	7,346,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 12 kali]	300.0 OK	22,000	6,600,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [25 orang x 3 kali]	75.0 OK	47,000	3,525,000	
	> Kegiatan FGD/Bimtek/Workshop Jabatan Fungsional			26,352,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	2,340,000	2,340,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [58 orang x 6 kali]	348.0 OK	22,000	7,656,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [58 orang x 6 kali]	348.0 OK	47,000	16,356,000	
	> Internalisasi Peraturan Pendukung Jabatan Fungsional			8,057,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [37 orang x 3 kali]	111.0 OK	22,000	2,442,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [35 orang x 3 kali]	105.0 OK	47,000	4,935,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	680,000	680,000	
	> Kegiatan CLE			4,480,000	
	- Biaya konsumsi snack kegiatan [60 orang x 1 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan kegiatan [60 orang x 1 kali]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	340,000	340,000	
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			4,400,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat di daerah [25 orang x 2 kali]	50.0 OK	19,000	950,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat di daerah [25 org x 2 kali]	50.0 OK	50,000	2,500,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	950,000	950,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,000,000	4,000,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			27,300,000	RM
	Honor narasumber Kegiatan FGD/Bimtek/Workshop Jabatan Fungsional (setara Eselon III) [1 orang x 3 jam x 5 KGT]	15.0 OJ	900,000	13,500,000	
	Honor narasumber Eksternal Internalisasi Peraturan Pendukung Jabatan Fungsional (setara Eselon III) [1 orang x 3 jam x 4 KGT]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	
	Honor narasumber Eksternal kegiatan CLE (setara Eselon II) [1 orang x 3 jam x 1 KGT]	3.0 OJ	1,000,000	3,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

Halaman : 66

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			59,310,000	RM
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Jawa Barat			25,610,000	
	- Biaya uang harian [9 orang x 3 hari]	27.0 OH	430,000	11,610,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [6 orang x 3 hari]	18.0 OH	570,000	10,260,000	
	- Biaya penggantian transport PP Jawa Barat [6 Orang x 1 Kali x 2 kgt]	12.0 OK	300,000	3,600,000	
	- Biaya penggantian transport PP Jawa Barat	1.0 OK	140,000	140,000	
	> Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Banten			26,980,000	
	- Biaya uang harian [15 orang x 2 hari x 1 kali]	30.0 OH	370,000	11,100,000	
	- Biaya penginapan (eselon III/Gol.IV) [2 orang x 1 hari x 1 kali]	2.0 OH	400,000	800,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [17 orang x 1 hari x 1 kali]	17.0 OH	680,000	11,560,000	
	- Biaya penggantian transport PP Banten [7 orang x 1 kgt x 2 kali]	14.0 OK	250,000	3,500,000	
	- Biaya penggantian transport PP Banten	1.0 OK	20,000	20,000	
	> Kegiatan Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi Administrasi Jabatan Fungsional di Bali			6,720,000	
	- Biaya tiket pesawat PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	2,980,000	2,980,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OH	480,000	1,440,000	
	- Biaya penginapan (eselon IV/Gol.III) [1 orang x 2 hari x 1 kali]	2.0 OH	900,000	1,800,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [1 orang x 2 kali x 1 PP]	2.0 OK	250,000	500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,679,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	38.0 OK	100,000	3,800,000	
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	79,000	79,000	
	- Biaya transport lokal orang luar BPHN [2 orang x 6 kali]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
1614.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u> Lokasi : INSTANSI PUSAT	5.0 Dokumen		1,156,144,000	
1614.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		145,020,000	
051	<u>Penyusunan Rencana Program/Kegiatan/Anggaran</u>			110,973,000	U
A	<i>Penyusunan Rencana Kerja Program</i>			28,107,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			3,700,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	400,000	400,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [10 orang x 15 kali]	150.0 OK	22,000	3,300,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,540,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,540,000	1,540,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,000	RM
	- Biaya Swab Antigen [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	5,000	5,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			22,382,000	RM
	> BALI			2,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	2,000	2,000	
	> NUSA TENGGARA TIMUR			22,380,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	4,794,000	14,382,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	550,000	3,300,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	138,000	828,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			480,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	480,000	480,000	
B	<u>Penyusunan Postur</u>			1,600,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,220,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,220,000	1,220,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			380,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [1 org x 1 kali]	1.0 OK	380,000	380,000	
C	<u>Penyusunan RKA-KL</u>			74,011,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			9,804,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,200,000	1,200,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 14 kali]	280.0 OK	22,000	6,160,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat	52.0 OK	47,000	2,444,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,891,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,891,000	1,891,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,000	RM
	- Biaya Swab Antigen	1.0 OK	5,000	5,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			60,064,000	RM
	> SUMATERA UTARA			22,244,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	3,219,000	12,876,000	
	- Biaya uang harian [4 org x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	510,000	4,080,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [4 org x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OK	62,000	496,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [4 org x 2 kali x 1 kali]	8.0 OK	44,000	352,000	
	> SULAWESI SELATAN			13,390,000	
	- Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,825,000	7,650,000	
	- Biaya uang harian [2 org x 3 hr x 1 kgt]	6.0 OH	430,000	2,580,000	
	- Biaya penginapan [2 org x 2 hr x 1 kgt]	4.0 OH	701,000	2,804,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	89,000	356,000	
	> NUSA TENGGARA BARAT			9,980,000	
	- Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	2,460,000	4,920,000	
	- Biaya uang harian [2 org x 3 hr x 1 kgt]	6.0 OH	440,000	2,640,000	
	- Biaya penginapan [2 org x 2 hr x 1 kgt]	4.0 OH	550,000	2,200,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	55,000	220,000	
	> KEPULAUAN RIAU			5,660,000	
	- Tiket PP [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	2,692,000	2,692,000	
	- Biaya uang harian [1 org x 3 hr x 1 kgt]	3.0 OH	370,000	1,110,000	
	- Biaya penginapan [1 org x 2 hr x 1 kgt]	2.0 OH	792,000	1,584,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [1 org x 2 kali x 1 kgt]	2.0 OK	137,000	274,000	
	> JAWA BARAT			8,790,000	
	- Biaya uang harian	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Biaya penginapan	6.0 OH	570,000	3,420,000	
	- Biaya Transport Darat	3.0 OK	500,000	1,500,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			2,247,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	12.0 OK	100,000	1,200,000	
	- Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam [1 orang x 1 hari]	1.0 OH	1,047,000	1,047,000	
D	<i>Evaluasi Renstra BPHN</i>			7,255,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,238,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	400,000	400,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat	89.0 OK	22,000	1,958,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	47,000	1,880,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,007,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,007,000	1,007,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [1 orang x 2 jam]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal	1.0 OK	10,000	10,000	RM
052	Evaluasi Program dan Anggaran			34,047,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			34,047,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya penggandaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat - Biaya konsumsi makan rapat	1.0 PKT 302.0 OK 45.0 OK	500,000 22,000 47,000	500,000 6,644,000 2,115,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,085,000	2,085,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen [1 org x 1 kali]	1.0 OK	3,000	3,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > JAWA TIMUR - Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt] > BALI - Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [1 orang x 1 kali x 1 kgt]			22,148,000 10,698,000 5,254,000 2,460,000 2,600,000 288,000 96,000 11,450,000 4,700,000 2,880,000 3,320,000 500,000 50,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal	1.0 OK	552,000	552,000	RM
1614.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		328,026,000	
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi BPHN			316,658,000	U
A	<i>Pengumpulan dan Supervisi Data</i>			<i>315,753,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			12,278,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	165.0 OK	22,000	3,630,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat	184.0 OK	47,000	8,648,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			824,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	824,000	824,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			706,000	RM
	- Biaya SWAB PCR di jawa dan bali	1.0 OK	700,000	700,000	
	- Biaya SWAB Antigen di luar pulau jawa dan bali [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	6,000	6,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			301,935,000	RM
	> NUSA TENGGARA BARAT			13,488,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	3,000,000	6,000,000	
	- Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	440,000	2,640,000	
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	725,000	2,900,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 orang x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	231,000	924,000	
	> Menghadiri Kegiatan Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kemenkumham 2025-2029			28,108,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	2,921,000	11,684,000	
	- Biaya uang harian [4 org x 4 hari x 1 kgt]	16.0 OH	440,000	7,040,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	725,000	8,700,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali]	4.0 OK	171,000	684,000	
	> KALIMANTAN TENGAH			20,886,000	
	- Tiket PP [4 orang x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	2,984,000	11,936,000	
	- Biaya uang harian [4 orang x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	360,000	4,320,000	
	- Biaya penginapan [4 orang x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	522,500	4,180,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	225,000	450,000	
	> JOGJAKARTA			9,700,000	
	- Tiket PP [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	1,900,000	3,800,000	
	- Biaya uang harian [2 orang x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	420,000	2,520,000	
	- Biaya penginapan [2 orang x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	845,000	3,380,000	
	> RIAU			17,954,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	3,000,000	9,000,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	852,000	5,112,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> SUMATERA SELATAN			16,590,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	2,156,000	6,468,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	861,000	5,166,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	256,000	1,536,000	
	> KEPULAUAN RIAU / BATAM			17,258,000	
	- Tiket PP [3 orang x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	2,888,000	8,664,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	792,000	4,752,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 orang x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	256,000	512,000	
	> JAWA TIMUR			32,610,000	
	- Tiket PP	6.0 OK	2,674,000	16,044,000	
	- Biaya uang harian	18.0 OH	410,000	7,380,000	
	- Biaya penginapan	12.0 OH	664,000	7,968,000	
	- Biaya Taksi Jakarta	4.0 OK	256,000	1,024,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan	1.0 OK	194,000	194,000	
	> KALIMANTAN BARAT			27,183,000	
	- Tiket PP [5 org x 1 kali x 1 kgt]	5.0 OK	2,781,000	13,905,000	
	- Biaya uang harian [5 org x 3 hari x 1 kgt]	15.0 OH	380,000	5,700,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	538,000	4,304,000	
	- Biaya penginapan eselon II [1 org x 2 hari]	2.0 OH	900,000	1,800,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali x 1 kgt]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya uang representatif [1 org x 3 hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	> JAWA TENGAH			15,525,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	1,526,000	6,104,000	
	- Biaya uang harian [4 org x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	600,000	4,800,000	
	- Biaya Taksi Jakarta	1.0 OK	181,000	181,000	
	> MALUKU			28,382,000	
	- Tiket PP [3 org x 1 kali x 1 kgt]	3.0 OK	6,900,000	20,700,000	
	- Biaya uang harian [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	380,000	3,420,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 2 hari x 1 kgt]	6.0 OH	667,000	4,002,000	
	- Biaya Taksi Jakarta	2.0 OK	130,000	260,000	
	> LAMPUNG			16,702,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	1,583,000	6,332,000	
	- Biaya uang harian [4 org x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	380,000	4,560,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	580,000	4,640,000	
	- Biaya Taksi Jakarta	5.0 OK	234,000	1,170,000	
	> BANGKA BELITUNG			20,278,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	2,139,000	8,556,000	
	- Biaya uang harian [4 org x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	410,000	4,920,000	
	- Biaya penginapan [3 org x 3 hari x 1 kgt]	9.0 OH	622,000	5,598,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [4 Org x 1 kali]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [2 org x 1 kali]	2.0 OK	90,000	180,000	
	> SUMATERA BARAT			21,199,000	
	- Tiket PP [4 org x 1 kali x 1 kgt]	4.0 OK	2,510,000	10,040,000	
	- Biaya uang harian [4 org x 3 hari x 1 kgt]	12.0 OH	380,000	4,560,000	
	- Biaya penginapan [4 org x 2 hari x 1 kgt]	8.0 OH	650,000	5,200,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [4 org x 1 kali]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
	- Biaya uang taksi Provinsi Tujuan [3 org x 1 kali]	3.0 OK	125,000	375,000	
	> SULAWESI TENGGARA			16,072,000	
	- Tiket PP [2 org x 1 kali x 1 kgt]	2.0 OK	4,812,000	9,624,000	
	- Biaya uang harian [2 org x 3 hari x 1 kgt]	6.0 OH	380,000	2,280,000	
	- Biaya penginapan [2 org x 2 hari x 1 kgt]	4.0 OH	786,000	3,144,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [2 org x 2 kali]	4.0 OK	256,000	1,024,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			10,000	RM
	(KPPN.139-Jakarta V)				
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	10,000	10,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	Verifikasi dan Validasi Target Kinerja BPHN			905,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			880,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 2 kali]	40.0 OK	22,000	880,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			25,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	25,000	25,000	
052	Pengendalian Kinerja BPHN			789,000	U
B	Rapat Koordinasi Capaian Kinerja			789,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			479,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	479,000	479,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			310,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	310,000	310,000	
053	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja			10,579,000	U
A	Penyusunan Bahan Rapat Kerja			1,795,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			1,795,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,795,000	1,795,000	
B	Rapat Koordinasi Capaian Kinerja			2,255,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			1,760,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	80.0 OK	22,000	1,760,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			440,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	440,000	440,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			55,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	55,000	55,000	
C	Penyusunan LKIP, Laporan SPIP dan Manajemen Risiko			6,529,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			4,700,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat	200.0 OK	22,000	4,400,000	
	- Biaya Pengandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	300,000	300,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			1,159,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	1,159,000	1,159,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			670,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	670,000	670,000	
1614.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen		219,924,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Pelaksanaan Anggaran			69,306,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			69,306,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			9,376,000	RM
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	1,381,000	1,381,000	
	- Biaya konsumsi snack rapat [27 orang x 8 kali]	216.0 OK	22,000	4,752,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [23 orang x 3 kali]	69.0 OK	47,000	3,243,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			2,921,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,921,000	2,921,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V)			171,000	RM
	- Biaya Swab Antigen Jawa-Bali [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	91,000	91,000	
	- Biaya Swab Antigen Luar Jawa-Bali [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	80,000	80,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.139-Jakarta V)			51,346,000	RM
	> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Bali			20,736,000	
	- Biaya tiket PP [3 orang x 1 kali]	3.0 OK	3,062,000	9,186,000	
	- Biaya penginapan [3 orang x 2 hari]	6.0 OH	910,000	5,460,000	
	- Biaya uang harian [3 orang x 3 hari]	9.0 OH	480,000	4,320,000	
	- Biaya taksi Jakarta PP [3 orang x 2 kali]	6.0 OK	206,000	1,236,000	
	- Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [3 orang x 2 kali]	6.0 OH	89,000	534,000	
	> Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran di Jawa Barat			12,750,000	
	- Biaya transport darat PP [5 orang x 1 kali]	5.0 OK	120,000	600,000	
	- Biaya penginapan [5 orang x 2 hari]	10.0 OH	570,000	5,700,000	
	- Biaya uang harian [5 orang x 3 hari]	15.0 OH	430,000	6,450,000	
	> Pembinaan Perbendaharaan di Bogor			17,860,000	
	- Biaya Penggantian Transport Darat [2 orang x 1 kgt]	2.0 OK	350,000	700,000	
	- Biaya Penginapan [4 orang x 3 malam x 1 kgt]	12.0 OH	570,000	6,840,000	
	- Biaya Uang Harian [6 orang x 4 hari x 1 kgt]	24.0 OH	430,000	10,320,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V)			5,492,000	RM
	- Biaya Transport Lokal	1.0 OK	5,492,000	5,492,000	
052	Pengelolaan Perbendaharaan			64,544,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			64,544,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V)			2,715,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 5 kali]	100.0 OK	22,000	2,200,000	
	- Biaya penggandaan dan penjiilidan	1.0 PKT	515,000	515,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V)			15,017,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	15,017,000	15,017,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen Jawa-Bali [1 orang x 1 kali] - Biaya Swab Antigen Luar Jawa-Bali [1 orang x 1 kali]	1.0 OK 1.0 OK	92,000 259,000	351,000 92,000 259,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Monitoring Kegiatan Pembinaan Perbandaharaan di Kanwil Yogyakarta - Biaya tiket PP [1 orang x 1 kali x 1 kgt] - Biaya penginapan [3 orang x 2 hari x 1 kgt] - Biaya uang harian [3 orang x 3 hari x 1 kgt] - Biaya Taksi Jakarta PP [2 orang x 1 kali x 2 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [1 orang x 1 kali x 1 pp] > Monitoring dan Evaluasi Perbandaharaan di Kanwil Denpasar - Biaya tiket PP [2 orang x 1 kali] - Biaya taksi Jakarta PP [2 orang x 2 kali x 1 PP] - Biaya Taksi Provinsi tujuan PP [2 orang x 2 kali x 1 PP] - Biaya penginapan [2 orang x 2 hari] - Biaya Uang Harian [2 orang x 3 hari] > Monitoring dan Evaluasi Perbandaharaan di Kanwil Jawa Barat - Biaya transport darat PP [4 orang x 1 kali] - Biaya penginapan [4 orang x 2 hari] - Biaya Uang Harian [4 orang x 3 hari]	1.0 OK 6.0 OH 9.0 OH 4.0 OK 1.0 OK 2.0 OK 4.0 OK 4.0 OK 4.0 OH 6.0 OH 4.0 OK 8.0 OH 12.0 OH	3,431,000 835,000 420,000 171,000 252,000 3,050,000 150,000 100,000 910,000 480,000 250,000 570,000 430,000	37,497,000 13,157,000 3,431,000 5,010,000 3,780,000 684,000 252,000 13,620,000 6,100,000 600,000 400,000 3,640,000 2,880,000 10,720,000 1,000,000 4,560,000 5,160,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	8,964,000	8,964,000	RM
053	Penyusunan Laporan Keuangan			86,074,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			86,074,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker - Biaya penggunaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 9 kali] - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 9 kali] > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya penggunaan dan penjiilidan - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 12 kali]	1.0 PKT 135.0 OK 135.0 OK 1.0 PKT 180.0 OK	500,000 47,000 22,000 5,912,000 22,000	19,687,000 9,815,000 500,000 6,345,000 2,970,000 9,872,000 5,912,000 3,960,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker - Biaya pembelian ATK 1.0 Paket 2,838,000 2,838,000 > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya pembelian ATK 1.0 Paket 2,718,000 2,718,000			5,556,000 2,838,000 2,838,000 2,718,000 2,718,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Honor Narasumber Eksternal [2 orang x 3 jam x 1 kgt]	6.0 OJ	900,000	5,400,000 5,400,000 5,400,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Swab Antigen [1 orang x 1 kali] - Biaya Swab PCR [1 orang x 1 kali]	1.0 OK 1.0 OK	7,000 150,000	157,000 7,000 150,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V) > Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di Bali - Biaya tiket PP [3 orang x 1 kali] - Biaya uang harian [3 orang x 3 hari] - Biaya penginapan golongan III [3 orang x 2 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [3 orang x 2 kali x 1 pp] > Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di Yogyakarta - Biaya tiket PP [4 orang x 1 kali] - Biaya uang harian [4 orang x 3 hari] - Biaya penginapan setara eselon III [1 orang x 2 hari] - Biaya penginapan golongan III [3 orang x 2 hari] - Biaya Taksi Jakarta PP [3 orang x 2 kali x 1 pp] - Biaya Taksi Provinsi Tujuan PP [3 orang x 2 kali x 1 pp] > Melakukan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon I di Banten - Penggantian Transport [3 orang x 1 kali] - Biaya uang harian [3 orang x 2 hari] - Biaya penginapan golongan III [3 orang x 1 hari] > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I dalam rangka Kegiatan Workshop Penyusunan Laporan Pengendalian Intern atas - Biaya Penggantian Transport PP [2 org] - Biaya Uang Harian [2 orang x 4 hari x 1 kali] - Biaya Penginapan Golongan III [2 orang x 3 hari x 1 kali]	3.0 OK 9.0 OH 6.0 OH 6.0 OK 4.0 OK 12.0 OK 2.0 OH 6.0 OH 6.0 OK 6.0 OK 3.0 OK 6.0 OK 3.0 OH 2.0 OK 8.0 OH 6.0 OH	3,250,000 480,000 600,000 90,000 2,150,000 420,000 450,000 830,000 250,000 50,000 450,000 370,000 570,000 150,000 430,000 570,000	51,970,000 18,210,000 9,750,000 4,320,000 3,600,000 540,000 21,320,000 8,600,000 5,040,000 900,000 4,980,000 1,500,000 300,000 5,280,000 1,350,000 2,220,000 1,710,000 7,160,000 300,000 3,440,000 3,420,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker - Biaya Transport Lokal [1 orang x 1 kali] - Biaya Transport Lokal Luar BPHN [2 orang x 1 kali] > Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon I - Biaya Transport Lokal [2 orang x 8 kali] - Uang Harian Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (3 orang x 2 kali)			3,234,000 1,004,000 704,000 300,000 2,230,000 1,600,000 630,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker di Provinsi DKI Jaka - Biaya Transport Darat PP [1 orang x 1 kali] - Biaya uang harian paket meeting fullboard [1 org x 1 hari]	1.0 OK 1.0 OH	42,000 22,000	64,000 64,000 42,000 22,000	RM
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) Melakukan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data > Keuangan dan BMN Program Pembinaan Hukum Nasional Tingkat Satker di Provinsi Jawa Bar - Biaya paket meeting fullboard [1 org x 1 paket]	1.0 OP	6,000	6,000 6,000 6,000	RM
1614.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen		98,186,000	
051	Perencanaan Reformasi Birokrasi			5,822,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,822,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [15 orang x 3 kali]	45.0 OK	22,000	990,000 990,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	3,822,000	3,822,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal	1.0 OK	1,010,000	1,010,000	RM
052	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			81,330,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			81,330,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat - Biaya konsumsi makan rapat - Biaya Pembuatan Roll Banner	1835.0 OK 732.0 OK 12.0 Buah	22,000 47,000 350,000	40,370,000 34,404,000 4,200,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. II [1 orang x 2 jam]	2.0 OJ	1,000,000	2,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya SWAB Antigen [1 org x 1 kali]	1.0 OK	35,000	35,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 5 kali]	5.0 OK	61,000	305,000	RM
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya paket meeting fullboard (Pejabat Eselon III ke bawah) [1 org x 1 paket]	1.0 OP	16,000	16,000	RM
053	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi			11,034,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			11,034,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat - Biaya konsumsi makan rapat - Biaya penggandaan dan penjiilidan	127.0 OK 52.0 OK 1.0 PKT	22,000 47,000 5,186,000	2,794,000 2,444,000 5,186,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal	1.0 OK	610,000	610,000	RM
1614.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen		364,988,000	
051	Pelaksanaan Ketatusahaan dan Arsip			35,708,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			35,708,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 14 kali] - Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 11 kali] - Biaya penggandaan dan Penjiilidan	280.0 OK 220.0 OK 1.0 PKT	22,000 47,000 500,000	6,160,000 10,340,000 500,000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	2,033,000	2,033,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Narasumber Eksternal Setara Es. I [1 orang x 6 jam]	6.0 OJ	1,400,000	8,400,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 331 kali]	331.0 OK	25,000	8,275,000	RM
052	Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis			329,280,000	U
A	Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum			90,273,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			35,744,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [25 orang x 21 kali]	525.0 OK	22,000	11,550,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [15 orang x 21 kali]	315.0 OK	47,000	14,805,000	
	- Biaya penggantian dan Penjilidan	1.0 PKT	9,389,000	9,389,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			38,000	RM
	- Biaya SWAB Antigen [1 org x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	38,000	38,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			52,891,000	RM
	> Koodinasi dan Konsultasi Teknis			52,891,000	
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	13,431,000	13,431,000	
	- Biaya uang harian [1 orang x 3 hari x 14 kgt]	42.0 OH	410,000	17,220,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 2 hari x 8 kgt]	16.0 OH	1,215,000	19,440,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP [1 orang x 2 kali x 2 kgt]	4.0 OK	250,000	1,000,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II [1 org x 3 hari x 4 kgt]	12.0 OH	150,000	1,800,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,600,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [2 orang x 8 kali x 1 Kgt]	16.0 OK	100,000	1,600,000	
B	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Perencanaan Hukum</i>			100,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,443,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [31 orang x 3 kali]	93.0 OK	22,000	2,046,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [17 orang x 3 kali]	51.0 OK	47,000	2,397,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			5,855,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	5,855,000	5,855,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			88,502,000	RM
	- Tiket PP [1 orang x 5 kali]	5.0 OK	3,500,000	17,500,000	
	- Biaya uang harian [0 orang x 0 hari x 0 Kgt]	97.0 OH	420,000	40,740,000	
	- Biaya penginapan [0 orang x 0 hari x 0 Kgt]	22.0 OH	1,000,000	22,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta PP	2.0 OK	256,000	512,000	
	- Biaya Transport Darat [0 org x 0 kali x 0 Kgt]	31.0 OK	250,000	7,750,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			1,200,000	RM
	- Biaya Transport Lokal [0 orang x 0 kali x 0 Kgt]	12.0 OK	100,000	1,200,000	
C	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Analisis dan Evaluasi</i>			41,587,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			10,500,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [16 orang x 8 kali]	128.0 OK	22,000	2,816,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [17 orang x 2 kali]	34.0 OK	47,000	1,598,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	6,086,000	6,086,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			7,000,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	7,000,000	7,000,000	
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.139-Jakarta V)			305,000	RM
	- Biaya SWAB Antigen	1.0 OK	10,000	10,000	
	- Biaya Pemeriksaan Swab PCR	1.0 OK	295,000	295,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			23,482,000	RM
	- Tiket PP [1 orang x 1 kali]	1.0 OK	4,310,000	4,310,000	
	- Biaya uang harian [24 orang]	24.0 OH	387,000	9,288,000	
	- Biaya penginapan [1 orang x 1 hari x 10 kgt]	10.0 OH	841,000	8,410,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	205,000	205,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [1 orang x 1 kali x 1 kgt]	1.0 OK	123,000	123,000	
	- Biaya Uang Representatif Eselon II	1.0 OH	811,000	811,000	
	- Biaya Transport Darat	1.0 OK	335,000	335,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.139-Jakarta V)			300,000	RM
	- Biaya Transport BPHN	3.0 OK	100,000	300,000	
D	<i>Ketatausahaan dan Penguatan Substansi Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</i>			97,420,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.139-Jakarta V)			22,500,000	RM
	- Biaya konsumsi snack rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	22,000	1,320,000	
	- Biaya konsumsi makan rapat [20 orang x 3 kali]	60.0 OK	47,000	2,820,000	
	- Biaya konsumsi snack konsultasi Anggota JDIH [5 orang x 159 kali]	795.0 OK	22,000	17,490,000	
	- Biaya penggandaan dan Penjilidan	1.0 PKT	870,000	870,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.139-Jakarta V)			4,500,000	RM
	- Biaya pembelian ATK	1.0 Paket	4,500,000	4,500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.139-Jakarta V)			63,000,000	RM
	- Tiket PP [6 orang x 1 kali]	6.0 OK	4,000,000	24,000,000	
	- Biaya uang harian [6 orang x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	550,000	9,900,000	
	- Biaya penginapan [6 orang x 2 hari x 1 kgt]	12.0 OH	1,750,000	21,000,000	
	- Biaya Taksi Jakarta [6 orang x 2 kali x 1 kgt]	12.0 OK	250,000	3,000,000	
	- Biaya Taksi Propinsi Tujuan [3 orang x 2 kali x 1 kgt]	6.0 OK	400,000	2,400,000	
	- Biaya Uang Representatif [6 org x 3 hari x 1 kgt]	18.0 OH	150,000	2,700,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORG (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
UNIT KERJA (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
ALOKASI Rp. 38,946,171,000

Halaman : 81

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.139-Jakarta V) - Biaya Transport Lokal [1 orang x 106 kali]	106.0 OK	70,000	7,420,000 7,420,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Jakarta, 1 Desember 2022

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum

NIP. 197105011993031001